



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI LKIP2025

bangga
melayani
bangsa





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Katedral No. 2 Ruteng
Pos el : inspektoratmanggarai@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TA.2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ruteng, 30 Maret 2026

7 an. Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai, y

Sekretaris,



Heri Carvallo, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19741125 200501 1 010



KATA PENGANTAR

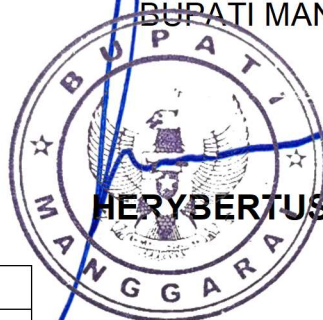


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Manggarai tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja keempat/terakhir periode RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai ini, bermanfaat dan dapat dijadikan gambaran terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Ruteng, 25 Maret 2026

BUPATI MANGGARAI,



HERYBERTUS G. L. NABIT

Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAMPIRAN – LAMPIRAN	Vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	Vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan LKIP	2
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Manggarai	2
1.4 Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3
1.5 Perangkat Daerah	5
1.6 Sumber Daya Aparatur	8
1.7 Kondisi Perekonomian Kabupaten Manggarai	9
1.7.1 Struktur Perekonomian	9
1.7.2 Pertumbuhan Ekonomi	10
1.7.3 PDRB Per Kapita	12
1.7.4 Angka Kemiskinan	13
1.7.5 Indeks Pembangunan Manusia	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026	15
1. Isu Strategis	15
2. Visi dan Misi	24
a. Visi	24
b. Misi	27
c. Tujuan dan Sasaran	28
d. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	35
B. Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Manggarai	58
C. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai	59
D. Rencana Kinerja	60
E. Penjanjian Kinerja	61



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	70
A.	CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025	71
A.1	Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	73
A.2	Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya	81
A.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	89
B.	URAIAN CAPAIAN KINERJA SESUAI FORM PENGUKURAN KINERJA	97
	Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	97
	Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia	97
	Sasaran 1 Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	101
	Sasaran 2 Meningkatnya Literasi/Minat Baca Masyarakat.....	109
	Sasaran 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	112
	Sasaran 4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	117
	Sasaran 5 Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	122
	Sasaran 6 Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya	124
	Tujuan 2 Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	126
	Indikator Tujuan Angka PMKS	127
	Indikator Tujuan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	129
	Sasaran 7 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	132
	Sasaran 8 Menurunnya Ketimpangan Gender	134
	Sasaran 9 Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	136
	Tujuan 3 Meningkatnya Ketahanan Sosial	140
	Indikator Tujuan Angka Konflik Sosial	140
	Indikator Tujuan Indeks Risiko Bencana (IRBI)	142
	Sasaran 10 Meningkatnya Ketertiban Umum	147



Sasaran 11 Menurunnya Gangguan Kohesivitas Sosial	149
Sasaran 12 Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	151
Sasaran 13 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana	155
Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	157
Indikator Tujuan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	157
Indikator Tujuan PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	160
Indikator Tujuan Laju Inflasi	162
Sasaran 14 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian	164
Sasaran 15 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	165
Sasaran 16 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	166
Sasaran 17 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	168
Sasaran 18 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan ...	169
Sasaran 19 Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	171
Sasaran 20 Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	174
Sasaran 21 Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan	176
Sasaran 22 Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan	178
Sasaran 23 Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	179
Sasaran 24 Meningkatnya Ketahanan Pangan	182
Sasaran 25 Meningkatnya Stabilitas Harga Barang	188
Tujuan 5 Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	188
Indikator Tujuan Indeks Gini	188
Sasaran 26 Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian	190
Tujuan 6 Menurunnya Kemiskinan	194
Indikator Tujuan Tingkat Kemiskinan	194
Sasaran 27 Menurunnya Pengangguran	197
Sasaran 28 Meningkatnya Akses terhadap Pemukiman Layak Huni	200
Sasaran 29 Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	205
Tujuan 7 Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	207



Indikator Tujuan Indeks Desa Membangun	207
Sasaran 30 Meningkatnya Keberdayaan Desa	209
Tujuan 8 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	211
Indikator Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	211
Sasaran 31 Meningkatnya Kualitas Air	212
Sasaran 32 Meningkatnya Kualitas Udara	214
Sasaran 33 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	216
Sasaran 34 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3	218
Tujuan 9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	221
Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi	221
Sasaran 35 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.....	226
Sasaran 36 Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	242
Sasaran 37 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	248
PREVALENSI STUNTING	253
C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	255
1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	255
2. Anggaran	257
D. REALISASI ANGGARAN	258
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	259
2. Pengelolaan Belanja Daerah	261
3. Kondisi Pembiayaan Daerah	262
4. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	262
5. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran	269
BAB IV PENUTUP	273
4.1 Kesimpulan	273
4.2 Permasalahan.....	276
4.3 Rencana Tindak Lanjut	277



LAMPIRAN-LAMPIRAN

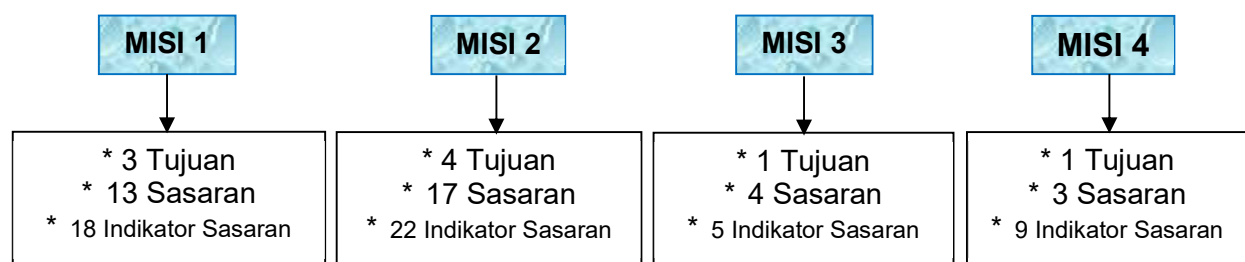
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.
2. Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025.
4. Realisasi Penyerapan Anggaran per Sasaran Tahun 2025.
5. Tindaklanjut LHE Kementerian PANRB tahun 2025.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban yang memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai hasil tindak lanjut dari penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya. Dalam rangka merealisasikan itu semua, ditetapkan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut penganggarannya.

Laporan Kinerja ini ingin memperlihatkan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Parameternya adalah indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Dalam dokumen RPJMD, IKU dan Perkin telah ditetapkan 9 tujuan, 37 sasaran dan 54 indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut:



Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut ini:

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi/target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.



Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tahun 2025 atau tahun ketiga periode perencanaan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Jumah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Capaian							
				Istimewa (x > 100%)		Baik (80%< x≤100%)		Cukup 60% < x ≤ 80%		Kurang x ≤ 60%	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
MISI KE-1 MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA											
1	Sasaran 1	3	112,65	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00
2	Sasaran 2	1	137,60	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Sasaran 3	2	61,15	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00
4	Sasaran 4	1	119,56	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Sasaran 5	2	74,44	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00
6	Sasaran 6	1	100,07	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Sasaran 7	1	15,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
8	Sasaran 8	1	108,24	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Sasaran 9	2	-60,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
10	Sasaran 10	1	100,27	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Sasaran 11	1	125,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Sasaran 12	1	69,39	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
13	Sasaran 13	1	69,79	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
Jlh	13 Sasaran	18	79,48	10	55,56	1	5,56	2	11,11	5	27,78
MISI KE-2 MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT											
1	Sasaran 14	1	87,24	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Sasaran 15	1	87,24	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Sasaran 16	1	189,54	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Sasaran 17	1	104,93	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Sasaran 18	1	208,49	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Sasaran 19	2	589,93	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00
7	Sasaran 20	1	86,04	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
8	Sasaran 21	1	85,99	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
9	Sasaran 22	1	92,83	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
10	Sasaran 23	2	69,19	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00
11	Sasaran 24	1	76,98	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
12	Sasaran 25	1	91,64	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
13	Sasaran 26	2	39,61	0	0,00	0	0,00	1	50,00	1	50,00
14	Sasaran 27	1	132,84	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Sasaran 28	3	97,92	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00
16	Sasaran 29	1	83,23	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
17	Sasaran 30	1	117,93	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jlh	17 Sasaran	22	131,86	6	27,27	11	50,00	2	9,09	3	13,64
MISI KE-3 MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP											
1	Sasaran 31	1	104,63	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Capaian							
				Istimewa ($x > 100\%$)		Baik ($80\% < x \leq 100\%$)		Cukup ($60\% < x \leq 80\%$)		Kurang ($x \leq 60\%$)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
2	Sasaran 32	1	94,16	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Sasaran 33	1	94,88	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Sasaran 34	2	117,82	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Jlh	4 Sasaran	5	102,87	2	40,00	2	40,00	0	0,00	1	20,00
MISI KE-4 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI											
1	Sasaran 35	6	73,71	0	0,00	4	66,67	1	16,67	1	16,67
2	Sasaran 36	2	87,82	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00
3	Sasaran 37	1	102,32	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jlh	3 Sasaran	9	87,95	2	22,22	4	44,44	2	22,22	1	11,11
Total	37 Sasaran	54	106,71	20	37,04	18	33,33	6	11,11	10	18,52

Data pada tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 37 sasaran strategis adalah **106,71%** predikat kinerja **ISTIMEWA**. Predikat kinerja istimewa ini menggambarkan bahwa tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 **sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi**. Tiga puluh tujuh sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 54 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Kategorisasi atau predikat dari 54 indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Predikat kinerja ISTIMEWA dengan range $x > 100\%$ sebanyak 20 indikator atau 37,04%.
2. Predikat kinerja BAIK dengan range $80\% < x \leq 100\%$ sebanyak 18 indikator atau 33,33%.
3. Predikat kinerja CUKUP dengan range $60\% < x \leq 80\%$ sebanyak 6 indikator atau 11,11%.
4. Predikat kinerja KURANG dengan range $x \leq 60\%$ sebanyak 10 indikator atau 18,52%.

Sedangkan dari aspek analisis efisiensi penggunaan anggaran pada program-program utama/strategis pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp582.818.991.936,64 terealisasi Rp552.558.941.269,38 atau 89,66% terdapat efisiensi sebesar Rp60.260.050.668,00. Disisi yang lain target Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp147.764.184.380,00 terealisasi Rp132.000.749.235,47 atau 89,33%.

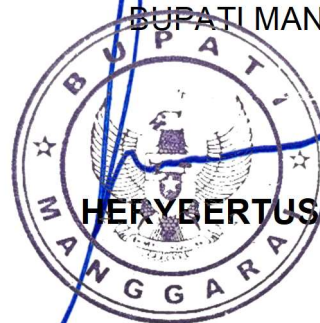


Pada tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap AKIP Kabupaten Manggarai. Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor B/68/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dimana nilai AKIP Kabupaten Manggarai sebesar 65,22, meningkat 0,41 nilai dari tahun 2024 sebesar 64,81 dengan Kategori yang sama yaitu **"B"**. *Predikat B tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.*

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan KINERJA yang telah diperoleh sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah dan sedang merumuskan langkah-langkah nyata untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ruteng, 25 Maret 2026

BUPATI MANGGARAI,



HERYBERTUS G. L. NABIT

Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Manggarai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026



dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/APBD-P) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP

Maksud dari penyusunan LKIP Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. sarana bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai;
2. bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*;
4. sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis; dan
5. mendorong Pemerintah Manggarai untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai.

1.3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT. Secara geografis terletak di antara 08⁰.14'27,32" - 08⁰ 54'57,17"LS dan 120⁰ 13'41,34"-120⁰ 32'47,22" BT, dan secara administratif berbatasan dengan:

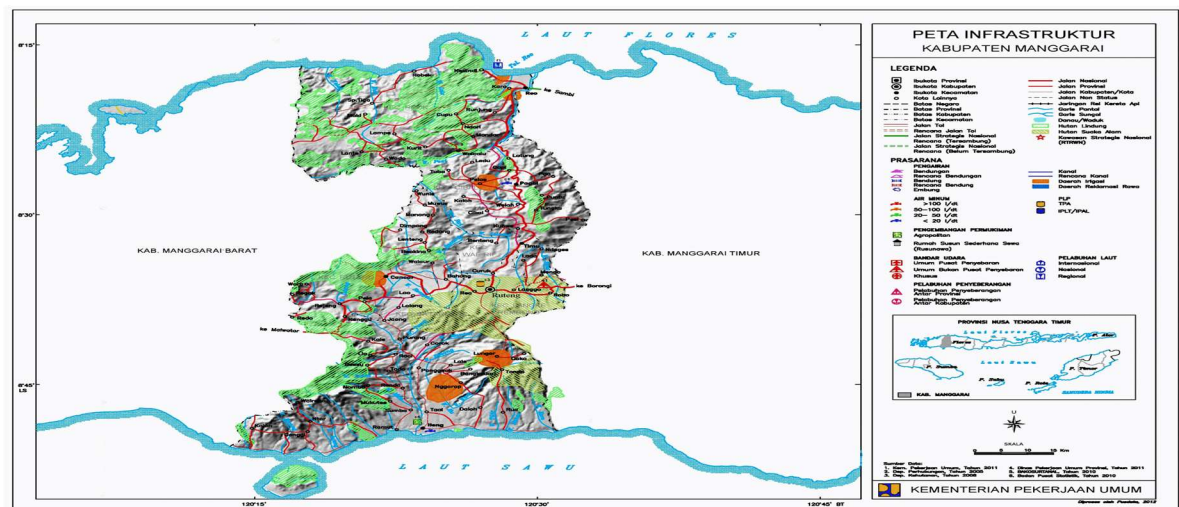
- ❖ Laut Flores di bagian utara;
- ❖ Laut Sawu di bagian selatan.



- ❖ Kabupaten Manggarai Timur di bagian timur.
- ❖ Kabupaten Manggarai Barat di bagian barat.

Wilayah Kabupaten Manggarai seluas 2.096,44 Km² atau 209.644 Ha yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan Pulau Kecil yaitu Pulau Mules.

Pemerintahannya terpusat di Kota Ruteng Kecamatan Langke Rembong. Jumlah penduduk per 31 Desember 2025 (BPS_Manggarai Dalam Angka 2026) sebanyak 340.153 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 170.185 jiwa dan perempuan 169.968 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 162 jiwa/Km².



1.4. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Kewenangan dimaksud meliputi urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.



Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan nomenklatur sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) perpustakaan; dan
 - 18) kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;



- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

1.5. PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selanjutnya ditetapkan pula Peraturan Bupati Manggarai untuk mengatur secara teknis perihal kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah maupun pembentukan unit pelaksana teknis daerah.

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalami beberapa perubahan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

Adapun perubahan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 sebagai berikut :

Substansi Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai

No	PERUBAHAN	
	Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021	Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



Adapun jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 berjumlah 41 (empat puluh satu) perangkat daerah.

Selain 41 Perangkat Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, terdapat 1 (satu) Perangkat Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan kedua Peraturan Daerah tersebut di atas, maka susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 berjumlah 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A;
5. Dinas Kesehatan Tipe A;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A;
9. Dinas Sosial Tipe A;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tipe B;
14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
17. Dinas Perhubungan Tipe B;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A;
21. Dinas Perikanan Tipe A;
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A;
23. Dinas Peternakan Tipe A;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A;



26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B;
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
28. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe B;
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Non Tipe;
31. Kecamatan Langke Rembong Tipe A;
32. Kecamatan Ruteng Tipe A;
33. Kecamatan Wae Ri'i Tipe A;
34. Kecamatan Cibal Tipe A;
35. Kecamatan Reok Tipe A;
36. Kecamatan Satar Mese Tipe A;
37. Kecamatan Satar Mese Barat Tipe A;
38. Kecamatan Lelak Tipe A;
39. Kecamatan Rahong Utara Tipe A;
40. Kecamatan Cibal Barat Tipe A;
41. Kecamatan Reok Barat Tipe A; dan
42. Kecamatan Satar Mese Utara Tipe A.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan beberapa Peraturan Bupati terkait Pembentukan UPTD Dinas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dan Rumah Sakit Kelas D Pratama Reo.

Berdasarkan jumlah Perangkat Daerah, UPTD dan Unit Organisasi Bersifat Khusus tersebut di atas, jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebanyak 529 jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II-A	1
2.	Eselon II-B	35
3.	Eselon III-A	59
4.	Eselon III-B	119
5.	Eselon IV-A	183
6.	Eselon IV-B	132
Jumlah		529



Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, saat Pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai, Senin 1 September 2025

1.6. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah ASN per 31 Desember 2025 sebanyak 7.845 orang. Jumlah 7.845 orang tersebut terdiri dari PNS sebanyak 4.310 Orang dan PPPK sebanyak 3.535 orang. Adapun komposisi ASN Kabupaten Manggarai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin sebagai berikut :

No.	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Jumlah	%
1.	Laki-Laki	1.867	1.664	3.531	45,01
2.	Perempuan	2.443	1.871	4.314	54,99
JUMLAH		4.310	3.535	7.845	100,00

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2025

b. Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah	%
1.	SD	11	23	34	0,43
2.	SMP/Sederajat	17	26	43	0,55
3.	SMA/Sederajat	508	365	873	11,13
4.	Diploma I, II/Akta I, II	44	-	44	0,56
5.	Diploma III/Akta III	939	710	1649	21,02
6.	S-1/Akta IV	2.624	2.411	5.035	64,18
7.	S-2	167	-	167	2,13
8.	S-3	-	-	-	
JUMLAH		4.310	3.535	7.845	100,00

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2025



c. Jumlah ASN menurut Golongan sebagai berikut:

GOL./Kelas		RUANG					Jlh	%
		PNS				PPPK		
		A	B	C	D			
1	I	1	2	5	2	23	33	0,42
2	II	42	38	279	274	-	633	8,07
3	III	682	579	308	1105	26	2.700	35,42
4	IV	285	378	330	-	-	993	12,66
5	V	-	-	-	-	365	365	4,65
6	VII	-	-	-	-	711	711	9,06
7	IX	-	-	-	-	2.213	2.213	28,21
8	X	-	-	-	-	197	197	2,51
JUMLAH		1.010	997	922	1.381	3.535	7.845	100,00

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2025

1.7. KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN MANGGARAI

1.7.1 Struktur Perekonomian

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah (region) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (tahun dasar 2010). Berdasarkan Manggarai Dalam Angka Tahun 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tahun 2026, data PDRB Kabupaten Manggarai yang disajikan adalah PDRB dari sisi produksi atau juga dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha, yang diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah seluruh lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian.

PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar harga berlaku tahun 2025 sebesar Rp6.379.840.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), sementara di tahun 2024 nilai tersebut meningkat menjadi Rp5.923.140.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar seratus empat juta rupiah). Adapun Produk



Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Manggarai (miliar rupiah), Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Manggarai (miliar rupiah), 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.046,91	1.139,80	1.204,95	1.263,49	1.350,16
b.	Pertambangan dan Penggalian	119,49	127,67	138,39	146,62	145,79
c.	Industri pengolahan	17,26	18,56	21,68	25,40	30,04
d.	Pengadaan listrik dan Gas	5,34	6,12	6,99	8,05	7,86
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,61	5,80	6,41	6,84	7,20
f.	Konstruksi	693,41	715,72	800,12	822,99	835,23
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	445,29	495,87	570,99	634,17	718,56
h.	Transportasi dan Pergudangan	161,55	175,03	197,68	228,10	244,72
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,98	19,82	23,48	27,91	29,56
j.	Informasi dan Komunikasi	493,25	526,95	556,66	608,27	651,55
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	347,31	381,90	392,48	410,91	448,36
l.	Real Estat	99,25	107,53	116,05	121,63	133,50
m,n.	Jasa Perusahaan	6,27	6,76	7,31	8,00	8,91
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	723,62	728,25	761,50	885,75	979,92
p.	Jasa Pendidikan	367,76	374,38	406,05	411,84	453,14
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,53	103,00	114,92	125,95	137,99
r,s,t,u	Jasa Lainnya	162,44	164,55	172,54	187,26	197,34
PDRB		4.810,27	5.097,72	5.498,22	5.923,14	6.379,84

Sumber: MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2026

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB tahun 2025 yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp1.350,16 disusul Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp979,92 dan Konstruksi sebesar Rp835,23.

1.7.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas Dasar Harga Konstan



tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan 2025, mencapai Rp3.572.340.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Angka tersebut naik dari Rp3.399.330.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2025 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,53 persen diikuti oleh Jasa Perusahaan yang mencapai pertumbuhan ekonomi 8,15 persen, lalu disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan yang mencapai pertumbuhan 7,79 persen. Pada tahun 2025 Kabupaten Manggarai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -5,35 persen, diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar -0,93 persen dan lapangan usaha Konstruksi -0,39 persen.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025 **
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,39	4,48	1,27	0,87	3,35
b.	Pertambangan dan Penggalan	1,88	2,28	5,31	7,08	-0,93
c.	Industri pengolahan	-3,73	4,84	7,17	7,57	11,96
d.	Pengadaan listrik dan Gas	0,50	9,08	11,28	15,07	-5,35
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,55	1,42	5,63	5,49	4,14
f.	Konstruksi	6,34	-0,05	7,84	1,24	-0,39
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	8,76	7,07	8,84	12,53
h.	Transportasi dan Pergudangan	1,70	3,34	4,68	5,55	6,35
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,62	19,03	14,04	15,17	5,96



Lapangan Usaha/Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025 **
j.	Informasi dan Komunikasi	3,51	5,00	4,01	2,12	5,40
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	1,21	0,74	3,49	6,90
l.	Real Estat	1,20	3,49	4,09	3,64	1,80
m,n.	Jasa Perusahaan	-13,79	4,63	4,68	7,43	8,15
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,67	0,10	1,31	9,14	6,43
p.	Jasa Pendidikan	-0,03	-0,15	4,89	2,65	7,79
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	3,02	5,14	3,32	4,54
r,s,t,u	Jasa Lainnya	-0,07	0,91	2,97	1,60	1,44
PDRB		2,43	2,85	3,77	3,94	5,09

Sumber: MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2026

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

1.7.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2021 hingga 2025 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB ADHB per kapita tercatat sebesar 15.157 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2025 mencapai 18.756 juta rupiah.

Tabel 1.3
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
a.	ADHB	4.810,27	5.097,72	5.498,22	5.923,14	6.379,84
b.	ADHK 2010	3.064,12	3.151,54	3.270,48	3.399,33	3.572,34
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
a.	ADHB	15.157	15.780	16.724	17.709	18.756
b.	ADHK 2010	9.655	9.755	9.948	10.164	10.502
c.	Pertumbuhan PDRB-ADHK per Kapita	0,82	1,04	1,97	2,17	3,33



Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk (juta/orang)	315,04	323,054	328,758	334,464	340,153
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	0,52	0,87	1,82	1,05	1,78

Sumber: Prov. NTT Dalam Angka, 2026 dan Manggarai Dalam Angka, 2026

1.7.4. Angka Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat juga dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Sedangkan kemiskinan akan semakin meluas, jika perbedaan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Adapun data Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 1.4
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	% Penduduk Miskin
2020	340.633	69,52	20,34
2021	371.531	71,03	20,48
2022	407.261	69,68	19,84
2023	443.908	70,00	19,69
2024	443.908	68,39	19,01
2025	472.888	65,81	18,10

Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai, 2026

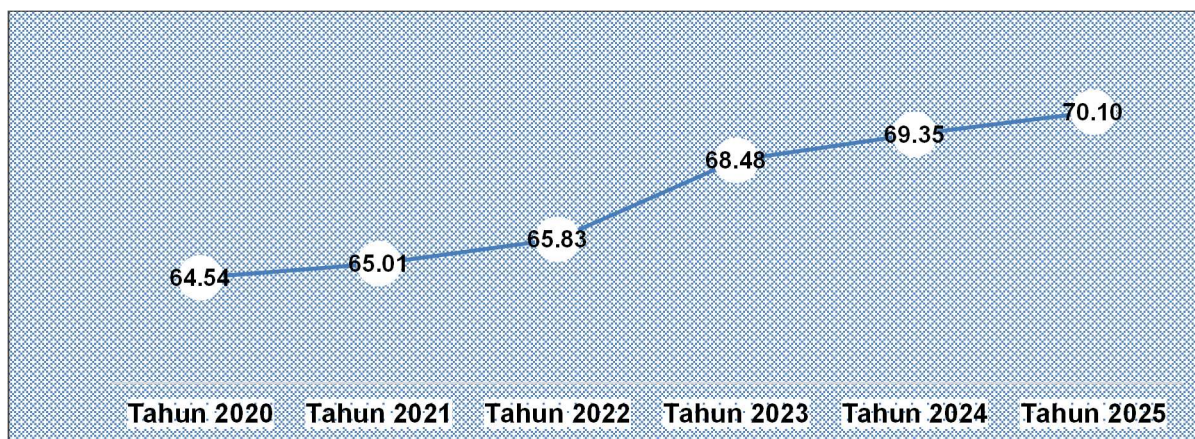
1.7.5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan keberhasilan dalam pembangunan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang



dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Manggarai sesuai Manggarai Dalam Angka yang dirilis BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2026 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari 64,54 tahun 2020 menjadi 70,10 pada tahun 2025.

Grafik 1.1
IPM Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Sumber: MDA BPS Kab. Manggarai & Prov NTT Dalam Angka, 2026



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai sebagai terjemahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manggarai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010. RPJP ini menjadi kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Manggarai yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

A. RPJMD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026

1. ISU STRATEGIS

RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi, Kabupaten Manggarai menghadapi isu strategis dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Isu strategis tersebut disusun dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah di berbagai urusan pemerintahan dan dinamika isu strategis di tingkat



internasional, nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uraian isu strategis Kabupaten Manggarai sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

a. Masih Rendahnya Kesejahteraan Sosial

Isu strategis rumpun urusan sosial Kabupaten Manggarai yaitu masih rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan sinergitas kategori masalah pokok dari hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah rumpun urusan sosial dengan berbagai isu strategis rumpun sosial di tingkat nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa kabupaten sekitar Kabupaten Manggarai. Isu rendahnya kesejahteraan sosial mewadahi beberapa urusan, yaitu keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kebudayaan.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).
2. Masih adanya gangguan terhadap kohesivitas sosial.
3. Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak.
4. Masih rendahnya tingkat kemandirian desa.
5. Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu melakukan beberapa agenda prioritas untuk menjawab isu strategis tersebut. Misalnya dengan peningkatan penegakan Perda, peningkatan kebijakan responsif gender, peningkatan pelestarian budaya lokal dan peningkatan status desa mandiri.

b. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor



dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal akibat menurunnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Manggarai.

Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya peningkatan kontribusi ekonomi dari sektor pengolahan, industri dan sektor non-sumber daya alam lainnya. Padahal beberapa sektor tersebut menjadi sebuah isu strategis yang menjadi perhatian nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya peningkatan kontribusi sektor ekonomi non-SDA dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Jika semakin tinggi kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, maka nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah di sektor non-tambang akan semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus memperhatikan aspek kekuatan. Kekuatan pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai dengan laju inflasi daerah. Kabupaten Manggarai harus mampu mengendalikan laju inflasi daerah dengan memperhatikan faktor-faktor determinannya. Salah satu upaya yang dapat dijalankan adalah pengendalian impor dan peningkatan produksi barang dan jasa dari dalam daerah. Upaya ini tentu harus diikuti dengan pengembangan jaringan pemasaran antara produsen dan konsumen di dalam daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai juga harus memperhatikan pengembangan Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai memiliki daya tarik wisata yang dapat dikembangkan seperti Todo dan Wae Rebo. Kedua destinasi ini harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan KSPN Labuan Bajo dan pariwisata Pulau Flores secara umum. Kabupaten Manggarai juga dapat menopang pemenuhan kebutuhan hortikultura dan daging bagi konsumsi wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di wilayah KSPN Labuan Bajo. Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian yang diikuti oleh pengembangan industri pangan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung pengembangan KSPN Labuan Bajo.



Isu mengenai pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan juga masih menjadi perhatian utama bagi Kabupaten Manggarai selama beberapa tahun ke depan. Pemerataan kesejahteraan dinilai dengan indeks gini. Ketimpangan pendapatan antara penduduk pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Semakin menurun tingkat pengangguran di pedesaan dan perkotaan, maka pendapatan masyarakat akan semakin merata. Pengembangan pusat ekonomi baru secara merata di pedesaan dapat menjadi upaya yang dapat dijalankan untuk menurunkan indeks gini, sekaligus menjadi pengungkit bagi perbaikan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di dalam Kabupaten Manggarai.

Isu kemiskinan juga menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan pada periode perencanaan ke depan. Isu ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran dapat ditekan, maka kemiskinan juga akan semakin menurun. Upaya ini dapat berjalan dengan baik kecuali jika terdapat faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh, seperti kebocoran ekonomi regional. Walaupun tingkat pengangguran terbuka dan produktivitas barang dan jasa di Kabupaten Manggarai bisa dinaikan, namun jika koneksi jaringan pemasaran antara produsen dengan konsumen tidak terjalin dengan baik, maka impor dari luar daerah dapat terjadi. Kondisi ini akan mengakibatkan uang yang beredar di Kabupaten Manggarai mengalir ke luar daerah, sehingga upaya pengentasan kemiskinan menjadi semakin melambat.

c. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus penting dalam proses pembangunan baik di level daerah maupun nasional. Sumber daya manusia seringkali dijadikan sebagai salah satu tolok ukur daya saing pembangunan. Pada level global, target pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) secara eksplisit menyasar pembangunan sosial yang meliputi pengembangan SDM. Melihat kebijakan nasional, pembangunan manusia juga menjadi salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu:



Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pada level daerah, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 menempatkan isu SDM sebagai salah satu fokus pembangunan. Isu strategis yang berkaitan dengan SDM di level Provinsi lebih berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan terhadap semua penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SDM menjadi salah satu pilar utama yang menunjang pada pembangunan di sektor lainnya.

Secara umum, kualitas SDM di suatu daerah dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM dapat mengukur pembangunan manusia dengan melihat 3 (tiga) komponen, yaitu pendidikan, kesehatan dan tingkat kehidupan layak. Capaian IPM Kabupaten Manggarai mengalami tren yang meningkat dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Manggarai setiap tahunnya adalah 0,8. Capaian IPM Kabupaten Manggarai pada tahun 2019 adalah 64,15. Capaian tersebut termasuk baik jika dibandingkan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan guna mengejar ketertinggalan dengan daerah lain seperti Kabupaten Ngada dan Ende. Isu pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus utama pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai. Pemenuhan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kualitas pemberi layanan baik di bidang kesehatan maupun pendidikan masih perlu menjadi perhatian. Beberapa hal mendasar tersebut yang turut menentukan keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai.

d. *Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup*

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah krusial yang menopang pembangunan daerah yang berkelanjutan. Aspek lingkungan hidup merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan di Kabupaten Manggarai meliputi tujuan 13 (Penanganan



Perubahan Iklim), dan tujuan 15 (Pelestarian dan pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan).

Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup atau kecenderungan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dikarenakan terkendala beberapa aspek yakni kualitas udara yang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2019, dan mengalami peningkatan di tahun 2020. Begitu pula dengan kondisi tutupan lahan yang mengalami penurunan di tahun 2019, dan kembali meningkat di tahun 2020. Kualitas air mengalami peningkatan dan stagnan di angka 70 hingga tahun 2020, yang termasuk ke dalam kelas cukup. Adanya nilai yang fluktuatif ini juga disebabkan oleh belum adanya alat pengujian laboratorium yang lengkap yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan kualitas udara, air, dan tutupan lahan yang merupakan komponen penyusun indeks kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan lainnya yakni belum optimalnya pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA. Semakin berkurangnya daya tampung TPA eksisting yang menjadikan perlunya pembangunan lokasi TPA baru yang kemudian berhadapan dengan persoalan keterbatasan lahan. Beberapa agenda prioritas dalam lingkup urusan lingkungan hidup antara lain adalah peningkatan pengawasan lingkungan hidup, peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas pengendalian lingkungan hidup.

e. Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pembangunan daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai masih perlu ditingkatkan. Kabupaten Manggarai masih terkendala beberapa permasalahan pada berbagai aspek. Pengelolaan sumber daya air, jaringan transportasi terutama kualitas jaringan jalan, telekomunikasi, serta infrastruktur pendukung yang belum optimal akan mempengaruhi tingkat konektivitas antar wilayah. Selain itu, ketersediaan utilitas seperti perumahan dan permukiman; akses air bersih dan air minum;



ketersediaan sanitasi yang dapat diakses oleh semua kelompok termasuk orang dengan disabilitas menjadi indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai. Aspek lainnya yakni penataan ruang yang belum diselenggarakan dengan optimal berdampak pada daya saing pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Manggarai.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air, serta pemanfaatan air sesuai kebutuhan. Kabupaten Manggarai memiliki kendala pengelolaan sumber daya air terkait dukungan terhadap ketahanan pangan, salah satunya yakni jaringan irigasi.

Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastuktur irigasi belum berjalan optimal, data tahun 2020 menyebutkan bahwa persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 68,789%, sedangkan Rasio Jaringan Irigasi di lahan budidaya pertanian masih sebesar 21,80%. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya panjang jaringan irigasi serta belum optimalnya jaringan irigasi eksisting dikarenakan kerusakan jaringan irigasi akibat rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan, serta bencana alam.

Data panjang jaringan jalan berdasarkan kelas jalan yakni Jalan Negara dan Jalan Provinsi dengan total panjang 166,04 km, Jalan Kabupaten 1493,73 km, dan Jalan Desa 410,87 km. Meskipun antar Kecamatan sudah saling terhubung, namun pendeknya total panjang jalan desa menunjukkan belum optimalnya pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa maupun kampung sehingga perencanaan dan pembangunan jalan masih perlu ditingkatkan. Disamping ketersediaan jalan, peningkatan konektivitas antar wilayah juga didukung oleh tersedianya pelayanan transportasi umum yang memadai. Kondisi transportasi umum di Kabupaten Manggarai masih belum memadai, jumlah armada yang kurang memadai terutama di kecamatan yang berada jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Data Dinas Perhubungan tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah armada di Kota Ruteng mencapai 118 unit, sedangkan Kecamatan Satar Mese 5 unit,



Kecamatan Reok 11 unit, Kecamatan Ruteng 0 unit, dan belum terdapat data untuk kecamatan lainnya. Selain itu, pengelolaan terminal dan trayek angkutan umum juga belum optimal. Data tahun 2019 menunjukkan terdapat 4 terminal di Kabupaten Manggarai yang kemudian menjadi 3 di tahun 2020. Perubahan tersebut mengakibatkan jalur dan trayek menjadi tidak sesuai sehingga diperlukan penataan dan pengelolaan lebih lanjut untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan transportasi.

Permasalahan utama terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase yaitu belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni. Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menunjukkan Rasio Rumah Layak huni di tahun 2020 sebesar 88,75%, sedangkan presentase Rumah Tangga menggunakan air bersih sebesar 80,90% dengan presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum sebesar 85,65%. Data tersebut menunjukkan nilai yang cukup baik, namun belum adanya ketersediaan data yang akurat menjadikan belum optimalnya akses terhadap rumah layak huni yang merata. Permasalahan infrastruktur lainnya yakni di bidang komunikasi dan informatika yaitu terbatasnya dan belum meratanya akses dan jangkauan telekomunikasi yang menyebabkan adanya kesenjangan perolehan informasi antara daerah Kota Ruteng dan sekitarnya dengan Kecamatan lainnya yang berada jauh dari pusat Ibukota Kabupaten.

Berbagai tantangan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Manggarai masih dihadapkan pada isu strategis yaitu perlunya peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa agenda prioritas terkait isu tersebut adalah peningkatan akses dan kualitas jaringan jalan, peningkatan fasilitas dan cakupan layanan perhubungan, peningkatan kualitas permukiman, serta optimalisasi infrastruktur dan pemanfaatan IPTEK di Kabupaten Manggarai.



f. Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kepatuhan hukum, responsivitas dalam pelayanan, dan profesionalitas. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkup internal pemerintah daerah maupun dalam relasinya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan menentukan efektivitas pembangunan di berbagai sektor lain.

Isu tata kelola pemerintahan aktual antara lain berupa penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mewujudkan birokrasi yang lincah dengan penyederhanaan struktur, regulasi, dan sistem pelayanan. Isu aktual tersebut perlu direspon oleh pemerintah daerah, agar tata kelola pemerintahan daerah dapat responsif terhadap perkembangan jaman dan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang diarahkan untuk segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam aspek pelayanan antar instansi pemerintah maupun pelayanan kepada publik. Kondisi saat ini pemerintah daerah telah menjalankan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada aspek perencanaan, keuangan dan kinerja, meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Realitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai pada beberapa aspek telah memiliki kinerja yang baik, antara lain capaian akuntabilitas keuangan yang sudah memiliki predikat Opini BPK WTP. Meskipun demikian, pada aspek lain, kinerja akuntabilitas belum optimal. Nilai SAKIP memiliki predikat B dengan nilai 61,06 pada 2019 dan EKPPD memiliki nilai 2,7951 pada 2018. Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial mengalami penurunan nilai dari 80,24 pada 2018 menjadi 79,77 pada 2019. Aspek penguatan integritas dan pengendalian intern pemerintah daerah belum optimal yang ditandai dengan level SPIP 2 dan belum terdapat perangkat daerah yang menjalankan zona integritas. Pada aspek profesionalitas pegawai



sebagai agen pelayan masyarakat memiliki capaian indeks profesionalitas pegawai 47,59 pada 2020.

Berdasarkan capaian kinerja beberapa aspek tata kelola pemerintahan tersebut menegaskan adanya isu strategis berupa belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai. Beberapa aspek di dalam isu tersebut yang perlu direspon dalam periode pembangunan mendatang antara lain pembangunan akuntabilitas kinerja dengan sistem manajemen kinerja yang baik antara kepala daerah dengan perangkat daerah, pembangunan sistem pelayanan publik yang responsif dan dikendalikan oleh survei kepuasan layanan secara reguler. Selain itu, tidak kalah penting peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memperkuat capaian dan komitmen pada kebijakan anti korupsi. Tata kelola pemerintahan mensyaratkan pula kolaborasi dan inovasi antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini kolaborasi antar perangkat daerah dengan mereduksi ego sektoral maupun kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sektor dunia usaha. Percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi agenda mendesak mengingat tuntutan perkembangan jaman dan kebijakan nasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan dan pelayanan publik.

2. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Manggarai, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama-sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

a. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan. Rumusan visi menjadi dasar dalam perumusan arah dan prioritas pembangunan. Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 masih berada dalam lingkup



rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang adalah **“Manggarai yang Makmur, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan”**.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang dan berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis, maka dirumuskan Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, yaitu:

“MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING”

Rumusan visi RPJMD periode 2021-2026 memiliki keterkaitan secara substansi maupun kata dengan Visi RPJPD. **Adil** merupakan rumusan pokok visi yang memiliki persamaan dengan visi RPJPD, sedangkan **Maju** dan **Berdaya Saing** tidak terdapat di dalam visi RPJPD, namun tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut berupa harapan tentang kondisi daerah yang semakin maju dan berdaya saing di akhir periode pembangunan jangka panjang, sehingga mampu mencapai visi RPJPD makmur, sejahtera, adil dan berkelanjutan di tahun 2025.

Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 juga dioperasionalkan melalui jargon **“Manggarai Mberes”** yang artinya Manggarai Kuat. Hal tersebut merupakan bentuk operasionalisasi visi Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing melalui penguatan-penguatan pada sektor unggulan yang akan menjadi dasar penopang kekuatan Kabupaten Manggarai, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui jargon tersebut diharapkan kedepannya tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masing-masing memiliki peran untuk menciptakan Kabupaten Manggarai yang maju dan kuat ketahanan ekonomi dan sumber daya manusianya.

Penjelasan tentang setiap pokok-pokok visi RPJMD 2021-2026 seperti terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.1

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing	Manggarai	- Memiliki makna spasial sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan.
		- Memiliki masyarakat beserta sosial budaya Manggarai yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.
	Maju	- Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis.
		- Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal.
		- Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
	Adil	- Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.
		- Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan.
		- Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
		- Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat.



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		- Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan.
		- Adil menjadi kata kunci yang menjadi dasar bagi penyusunan misi sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan.
	Berdaya Saing	- Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi.
		- Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.
		- Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

b. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA.**
- 2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.**
- 3. MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP.**
- 4. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI.**



c. **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata lain tujuan mempertajam misi organisasi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas pembangunan. Di atas prioritas itulah semua program dan kegiatan serta alokasi anggaran diarahkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Mengacu pada visi, misi dan isu-isu strategik dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka ditetapkan 9 (sembilan) tujuan dan 37 (tiga puluh) sasaran seperti pada tabel berikut ini:



Tabel 2.2
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikaator Sasaran

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah
					Harapan lama sekolah
					Rata-rata nilai ujian
				Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	Indeks literasi masyarakat / Indeks minat baca
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)
					Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI
				Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka kelahiran total (TFR)
				Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
					Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)
				Meningkatnya keberdayaan potensi budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan
		Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat	Angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani
			Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Menurunnya ketimpangan gender	TPAK perempuan
				Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Meningkatnya ketahanan sosial	Angka konflik sosial	Meningkatnya ketertiban umum	Angka kasus kekerasan terhadap anak
				Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	Persentase penurunan pelanggaran Perda
		Indeks resiko bencana		Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Angka konflik sosial
				Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Indeks ketahanan daerah (IKD)
				Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Laju pertumbuhan sektor pertanian
			PDRB per-kapita (ADHK, Ribu Rp)	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan
				Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
				Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum
				Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan
				Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi PMDN



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
					Persentase peningkatan realisasi PMA
				Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
				Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase drainase perkotaan yang terbangun
				Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer
				Meningkatnya pelayanan perhubungan	Rasio konektivitas
					Kinerja lalu lintas
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Laju inflasi	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan
				Meningkatnya stabilitas harga barang	Indeks harga konsumen
			Indeks gini	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya
					Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil
		Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
				Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Rasio rumah layak huni
					Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
					Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan
				Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang terkendali
				Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase status desa berkembang
3	Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks desa membangun (IDM)	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)
				Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)
				Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	Persentase sampah tertangani
					Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah (B3)
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, professional dan responsif terhadap pelayanan publik	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP
					Peringkat EKPPD
					Opini BPK
					Indeks pengelolaan keuangan daerah
					Indeks kapasitas fiskal
					Indeks kematangan penerapan manajemen resiko



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Indeks profesionalitas ASN
				Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat

Tabel 2.3

Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target selama 5 (Lima) Tahun

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Angka	66,24	67,01	67,77	68,54	69,30	69,30
		Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat	Angka PMKS	Jlh. PMKS tahun n	Angka	19.089	18.589	18.059	17.589	17.089	17.089
			Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun n	Angka	65,84	65,88	65,93	65,97	66,02	66,02
		Meningkatnya ketahanan sosial	Angka konflik sosial	Angka total konflik sosial tahun n	Angka	6	5	4	4	3	3
			Indeks resiko bencana (IRBI)	$R = H \times V / C$ H = Hazard (Ancaman atau Bahaya) V = Vulnerability (Kerentanan) C = Capacity (Kapasitas)	Angka	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	Rumus Pertumbuhan Ekonomi: $G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: G_t = pertumbuhan ekonomi periode t (trivulanan atau tahunan) PDB_t = produk domestik bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB_{t-1} = PDB satu periode sebelumnya	Angka	4,93	5,19	5,20	5,22	5,23	5,23



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
			PDRB per-kapita (ADHK, Ribu Rp)	$PDRB \text{ Perkapita}_t = \frac{PDRB_t}{Jumlah \text{ Penduduk}_t}$	Rp	10.12 5	10.49 7	10.88 5	11.28 8	11.70 6	11.706
			Laju inflasi		Angka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Indeks gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$ GR= Koefisien gini F _{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F _{ci} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F _{ci-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)	Angka	0,289	0,286	0,283	0,280	0,276	0,276
		Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi total jumlah penduduk kali 100%	Angka	19,47	18,88	18,30	17,71	17,12	17,12
		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks desa membangun (IDM)	IDM = 1/3 (IKL + IKE + IKS) IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKS = Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,601	0,613	0,625	0,638	0,650	0,650
3	Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Keterangan : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Angka	81,36	81,36	81,75	81,86	82,16	82,16
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, profesional dan responsif terhadap pelayanan publik	Indeks reformasi birokrasi	Nilai dan Predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun _n oleh Kementerian PANRB	Angka	50,10 (CC)	54,00 (CC)	56,00 (CC)	58,00 (CC)	60,10 (B)	60,10 (B)



d. **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

1. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang berkesinambungan untuk mewujudkan misi yang tepat sasaran serta mencapai tujuan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dari pemetaan masalah pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dengan mengkaji potensi serta tantangan di Kabupaten Manggarai. Strategi merupakan langkah atau tindakan sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing tujuan dan sasaran yang diurutkan berdasarkan misi kepala daerah terpilih di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2.4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Manggarai 2021-2026

VISI : MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING			
MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tingkat PAUD	Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pendidikan tingkat PAUD
			Standarisasi penyelenggaraan PAUD
			Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
		Peningkatan fasilitas pendidikan	Pembebasan lahan yang layak bangun
			Pembaharuan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP



VISI : MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
			Peningkatan efektifitas bangunan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
		Peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan	Peningkatan kompetensi guru
			Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan
			Peningkatan akreditasi sekolah SD dan SMP
			Peningkatan kompetensi siswa
			Pengembangan kurikulum local
		Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pendidikan	Peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan dana pendidikan
			Peningkatan monitoring pengelolaan sistem pendidikan
	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	Peningkatan budaya baca dan literasi	Peningkatan fasilitas penunjang layanan perpustakaan
			Peningkatan koleksi buku perpustakaan
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan
			Pengembangan layanan perpustakaan
			Peningkatan pembinaan Perpustakaan
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan membaca



VISI : MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	Peningkatan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
			Peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan
			Peningkatan penanganan komplikasi saat persalinan
			Peningkatan penanganan komplikasi pasca persalinan/nifas
			Peningkatan kunjungan K1 dan K4
		Peningkatan kualitas kesehatan bayi	Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
			Peningkatan gizi bayi
			Peningkatan imunisasi dasar Lengkap (IDL)
		Peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting	Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil
			Pemenuhan gizi bayi dan balita
			Optimalisasi pemberian PMT
			Peningkatan penerapan PHBS
		Peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang
			Peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyakit menular dan tidak menular
		Peningkatan penanganan ODGJ	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa (ODGJ)
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan



VISI : MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

			Peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas
			Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan
			Peningkatan pengawasan obat dan makanan
		Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Peningkatan peran kader kesehatan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan kesehatan
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan penyelenggaraan dan cakupan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan partisipasi/akseptor KB aktif
			Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta advokasi kepada masyarakat terkait pentingnya KB
			Peningkatan pendataan fasilitas Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB
		Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk	Pengembangan <i>grand design</i> kependudukan
			Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pengembangan organisasi kepemudaan	Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan
			Peningkatan dukungan dan fasilitasi aktivitas dan kegiatan organisasi kepemudaan
		Optimalisasi peran dan pengembangan organisasi kepramukaan	Peningkatan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah



VISI : MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

		Peningkatan fasilitas dan dukungan terhadap bidang keolahragaan	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
			Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM pelatih
			Peningkatan pembinaan atlet muda berdasarkan minat dan bakat
			Peningkatan fasilitas terhadap organisasi keolahragaan daerah
	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	Peningkatan pelestarian budaya	Peningkatan penelitian potensi dan perkembangan budaya
			Optimalisasi perencanaan pelestarian budaya
			Peningkatan pemeliharaan dan perlindungan situs budaya
			Peningkatan pemanfaatan budaya
Meningkatnya Keberdayaan sosial masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Optimalisasi penanganan PMKS	Peningkatan verifikasi dan validasi data PMKS
			Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
			Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
		Peningkatan kualitas pelayanan sosial	Peningkatan kapasitas pekerja sosial
			Peningkatan cakupan pelayanan PMKS
	Menurunnya kesenjangan gender	Optimalisasi peran perempuan dalam politik	Peningkatan kapasitas perempuan
			Peningkatan minat perempuan dalam politik



VISI : MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan fasilitas pendampingan perempuan
			Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan (terutama keluarga pekerja migran)
	Meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan hak-hak anak	Optimalisasi desa dan paroki layak anak
		Peningkatan penegakan Perda	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda
Meningkatnya ketahanan sosial	Meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan penegakan Perda	Peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP
			Peningkatan pencegahan, penanganan dan penyelesaian pelanggaran Perda
	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	Peningkatan pencegahan potensi konflik sosial	Peningkatan deteksi dini konflik sosial
			Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
			Peningkatan peran lembaga adat
			Peningkatan wawasan kebangsaan
			Peningkatan kerukunan umat beragama
		Peningkatan pemberdayaan ormas dan orpol	Peningkatan partisipasi politik masyarakat
			Peningkatan pembinaan organisasi politik
			Peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi	Peningkatan Desa tangguh bencana



VISI : MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

	terhadap bencana	bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana
			Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana
			Optimalisasi penanganan pasca bencana
		Optimalisasi penanganan kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
			Peningkatan kapasitas pemadam kebakaran
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur penahan erosi
			Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur penahan banjir
			Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur penahan abrasi

MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Peningkatan produksi komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
			Pengembangan gerakan petani milenial
			Peningkatan ketersediaan benih unggul bersubsidi
			Peningkatan ketersediaan pupuk bersubsidi



MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian
			Penurunan serangan hama penyakit
			Peningkatan kualitas prasarana pertanian lainnya
			Pemanfaatan lahan tidur
		Peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan kapasitas SDM peternak
			Peningkatan penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis
			Peningkatan pemanfaatan teknologi peternakan
			Peningkatan ketersediaan bibit unggul dari dalam daerah
			Peningkatan ketersediaan pakan ternak dari dalam daerah
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan kualitas prasarana pendukung peternakan lainnya
		Peningkatan populasi ternak	Peningkatan kelahiran ternak
			Penurunan kematian ternak
			Penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan penyakit lainnya
		Peningkatan kualitas produk pertanian dan peternakan	Optimalisasi standarisasi penanganan pasca panen
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya
		Peningkatan kualitas produk perikanan	Peningkatan standarisasi produk perikanan



MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (fokus: pertanian, perikanan, tenun, mebel dan bambu)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan akses permodalan
			Pengembangan metode / teknologi pengolahan modern
			Peningkatan ketersediaan bahan baku industri tenun
		Peningkatan mutu produk industri tenun, mebel dan bambu	Peningkatan kapasitas SDM pelaku industri tenun, mebel dan bambu
			Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung industri
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Optimalisasi pengembangan daya tarik destinasi wisata
			Optimalisasi pemasaran destinasi wisata
			Optimalisasi kerjasama pengembangan wisata
			Pengembangan kapasitas pelaku wisata dan masyarakat
		Peningkatan spend of money wisatawan	Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif (terutama kerajinan)
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Optimalisasi kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	Optimalisasi penerapan metode marketing-mix
			Optimalisasi jaringan perdagangan produk pertanian dan perikanan
			Penurunan kasus sengketa perdagangan
		Revitalisasi pasar tradisional	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perdagangan
			Peningkatan kapasitas SDM Pedagang
			Optimalisasi akses bantuan permodalan
			Optimalisasi identifikasi potensi investasi
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Peningkatan minat investasi	Peningkatan promosi potensi investasi



MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kegiatan penanaman modal secara online (LKPM online)
		Peningkatan kualitas perizinan	Peningkatan kapasitas SDM
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perizinan
	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Peningkatan pemerataan pembangunan jalan
			Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya
			Peningkatan pengawasan konstruksi jalan dan jembatan
	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Optimalisasi kualitas jaringan drainase perkotaan	Peningkatan ketersediaan jaringan drainase perkotaan
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan
	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi teknis primer	Pembangunan jaringan irigasi Primer
			Pemeliharaan/rehabilitasi Jaringan Irigasi primer
			Peningkatan jaringan irigasi primer
	Meningkatnya pelayanan perhubungan	Peningkatan layanan transportasi umum	Optimalisasi penataan trayek angkutan umum
			Peningkatan jumlah trayek angkutan umum
		Peningkatan kelaikan angkutan umum	Peningkatan ketersediaan peralatan pengujian kendaraan sesuai standar akreditasi
			Peningkatan kualifikasi SDM dalam bidang Perhubungan
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan terutama penerangan jalan dan trotoar



MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perlengkapan jalan dan sungai	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan
			Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal
			Optimalisasi pengelolaan terminal
			Optimalisasi Koordinasi dengan mitra kerja dalam bidang pelayaran (Pol Air, Sabandar Pelabuhan dan Stakeholder lainnya)
			Peningkatan pengawasan jalur sungai
			Peningkatan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal
			Peningkatan pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat
			Peningkatan kualitas tenaga bidang pelayaran
		Optimalisasi pengelolaan parkir	Optimalisasi Penataan dan Pengelolaan Lahan Parkir
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola parkir
			Peningkatan sarana dan prasarana parkir yang memadai
		Peningkatan upaya pengendalian volume kendaraan pada ruas rawan kemacetan	Peningkatan ketersediaan dokumen andalalin (analisis dampak lalu lintas); tatralok (tataran transportasi lokal); serta manajemen dan rekayasa lalu lintas
			Peningkatan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan



MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan keterjangkauan pangan	Optimalisasi fungsi lumbung pangan
			Penurunan daerah rawan pangan
		Peningkatan pemanfaatan pangan	Peningkatan diversifikasi pangan lokal (seperti sorgum, jagung, ubi dan lain sebagainya)
			Penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan
	Meningkatnya stabilitas harga barang	Peningkatan kelancaran distribusi barang	Peningkatan ketersediaan barang local
			Peningkatan stabilitas harga barang pokok dan barang penting
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Peningkatan kualitas manajerial koperasi	Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi
			Peningkatan pengawasan koperasi
		Peningkatan omzet usaha mikro	Peningkatan kapasitas produksi usaha mikro
			Peningkatan kapasitas pemasaran usaha mikro
Menurunnya kemiskinan	Menurunnya pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
			Peningkatan penempatan tenaga kerja
		Penurunan konflik/kasus hubungan industrial	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial
	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan ketersediaan RLH
			Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak
			Peningkatan pengembangan kawasan permukiman terpadu
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh



MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Optimalisasi pendataan rumah korban bencana
			Peningkatan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
			Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan PSU di kawasan permukiman dan perumahan	Peningkatan rumah tangga yang teraliri listrik
		Optimalisasi pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Peningkatan ketersediaan jaringan drainase lingkungan
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan
			Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
			Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
		Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
			Peningkatan pembangunan sanitasi yang menjamin akses dan partisipasi semua kelompok/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan air minum	Peningkatan ketersediaan jaringan perpipaan air bersih



MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
			Peningkatan perencanaan Perda Tata Ruang
			Peningkatan pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kabupaten
			Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda tata ruang
			Peningkatan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan spasial
			Peningkatan ketersediaan dokumen RDTR
		Optimalisasi penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	Peningkatan data kepemilikan lahan masyarakat yang belum tersertifikat dan bersertifikat
		Peningkatan ketersediaan bangunan	Peningkatan ketersediaan gedung dan prasarana lainnya
		Peningkatan kualitas bangunan	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan
			Peningkatan pengawasan Bangunan
Meningkatnya tingkat kemandirian desa	Meningkatnya keberdayaan desa	Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa	Optimalisasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
			Optimalisasi Pembinaan jasa konstruksi
			Peningkatan kualitas tenaga terampil konstruksi
			Peningkatan kapasitas dan peran Bumdes
			Peningkatan tertib administrasi



MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Optimalisasi teknologi tepat guna
			Peningkatan peran PKK
			Optimalisasi fungsi lembaga adat di desa
			Peningkatan penataan desa

MISI 3 : MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Optimalisasi pengendalian pencemaran air	Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah
			Peningkatan ketersediaan peralatan laboratorium lingkungan
			Optimalisasi pemantauan kualitas air
			Optimalisasi Konservasi mata air belum optimal
			Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas udara	Optimalisasi pengendalian pencemaran udara	Peningkatan ketersediaan alat ukur kualitas udara
			Optimalisasi pemantauan kualitas udara
	Meningkatnya kualitas tutupan vegetasi	Optimalisasi ketersediaan dan kualitas tutupan lahan	Peningkatan ketersediaan RTH publik perkotaan
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Optimalisasi pengelolaan persampahan	Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA
			Peningkatan ketersediaan TPA
			Peningkatan ketersediaan sarana persampahan di TPA



MISI 3 : MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan ketersediaan TPS
			Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan di TPA/TPS
			Peningkatan pengelolaan sampah 3R
			Peningkatan penanganan sampah berbasis komunitas
		Optimalisasi pengelolaan limbah B3	Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3
			Peningkatan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, Professional dan responsif terhadap pelayanan publik	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan	Peningkatan sinergisitas antar dokumen perencanaan
			Peningkatan kualitas penerapan TIK dalam perencanaan
		Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi	Peningkatan kualitas data kinerja
			Pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan
		Peningkatan pengendalian penerapan SAKIP	Peningkatan kualitas indikator kinerja berbasis outcome
		Peningkatan efektifitas sistem pengendalian kebijakan daerah	Peningkatan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Peningkatan kualitas produk hukum daerah



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan pengendalian kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan
			Peningkatan koordinasi penyelesaian persoalan pengelolaan SDA
			Peningkatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan
			Peningkatan pengendalian kebijakan bidang administrasi umum
			Peningkatan kualitas kelembagaan daerah
			Peningkatan fasilitasi pendampingan penerapan SAKIP di OPD
			Peningkatan pelayanan protokol dan kehumasan
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kualitas administrasi desa
		Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD
			Pengembangan penggunaan TIK dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Optimalisasi TIK dalam pelaporan keuangan
			Peningkatan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan daerah
		Peningkatan pengelolaan aset daerah	Peningkatan pemutakhiran inventarisasi asset
			Peningkatan legalisasi tanah pemerintah daerah
		Peningkatan kinerja keuangan daerah	Peningkatan <i>reward and punishment</i> dalam penyerapan belanja



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan penyusunan DAB penyerapan anggaran sesuai standar
		Peningkatan pengelolaan kapasitas fiskal daerah	Penyusunan/revisi kebijakan (Perda/Perbup) tentang objek dan tarif pajak serta retribusi
			Ekstensifikasi pajak dan retribusi
			Peningkatan inovasi melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi
		Peningkatan sistem sistem pengawasan	Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah
			Penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
			Peningkatan perangkat daerah dalam menjalankan zona integritas
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Peningkatan akses informasi publik	Peningkatan kualitas layanan informasi public
			Peningkatan jangkauan diseminasi informasi publik
			Penguatan PPID dan PPID pembantu di OPD
			Peningkatan pengembangan kelompok informasi masyarakat
		Peningkatan kualitas integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan kualitas tata kelola TIK
			Peningkatan infrastruktur teknologi dan informasi
			Peningkatan ketersediaan dokumen pendukung TIK
		Peningkatan sistem merit dalam manajemen kepegawaian	Peningkatan keamanan informasi pemerintah
			Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai
			Peningkatan kinerja pegawai



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Peningkatan disiplin pegawai
			Pemenuhan kebutuhan jabatan
		Peningkatan pengendalian kualitas pelayanan publik	Peningkatan Sistem pengendalian pelayanan publik
			Peningkatan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
			Peningkatan fasilitas pendukung pelayanan kecamatan
		Peningkatan peran kecamatan dalam menjalankan fungsi kewilayahan	Peningkatan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan
			Peningkatan kejelasan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten
		Peningkatan jangkauan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan kualitas pelayanan dokumen
			Perluasan jangkauan akses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
		Peningkatan penyelamatan dan perlindungan arsip	Peningkatan sistem pengelolaan arsip
			Peningkatan pembinaan arsip terhadap OPD

2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah merupakan program yang langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah. Program ini memiliki daya ungkit yang besar, oleh karena itu berbagai program ini mendapat prioritas yang lebih besar. Berikut adalah program pembangunan daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026:



NO	PROGRAM
Sasaran 1	Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Program Pengembangan Kurikulum
Sasaran 2	Meningkatnya Literasi / Minat Baca Masyarakat
4	Program Pembinaan Perpustakaan
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Sasaran 3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Sasaran 4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana
11	Program Pengendalian Penduduk
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Sasaran 5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Sasaran 6	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya
16	Program Pengembangan Kebudayaan
17	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
18	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Sasaran 7	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
19	Program Perlindungan Jaminan Sosial
20	Program Rehabilitasi Sosial
21	Program Pemberdayaan Sosial
22	Program Penanganan Bencana
Sasaran 8	Menurunnya Ketimpangan Gender
23	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Sasaran 9	Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
24	Program Perlindungan Perempuan



25	Program Perlindungan Khusus Anak
26	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
27	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Sasaran 10 Meningkatnya Ketertiban Umum	
28	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran 11 Menurunnya Gangguan Kohesivitas Sosial	
29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
31	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
32	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sasaran 12 Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	
34	Program Penanggulangan Bencana
35	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Sasaran 13 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana	
36	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Sasaran 14 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian	
37	Program Penyuluhan Pertanian
38	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
39	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
40	Program Perizinan Usaha Pertanian
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
42	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Sasaran 15 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	
43	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
44	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
45	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sasaran 16 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	
46	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran 17 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	
47	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
48	Program Pemasaran Pariwisata



49	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran	18 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan
50	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
51	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Sasaran	19 Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal
53	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
54	Program Promosi Penanaman Modal
55	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
56	Program Pelayanan Penanaman Modal
Sasaran	20 Meningkatkan Kualitas Jaringan Jalan
57	Program Penyelenggaraan Jalan
Sasaran	21 Meningkatkan Jaringan Drainase Perkotaan
58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Sasaran	22 Meningkatkan Infrastruktur Pengairan Lahan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Sasaran	23 Meningkatkan Pelayanan Perhubungan
59	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
60	Program Pengelolaan Pelayaran
Sasaran	24 Meningkatkan Ketahanan Pangan
61	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
62	Program Penanganan Kerawanan Pangan
63	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
64	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Sasaran	25 Meningkatkan Stabilitas Harga Barang
65	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Sasaran	26 Meningkatkan Kontribusi Koperasi Dan UKM Terhadap Perekonomian
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
67	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
68	Program Pengembangan UMKM
69	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Sasaran	27 Menurunnya Pengangguran
70	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
71	Program Penempatan Tenaga Kerja
72	Program Hubungan Industrial
Sasaran	28 Meningkatkan Akses Terhadap Permukiman Layak Huni



73	Program Kawasan Permukiman
74	Program Pengembangan Perumahan
75	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
76	Program Pengembangan Permukiman
77	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
78	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sasaran 29 Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan Dan Penataan Ruang	
79	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
80	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
81	Program Penataan Bangunan Gedung
82	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran 30 Meningkatnya Keberdayaan Desa	
83	Program Administrasi Pemerintahan Desa
84	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
85	Program Penataan Desa
Sasaran 31 Meningkatnya Kualitas Air	
86	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
87	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH
88	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Sasaran 32 Meningkatnya Kualitas Udara	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
89	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Sasaran 33 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan/Vegetasi	
90	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Sasaran 34 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	
91	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
92	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
93	Program Pengelolaan Persampahan
94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sasaran 35 Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	
95	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



	Pembangunan Daerah
96	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
97	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
98	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
101	Program Perekonomian dan Pembangunan
102	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
106	Program Penyelenggaraan Pengawasan
107	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Sasaran 36 Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel	
108	Program Informasi dan Komunikasi Publik
109	Program Aplikasi Informatika
110	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
111	Program Kepegawaian Daerah
Sasaran 37 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	
112	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
113	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
114	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
115	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
116	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
117	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
118	Program Pendaftaran Penduduk
119	Program Pencatatan Sipil
120	Program Pengelolaan Arsip
121	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

B. INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan indikator tujuan yang sesuai yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.5

Tujuan dan Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Manggarai

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,54
Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat	Angka PMKS	Angka	17.589
	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	65,97
Meningkatnya ketahanan sosial	Angka konflik sosial	Angka	3
	Indeks resiko bencana (IRBI)	Angka	97,12
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	Angka	5,22
	PDRB per-kapita (ADHK, Ribu Rp)	Rp	11.288
	Laju inflasi	Angka	2,00
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Indeks gini	Angka	0,280
Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Angka	17,71
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks desa membangun (IDM)	Angka	0,38
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	81,86
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, profesional dan responsif terhadap pelayanan publik	Indeks reformasi birokrasi	Angka	58,00 (CC)

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.6

Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	66,24	67,01	67,77	68,54	69,30
2	Prevalensi Stunting	Persen	19,40	16,90	14,40	11,90	9,40
3	Angka PMKS	Angka	19.089	18.589	18.059	17.589	17.089
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,84	65,88	65,93	65,97	66,02
5	Indeks Resiko Bencana	Angka	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,93	5,19	5,20	5,22	5,23
7	PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp)	Ribu Rp Per Pddk	10.125	10.497	10.885	11.288	11.706
8	Indeks Gini	Angka	0,289	0,286	0,283	0,280	0,276
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,47	18,88	18,30	17,71	17,12
10	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,601	0,613	0,625	0,38	0,650
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,36	81,36	81,75	81,86	82,16
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Predikat	50,10 (CC)	54,00 (CC)	56,00 (CC)	58,00 (CC)	60,10 (B)
13	Nilai SAKIP	Nilai	63,10 (B)	64,50 (B)	66,00 (B)	67,50 (B)	68,00 (B)
14	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

D. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana



Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 ada pada Lampiran.

E. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Manggarai tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/APBD-P) Tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang disajikan di sini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap mengikuti target yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dimaksud, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	68,54
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,93
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,91
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,49
Sasaran	2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	15
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Prevalensi Stunting	Persen	11,90
			6	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	68,88
			7	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100
Sasaran	4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	8	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,014



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,61
			10	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	4
Sasaran	6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	11	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	91,00
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	Angka PMKS		Angka	17.589
Sasaran	7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	12	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	4,09
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Angka	65,97
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	13	TPAK Perempuan	Angka	67,32
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	14	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	22,29
			15	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,015
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial		Angka	4
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	16	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	40,43
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	17	Angka konflik sosial	Angka	4
			Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)		Angka	97,12
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	18	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	19	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,22
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)		Ribu Rp per penduduk	11.288,00
Sasaran	14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	20	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	3,84
Sasaran	15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	21	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	3,84
Sasaran	16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	22	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	6,31
Sasaran	17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	23	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	5,68
Sasaran	18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	24	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	6,01
Sasaran	19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	25	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00
			26	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00
Sasaran	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	27	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	28	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	84,80
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	29	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	30	Rasio konektivitas	Angka	0,86
			31	Kinerja lalu lintas	Angka	59,37
			Laju Inflasi		Angka	2,00
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	32	Indeks ketahanan pangan	Angka	79,94
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	33	Indeks harga konsumen	Angka	117,34
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini		Angka	0,28
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	34	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	97,50
			35	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	65,00
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		Persen	17,71
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	36	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,33
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	37	Rasio rumah layak huni	Angka	93,75
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,927
			39	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00
Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	40	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	52,00
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)		Angka	0,638
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	41	Persentase status desa berkembang	Persen	59,65
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,86
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	42	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	72,00
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	43	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,87
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	44	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,82
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	45	Persentase sampah tertangani	Persen	27,68
			46	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	41,46
Tujuan	9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birkasi		Nilai / Predikat	58,00 (CC)



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	47	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)
			48	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)
			49	Opini BPK	Peringkat	WTP
			50	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Baik
			51	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Tinggi (1,459)
			52	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	53	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,80
			54	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,00 (Tinggi)
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	55	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
Sasaran 1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rp. 112.756.854.693,00	APBD-P 2025
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 105.793.613.938,00	APBD-P 2025
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 6.963.240.755,00	APBD-P 2025
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 0,00	APBD-P 2025
Sasaran 2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	Rp. 700.824.964,00	APBD-P 2025
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 664.760.064,00	APBD-P 2025
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 36.064.900,00	APBD-P 2025
Sasaran 3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rp. 78.569.175.084,00	APBD-P 2025
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 76.305.946.452,00	APBD-P 2025
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.688.069.732,00	APBD-P 2025
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 314.209.000,00	APBD-P 2025
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 260.949.900,00	APBD-P 2025
Sasaran 4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Rp. 6.746.153.850,00	APBD-P 2025
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 4.998.113.850,00	APBD-P 2025
11	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 0,00	APBD-P 2025
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.748.040.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Rp. 770.708.400,00	APBD-P 2025
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 252.860.000,00	APBD-P 2025
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 194.600.000,00	APBD-P 2025
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 323.248.400,00	APBD-P 2025
Sasaran 6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	Rp. 18.902.118.188,00	APBD-P 2025
16	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 219.060.000,00	APBD-P 2025



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
17	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 46.130.000,00	APBD-P 2025
18	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 18.636.928.188,00	APBD-P 2025
Sasaran 7 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Rp. 701.041.000,00	APBD-P 2025
19	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 16.121.000,00	APBD-P 2025
20	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 523.592.000,00	APBD-P 2025
21	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 96.332.000,00	APBD-P 2025
22	Program Penanganan Bencana	Rp. 64.996.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 8 Menurunnya ketimpangan gender		Rp. 136.485.000,00	APBD-P 2025
23	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 136.485.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 9 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Rp. 550.498.004,00	APBD-P 2025
24	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 135.768.168,00	APBD-P 2025
25	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 66.734.668,00	APBD-P 2025
26	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 333.725.168,00	APBD-P 2025
27	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 14.270.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 10 Meningkatnya ketertiban umum		Rp. 1.324.719.057,00	APBD-P 2025
28	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.324.719.057,00	APBD-P 2025
Sasaran 11 Menurunnya gangguan kohesivitas sosial		Rp. 1.244.864.200,00	APBD-P 2025
29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 268.094.000,00	APBD-P 2025
30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 219.334.500,00	APBD-P 2025
31	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 718.432.200,00	APBD-P 2025
32	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 9.053.000,00	APBD-P 2025
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 29.950.500,00	APBD-P 2025
Sasaran 12 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana		Rp. 573.329.939,00	APBD-P 2025
34	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 461.607.939,00	APBD-P 2025
35	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 111.722.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana		Rp. 477.005.000,00	APBD-P 2025
36	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 477.005.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 14 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian		Rp. 14.257.681.551,00	APBD-P 2025
37	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 934.517.239,00	APBD-P 2025
38	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 4.788.499.195,00	APBD-P 2025
39	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 175.586.900,00	APBD-P 2025
40	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 0,00	APBD-P 2025
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 7.794.328.244,00	APBD-P 2025



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
42	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 564.749.973,00	APBD-P 2025
Sasaran 15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Rp. 1.388.054.373,00	APBD-P 2025
43	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 323.784.314,00	APBD-P 2025
44	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.022.440.059,00	APBD-P 2025
45	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 41.830.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Rp. 676.240.439,00	APBD-P 2025
46	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 676.240.439,00	APBD-P 2025
Sasaran 17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Rp. 361.920.000,00	APBD-P 2025
47	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 62.780.000,00	APBD-P 2025
48	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 239.520.000,00	APBD-P 2025
49	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 59.620.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Rp. 184.721.878,00	APBD-P 2025
50	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 36.821.878,00	APBD-P 2025
51	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 119.130.000,00	APBD-P 2025
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 28.770.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Rp. 92.326.599,94	APBD-P 2025
53	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 2.348.000,00	APBD-P 2025
54	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 1.652.000,00	APBD-P 2025
55	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 36.863.000,00	APBD-P 2025
56	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 51.463.599,94	APBD-P 2025
Sasaran 20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Rp. 77.846.916.940,00	APBD-P 2025
57	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 77.846.916.940,00	APBD-P 2025
Sasaran 21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Rp. 2.790.633.826,00	APBD-P 2025
58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 2.790.633.826,00	APBD-P 2025
Sasaran 22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Rp. 3.083.280.000,00	APBD-P 2025
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 3.083.280.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	Rp. 845.102.404,00	APBD-P 2025
59	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 790.514.708,00	APBD-P 2025
60	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 54.587.696,00	APBD-P 2025
Sasaran 24	Meningkatnya ketahanan pangan	Rp. 35.093.100,00	APBD-P 2025
61	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 5.216.000,00	APBD-P 2025
62	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 20.359.100,00	APBD-P 2025
63	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 9.518.000,00	APBD-P 2025
64	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 0,00	APBD-P 2025
Sasaran 25		Rp. 39.870.939,00	APBD-P 2025
65	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 39.870.939,00	APBD-P 2025



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
Sasaran 26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Rp. 60.200.000,00	APBD-P 2025
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 0,00	APBD-P 2025
67	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 43.000.000,00	APBD-P 2025
68	Program Pengembangan UMKM	Rp. 4.780.000,00	APBD-P 2025
69	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 12.420.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 27	Menurunnya pengangguran	Rp. 995.550.239,00	APBD-P 2025
70	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 716.590.939,00	APBD-P 2025
71	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 20.712.300,00	APBD-P 2025
72	Program Hubungan Industrial	Rp. 258.247.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 28	Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni	Rp. 20.287.384.500,00	APBD-P 2025
73	Program Kawasan Permukiman	Rp. 9.600.000,00	APBD-P 2025
74	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 4.790.000,00	APBD-P 2025
75	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.246.528.500,00	APBD-P 2025
76	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 0,00	APBD-P 2025
77	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 9.536.014.000,00	APBD-P 2025
78	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 9.490.452.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Rp. 1.783.856.799,00	APBD-P 2025
79	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 301.300.000,00	APBD-P 2025
80	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 4.820.000,00	APBD-P 2025
81	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 1.218.652.049,00	APBD-P 2025
82	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 259.084.750,00	APBD-P 2025
Sasaran 30	Meningkatnya keberdayaan desa	Rp. 3.059.734.424,00	APBD-P 2025
83	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.774.671.076,00	APBD-P 2025
84	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 843.951.348,00	APBD-P 2025
85	Program Penataan Desa	Rp. 441.112.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 31	Meningkatnya kualitas air	Rp. 669.982.600,00	APBD-P 2025
86	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 179.347.000,00	APBD-P 2025
87	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 0,00	APBD-P 2025
88	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 51.315.600,00	APBD-P 2025
89	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 439.320.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 32	Meningkatnya kualitas udara	Rp. 0,00	APBD-P 2025
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	APBD-P 2025
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	APBD-P 2025



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
Sasaran	33 Meningkatnya kualitas tutupan lahan/vegetasi	Rp. 0,00	APBD-P 2025
90	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 0,00	APBD-P 2025
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	APBD-P 2025
Sasaran	34 Meningkatnya pengelolaan persampahan	Rp. 2.282.568.420,00	APBD-P 2025
91	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	APBD-P 2025
92	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 0,00	APBD-P 2025
93	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.247.057.420,00	APBD-P 2025
94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 35.511.000,00	APBD-P 2025
Sasaran	35 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Rp. 219.477.022.224,00	APBD-P 2025
95	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 889.457.700,00	APBD-P 2025
96	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 333.984.324,00	APBD-P 2025
97	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 159.887.000,00	APBD-P 2025
98	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 29.895.000,00	APBD-P 2025
99	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 1.474.022.386,00	APBD-P 2025
100	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 390.721.348,00	APBD-P 2025
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 10.953.110.000,00	APBD-P 2025
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 203.067.615.400,00	APBD-P 2025
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 765.541.878,00	APBD-P 2025
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 952.087.188,00	APBD-P 2025
105	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 459.825.000,00	APBD-P 2025
106	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 875.000,00	APBD-P 2025
Sasaran	36 Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Rp. 2.163.955.775,00	APBD-P 2025
107	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 569.292.375,00	APBD-P 2025
108	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 78.680.000,00	APBD-P 2025
109	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 3.980.000,00	APBD-P 2025
110	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.512.003.400,00	APBD-P 2025
Sasaran	37 Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rp. 6.983.117.527,00	APBD-P 2025
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 620.024.000,00	APBD-P 2025
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 285.545.000,00	APBD-P 2025
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.516.567.000,00	APBD-P 2025
114	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 237.500.000,00	APBD-P 2025
115	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 836.000,00	APBD-P 2025
116	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 21.583.939,00	APBD-P 2025
117	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 102.327.634,00	APBD-P 2025
118	Program Pencatatan Sipil	Rp. 111.689.454,00	APBD-P 2025
119	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 17.739.500,00	APBD-P 2025



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
120	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 69.305.000,00	APBD-P 2025
JUMLAH ANGGARAN PADA PROGRAM STRATEGIS		Rp. 582.818.991.936,94	APBD-P 2025
JUMLAH ANGGARAN PADA PROGRAM PENDUKUNG (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)		Rp. 712.429.415.696,06	APBD-P 2025
TOTAL ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2025		Rp. 1.295.248.407.633,00	APBD-P 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 merupakan pelaporan kinerja keempat dan/atau akhir periode RPJMD 2021-2026 ini, akan menyajikan pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 seperti yang telah diuraikan pada Bab II. Dalam Bab ini juga akan menyajikan uraian pengukuran kinerja, realisasi kinerja, perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan realisasi capaian kinerja nasional, provinsi atau kabupaten/kota se-Provinsi NTT bila indikatornya sama dan datanya tersedia. Selanjutnya akan menjelaskan program yang mendukung sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

CARA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$



2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

Table 3.1
Skala Kategori Peringkat Kinerja

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.</i>
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.</i>
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	<i>Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.</i>
$x \leq 60\%$	KURANG	<i>Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi / target.</i>

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sebagai berikut:



A.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1			2		3	4	5	6
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	68,54	70,10	102,28
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,93	8,17	103,03
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,91	13,74	98,78
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,49	76,91	136,15
	Rata-rata Sasaran 1						112,65	
	Predikat Kinerja						Istimewa	
Sasaran	2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	15	20,64	137,60
			Rata-rata Sasaran 2					137,60
	Predikat Kinerja						Istimewa	
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Prevalensi Stunting	Persen	11,90	13,17	89,34
			6	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	68,88	72,76	105,63
			7	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100	16,67	16,67
	Rata-rata Sasaran 3						61,15	
	Predikat Kinerja						Cukup	
Sasaran	4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	8	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,014	1,62	119,56
			Rata-rata Sasaran 4					119,16
	Predikat Kinerja						Istimewa	



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1			2		3	4	5	6
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,61	13,92	144,88
			10	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	4	0	0,00
	Rata-rata Sasaran 5							72,44
	Predikat Kinerja							Cukup
Sasaran	6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	11	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	91,00	91,06	100,07
	Rata-rata Sasaran 6							100,07
	Predikat Kinerja							Istimewa
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	Angka PMKS		Angka	17.589	11.256	136,01
Sasaran	7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	12	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	4,09	0,64	15,65
	Rata-rata Sasaran 7							15,65
	Predikat Kinerja							Kurang
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Angka	65,97	65,39	99,12
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	13	TPAK Perempuan	Angka	67,32	72,86	108,24
	Rata-rata Sasaran 8							108,24
	Predikat Kinerja							Istimewa
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	14	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	22,29	65,08	-91,95
			15	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,015	0,0344	-29,28
	Rata-rata Sasaran 9							-60,62
	Predikat Kinerja							Kurang
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial		Angka	4	3	125,00



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1			2		3	4	5	6
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	16	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	40,43	40,54	100,27
	Rata-rata Sasaran 10							100,27
	Predikat Kinerja							Istimewa
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	17	Angka konflik sosial	Angka	4	3	125,00
	Rata-rata Sasaran 11							125,00
	Predikat Kinerja							Istimewa
			Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)		Angka	97,12	241,90	-49,07
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	18	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)	0,34 (Rendah)	69,39
	Rata-rata Sasaran 12							69,39
	Predikat Kinerja							Cukup
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	19	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17	33,62	69,79
	Rata-rata Sasaran 13							69,79
	Predikat Kinerja							Cukup
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,22	5,09	97,51
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)		Ribu Rp per penduduk	11.288,00	10.502	93,04
Sasaran	14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	20	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	3,84	3,35	87,24
	Rata-rata Sasaran 14							87,24
	Predikat Kinerja							Baik
Sasaran	15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	21	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	3,84	3,35	87,24



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1			2		3	4	5	6
	Rata-rata Sasaran 15							87,24
	Predikat Kinerja							Baik
Sasaran	16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	22	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	6,31	11,96	189,54
	Rata-rata Sasaran 16							189,54
	Predikat Kinerja							Istimewa
Sasaran	17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	23	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	5,68	5,96	104,93
	Rata-rata Sasaran 17							104,93
	Predikat Kinerja							Istimewa
Sasaran	18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	24	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	6,01	12,53	208,49
	Rata-rata Sasaran 18							208,49
	Predikat Kinerja							Istimewa
Sasaran	19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	25	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00	58,99	1179,86
			26	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00	0,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 19							589,93
	Predikat Kinerja							Istimewa
Sasaran	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	27	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95	55,88	86,04
	Rata-rata Sasaran 20							86,06
	Predikat Kinerja							Baik
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	28	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	84,80	72,92	85,99
	Rata-rata Sasaran 21							85,99
	Predikat Kinerja							Baik



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1			2		3	4	5	6
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	29	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84	88,97	92,83
	Rata-rata Sasaran 22							92,83
	Predikat Kinerja							Baik
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	30	Rasio konektivitas	Angka	0,86	0,73	84,88
			31	Kinerja lalulintas	Angka	59,37	31,56	53,15
	Rata-rata Sasaran 23							69,02
	Predikat Kinerja							Cukup
			Laju Inflasi		Angka	2,00	1,74	113,00
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	32	Indeks ketahanan pangan	Angka	79,94	61,54	76,98
	Rata-rata Sasaran 24							76,98
	Predikat Kinerja							Cukup
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	33	Indeks harga konsumen	Angka	117,34	107,53	91,64
	Rata-rata Sasaran 25							91,64
	Predikat Kinerja							Baik
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini		Angka	0,28	0,230	117,86
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	34	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	97,50	76,19	78,14
			35	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	65,00	0,69	1,07
	Rata-rata Sasaran 26							39,61
	Predikat Kinerja							Kurang
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		Persen	17,71	18,10	97,80
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	36	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,33	1,56	132,84



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1			2		3	4	5	6
	Rata-rata Sasaran 27							132,84
	Predikat Kinerja							Istimewa
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	37	Rasio rumah layak huni	Angka	93,75	92,34	98,49
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,927	86,66	99,69
			39	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00	87,92	95,57
	Rata-rata Sasaran 28							97,92
	Predikat Kinerja							Baik
	Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	40	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	52,00	43,28
Rata-rata Sasaran 29							83,23	
Predikat Kinerja							Baik	
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)		Angka	0,638	0,6317	99,02
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	41	Persentase status desa berkembang	Persen	59,65	70,34	117,93
	Rata-rata Sasaran 30							117,93
	Predikat Kinerja							Istimewa
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,86	80,05	97,79
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	42	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	72,00	75,33	104,63
	Rata-rata Sasaran 31							104,63
	Predikat Kinerja							Istimewa
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	43	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,87	83,68	94,16
	Rata-rata Sasaran 32							94,16



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1			2		3	4	5	6
	Predikat Kinerja							Baik
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	44	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,82	81,43	94,88
	Rata-rata Sasaran 33							94,88
	Predikat Kinerja							Baik
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limba B3	45	Persentase sampah tertangani	Persen	27,68	13,067	47,21
			46	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	41,46	78,13	188,43
	Rata-rata Sasaran 34							117,82
	Predikat Kinerja							Istimewa
Tujuan	9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birkraasi		Nilai / Predikat	58,00 (CC)	68,03	117,29
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	47	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)	65,22	96,62
			48	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)	2,8113 (Sedang)	62,89
			49	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	100,00
			50	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Baik	Baik (62,5367)	100,00
			51	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Tinggi (1,459)	0,017	1,17
			52	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3	Level 2 (2,448)	81,60
	Rata-rata Sasaran 35							73,71
	Predikat Kinerja							Cukup
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	53	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,80	2,90	103,57



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1			2		3	4	5	6
			54	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,00 (Tinggi)	58,38 (Sangat Rendah)	72,07
		Rata-rata Sasaran 36						87,82
		Predikat Kinerja						Baik
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	55	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50	85,44	102,32
		Rata-rata Sasaran 37						102,31
		Predikat Kinerja						Istimewa
RATA-RATA SASARAN 1 S/D 37								106,71
PREDIKAT KINERJASASARAN								ISTIMEWA

Berdasarkan tabel Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

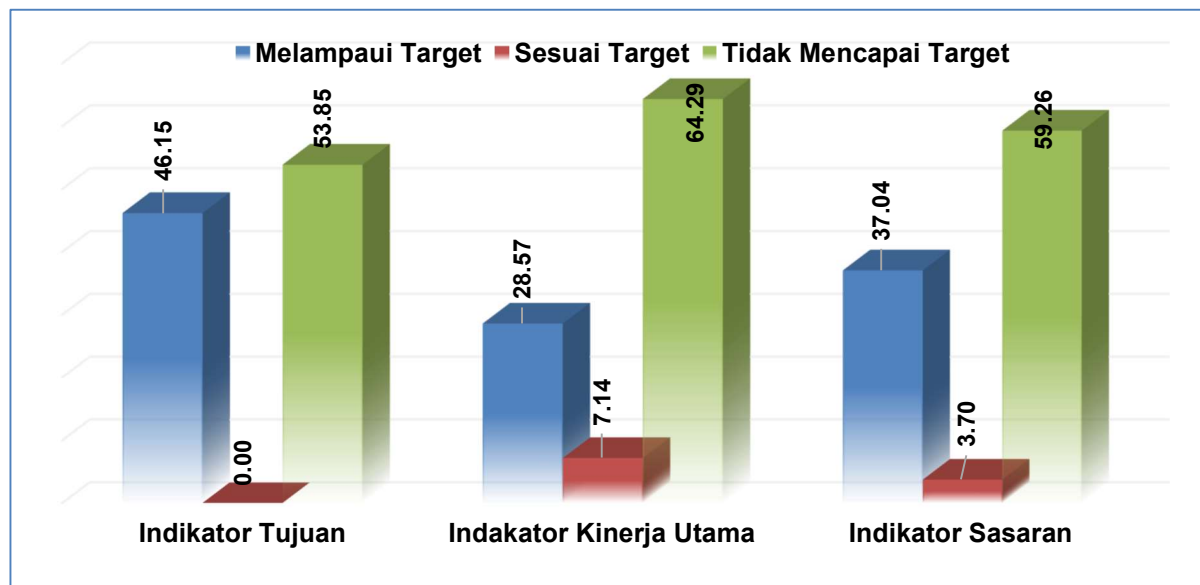
1. Rata-rata capaian kinerja dari 9 (sembilan) tujuan yang diukur menggunakan 13 indikator adalah **98,75%** predikat kinerja **BAIK**.
2. Rata-rata capaian dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari indikator tujuan sebanyak 11 indikator, indikator sasaran sebanyak 2 indikator dan indikator program sebanyak 1 indikator adalah **92,47%** predikat kinerja **BAIK**.
3. Rata-rata capaian kinerja dari 37 (tiga puluh tujuh) sasaran yang diukur menggunakan 54 indikator adalah **106,71%** predikat kinerja **ISTIMEWA**.



Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Indikator	Jumlah Indikator	Melampaui Target	Sesuai Target	Tidak Mencapai Target	% Melampaui Target	% Sesuai Target	% Tidak Mencapai Target	Keterangan
1	Tujuan	13	6	0	7	46,15	0,00	53,85	-
2	Indikator Kinerja Utama	14	4	1	9	28,57	7,14	64,29	-
3	Sasaran	54	20	2	32	37,04	3,70	59,26	-

Grafik 3.1
Persentase Pencapaian Indikator Kinerja
Tahun 2025





A.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya mengacu pada indikator tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1			2		3	4	5	6	7	8	9
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	67,77	69,35	102,33	68,54	70,10	102,28
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,82	7,91	101,15	7,93	8,17	103,03
			2	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,78	13,73	99,64	13,91	13,74	98,78
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,47	74,57	132,04	56,49	76,91	136,15
		Rata-rata Sasaran 1						110,94			112,65
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	2	Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	14,00	18,578	132,70	15	20,64	137,60
		Rata-rata Sasaran 2						132,70			137,60
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	99,25	68,51	72,44	68,88	72,76	105,63
			6	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100	16,67	16,67	100	16,67	16,67
		Rata-rata Sasaran 3						61,20			61,15
		Kategori						CUKUP			CUKUP



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1			2		3	4	5	6	7	8	9
Sasaran	4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	7	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,028	1,75	113,71	2,014	1,62	119,56
		Rata-rata Sasaran 4						113,71			119,56
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,47	14,58	153,99	9,61	13,92	144,88
			9	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	5	0	0,00	4	0	0,00
		Rata-rata Sasaran 5						77,00			72,44
		Kategori						CUKUP			CUKUP
Sasaran	6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	10	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	82,00	82,81	100,99	91,00	91,06	100,07
		Rata-rata Sasaran 6						100,99			100,07
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	Angka PMKS		Angka	18.059	5.351	170,37	17.589	11.256	136,01
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Angka	65,93	67,86	102,93	65,97	65,39	99,12
Sasaran	7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	11	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	3,10	0,30	9,56	4,09	0,64	15,65
		Rata-rata Sasaran 7						9,56			15,65
		Kategori						KURANG			KURANG
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	12	TPAK Perempuan	Angka	66,27	78,04	117,76	67,32	72,86	108,24
		Rata-rata Sasaran 8						117,76			108,24
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	23,34	42,03	19,93	22,29	65,08	-91,95
			14	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,016	0,0337	-10,49	0,015	0,0344	-29,28
		Rata-rata Sasaran 9						4,72			-60,62



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1			2		3	4	5	6	7	8	9
		Kategori						KURANG			KURANG
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial		Angka	4	1	175,00	4	3	125,00
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)		Angka	97,1	142,09	53,70	97,12	241,90	-49,07
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	15	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	28,79	30,28	105,18	40,43	40,54	100,27
		Rata-rata Sasaran 10						105,18			100,27
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	16	Angka konflik sosial	Angka	4	1	175,00	4	3	125,00
		Rata-rata Sasaran 11						175,00			125,00
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	17	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)	0,40 (Sedang)	81,63	0,49 (Sedang)	0,34 (Rendah)	69,39
		Rata-rata Sasaran 12						81,63			69,39
		Kategori						BAIK			CUKUP
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	18	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	41,36	33,34	80,61	48,17	33,62	69,79
		Rata-rata Sasaran 13						80,61			69,79
		Kategori						BAIK			CUKUP
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,2	3,93	75,58	5,22	5,09	97,51
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)		Ribu Rp per pddk	10.885	10.161	93,35	11.288	10.502	93,04
			Laju Inflasi		Angka	2,00	1,61	119,50	2,00	1,74	113,00
Sasaran	14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	19	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	3,85	0,95	28,61	3,84	3,35	87,24
		Rata-rata Sasaran 14						28,61			87,24
		Kategori						KURANG			BAIK



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1			2		3	4	5	6	7	8	9
Sasaran	15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	20	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	3,85	0,95	28,61	3,84	3,35	87,24
		Rata-rata Sasaran 15						28,61			87,24
		Kategori						KURANG			BAIK
Sasaran	16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	21	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	6,08	8,57	140,95	6,31	11,96	189,54
		Rata-rata Sasaran 16						140,95			189,54
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	22	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	5,63	14,35	254,88	5,68	5,96	104,93
		Rata-rata Sasaran 17						254,88			104,93
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	23	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	5,73	9,62	167,89	6,01	12,53	208,49
		Rata-rata Sasaran 18						167,89			208,49
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Sasaran	19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	24	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00	-15,01	-300,28	5,00	58,99	1179,86
			25	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
		Rata-rata Sasaran 19						-150,14			589,93
		Kategori						KURANG			ISTIMEWA
Sasaran	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	26	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	62,02	55,47	89,44	64,95	55,88	86,04
		Rata-rata Sasaran 20						89,44			86,04
		Kategori						BAIK			BAIK
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	27	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	81,70	72,82	89,13	84,80	72,92	85,99
		Rata-rata Sasaran 21						89,14			85,99
		Kategori						BAIK			BAIK



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1			2		3	4	5	6	7	8	9
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	28	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	91,13	87,94	96,50	95,84	88,97	92,83
		Rata-rata Sasaran 22						96,50			92,83
		Kategori						BAIK			BAIK
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	29	Rasio konektivitas	Angka	0,85	0,74	87,14	0,86	0,73297	85,23
			30	Kinerja lalu lintas	Angka	53,65	30,00	55,92	59,37	31,56	53,15
		Rata-rata Sasaran 23						71,53			69,19
		Kategori						CUKUP			CUKUP
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	31	Indeks ketahanan pangan	Angka	77,99	75,69	97,05	79,94	61,54	76,98
		Rata-rata Sasaran 24						97,05			76,98
		Kategori						BAIK			CUKUP
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	32	Indeks harga konsumen	Angka	115,04	105,34	91,57	117,34	107,53	91,64
		Rata-rata Sasaran 25						91,57			91,64
		Kategori						BAIK			BAIK
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini		Angka	0,283	0,29	97,53	0,280	0,230	117,86
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	33	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	95,00	28,05	29,53	97,50	76,19	78,14
			34	Persentase usaha mikro yang naik kelas mjd. kecil	Persen	60,00	0,42	0,70	65,00	0,69	1,07
		Rata-rata Sasaran 26						15,11			39,61
		Kategori						KURANG			KURANG
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		Persen	18,30	19,01	96,12	17,71	18,10	97,80
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	35	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,58	1,17	154,65	2,33	1,56	132,84
		Rata-rata Sasaran 27						154,65			132,84
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1			2		3	4	5	6	7	8	9
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	36	Rasio rumah layak huni	Angka	92,75	92,34	99,55	93,75	92,34	98,49
			37	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	83,98	83,80	99,78	86,927	86,66	99,69
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	91,00	86,08	94,59	92,00	87,92	95,57
		Rata-rata Sasaran 28						97,98			97,92
		Kategori						BAIK			BAIK
Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	39	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	32,00	36,06	112,69	52,00	43,28	83,23
								112,69			83,23
								ISTIMEWA			BAIK
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)		Angka	0,625	0,6421	102,74	0,638	0,6317	99,02
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	40	Persentase status desa berkembang	Persen	53,79	79,31	147,44	59,65	70,34	117,93
								147,44			117,93
								ISTIMEWA			ISTIMEWA
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,75	76,69	93,81	81,86	80,05	97,79
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	41	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	72,00	61,25	85,07	72,00	75,33	104,63
								85,07			104,63
								BAIK			ISTIMEWA
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	42	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,87	92,19	103,74	88,87	83,68	94,16
								103,74			94,16
								ISTIMEWA			BAIK
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	43	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,32	74,53	87,35	85,82	81,43	94,88



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1			2		3	4	5	6	7	8	9
		Rata-rata Sasaran 33						87,35			94,88
		Kategori						BAIK			BAIK
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limba B3	44	Persentase sampah ter-tangani	Persen	25,44	12,53	49,25	27,68	13,067	47,21
			45	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	36,35	76,47	210,37	41,46	78,13	188,43
		Rata-rata Sasaran 34						129,81			117,82
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Tujuan	9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai / Predikat	56,00 (CC)	67,66 (B)	120,82	58,00 (CC)	68,03 (B)	117,29
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	46	Nilai SAKIP	Angka	66,00 (B)	64,81 (B)	98,20	67,50 (B)	65,22 (B)	96,62
			47	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,21)	69,64	61,98	Sangat Tinggi (4,47)	2,8113 (Sedang)	62,89
			48	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
			49	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Baik	Baik	100,00	Baik Tinggi (1,459)	Baik (62,5367)	100,00
			50	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Sedang (1,373)	76,18	65,91	Tinggi (1,459)	0,017	1,17
			51	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3	Level 2 (Nilai 2,344)	78,13	Level 3	Level 2 (2,448)	81,60
		Rata-rata Sasaran 35						87,03			73,71
		Kategori						BAIK			CUKUP
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,60	2,90	111,54	2,80	2,90	103,57



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1			2		3	4	5	6	7	8	9
			53	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	78,00 (Sedang)	73,69 (Sedang)	94,47	81,00 (Tinggi)	58,38 (Sangat Rendah)	72,07
		Rata-rata Sasaran 36						103,01			87,82
		Kategori						ISTIMEWA			BAIK
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	54	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	86,28	104,59	83,50	85,44	102,32
		Rata-rata Sasaran 37						104,59			102,31
		Kategori						ISTIMEWA			ISTIMEWA
Rata-rata Sasaran 1 s/d 37								91,62			106,71
Kategori Kinerja Sasaran								BAIK			ISTIMEWA

Berdasarkan tabel perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja dari 9 (sembilan) tujuan yang diukur menggunakan 13 indikator pada tahun 2025 adalah 98,75%. Capaian ini turun sebesar 7,84% dari capaian tahun 2024 yang mencapai 106,59%.
2. Rata-rata capaian dari 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari indikator tujuan sebanyak 11 indikator, indikator sasaran sebanyak 2 indikator dan indikator program sebanyak 1 indikator pada tahun 2025 adalah 92,47%, turun sekitar 9,63% dari tahun 2024 yang mencapai 102,10%.
3. Rata-rata capaian kinerja dari 37 (tiga puluh tujuh) sasaran yang diukur menggunakan 54 indikator pada tahun 2025 adalah 106,71% naik sekitar 15,09% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 91,62%.



A.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau target akhir RPJMD 2021-2026 dengan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	68,54	69,30	70,10	102,28	101,15
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,93	8,04	8,17	103,03	101,62
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,91	14,03	13,74	98,78	97,93
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,47	56,52	74,57	132,04	131,93
	Rata-rata Sasaran 1							112,65	111,88	
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	15	15	20,64	137,60	137,60
	Rata-rata Sasaran 2								137,60	137,60
	Kategori								MEMUASKAN	MEMUASKAN
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	68,88	69,24	72,76	105,63	105,08
			6	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100,00	100,00	16,67	16,67	16,67
	Rata-rata Sasaran 3								61,15	60,88
	Kategori								CUKUP	CUKUP



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
Sasaran	4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	7	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,014	2,00	1,62	119,56	119,00
	Rata-rata Sasaran 4								119,56	119,00
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,61	9,75	13,92	144,88	142,80
			9	Peringkat pada event olahraga daerah (POFDA)	Angka	4	4	0	0,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 5								72,44	71,40
	Kategori								CUKUP	CUKUP
Sasaran	6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	10	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	91,00	100,00	91,06	100,07	91,06
	Rata-rata Sasaran 6								100,07	91,06
	Kategori								ISTIMEWA	BAIK
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	Angka PMKS		Angka	17.589	17.089	11.256	136,01	134,13
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Angka	65,97	66,02	65,39	99,12	99,05
Sasaran	7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	11	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	4,09	5,08	0,64	15,65	12,60
	Rata-rata Sasaran 7								15,65	12,60
	Kategori								KURANG	KURANG
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	12	TPAK Perempuan	Angka	67,32	68,37	72,86	108,24	106,57
	Rata-rata Sasaran 8								108,24	106,57
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	22,29	21,24	65,08	-91,95	-106,38
			14	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,015	0,014	0,0344	-29,28	-45,66



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
	Rata-rata Sasaran 9								-60,62	-76,02
	Kategori								KURANG	KURANG
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial		Angka	4	3	3	125,00	100,00
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)		Angka	97,12	97,12	241,90	-49,07	-49,07
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	15	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	40,43	67,87	40,54	100,27	59,73
	Rata-rata Sasaran 10								100,27	59,73
	Kategori								ISTIMEWA	KURANG
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	16	Angka konflik sosial	Angka	4	3	3	125,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 11								125,00	100,00
	Kategori								ISTIMEWA	BAIK
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	17	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)	0,49 (Sedang)	0,34 (Rendah)	69,39	69,39
	Rata-rata Sasaran 12								69,39	69,39
	Kategori								CUKUP	CUKUP
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	18	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17	58,60	33,62	69,79	57,37
	Rata-rata Sasaran 13								69,79	57,37
	Kategori								CUKUP	KURANG
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,22	5,23	5,09	97,51	97,32
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)		Ribu Rp per penduduk	11.288	11.706	10.502	93,04	89,71
			Laju Inflasi		Angka	2,00	2,00	1,74	113,00	113,00
Sasaran	14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	19	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	3,84	3,85	3,35	87,24	87,01



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
	Rata-rata Sasaran 14								87,24	87,01
	Kategori								BAIK	BAIK
	15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	20	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	3,84	3,85	3,35	87,24	87,01
	Rata-rata Sasaran 15								87,24	87,01
	Kategori								BAIK	BAIK
	16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	21	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	6,31	6,53	11,96	189,54	183,15
	Rata-rata Sasaran 16								189,54	183,15
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
	17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	22	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	5,68	5,72	5,96	104,93	104,20
	Rata-rata Sasaran 17								104,93	104,20
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
	18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	23	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	6,01	6,30	12,53	208,49	198,89
	Rata-rata Sasaran 18								208,49	198,89
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
	19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	24	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00	25,00	58,99	1179,86	235,97
			25	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 19								589,93	117,99
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	26	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95	67,88	55,88	86,04	82,32
	Rata-rata Sasaran 20								86,04	82,32
	Kategori								BAIK	BAIK



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	27	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	84,80	88,00	72,92	85,99	82,86
	Rata-rata Sasaran 21								85,99	82,86
	Kategori								BAIK	BAIK
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	28	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84	100,00	88,97	92,83	88,97
	Rata-rata Sasaran 22								92,83	88,97
	Kategori								BAIK	BAIK
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan per- hubungan	29	Rasio konektivitas	Angka	0,86	0,89	0,73297	85,23	82,36
			30	Kinerja lalu lintas	Angka	59,37	65,94	31,56	53,15	47,86
	Rata-rata Sasaran 23								69,19	65,11
	Kategori								CUKUP	CUKUP
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	31	Indeks ketahanan pangan	Angka	79,94	81,94	61,54	76,98	75,10
	Rata-rata Sasaran 24								76,98	75,10
	Kategori								CUKUP	CUKUP
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	32	Indeks harga konsumen	Angka	117,34	119,69	107,53	91,64	89,84
	Rata-rata Sasaran 25								91,64	89,84
	Kategori								BAIK	BAIK
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini		Angka	0,280	0,276	0,230	117,86	116,67
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	33	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	97,50	100,00	76,19	78,14	76,19
			34	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	65,00	70,00	0,69	1,07	0,99
	Rata-rata Sasaran 26								39,61	38,59
	Kategori								KURANG	KURANG
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		Persen	17,71	17,12	18,10	97,80	94,28
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	35	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,33	2,08	1,56	132,84	124,77



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
	Rata-rata Sasaran 27								132,84	124,77
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	36	Rasio rumah layak huni	Angka	93,75	94,75	92,34	98,49	97,45
			37	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,927	89,872	86,66	99,69	96,43
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00	93,00	87,92	95,57	94,54
	Rata-rata Sasaran 28								97,92	96,14
	Kategori								BAIK	BAIK
	Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	39	Persentase cakupan peman-faatan ruang yang terkendali	Persen	52,00	62,00	43,28	83,23
Rata-rata Sasaran 29								83,23	69,81	
Kategori								BAIK	CUKUP	
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)		Angka	0,638	0,650	0,6317	99,02	97,19
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	40	Persentase status desa berkembang	Persen	59,65	65,51	70,34	117,93	59,65
	Rata-rata Sasaran 30								117,93	107,38
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,86	82,16	80,05	97,79	97,43
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	41	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	72,00	72,50	75,33	104,63	103,90
	Rata-rata Sasaran 31								104,63	103,90
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	42	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,87	88,87	83,68	94,16	94,16
	Rata-rata Sasaran 32								94,16	94,16



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
	Kategori								BAIK	BAIK
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	43	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,82	86,32	81,43	94,88	94,34
	Rata-rata Sasaran 33								94,88	94,34
	Kategori								BAIK	BAIK
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	44	Persentase sampah tertangani	Persen	27,68	29,91	13,067	47,21	43,69
			45	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	41,46	46,57	78,13	188,43	167,76
	Rata-rata Sasaran 34								117,82	105,72
	Kategori								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Tujuan	9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai / Predikat	58,00 (CC)	60,10 (B)	68,03	117,29	113,19
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	46	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)	68,00 (B)	65,22	96,62	95,91
			47	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)	Sangat Tinggi (4,73)	2,8113 (Sedang)	62,89	59,44
			48	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
			49	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Baik	Baik	Baik (62,5367)	100,00	100,00
			50	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Tinggi (1,459)	Tinggi (1,587)	0,017	1,17	1,07
			51	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3	Level 3	Level 2 (2,448)	81,60	81,60
	Rata-rata Sasaran 35								73,71	73,00
	Kategori								CUKUP	CUKUP
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,80	3,00	2,90	103,57	96,67



SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
			53	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,00 (Tinggi)	83,00 (Tinggi)	58,38 (Sangat Rendah)	72,07	70,34
		Rata-rata Sasaran 36							87,82	83,50
		Kategori							BAIK	BAIK
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	54	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50	84,50	85,44	102,32	101,11
		Rata-rata Sasaran 37							102,32	101,11
		Kategori							ISTIMEWA	ISTIMEWA
RATA-RATA SASARAN 1 s/d 37									106,71	88,55
PREDIKAT KINERJA									ISTIMEWA	BAIK

Berdasarkan tabel perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026 tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rata-rata realisasi indikator kinerja dari 9 (sembilan) tujuan yang diukur menggunakan 13 indikator pada tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 95,78% Predikat Kinerja **BAIK**.
2. Rata-rata realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari indikator tujuan sebanyak 11 indikator, indikator sasaran sebanyak 2 indikator dan indikator program sebanyak 1 indikator pada tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 89,06% Predikat Kinerja **BAIK**.
3. Rata-rata realisasi indikator kinerja dari 37 (tiga puluh tujuh) sasaran yang diukur menggunakan 54 indikator pada tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 adalah 88,55% Predikat Kinerja **BAIK**.



B. URAIAN CAPAIAN KINERJA SESUAI FORM PENGUKURAN KINERJA

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

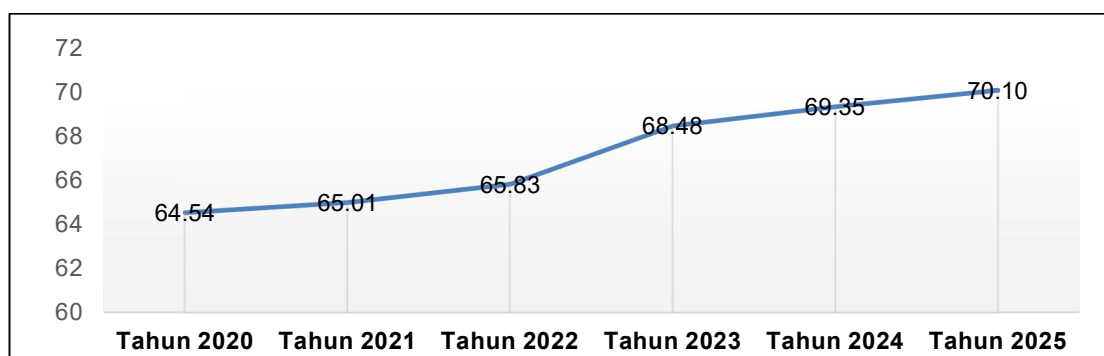
Target 68,54 → Realisasi 70,10 → Capaian Kinerja 102,28% → ISTIMEWA

Keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan menggunakan hasil pengukuran Badan Pusat Statistik yang berbasis pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yaitu :

1. Dimensi umur panjang dan sehat, menggunakan angka harapan hidup saat lahir.
2. Dimensi pengetahuan, menggunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan.

IPM Kabupaten Manggarai terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020-2024, status pembangunan manusia Kabupaten Manggarai berada di level “sedang”, sementara pada tahun 2025 berada pada level “tinggi” yaitu pada angka 70,10 atau meningkat 0,75 poin (1,08 %) dari IPM tahun 2024 yang mencapai 69,35. IPM 70,10 ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 68,54 dengan tingkat capaian kinerja 102,28 masuk dalam predikat kinerja ISTIMEWA.

Grafik 3.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Sumber : BPS_Manggarai Dalam Angka, 2026



Berdasarkan grafik tersebut di atas, capaian IPM Kabupaten Manggarai sejak tahun 2020 rata-rata tumbuh sebesar 0,93 persen setiap tahun.

Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Sama seperti tahun sebelumnya, seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2025 tumbuh 0,07 persen sementara pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,15 persen. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 3,29 persen dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,67 persen.

Indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) mengalami percepatan pertumbuhan yakni 0,44 persen dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,33 persen. Di sisi lain, Indikator pengeluaran riil per kapita juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 3,81 persen tahun 2024 menjadi 2,67 persen pada tahun 2025. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Rincian Tiga Dimensi Dasar penghitungan capaian IPM
Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Dimensi Dasar	Satuan	Tahun			
			2022	2023	2024	2025
1	Dimensi Kesehatan : Umur Harapan Hidup saat Lahir	Tahun	71,96	72,20	72,44	72,76
2	Dimensi Pendidikan :					
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,70	13,71	13,73	13,74
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,62	7,63	7,91	8,17
3	Dimensi hidup layak : Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah)	Rp.	7.580	7.903	8.204	8.423
Capaian IPM			67,83	68,48	69,35	70,10

Sumber : BPS_Provinis NTT Dalam Angka, 2026

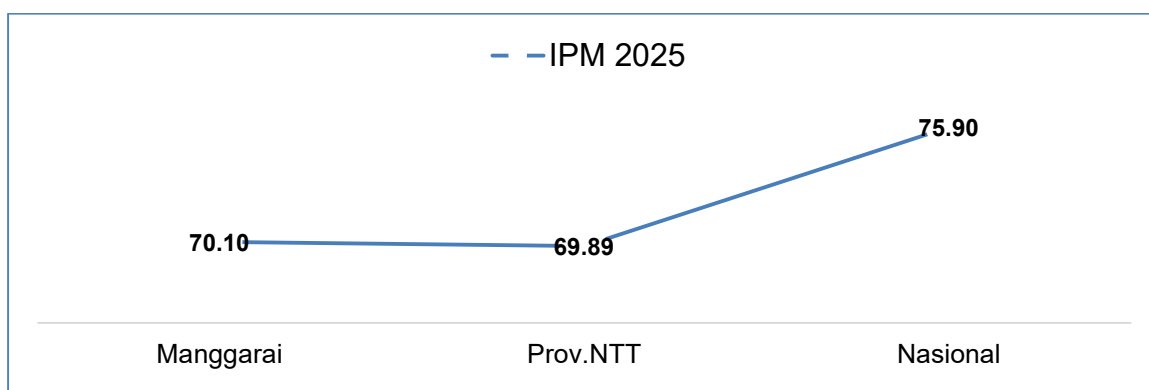
Tahun 2025 IPM Kabupaten Manggarai menempati peringkat tertinggi ke-8 dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT di bawah IPM Kota Kupang, Kabupaten Ende, Ngada, Sumba Timur, Sikka, Flores Timur dan Nagekeo, seperti yang tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	IPM	Kategori IPM	Ket.
1	Kota Kupang	83,65	Sangat Tinggi	IPM < 60 : IPM rendah 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi
2	Ende	72,73	Tinggi	
3	Ngada	72,53	Tinggi	
4	Sumba Timur	70,99	Tinggi	
5	Sikka	70,65	Tinggi	
6	Flores Timur	70,61	Tinggi	
7	Nagekeo	70,48	Tinggi	
8	Manggarai	70,10	Tinggi	
9	Lembata	69,70	Sedang	
10	Manggarai Barat	69,20	Sedang	
11	Kupang	69,03	Sedang	
12	Belu	68,89	Sedang	
13	Sumba Barat	68,46	Sedang	
14	Alor	68,44	Sedang	
15	Timor Tengah Utara	67,87	Sedang	
16	Rote Ndao	67,01	Sedang	
17	Timor Tengah Selatan	66,88	Sedang	
18	Manggarai Timur	66,63	Sedang	
19	Malaka	65,84	Sedang	
20	Sumba Tengah	65,29	Sedang	
21	Sumba Barat Daya	64,82	Sedang	
22	Sabu Raijua	62,74	Sedang	
23	Provinsi NTT	69,89	Sedang	
24	Nasional	75,90	Tinggi	

Grafik 3.3
IPM Kabupaten Manggarai
dan Perbandingan dengan Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2025



Sumber : BPS_Provinsi NTT Dalam Angka, 2026



Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Manggarai sedikit lebih baik dari IPM Provinsi NTT namun jauh di bawah IPM Nasional.

Faktor yang mendukung capaian kinerja IPM Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 dipengaruhi oleh keberhasilan 3 (tiga) dimensi utama yang saling berkaitan yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.

a. Pada Dimensi Pendidikan

Pada dimensi pendidikan dilihat dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang setiap tahun menunjukkan peningkatan.

b. Dimensi Kesehatan

Pada dimensi kesehatan dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup. AHH Kabupaten Manggarai terus menunjukkan tren yang positif dari 71,96 tahun 2022 menjadi 72,76 pada tahun 2025.

c. Pada Dimensi Hidup Layak

Dimensi hidup layak dilihat dari Pengeluaran Riil Perkapita (Ribuan Rupiah). Pengeluaran riil perkapita Kabupaten Manggarai juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari Rp7.580 tahun 2022 menjadi Rp8.423 tahun 2025.

Hambatan yang dihadapi:

- a. Kesenjangan akses pendidikan dimana masih adanya perbedaan kualitas dan kesempatan pendidikan antarwilayah (desa-kota) serta keterbatasan sarana pendidikan pada wilayah-wilayah tertentu.
- b. Layanan kesehatan seperti kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis yang tidak merata, serta akses yang sulit ke wilayah terpencil.
- c. Kemiskinan dan rendahnya pendapatan dimana tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi sehingga memaksa masyarakat memprioritaskan kebutuhan primer (pangan) daripada pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada rendahnya pengeluaran riil per kapita.
- d. Terbatasnya lapangan kerja produktif menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat, yang secara langsung menghambat komponen standar hidup layak.
- e. Kurangnya aksesibilitas fisik, sarana listrik, dan komunikasi di beberapa wilayah desa yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.



- f. Letak geografis yang sulit dijangkau menyebabkan lambatnya pembangunan infrastruktur dan distribusi layanan publik.

Strategi yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi hambatan:

1. Menyelenggarakan Program Pengelolaan Pendidikan dalam rangka menjaga angka HLS agar tidak turun, melalui kegiatan yang secara langsung beririsan dengan upaya mempertahankan HLS yaitu Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar dan Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik yang sedang menempuh pendidikan jenjang SD dan SMP sederajat tidak berhenti atau putus sekolah.
2. Menyelenggarakan monitoring peningkatan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan (Dapodik) dan meningkatkan kerja sama internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun lintas sektor dengan Dinas Sosial sebagai pemilik database kemiskinan.
3. Pembangunan infrastruktur sekolah dan perpustakaan/taman bacaan di pedesaan.
4. Memperbaiki infrastruktur dasar seperti puskesmas dan fasilitas sanitasi (MCK).
5. Pelaksanaan program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan peningkatan gizi untuk menurunkan angka stunting.
6. Pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
7. Koordinasi antar lembaga (Pemerintah, PKK, dan masyarakat) untuk percepatan intervensi di lapangan..
8. Menjaga iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pencapaian tujuan **MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA**, didukung oleh 6 (enam) sasaran pembangunan, yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatkan Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan
Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)
Indikator Rata-rata Nilai Ujian



No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,93	8,17	103,03
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,91	13,74	98,78
3	Rata-rata Nilai Ujian	Nilai	56,49	76,91	136,15
Rata-rata					112,65
Predikat Kinerja					Istimewa

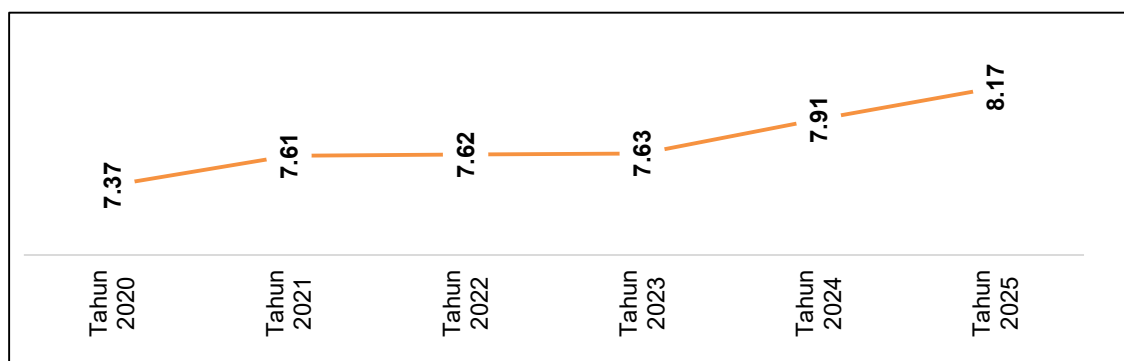
Sasaran *Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan* diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan rata-rata capaian dari ke-3 indikator sasaran tersebut adalah 112,65%, predikat kinerja **ISTIMEWA**.

Indikator Rata-rata lama sekolah (RLS), Target 7,93→Realisasi 8,17→Capaian 103,03% → Predikat Istimewa

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

RLS Penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2025 meningkat dari 7,91 tahun 2024 menjadi 8,17 pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Manggarai menempuh pendidikan setara **kelas VIII atau II SMP** (belum menamatkan SMP sepenuhnya).

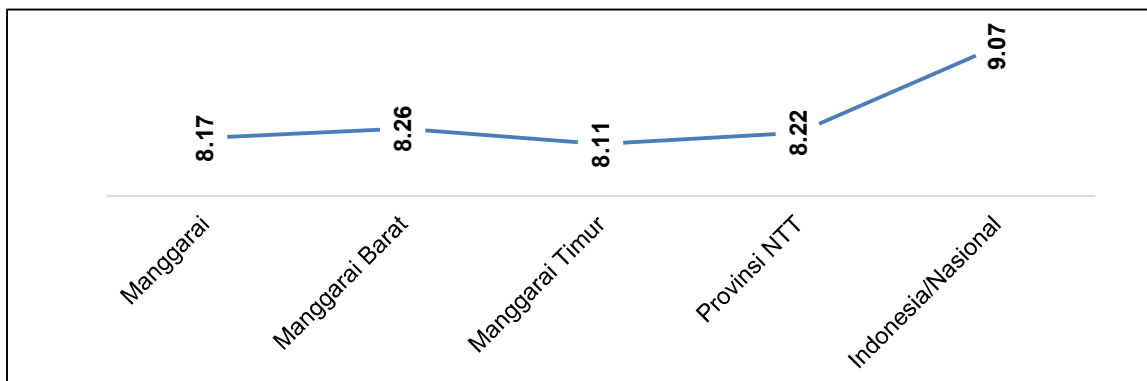
Grafik 3.4
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



RLS Kabupaten Manggarai, sesuai grafik tersebut di atas terus menunjukkan peningkatan dari 7,37 tahun 2020 menjadi 8,17 pada tahun 2025.



Grafik 3.5
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai
dengan Kabupaten Terdekat, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2025



Sumber : Provinsi NTT Dalam Angka, 2026

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa RLS Kabupaten Manggarai tahun 2025, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan RLS Kabupaten Manggarai Timur, namun masih berada di bawah RLS Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dan Nasional.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2025 sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	RLS	Keterangan
1	Kota Kupang	11,66	Peringkat 1
2	Ngada	8,84	Peringkat 2
3	Alor	8,72	Peringkat 3
4	Ende	8,52	Peringkat 4
5	Lembata	8,49	Peringkat 5
6	Nagekeo	8,47	Peringkat 6
7	Timor Tengah Utara	8,36	Peringkat 7
8	Manggarai Barat	8,26	Peringkat 8
9	Flores Timur	8,19	Peringkat 9
10	Manggarai	8,17	Peringkat 10
11	Manggarai Timur	8,11	Peringkat 11
12	Sumba Timur	7,94	Peringkat 12
13	Kupang	7,87	Peringkat 13
14	Rote Ndao	7,84	Peringkat 14
15	Belu	7,73	Peringkat 15
16	Sumba Tengah	7,50	Peringkat 16
17	Timor Tengah Selatan	7,43	Peringkat 17
18	Sumba Barat	7,39	Peringkat 18



No	Kabupaten/Kota	RLS	Keterangan
19	Malaka	7,38	Peringkat 19
20	Sikka	7,20	Peringkat 20
21	Sabu Raijua	7,10	Peringkat 21
22	Sumba Barat Daya	6,47	Peringkat 22
Provinsi NTT		8,22	

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025

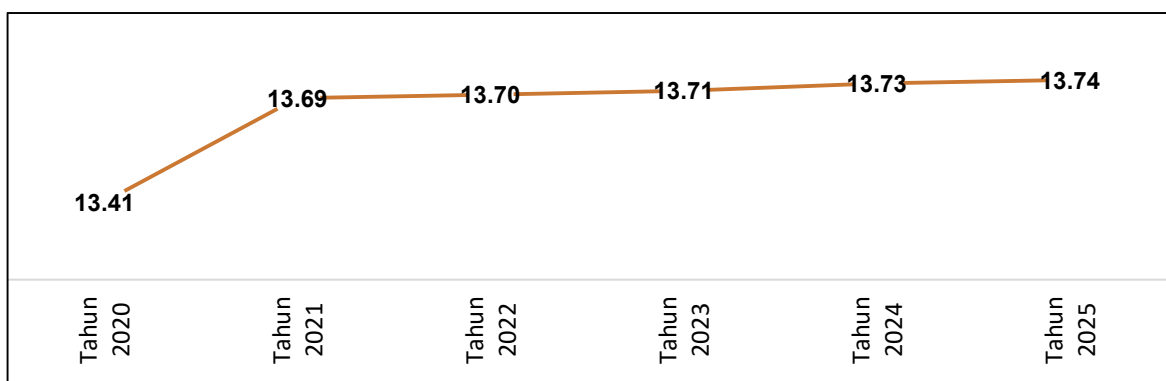
RLS Kabupaten Manggarai tahun 2025 berada pada peringkat ke-10 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), Target 13,91→Realisasi 13,74→Capaian 98,79%
Predikat Kinerja Istimewa

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

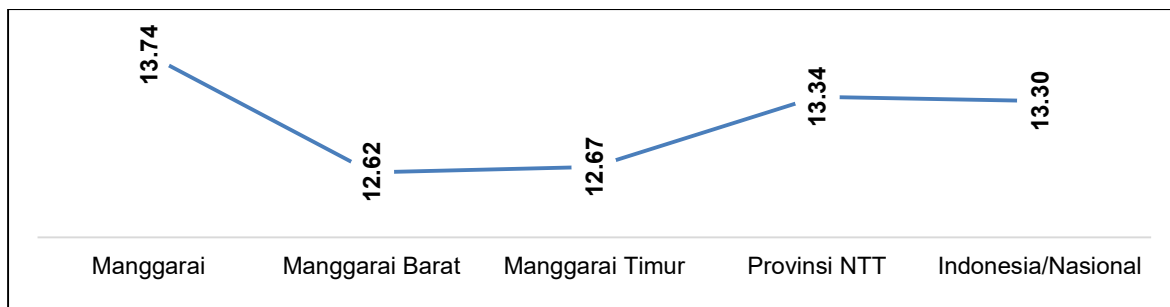
HLS penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang dirilis BPS Kabupaten Manggarai tahun 2026 adalah 13,74 meningkat 0,01 dari HLS penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2024 sebesar 13,73 tahun. Realisasi ini menunjukkan bahwa minimal pendidikan anak di Kabupaten Manggarai setara dengan Diploma 2.

Grafik 3.6
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025





Grafik 3.7
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai
dengan Kabupaten Terdekat, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2025



Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa HLS Kabupaten Manggarai tahun 2025, berada di atas HLS Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT dan Nasional.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2025 sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	HLS	Keterangan
1	Kota Kupang	16,55	Peringkat 1
2	Kupang	13,91	Peringkat 2
3	Ende	13,84	Peringkat 3
4	Manggarai	13,74	Peringkat 4
5	Sikka	13,68	Peringkat 5
6	Sumba Barat	13,41	Peringkat 6
7	Timor Tengah Utara	13,39	Peringkat 7
8	Rote Ndao	13,24	Peringkat 8
9	Sabu Raijua	13,20	Peringkat 9
10	Flores Timur	13,17	Peringkat 10
11	Sumba Tengah	13,15	Peringkat 11
12	Sumba Barat Daya	13,12	Peringkat 12
13	Sumba Timur	12,88	Peringkat 13
14	Malaka	12,84	Peringkat 14
15	Ngada	12,76	Peringkat 15
16	Nagekeo	12,74	Peringkat 16
17	Manggarai Timur	12,67	Peringkat 17
18	Timor Tengah Selatan	12,63	Peringkat 18
19	Manggarai Barat	12,62	Peringkat 19
20	Alor	12,59	Peringkat 20
21	Lembata	12,54	Peringkat 21
22	Belu	12,33	Peringkat 22
Provinsi NTT		13,34	

Sumber : BPS_ Provinsi NTT Dalam Angka, 2026



HLS Kabupaten Manggarai tahun 2025 berada pada peringkat ke-4 dari 22 kabupaten/kota se-Pronvinsi Nusa Tenggara Timur.

Keberhasilan Peningkatan **Rata-rata Lama sekolah (RLS)** dan **Harapan Lama Sekolah (HLS)** adalah adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal dimana salah satu solusi atau upayanya adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan melalui:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar maupun pendidikan nonformal/kesetaraan.
2. Pemberian bantuan kepada siswa-siswi baik pada satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal/kesetaraan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
3. Pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan untuk melayani penduduk di luar usia sekolah yang ingin menyelesaikan pendidikannya baik pada jenjang Paket A setara SD dan Paket B Setara SMP.

Indikator Rata-rata Nilai Ujian, Target 56,49→Realisasi 76,91→Capaian 136,15% Predikat Kinerja Istimewa

Tabel 3.8
Rata-rata Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan
Tahun Pelajaran 2021/2022-2024/2025

No	Jenjang Pendidikan	Mata Pelajaran				Rata-rata
		Bindo	Bing	Matematika	IPA	
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2022						
1	SD/MI	72,94	-	69,56	72,05	71,52
2	SMP/MTs	77,29	75,35	74,02	74,97	75,41
Rata-rata Nilai Ujian Tahun 2022						73,47
Tahun 2023						
1	SD/MI	74,20	-	71,19	73,35	72,91
2	SMP/MTs	76,36	74,47	73,29	74,11	74,56
Rata-rata Nilai Ujian Tahun 2023						73,74
Tahun 2024						
1	SD/MI	75,80	-	72,65	75,25	74,57
2	SMP/MTs	76,36	74,47	73,29	74,11	74,56
Rata-rata Nilai Ujian Tahun 2024						74,57
Tahun 2025						
1	SD/MI	79,84	-	76,23	75,46	77,18
2	SMP/MTs	78,21	76,80	75,07	76,46	76,64
Rata-rata Nilai Ujian Tahun 2025						76,91

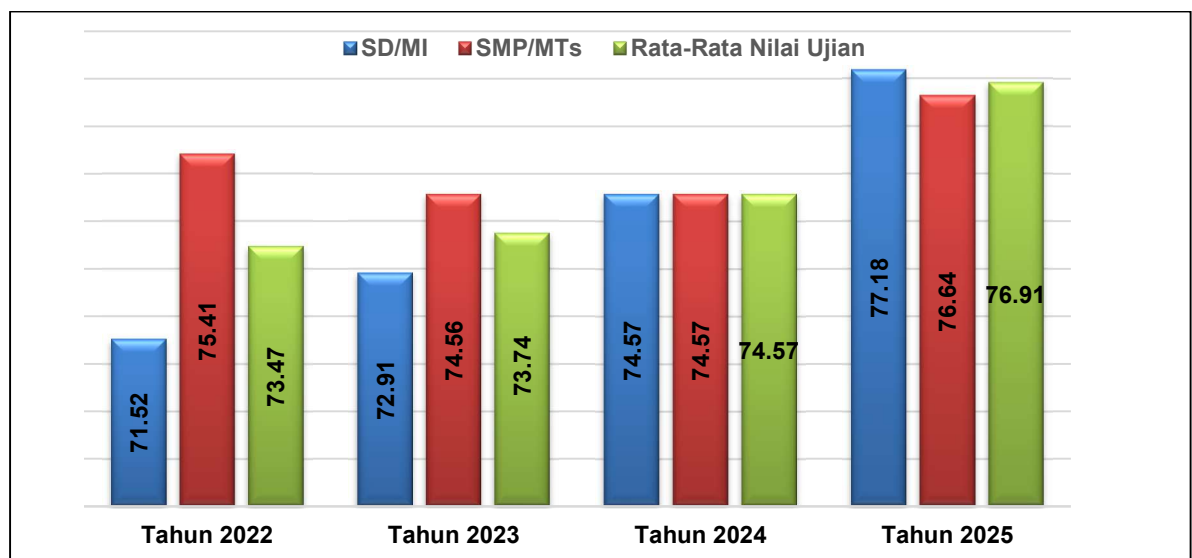
Sumber : Dinas PPO, 2025



Rata-rata Nilai Ujian, untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarau tahun 2025 adalah 76,91 dari target 56,49 dengan tingkat capaian kinerja 136,15% predikat kinerja ISTIMEWA. Realisasi 76,91 diperoleh dari rata-rata nilai ujian jenjang Pendidikan SD/MI untuk 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dengan rata-rata nilai mencapai 77,18 dan untuk jenjang Pendidikan SMP/MTS mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA memperoleh nilai rata-rata sebesar 76,64.

Sementara untuk tahun 2024, **Rata-rata Nilai Ujian**, untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai tahun 2024 adalah 74,57 dari target 56,47 dengan tingkat capaian 132,04% kategori kinerja **Istimewa**. Realisasi 74,57 diperoleh dari rata-rata nilai ujian jenjang Pendidikan SD/MI untuk 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dengan rata-rata nilai mencapai 74,57 dan untuk jenjang Pendidikan SMP/MTS mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA memperoleh nilai rata-rata sebesar 74,56.

Grafik 3.8
Nilai Ujian per Jenjang Pendidikan
Tahun 2022-2025



Rata-rata nilai nilai ujian jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Manggarai setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Meningkatnya rata-rata nilai ujian siswa dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (dalam diri siswa) dan faktor eksternal (lingkungan).



- **Faktor Internal** seperti banyaknya latihan soal, terutama simulasi ujian (tryout), memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan nilai ujian; konsistensi dalam belajar dan waktu yang dialokasikan untuk mempelajari kembali materi di rumah berpengaruh positif terhadap hasil; dan pemahaman siswa terhadap gaya belajar mereka sendiri dapat mengoptimalkan penyerapan materi.
- **Faktor Eksternal** seperti variasi gaya mengajar guru dan metode pengajaran yang interaktif mempermudah pemahaman siswa; dukungan orang tua, baik secara emosional maupun fasilitas belajar, sangat berpengaruh pada pencapaian akademik; partisipasi dalam bimbingan belajar tambahan membantu siswa memahami topik sulit dan strategi menjawab soal; dan Kondisi sekolah yang kondusif, sarana prasarana yang memadai, serta budaya kompetisi yang sehat di antara teman sebaya.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan/mempertahankan rata-rata nilai ujian, antara lain:

1. Siswa kurang memiliki motivasi yang diperparah dengan kebiasaan bermain anak-anak yang berlebihan.
2. Pembelajaran sering kali lebih mengutamakan hafalan daripada pemahaman konsep yang mendalam.
3. Metode pengajaran yang pasif membuat siswa kurang terlibat dan kurang dirangsang untuk berpikir kritis.
4. Kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan siswa atau zaman.
5. Siswa jarang melakukan latihan soal yang bervariasi, termasuk soal-soal tingkat lanjut.
6. Sarana dan prasarana yang tidak merata, terutama di daerah terpencil (sekolah rusak, ketiadaan teknologi, internet lambat).
7. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dan lingkungan pertemanan yang buruk.

Strategi untuk meningkatkan rata-rata nilai ujian secara umum antara lain kombinasi latihan rutin (simulasi/try out) untuk mengenali pola soal, perbaikan waktu belajar dan saat pengerjaan soal, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Selain itu, fokus pada materi yang belum dipahami dan penggunaan metode belajar yang aktif (seperti mengajar orang lain atau membuat ringkasan) terbukti efektif.



Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan" tidak lepas dari upaya konsistensi, kolaboratif dan terus berinovasi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pada bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Manggarai akan terus berupaya memastikan kualitas dan akses pelayanan bidang pendidikan bagi anak-anak Manggarai tetap terjamin.

Sasaran "**Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan**" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	105.793.613.938,00	75.223.315.286,00	71,10
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.963.240.755,00	6.798.679.462,00	97,64
3	Program Pengembangan Kurikulum	0,00	0,00	0,00
Total Anggaran		112.756.854.693,00	82.021.994.748,00	72,74

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akses, Kualitas dan Daya Saing Pendidikan** sebesar Rp112.756.854.693,00 realisasi 82.021.994.748,00 atau 72,74%.

Sasaran 2 : **Meningkatnya Literasi/Minat Baca Masyarakat**

Indikator **Indeks Literasi Masyarakat / Indeks Minat Baca**

Target 15 → Realisasi 20,64899 → Capaian Kinerja 137,60% → Istimewa

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah instrumen pengukuran tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. IPLM adalah upaya formulasi kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan semua jenis Perpustakaan berdasarkan pada





Standar Nasional Perpustakaan. Perumusan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat melibatkan dua unsur/aspek utama yaitu:

1. Aspek Masyarakat (AM) : jumlah penduduk wilayah setempat sesuai data BPS dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan dan Kearsipan berSNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. kegunaannya untuk :
 - a. Mengetahui Pemerataan Layanan Perpustakaan;
 - b. Mengetahui Ketercukupan Koleksi Perpustakaan;
 - c. Mengetahui SDM/Tenaga Perpustakaan;
 - d. Mengetahui Pengunjung semua jenis perpustakaan;
 - e. Mengetahui kondisi Perpustakaan Ber-SNP;
 - f. Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan; dan
 - g. Mengetahui jumlah Anggota Perpustakaan.

Formulasi Perhitungan IPLM adalah:

$$\text{IPLM} = \frac{\text{Jlh. seluruh variabel komponen Pembentuk UPLM}}{\text{Jlh. Populai (AM) sesuai segmentasi atau jenis perputakaan}} \times 100$$

Variabel komponen:

UPLM1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan;

UPLM2 = Ketercukupan Koleksi;

UPLM3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dan Kearsipan;

UPLM4 = Tingkat Kunjungan Masyarakat Perhari;

UPLM5 = Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Kearsipan (SNP);

UPLM6 = Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi;

UPLM7 = Jumlah Anggota Perpustakaan.

Hasil perhitungan dari ke-7 unsur dalam pembangunan literasi masyarakat tahun 2025 sebagai berikut:



No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Ket.
Tahun 2022			
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,00110	
2	Ketercukupan koleksi	0,169258	
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,002139	
4	Tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,0001	
5	Jumlah perpustakaan ber-SNP	-	
6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi / promosi	0,0072	
7	Anggota perpustakaan	0,0048	
Jumlah		0,18456 x 100	
Indikator Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca		18,445	
Tahun 2023			
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,0010787	
2	Ketercukupan koleksi	0,1667605	
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,0020945	
4	Tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,0001648	
5	Jumlah perpustakaan ber-SNP	0,0000	
6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi / promosi	0,0134240	
7	Anggota perpustakaan	0,0046594	
Jumlah		0,188181 x 100	
Indikator Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca		18,81819	
Tahun 2024			
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,0010509	
2	Ketercukupan koleksi	0,1626761	
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,0020405	
4	Tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,0001839	
5	Jumlah perpustakaan ber-SNP	0,0000	
6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi / promosi	0,0152937	
7	Anggota perpustakaan	0,0045393	
Jumlah		0,185784 x 100	
Indikator Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca		18,57844	
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,0010109	
2	Ketercukupan koleksi	0,157	
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,00197	
4	Tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,000239	
5	Jumlah perpustakaan ber-SNP	0,0000	
6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi / promosi	0,0419	
7	Anggota perpustakaan	0,00437	
Jumlah		0,20649 x 100	
Indikator Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca		20,64899	

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025



Indeks Literasi Masyarakat tahun 2025 sesuai tabel tersebut di atas yang bersumber data perhitungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai mencapai angka 20,64899 dari target 15 seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dan Perjanjian Keinerja Perubahan Tahun 2025 dengan tingkat capaian kinerja 137,60% predikat kinerja ISTIMEWA. Capaian tahun 2025 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai angka 18,57844 dari target 14 dengan tingkat capaian kinerja 132,70% predikat kinerja ISTIMEWA.



Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks literasi masyarakat/indeks minat baca antara lain:

→ Melakukan pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Anggota Perpustakaan.

Sasaran “**Meningkatnya Literasi/Minat Baca Masyarakat**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pembinaan Perpustakaan	664.760.064,00	597.974.672,00	89,95
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	36.064.900,00	32.450.000,00	89,98
Total Anggaran		700.824.964,00	630.424.672,00	89,95

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Literasi/Minat Baca Masyarakat** sebesar Rp700.824.964,00 realisasi Rp630.424.672,00 atau 89,95%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
Indikator Angka Harapan Hidup (AHH)					
Indikator Persentase Kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI					

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka Harapan Hidup	Angka	68,88	72,76	105,63



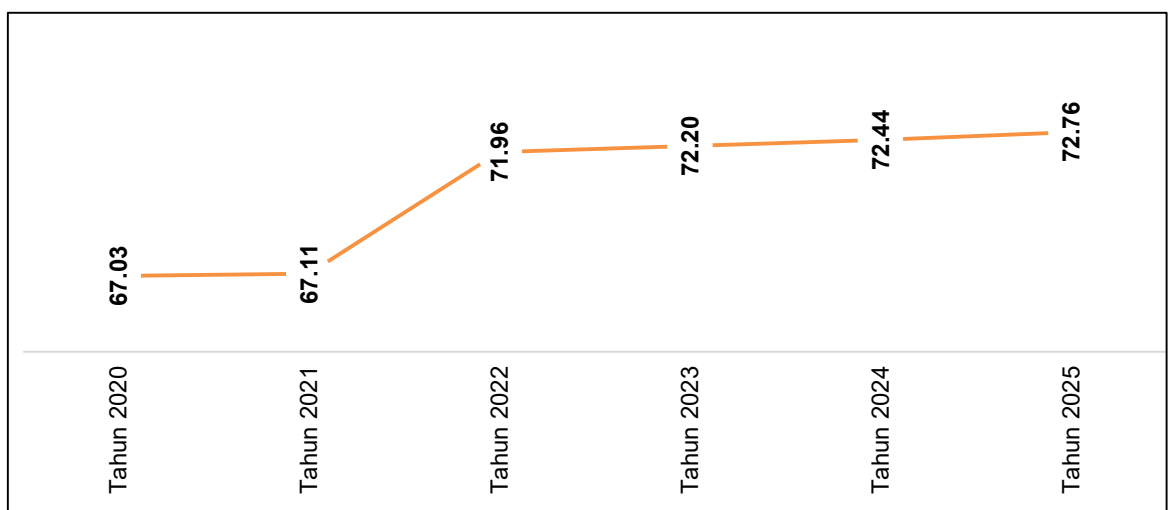
No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Persentase Kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 Pilar STBM GESI	Persen	100,00	16,67	16,67
Rata-rata					61,15
Kategori					CUKUP

Indikator Angka Harapan Hidup

Target 68,88 → Realisasi 72,76 → Capaian Kinerja 105,63% → ISTIMEWA

Usia Harapan Hidup (UHH) atau juga sering disebut Angka Harapan Hidup adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh seseorang/penduduk. Sesuai Data MDA yang dirilis BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2026, Angka Harapan Hidup Kabupaten Manggarai selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 67,03 tahun 2020 menjadi 72,76 di tahun 2025. UHH 72,76 tahun 2025 ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 68,88 dengan tingkat capaian kinerja 105,63 termasuk dalam predikat kinerja **Istimewa**. Peningkatan Angka Harapan Hidup tersebut menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai.

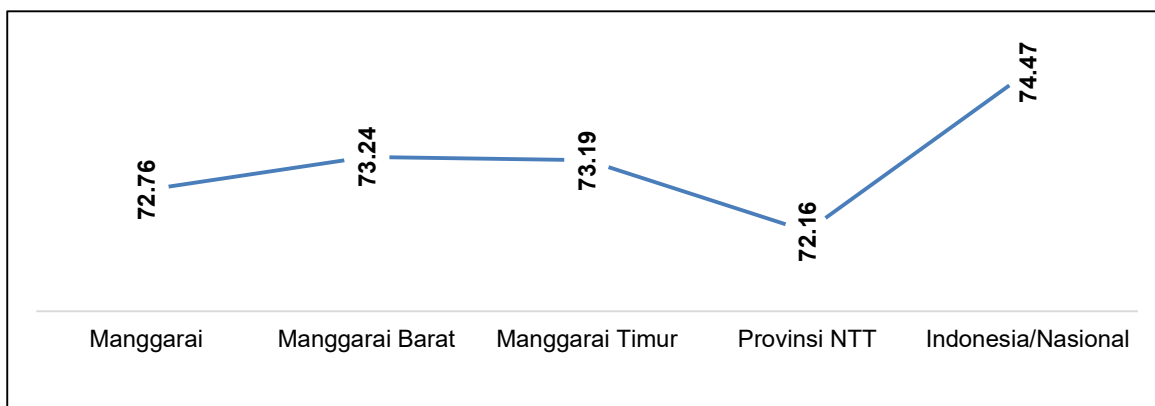
Grafik 3.9
Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Sumber : BPS_Manggarai Dalam Angka 2026



Grafik 3.10
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai
Dengan Kabupaten Terdekat, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2025



Sumber : BPS_Pronvinsi NTT Dalam Angka, 2026

Berdasarkan grafik tersebut di atas, Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mencapai 72,76 tahun, masih berada di bawah rata-rata Umur Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat 73,24 tahun dan Kabupaten Manggarai Timur 73,19 tahun dan nasional 74,47 namun berada di atas UHH Provinsi NTT 72,16 tahun pada tahun yang sama.

Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2025 sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	UHH	Keterangan
1	Kota Kupang	75,38	Peringkat 1
2	Ngada	74,89	Peringkat 2
3	Belu	74,77	Peringkat 3
4	Sikka	74,64	Peringkat 4
5	Flores Timur	74,37	Peringkat 5
6	Lembata	73,81	Peringkat 6
7	Manggarai Barat	73,24	Peringkat 7
8	Manggarai Timur	73,19	Peringkat 8
9	Ende	73,06	Peringkat 9
10	Nagekeo	72,89	Peringkat 10
11	Manggarai	72,76	Peringkat 11
12	Sumba Timur	71,91	Peringkat 12
13	Malaka	71,72	Peringkat 13
14	Sumba Barat	71,63	Peringkat 14
15	Timor Tengah Selatan	71,47	Peringkat 15
16	Timor Tengah Utara	71,39	Peringkat 16
17	Alor	71,33	Peringkat 17
18	Rote Ndao	70,17	Peringkat 18



No	Kabupaten/Kota	UHH	Keterangan
19	Kupang	69,91	Peringkat 19
20	Sumba Tengah	69,77	Peringkat 20
21	Sumba Barat Daya	69,46	Peringkat 21
22	Sabu Raijua	66,88	Peringkat 22
Provinsi NTT		72,26	

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025

UHH Kabupaten Manggarai tahun 2025 berada pada peringkat ke-11 dari 22 kabupaten/kota se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Faktor pendorong keberhasilan:

1. Kemudahan masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit). Sampai dengan tahun 2025, Kabupaten Manggarai telah memiliki 3 (tiga) RS yaitu RSUD Ruteng, RSP Reo dan RS St. Rafael Cancar (milik Swasta) serta 25 Puskesmas yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai.
2. Program imunisasi dan deteksi penyakit dini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.
3. Adanya sistem jaminan kesehatan seperti BPJS yang memungkinkan akses pengobatan tanpa kendala biaya, termasuk bagi masyarakat kurang mampu.

Faktor penghambat keberhasilan secara umum, antara lain:

1. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular serta peningkatan penyakit tidak menular di masyarakat menjadi penghambat utama peningkatan umur harapan hidup.
2. Faktor lingkungan yang belum optimal, seperti akses air bersih dan sanitasi, berkontribusi pada penurunan kesehatan masyarakat.
3. Terbatasnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas dasar (Puskesmas) masih menjadi tantangan.
4. Tingginya persentase penduduk yang merokok dan konsumsi alkohol pada usia muda (di bawah 18-24 tahun) berpengaruh pada kesehatan jangka panjang.
5. Keterbatasan akses pendidikan tinggi yang berdampak pada kemampuan ekonomi penduduk juga menjadi faktor tidak langsung yang mempengaruhi kualitas kesehatan, terutama terkait biaya pendidikan dan rendahnya kesadaran kesehatan.



6. Keterbatasan infrastruktur sarana dan prasarana yang menyulitkan jangkauan layanan kesehatan di daerah pedesaan/pelosok.

Solusi yang telah dan akan dilakukan:

1. Mengoptimalkan peran Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu) di tingkat desa untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan cepat kepada masyarakat.
2. Fokus pada penurunan Kematian Balita (AKBa) dan Kematian Neonatal (AKN) melalui pendampingan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.
3. Mengintensifkan penanganan penyakit menular maupun tidak menular yang masih tinggi di masyarakat.
4. Program pencegahan stunting dan perbaikan gizi buruk untuk meningkatkan daya tahan tubuh sejak dini.
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan jamban sehat guna menurunkan penyakit berbasis lingkungan (seperti diare).
6. Sosialisasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga.

Indikator Persentase Kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI

Target 100 → Realisasi 16,67 → Capaian Kinerja 16,67% → KURANG

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Program ini berfokus pada lima pilar, yaitu:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT).
4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

STBM GESI adalah pendekatan sanitasi yang mengintegrasikan 5 pilar STBM dengan prinsip Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (*Gender Equality and Social Inclusion*). STBM GESI dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit, keracunan dan menjamin pemenuhan hak perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.



Sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Manggarai baru melaksanakan 5 (lima) Pilar STBM GESI di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Wae Ri'i dan Kecamatan Ruteng dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai atau 16,67% dari target 100%. Sementara 10 kecamatan lainnya baru melaksanakan Pilar 1 dan Pilar 2 dari 5 Pilar STBM GESI. Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen untuk melaksanakan 3 pilar lainnya dengan melibatkan sekolah-sekolah dan unsur-unsur lain yang ada di wilayah kecamatan dan desa.

Upaya pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penanganan urusan kesehatan diantaranya:

- Sinergitas lintas program, lintas sektor dan stakeholder terkait pembangunan bidang kesehatan.
- Akses fasilitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan sebagai prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Sasaran "**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Kesehatan dan RSUD Ruteng				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.305.946.452,00	66.166.286.098,88	86,71
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.688.069.732,00	1.551.207.188,00	91,89
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	314.209.000,00	306.538.829,00	97,56
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	260.949.900,00	101.891.500,00	39,05
Total Anggaran		78.569.175.084,00	68.125.923.615,88	86,71

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** sebesar Rp78.569.175.084,00 realisasi Rp68.125.923.615,88 atau 86,71%.

Sasaran 4 : **Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk**

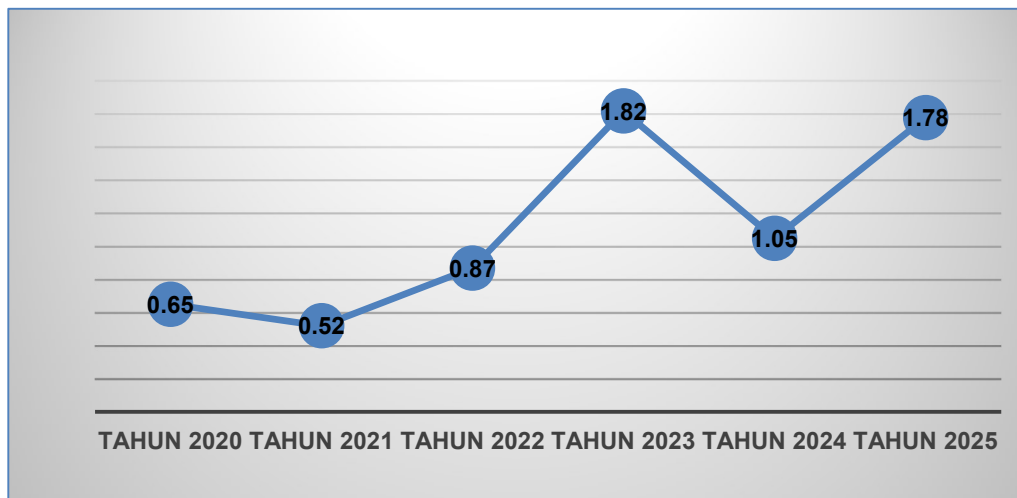
Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Manggarai tahun 2025 sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2026 adalah



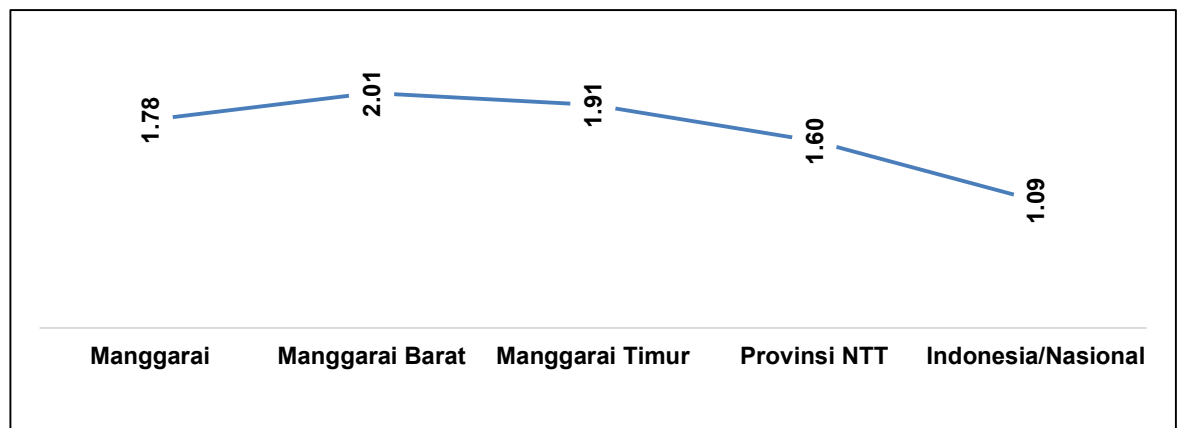
1,78%, naik 0,73% dari tahun 2024 yang mencapai 1,05%. LPP Kabupaten Manggarai berfluktuatif, seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.11
LPP Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Keterangan : Tahun 2024* Tahun 2025**

Grafik 3.12
Perbandingan LPP Kabupaten Manggarai
Dengan Kabupaten Terdekat, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2025



LPP Kabupaten Manggarai tahun 2025 sesuai data pada grafik di atas masih lebih baik jika dibandingkan dengan LPP Kabupaten Manggarai Barat sebesar 2,0%) dan LPP Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,91%, namun LPP tersebut masih lebih tinggi dari LPP Provinsi NTT 1,60% dan LPP Nasional 1,09%



LPP Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2025 sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	LPP	Keterangan
1	Kupang	0,96	Peringkat 1
2	Ende	1,02	Peringkat 2
3	Malaka	1,35	Peringkat 3
4	Ngada	1,39	Peringkat 4
5	Nagekeo	1,40	Peringkat 5
6	Lembata	1,41	Peringkat 6
7	Timor Tengah Selatan	1,47	Peringkat 7
8	Flores Timur	1,47	Peringkat 8
9	Sikka	1,49	Peringkat 9
10	Sumba Timur	1,52	Peringkat 10
11	Timor Tengah Utara	1,56	Peringkat 11
12	Sabu Raijua	1,59	Peringkat 12
13	Alor	1,60	Peringkat 13
14	Rote Ndao	1,65	Peringkat 14
15	Sumba Barat	1,75	Peringkat 15
16	Manggarai	1,78	Peringkat 16
17	Kota Kupang	1,84	Peringkat 17
18	Manggarai Timur	1,91	Peringkat 18
19	Manggarai Barat	2,01	Peringkat 19
20	Sumba Tengah	2,06	Peringkat 20
21	Belu	2,08	Peringkat 21
22	Sumba Barat Daya	2,12	Peringkat 22
Provinsi NTT		1,60	

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025

LPP Kabupaten Manggarai tahun 2025 berada pada urutan terendah ke-16 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Manggarai sebesar 1,78% pada tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingginya Angka Kelahiran (Fertilitas): Struktur penduduk Manggarai didominasi oleh kelompok usia produktif dan muda. Pada tahun 2024, sekitar 64,87% penduduk berada di usia 15-59 tahun. Besarnya proporsi penduduk di usia reproduksi ini secara alami memicu angka kelahiran yang tetap tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan: Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui sektor kesehatan telah membantu menurunkan angka kematian (mortalitas), terutama pada bayi dan ibu. Angka Kematian Bayi tahun 2024 sebanyak 96 kasus turun menjadi 83 kasus tahun 2025, sedangkan



Angka Kematian Ibu tahun 2024 sebanyak 14 kasus turun menjadi 4 kasus tahun 2025. Penurunan angka kematian yang tidak dibarengi dengan penurunan angka kelahiran yang setara menyebabkan pertumbuhan penduduk alami meningkat.

3. Migrasi Masuk: Perkembangan wilayah dan pusat-pusat ekonomi, khususnya di area perkotaan seperti Ruteng, menarik penduduk dari wilayah sekitar atau dari luar untuk menetap, bekerja, atau menempuh pendidikan.

Solusi yang telah dan terus dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. Peningkatan Akses Kontrasepsi: Memperluas jangkauan layanan KB hingga ke desa-desa terpencil, termasuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) untuk pasangan usia subur, seperti pelayanan KB serentak yang intensif.
2. Penyuluhan Intensif (KIE): Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang lebih intensif mengenai manfaat keluarga kecil, perencanaan kehamilan, dan risiko pernikahan dini.
3. Optimalisasi Kampung KB: Mengaktifkan kembali dan memperkuat "Kampung Keluarga Berencana" (Kampung KB) sebagai pusat pelayanan terpadu bagi remaja, ibu hamil, dan pasangan subur.
4. Pendekatan Tenaga Lapangan: Mengoptimalkan peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) untuk pendekatan personal ke keluarga.
5. Pencegahan Pernikahan Usia Dini: Mengedukasi masyarakat mengenai risiko kesehatan dan ekonomi dari pernikahan di usia muda, karena ini memicu angka kelahiran tinggi.

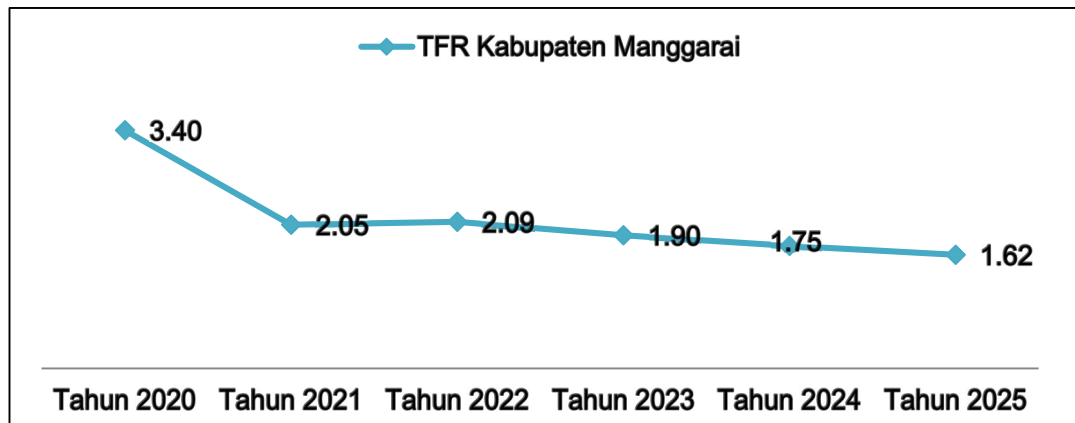
Sasaran **Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk** diukur dengan menggunakan sebuah indikator yaitu **Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR)**. TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. TFR dihitung dengan menjumlahkan ASFR dari seluruh rentang usia reproduksi dan mengalikannya dengan interval kelahiran yang tepat (biasanya 5 tahun).

Sesuai data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, realisasi TFR tahun 2025 adalah 1,62 dari target 2,014 dengan tingkat



capaian 119,56% predikat kinerja ISTIMEWA. Sementara pada tahun 2024 realisasi TFR adalah 1,75 dari target 2,0428 dengan tingkat capaian 113,71% predikat kinerja ISTIMEWA.

Grafik 3.13
Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Manggarai, 2025

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menekan laju pertumbuhan penduduk diantaranya:

- Melakukan penyuluhan dan KIE secara intensif mengenai Keluarga Berencana.
- Adanya upaya-upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD).
- Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi.
- Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok-pelosok.
- Adanya pelatihan bagi kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut:

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun.
- Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar (muda paritas rendah), yaitu PUS yang jumlah anaknya masih atau dibawah 2 orang, agar memiliki cukup 2 (dua) anak.
- Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi.



- d. Alat kontrasepsi yang diminati calon akseptor KB belum/tidak tersedia.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kurangberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas yaitu:

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi/penyuluhan.
- Membentuk wadah PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa).
- Mengupayakan agar Alokasi KB selalu tersedia di Gudang DP2KB.

Sasaran "**Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk**" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%	
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4.998.113.850,00	4.205.155.304,00	84,13	
2	Program Pengendalian Penduduk	0,00	0,00	0,00	
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.748.040.000,00	1.068.379.000,00	61,12	
Total Anggaran		6.746.153.850,00	5.273.534.304,00	78,17	

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** sebesar Rp6.746.153.850,00 realisasi Rp5.273.534.304,00 atau 78,17%%.

Sasaran 5 : **Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan**

Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Indikator Peringkat pada Event Olahraga Daerah (POPDA)

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi	Angka	9,61	13,92	144,88
2	Peringkat pada Event Olahraga Daerah (POPDA)	Angka	4	0	0,00
Rata-rata					72,44
Predikat Kinerja					CUKUP

Rata-rata capaian dari sasaran ini pada tahun 2025 adalah 72,00% predikat kinerja Cukup turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 77,00%, predikat kinerja Baik.

Rincian capaian per indikator sebagai berikut :



1. Indikator **Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**, diperoleh dari **Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun yang Berwirausaha dibagi Total Jumlah Pemuda usia 16-30 Tahun dikali 100%**

Tabel 3.9
Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun	Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun yang Berwirausaha	Tingkat Partisipasi Pemuda
1	2022	94.280	15.133	16,05
2	2023	104.462	19.350	18,52
3	2024	98.278	14.332	14,58
4	2025	105.318	14.663	13,92

Sumber : Dinas PPO, 2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, maka realisasi dari indikator sasaran "Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri" pada tahun tahun 2025 adalah 13,92% dari target 9,61% dengan tingkat capaian kinerja 144,88% predikat kinerja ISTIMEWA. Realisasi 13,92% tersebut diperoleh dari hasil perbandingan dari jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha sebanyak 14.633 orang per total jumlah pemuda diusia yang sama sebanyak 105.318 orang.

Sedangkan tahun 2024 realisasi indikator sasaran ini adalah 14,58% dari target 9,47% dengan tingkat capaian kinerja 153,99% kategori kinerja Istimewa. Realisasi 14,58% diperoleh dari hasil perbandingan dari jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha sebanyak 14.332 orang per total jumlah pemuda usia 16-30 tahun sebanyak 98.278 orang.

2. Indikator Peringkat pada Event Olahraga Daerah (POPDA)

Dalam kurun waktu tahun 2022-2025, realisasi dari indikator sasaran ini adalah 0,00 karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 Kabupaten Manggarai tidak mengirim atlet untuk mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar pada Tingkat Provinsi NTT karena keterbatasan anggaran.
- b. Pada tahun 2023 tidak mengirim atlet karena keterlambatan pencairan anggaran yang bersumber dari DAU *Spesific Grant* yang baru ditransfer ke



rekening Kas Daerah pada bulan April 2023 sementara kegiatan POPDA dilaksanakan bulan Februari 2023.

- c. Pada tahun 2024 tidak mengirim atlet karena Pemerintah Provinsi NTT tidak menyelenggarakan kegiatan POPDA.
- d. Pada tahun 2025, anggaran untuk pelaksanaan POPDA melalui DPA Dinas PPO Kabupaten Manggarai dirasionalisasikan dan/atau digeser ke Program/Kegiatan strategis lainnya karena ketidakjelasan informasi mengenai jadwal pelaksanaan POPDA oleh Pemerintah Provinsi NTT, sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak mengirimkan atlet untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Pelaksanaan POPDA baru dilaksanakan pada tanggal 9-13 September 2025.

Terakhir Kabupaten Manggarai mengikuti kegiatan POPDA pada tahun 2019 dan menempati posisi ke-10 dari 22 Kabupaten/kota se-Provinsi NTT dan perolehan medali sebanyak 12 medali dengan rincian: medali emas sebanyak 4 medali, perak 3 medali dan perunggu sebanyak 5 medali.

Sasaran “**Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	252.860.000,00	51.895.000,00	20,52
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	194.600.000,00	70.000.000,00	35,97
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	323.248.400,00	293.640.600,00	90,84
Total Anggaran		770.708.400,00	415.535.600,00	53,92

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan** sebesar Rp770.708.400,00 realisasi Rp415.535.600,00 atau 53,92%%.

Sasaran 6 : Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Budaya
Indikator Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan
Target 91,00 → Realisasi 91,06 → Capaian Kinerja 100,07% → Istimewa



Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah atau lembaga dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya agar tetap lestari dan relevan, yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu:

1. Budaya Benda (*Tangible*): Benda, situs, kawasan, dan struktur cagar budaya yang terdata dan dilestarikan (dilindungi/direstorasi).
2. Budaya Tak Benda (*Intangible*): Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) yang tercatat, ditetapkan, atau direvitalisasi, seperti adat istiadat, tradisi lisan, pertunjukan, dan kemahiran kerajinan tradisional.

Sesuai data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, sampai dengan tahun 2025, jumlah budaya benda dan tak benda yang terdata sebanyak 1.678. Dari 1.678 budaya benda dan tak benda tersebut yang dilestarikan sebanyak 1.528 atau 91,06%. Realisasi 91,06% dari target 91,00% yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 maka capaian kinerja dari indikator sasaran di atas adalah 100,07% dengan predikat kinerja **Istimewa**.

Sementara sampai dengan tahun 2024, jumlah budaya benda dan tak benda yang terdata sebanyak 1.664. Dari 1.664 budaya benda dan tak benda tersebut yang dilestarikan sebanyak 1.378 atau 82,81% dari target 82,00% yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja mencapai 100,99% predikat kinerja **Istimewa**.

Tabel 3.10
Data Obyek Pemajuan Kebudayaan (Budaya Benda/Cagar Budaya)
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Budaya Benda dan Tak Benda	Yang dilestarikan		Belum dilestarikan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	s/d 2022	199	33	16,58	166	83,42
2	s/d 2023	927	670	72,28	257	27,72
3	s/d 2024	1.664	1.378	82,81	286	17,19
4	s/d 2025	1.678	1.528	91,06	150	8,94

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut di atas:

1. Banyak temuan cagar budaya yang belum bisa diungkap secara detail latar sejarahnya.
2. Ada beberapa situs yang tidak memiliki latar sejarah yang kuat tetap diminta masuk sebagai cagar budaya.



3. Beberapa lokasi yang jelas latar sejarahnya serta sudah masuk cagar budaya daerah belum tersentuh untuk perawatannya.
4. Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya lokal, sehingga nilai-nilai budaya menjadi kurang dikenal dan apresiasi masyarakat kurang.

Strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan ke depan:

- 1 Menginventarisir temuan benda cagar budaya.
- 2 Merencanakan pembiayaan perawatan benda cagar budaya.
- 3 Pengembangan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan taman budaya daerah.
- 4 Mendorong dan membina sanggar-sanggar seni budaya untuk tumbuh berkembang serta berperan dalam menjaga kelestarian seni budaya.

Untuk mendukung pencapaian "**Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya**", Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran pada program, sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kebudayaan	219.060.000,00	218.970.000,00	99,96
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	46.130.000,00	46.020.000,00	99,76
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	18.636.928.188,00	18.625.551.900,00	99,94
Total Anggaran		18.902.118.188,00	18.890.541.900,00	99,94

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Budaya** sebesar Rp18.902.118.188,00 realisasi Rp18.890.541.900,00 atau 99,44%.

TUJUAN 2
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT
Indikator Angka PMKS
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Ketercapaian tujuan kinerja **Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat** direpresentasikan melalui 2 (dua) IKU yaitu Angka PMKS dan Indeks Pemberdayaan



Gender (IDG) dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 136,65% predikat kinerja ISTIMEWA dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka PMKS	Angka	17.589	11.256	136,01
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,97	65,39	99,12
Rata-rata					117,56
Predikat Kinerja					Istimewa

INDIKATOR ANGKA PMKS

Target 17.589 → Realisasi 11.256 → Capaian Kinerja 136,01% → ISTIMEWA

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya gelandangan, pengemis, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Berbagai strategi penanggulangan PMKS ditetapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai baik dalam bentuk pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial maupun perlindungan sosial.

Angka PMKS Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang ditangani atau dibantu sesuai data Dinas Sosial sebanyak 11.256 dari target sebanyak 17.589 dengan capaian kinerja 136,01% predikat kinerja ISTIMEWA. Data PMKS sebanyak 11.256 tersebut tidak termasuk data Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 14.610 orang. Adapun rincian angka PMKS yang dibantu/ditangani tahun 2025 sebanyak 11.256 tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.11
Data PMKS yang ditangani
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jenis PMKS	Jumlah PMKS yang dibantu
1	2022	- Disabilitas	58 Orang
		- Lansia	50 Orang
		- Anak Terlantar	7 Orang
		- Warsosek	10 Kelompok
		- Karang Taruna	7 Kelompok
		- Bencana Alam/Bencana Sosial	16.167 Orang



No	Tahun	Jenis PMKS	Jumlah PMKS yang dibantu
Total PMKS yang dibantu Tahun 2022			16.299 Orang/Kelompok
2	2023	- Disabilitas	24 Orang
		- Lansia	15 Orang
		- Anak Terlantar	0 Orang
		- Warsosek	5 Orang
		- Karang Taruna	6 Orang
		- Bencana Alam/Bencana Sosial	18.285 Orang
Total PMKS yang dibantu Tahun 2023			18.335 Orang
3	2024	- Disabilitas	174 Orang
		- Lansia	67 Orang
		- Anak Terlantar	0 Orang
		- Warsosek	3 Keluarga
		- Karang Taruna	3 Lembaga
		- Bencana Alam/Bencana Sosial	5.104 Orang
Total PMKS yang dibantu Tahun 2024			5.351 Orang/Kelompok
4	2025	- Disabilitas	194 Orang
		- Lansia	58 Orang
		- Anak Terlantar	0 Orang
		- Warsosek	7 Keluarga (3 Orang)
		- Karang Taruna	7 Lembaga
		- Bencana Alam/Bencana Sosial	10.990 Orang
Total PMKS yang dibantu Tahun 2025			11.256 Orang/Kelompok

Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap PMKS sebanyak 11.256 orang/lembaga tersebut di atas yaitu berupa Bantuan Sembilan Bahan Pokok Program Rehabilitasi Sosial kepada Lansia, bantuan Alat Bantu Disabilitas dan Sembilan Bahan Pokok kepada Penyandang Disabilitas, bantuan Paket Peralatan Rias kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi, bantuan Paket Peralatan Pangkas Rambut kepada Anggota Karang Taruna dan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada korban bencana baik bencana alam maupun bencana sosial.

Secara umum, permasalahan yang mempengaruhi capaian ini bukan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program atau kegiatan, melainkan lebih pada tantangan pendataan sasaran, keterbatasan jangkauan pelayanan luar panti, serta sifat kegiatan yang sangat bergantung pada kondisi faktual di lapangan. Hal ini berdampak pada perhitungan persentase capaian indikator yang menggunakan pembandingan antara realisasi layanan dengan jumlah sasaran ideal yang seharusnya dilayani dalam satu tahun. Permasalahan ini menjadi dasar penting bagi perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian strategi



pelayanan agar pencapaian indikator dapat lebih optimal pada periode pelaporan berikutnya.

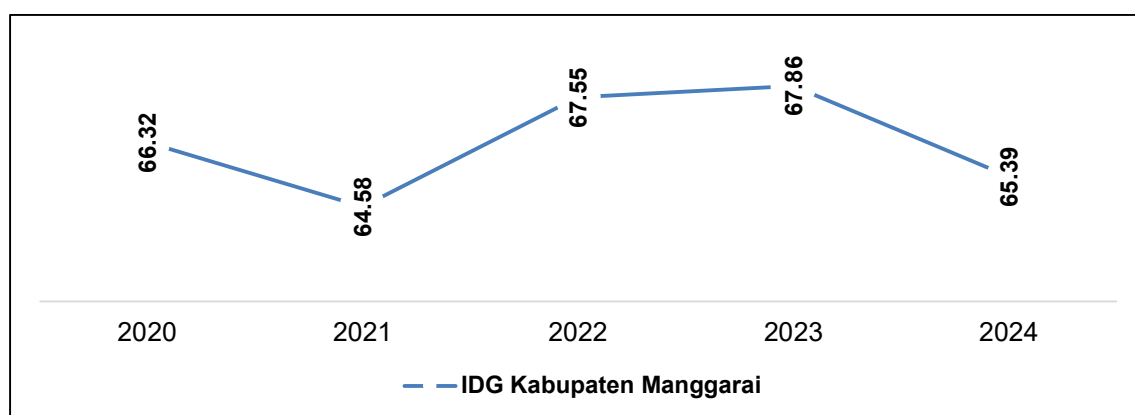
INDIKATOR Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Target 65,97 → Realisasi 65,39 → Capaian Kinerja 99,12% → BAIK

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kesetaraan gender melalui partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial atau pengambilan keputusan. Tiga komponen pembentuk IDG yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi (Badan Pusat Statistik).

Realisasi IDG Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang kami sajikan dalam laporan ini merupakan IDG tahun 2024 berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi NTT tahun 2025 yaitu 65,39 atau tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 65,97 dengan capaian kinerja 99,12 predikat kinerja BAIK. Angka IDG ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IDG tahun 2023 yang mencapai 67,86. IDG Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020-2024 berfluktuatif seperti terlihat pada grafik berikut.

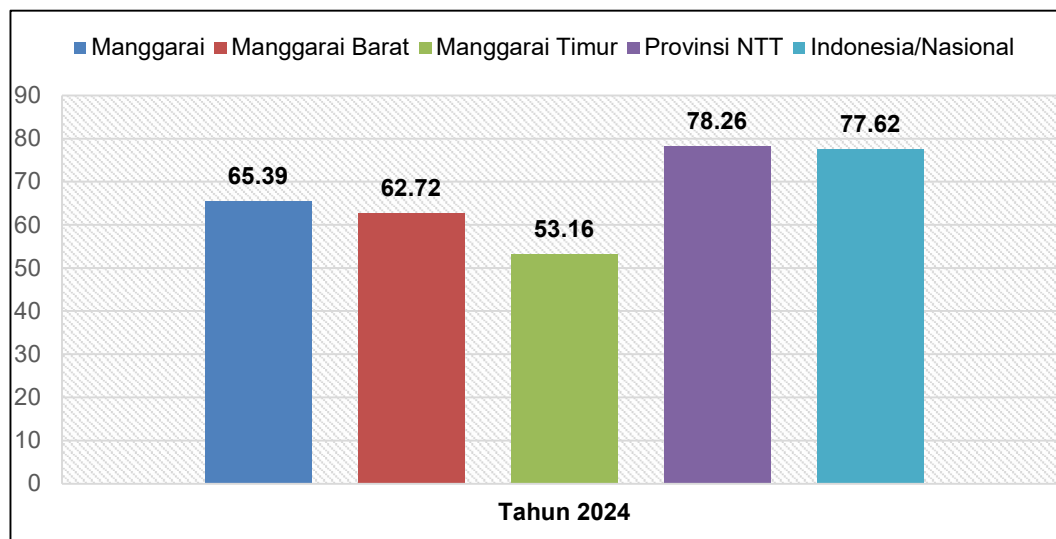
Grafik 3.14
IDG Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Prov. NTT_ Provinsi NTT Dalam Angka, 2026



Grafik 3.15
Perbandingan Indeks Pembedayaan Gender (IDG) Kabupaten Manggarai
Dengan Kabupaten Terdekat, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2024



Sumber : BPS Prov. NTT_ Provinsi NTT Dalam Angka, 2026

IDG Kabupaten Manggarai tahun 2024 berada di atas IDG Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur namun berada di bawah IDG Provinsi NTT dan Nasional.

IDG Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2024 yang dirilis BPS Provinsi NTT tahun 2025 sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	IDG	Keterangan
1	Belu	70,57	Peringkat 1
2	Sumba Barat	69,51	Peringkat 2
3	Kota Kupang	69,16	Peringkat 3
4	Timor Tengah Utara	68,32	Peringkat 4
5	Sumba Tengah	66,22	Peringkat 5
6	Manggarai	65,39	Peringkat 6
7	Sumba Barat Daya	63,53	Peringkat 7
8	Malaka	63,31	Peringkat 8
9	Manggarai Barat	62,72	Peringkat 9
10	Sikka	62,39	Peringkat 10
11	Kupang	62,06	Peringkat 11
12	Nagekeo	62,02	Peringkat 12
13	Alor	61,96	Peringkat 13
14	Ende	61,01	Peringkat 14
15	Sumba Timur	58,42	Peringkat 15
16	Sabu Raijua	57,51	Peringkat 16
17	Ngada	55,66	Peringkat 17



No	Kabupaten/Kota	IDG	Keterangan
18	Flores Timur	55,03	Peringkat 18
19	Lembata	54,68	Peringkat 19
20	Manggarai Timur	53,16	Peringkat 20
21	Timor Tengah Selatan	52,73	Peringkat 21
22	Rote Ndao	50,43	Peringkat 22
Provinsi NTT		78,26	

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025

IDG Kabupaten Manggarai tahun 2024 sesuai data pada tabel di atas berada pada peringkat tertinggi ke-6 dari 22 kabupaten/kota se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya nilai IDG Kabupaten Manggarai tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya Partisipasi Politik dan Manajerial: Keterwakilan perempuan yang minim di kursi parlemen (legislatif) dan posisi manajerial/profesional di tempat kerja menyebabkan IDG tidak maksimal atau menurun. Jumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Manggarai sebanyak 3 (tiga) orang dari total 35 orang anggota DPRD periode 2024-2029 dan yang menduduki jabatan JPT (eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dari total JPT yang terisi sebanyak 28 JPT.
2. Kesenjangan Pendapatan (Ekonomi): Ketimpangan yang lebar antara pendapatan per kapita laki-laki dan perempuan, di mana perempuan sering kali tertinggal dan bekerja di sektor informal dengan upah lebih rendah.
3. Budaya Patriarki dan Peran Gender: Pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan pada urusan domestik, sehingga mengurangi peluang perempuan untuk berpartisipasi aktif di ruang publik.
4. Beban Ganda (*Dual Role*): Tanggung jawab yang tinggi dalam mengurus rumah tangga membuat perempuan sulit membagi waktu untuk berkarier di sektor formal.
5. Ketimpangan Akses Sumber Daya: Terbatasnya akses perempuan terhadap permodalan, teknologi, dan infrastruktur ekonomi.
6. Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2025 yang mencapai 81 kasus.



Langkah peningkatan kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu:

1. Pelibatan seluruh stakeholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga.
2. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan di segala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga.
4. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral.

Dalam pencapaian tujuan **MENINGKATNYA KEBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT**, didukung oleh 3 (tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 7 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indikator Persentase PMKS yang tertangani

Target 4,09 → Realisasi 0,64 → Capaian Kinerja 15,65% → KURANG

Pada tahun 2025, jumlah PMKS yang diintervensi atau diberi bantuan sesuai data Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebanyak 11.256 orang/lembaga atau 0,64% dari total PMKS yang direncanakan untuk diintervensi sebanyak 17.589 orang/lembaga. Rincian dari 11.256 PMKS yang diberi bantuan tersebut adalah Lansia sebanyak 68 orang, Disabilitas sebanyak 194 orang, Warsosek sebanyak 7 keluarga, Karangtaruna sebanyak 7 lembaga dan Bantuan terhadap korban bencana alam/sosial sebanyak 10.990 orang. Sedangkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari anggaran APBN tidak menjadi bagian perhitungan dari PMKS yang tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Sementara pada tahun 2024 jumlah PMKS yang diintervensi atau diberi bantuan sesuai data dari Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebanyak 5.351 atau sekitar 0,30% dari total PMKS yang direncanakan untuk intervensi sebanyak 18.059 PMKS. Rincian dari 5.351 PMKS yang diberi bantuan tersebut adalah Lansia sebanyak 67 orang, Disabilitas 174 orang, Bencana Alam/Sosial 5.104 orang, Warsosek 3 Keluarga dan Karang Taruna sebanyak 3 Lembaga.



Tabel 3.12
Data PMKS yang ditangani/diberi Bantuan
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah PMKS yang Direncanakan untuk diberi Bantuan	Jumlah PMKS yang diberi Bantuan	%
1	2022	19.089	16.299	85,38
2	2023	18.589	18.338	98,65
3	2024	18.059	5.351	29,63
4	2025	17.589	11.256	63,99

Sumber : Dinas Sosial Kab. Manggarai, 2025

Secara umum, permasalahan yang mempengaruhi capaian ini bukan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program atau kegiatan, melainkan lebih pada tantangan pendataan sasaran, keterbatasan jangkauan pelayanan luar panti, serta sifat kegiatan yang sangat bergantung pada kondisi faktual di lapangan. Hal ini berdampak pada perhitungan persentase capaian indikator yang menggunakan pembandingan antara realisasi layanan dengan jumlah sasaran ideal yang seharusnya dilayani dalam satu tahun. Permasalahan ini menjadi dasar penting bagi perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian strategi pelayanan agar pencapaian indikator dapat lebih optimal pada periode pelaporan berikutnya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **"Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat"**, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran pada program, sebagai berikut :

Dinas Sosial				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.121.000,00	12.710.000,00	78,84
2	Program Rehabilitasi Sosial	523.592.000,00	515.641.636,00	98,48
3	Program Pemberdayaan Sosial	96.332.000,00	95.375.840,00	99,01
4	Program Penanganan Bencana	64.996.000,00	37.688.100,00	57,99
Total Anggaran		701.041.000,00	661.415.576,00	94,35

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat** sebesar Rp701.041.000,00 realisasi Rp661.415.576,00 atau 94,35%



Sasaran 8 : **Menurunnya Ketimpangan Gender**

Indikator TPAK Perempuan

Target 67,32 → Realisasi 72,86 → Capaian Kinerja 108,24% → Istimewa

Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{TPAK Perempuan} = \frac{\text{Jlh. Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jlh. Pddk. Perempuan (15 tahun ke atas)}} \times 100$$

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2026, angkatan kerja perempuan tahun 2025 sebanyak 87.135 orang atau 72,86% dari jumlah perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 119.586 orang, seperti yang tercantum pada tabel berikut.

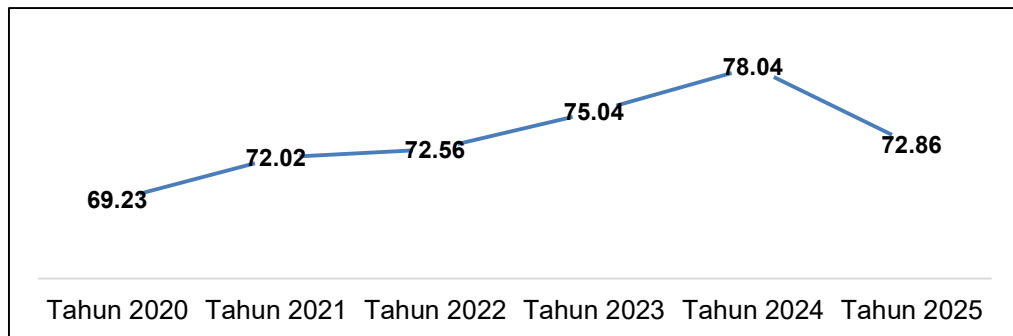
Tabel 3.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025

NO	Tahun	Jlh. Pddk. Usia Kerja (15 tahun ke atas)			Jlh. Angkatan Kerja (Bekerja + Pengangguran)			TPAK		
		L	P	LP	L	P	LP	L	P	LP
1	2020	113.442	120.570	234.012	95.604	83.475	179.079	84,28	69,23	76,53
2	2021	115.165	122.334	237.449	96.199	88.108	184.307	83,53	72,02	77,62
3	2022	116.841	124.126	240.967	99.133	90.065	189.198	84,84	72,56	78,52
4	2023	113.788	114.893	228.681	94.754	86.220	180.974	83,27	75,04	79,14
5	2024	116.186	117.226	233.412	102.572	91.480	194.052	88,28	78,04	83,14
6	2025	118.648	119.586	238.234	100.104	87.135	187.239	84,37	72,86	78,59

Sumber : BPS_Manggarai Dalam Angka, 2026



Grafik 3.16
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Sumber: MDA-BPS Kab. Manggarai 2026

TPAK Perempuan Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan, namun di tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan ini antara lain disebabkan:

1. Norma budaya yang sering kali memposisikan perempuan sebagai pengasuh utama, sehingga banyak perempuan terpaksa memilih bekerja paruh waktu, bekerja di sektor informal, atau keluar dari angkatan kerja untuk mengurus rumah tangga.
2. Perempuan sering menanggung tanggung jawab mengurus rumah tangga, merawat anak, dan orang tua sekaligus dituntut bekerja di ranah publik. Tingginya beban perawatan ini memaksa perempuan untuk memprioritaskan rumah tangga dibandingkan karier.
3. Adanya pandangan tradisional yang menempatkan peran utama perempuan di ranah domestik (ibu rumah tangga) dibandingkan ranah publik (pekerja).
4. Menikah dan memiliki anak menjadi faktor signifikan yang menurunkan TPAK perempuan. Perempuan cenderung berhenti bekerja atau mencari pekerjaan setelah menikah atau memiliki anak karena kurangnya fasilitas penitipan anak atau dukungan tempat kerja.
5. Banyak perempuan terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan perlindungan kerja yang minim, yang sering kali tidak tercatat dalam TPAK resmi atau membuat mereka mudah keluar dari pasar kerja.

Solusi untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Manggarai antara lain:



1. Mendorong partisipasi aktif perempuan di sektor formal melalui pelatihan kompetensi dan perluasan akses kerja.
2. Memberikan perlindungan sosial dan kemudahan berusaha bagi pekerja di sektor informal agar lebih produktif dan terdokumentasi.
3. Mendorong pertumbuhan UMKM yang fleksibel dalam menyerap tenaga kerja, terutama bagi generasi muda.

Sasaran “**Menurunnya Ketimpangan Gender**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	136.485.000,00	121.333.200,00	88,90
Total Anggaran		136.485.000,00	121.333.200,00	88,90

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Menurunnya Ketimpangan Gender** sebesar Rp136.485.000,00 realisasi Rp121.333.200,00 atau 88,90%.

Sasaran 9 : Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Indikator Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Angka	22,29	65,08	-91,95
2	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,015	0,0344	-29,28
Rata-rata					-60,62
Predikat Kinerja					KURANG

Rata-rata capaian kinerja ke-2 indikator kinerja sasaran **Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak** tahun 2025 adalah -60,62% dengan predikat kinerja KURANG. Setiap tahun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai terus meningkat, seperti uraian berikut ini.

1. Indikator Angka Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:



$$\text{Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan} = \frac{\text{Jlh. Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jlh. Penduduk Perempuan (18 tahun ke atas)}} \times 100.000$$

Pada tahun 2025, tercatat 81 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan usia 18 tahun ke atas atau 65,08 dari total jumlah perempuan (usia 18 tahun ke atas) sebanyak 124.471 orang. Realisasi 65,08% dari target 22,29% maka capaian kinerjanya adalah -91,95% predikat kinerja KURANG.

Tabel 3.14
Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah Perempuan (18 Tahun ke atas)	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
1	2022	163.233	46	28,18
2	2023	114.899	49	42,65
3	2024	121.350	51	42,03
4	2025	124.471	81	65,08

Sumber : Dinas P3A Kab. Manggarai, 2025

2. Indikator Angka Kasus Kekerasan terhadap Anak, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak} = \frac{\text{Jlh. Anak mengalami kekerasan}}{\text{Jlh. Anak usia kurang dari 18 tahun}} \times 100$$

Kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Manggarai setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2025, jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Manggarai mencapai 38 kasus atau 0,034% dari total jumlah anak (usia kurang dari 18 tahun) sebanyak 110.490 anak. Sementara pada tahun 2024 terdapat 37 kasus kekerasan terhadap anak atau 0,0337% dari total jumlah anak usia kurang dari 18 tahun sebanyak 109.863 orang.

Tabel 3.15
Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

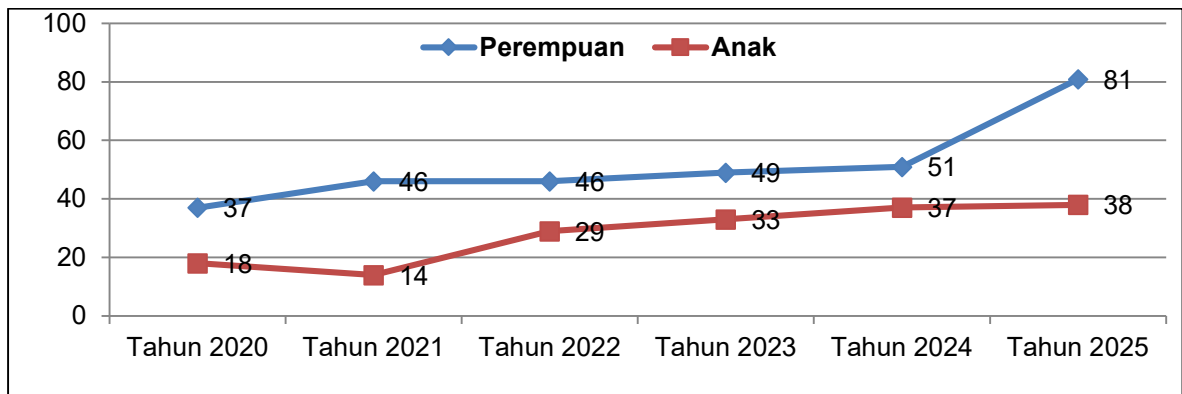
No	Tahun	Jumlah Anak (kurang 18 Tahun)	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak
1	2022	116.171	29	0,0250
2	2023	116.944	33	0,0282
3	2024	109.863	37	0,0337



No	Tahun	Jumlah Anak (kurang 18 Tahun)	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak
4	2025	110.490	38	0,0344

Sumber : Dinas P3A Kab. Manggarai, 2025

Grafik 3.17
Trend kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Berdasarkan grafik tersebut di atas, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai terus bertambah. Deviasi capaian yang cukup besar antara target dan realisasi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial. Capaian negatif ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya jumlah kasus, namun juga dipengaruhi oleh meningkatnya pelaporan dan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai dampak dari penguatan sistem pengaduan dan meningkatnya kesadaran masyarakat.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi capaian indikator kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan layanan pengaduan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat menyebabkan semakin banyak kasus yang tercatat secara resmi.
2. Kompleksitas bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga psikis, seksual, penelantaran, serta kekerasan berbasis digital.
3. Tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, serta pola asuh yang belum ramah anak menjadi faktor dominan pemicu kekerasan.



4. Masih terbatasnya jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak. Layanan belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil dan desa dengan akses terbatas.
5. Keterbatasan sumber daya manusia pendamping. Jumlah pendamping, psikolog, dan konselor anak belum sebanding dengan jumlah dan kompleksitas kasus.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

1. Kasus laten (*hidden cases*). Banyak kasus belum terungkap karena rasa takut korban, tekanan keluarga, serta stigma sosial.
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, terutama antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, layanan kesehatan, dan lembaga masyarakat.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan, termasuk rumah aman dan layanan rehabilitasi terpadu.
4. Sistem pendataan dan pelaporan kasus yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyulitkan analisis kebijakan yang komprehensif.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengurangi atau menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak:

1. Berbasis program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penganjangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yaitu Desa Bangka Kenda dan Desa Satar Ngkeling sebagai desa per-contohan di Kabupaten Manggarai
3. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
4. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.





6. Upaya preventif dan promotif berbasis masyarakat/kesadaran masyarakat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih meningkat.
7. Penguatan kapasitas forum anak di setiap kecamatan/desa.

Sasaran “**Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

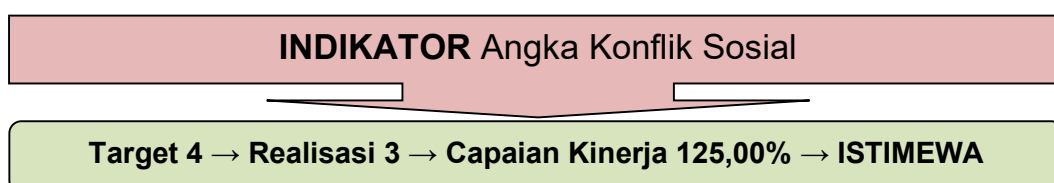
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
No	Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perlindungan Perempuan	135.768.168,00	130.506.218,00	96,12
2	Program Perlindungan Khusus Anak	66.734.668,00	54.951.243,00	82,34
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	333.725.168,00	270.653.848,00	81,10
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	14.270.000,00	13.970.000,00	97,90
Total Anggaran		550.498.004,00	470.081.309,00	85,39

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak** sebesar Rp550.495.004,00 realisasi Rp470.081.309,00 atau 85,39%.

TUJUAN 3
MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL
Indikator Angka Konflik Sosial
Indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI)

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka Konflik Sosial	Angka	4	3	125,00
2	Indeks Risiko Bencana	Angka	97,12	241,09	-49,07
Rata-rata					37,96
Predikat Kinerja					Kurang

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui indikator Angka Konflik Sosial dan Indeks Risiko Bencana (IRBI) dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 37,96% predikat kinerja KURANG.



Konflik sosial seperti ini tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Menjadi soal serius ketika konflik sosial itu mengganggu rasa aman dan nyaman seseorang atau



sekelompok orang. Apalagi kalau berdampak pada kerugian material maupun immaterial. Dengan demikian setiap konflik sosial sekecil apapun harus diselesaikan agar tidak menghambat kegiatan sosial manusia sebagai pribadi maupun komunitas.

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Meskipun pada tahun 2025 jumlah Angka Kejadian Konflik Sosial sebanyak **3 (tiga)** kasus, namun berdasarkan data yang dihimpun selama tahun 2025 tercatat 12 (dua belas) kejadian **potensi** konflik. Kejadian potensi konflik yang dilaporkan oleh mitra kerja/masyarakat maupun yang terpantau langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai selanjutnya dilakukan upaya penanganan yang berupa deteksi dini dan cegah dini yaitu segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak terkait, pengamanan tertutup, dialog, sosial *conditioning* dan melaporkan/menyampaikan telaahan kepada pimpinan.

Sedangkan tahun 2024 jumlah Angka Kejadian Konflik Sosial **1 (satu)**, dengan total **potensi** konflik yang tercatat sebanyak 10 (sepuluh).

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kerukunan dan harmoni masyarakat di Kabupaten Manggarai cukup tinggi.
2. Dukungan dan sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
3. Peran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh forum kemitraan yang berpengaruh dan kharismatik sehingga mampu meredam potensi-potensi konflik di masyarakat.
4. Peran aktif dan pelibatan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kegiatan pencegahan konflik sosial melalui optimalisasi Deteksi Dini Cegah Dini di tingkat Desa/Kelurahan.



Hambatan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan kondisi Kabupaten Manggarai yang kondusif tanpa Konflik Sosial antara lain:

1. Adanya peningkatan kejadian (insiden pelanggaran hukum, gesekan di masyarakat, demonstrasi, bentrok fisik antar anggota kelompok masyarakat) bidang sosial budaya dan bidang politik yang berpotensi memunculkan konflik di masyarakat dan jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan.
2. Pemantauan tentang aktivitas Ormas, LSM dan WNA yang belum terkoordinir dengan baik, pemantauan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga kemungkinan tindak kriminalitas yang muncul.
3. Belum optimalnya pemanfaatan jejaring komunikasi dan pelaporan intelijen, pembinaan serta fasilitasi terhadap mitra pemerintah daerah (Jejaring Intelijen, Ormas/LSM, FKUB, FKDM, FPK, FKAP, instansi vertikal terkait dll).

Strategi peningkatan capaian kinerja :

1. Memperkuat kelembagaan FKDM, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, FORKOPIMDA dan jejaring intelijen dengan cara menyusun regulasi, tata kerja dan menambah sarana prasarana deteksi dini cegah dini.
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan pemahaman kehidupan Demokrasi serta Hak Asasi Manusia terlebih menyambut Pemilu dan Pemilukada serentak melalui sosialisasi dan edukasi.
3. Optimalisasi dan peningkatan frekuensi pemantauan kegiatan Ormas/LSM, WNA di masyarakat, agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan potensi ke kriminal.
4. Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan mitra pemerintah daerah (Ormas/LSM, FKUB, FKDM, FPK, FKAP, instansi vertikal terkait dll)

INDIKATOR Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Target 97,12 → Realisasi 241,90 → Capaian Kinerja -49,07% → KURANG

Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko setiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *hazard*, *vulnerability*, dan



capacity. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

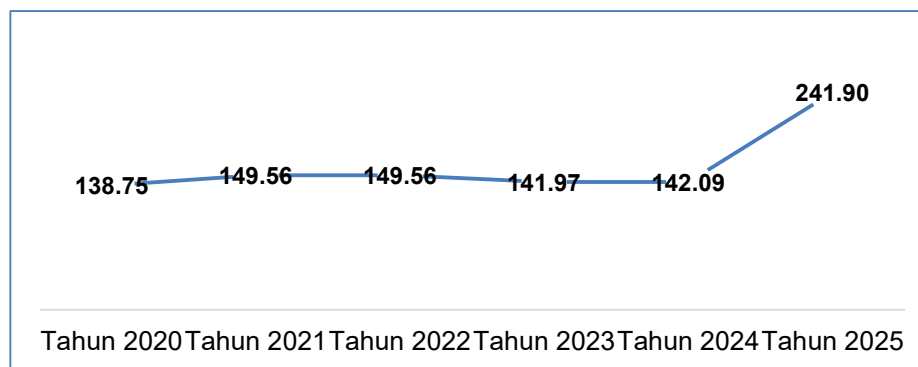
$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2025 yang kami sajikan dalam laporan ini adalah IRB hasil perhitungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang termuat dalam Surat Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-48/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 Hal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IRB Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sesuai surat tersebut adalah **241,90 poin** dengan kelas risiko **Tinggi**. IRB ini tahun 2025 ini naik 99,81 poin dari IRB Tahun 2024 sebesar 142,09 kelas risiko **Sedang**. Realisasi 241,90 poin dari target 97,12 poin maka capaian kinerja dari indikator tujuan ini adalah -49,07% predikat kinerja Kurang.



Grafik 3.18
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Sesuai grafik tersebut di atas, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai dalam 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif dari 138,75 poin kelas risiko **Sedang** tahun 2020 menjadi 241,90 poin kelas risiko **Tinggi** tahun 2025. Semakin tinggi bahaya/ancaman yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan maka semakin tinggi juga indeks risiko bencananya, demikianpun sebaliknya.

Tabel 3.16
Perbandingan Nilai IRB Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	IRB 2024	IRB 2025	Keterangan	Kelas Resiko 2025
1	Sumba Barat	120,42	193,31	Naik	Tinggi
2	Sumba Timur	120,66	174,64	Naik	Tinggi
3	Kupang	159,63	215,80	Naik	Tinggi
4	Timor Tengah Selatan	166,22	111,60	Turun	Sedang
5	Timor Tengah Utara	130,92	194,02	Naik	Tinggi
6	Belu	156,01	190,44	Naik	Tinggi
7	Alor	128,21	196,26	Naik	Tinggi
8	Lembata	126,22	205,27	Naik	Tinggi
9	Flores Timur	124,47	200,71	Naik	Tinggi
10	Sikka	141,81	180,09	Naik	Tinggi
11	Ende	140,42	205,71	Naik	Tinggi
12	Ngada	122,18	240,26	Naik	Tinggi
13	Manggarai	142,09	241,90	Naik	Tinggi
14	Manggarai Barat	129,57	188,82	Naik	Tinggi
15	Manggarai Timur	149,89	172,94	Naik	Tinggi
16	Rote Ndao	108,99	188,14	Naik	Tinggi
17	Sumba Tengah	111,45	197,58	Naik	Tinggi
18	Sumba Barat Daya	136,97	220,46	Naik	Tinggi
19	Nagekeo	131,58	206,64	Naik	Tinggi
20	Sabu Raijua	102,40	198,05	Naik	Tinggi



No	Kabupaten/Kota	IRB 2024	IRB 2025	Keterangan	Kelas Resiko 2025
21	Malaka	153,84	233,07	Naik	Tinggi
22	Kota Kupang	96,65	187,54	Naik	Tinggi

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai IRB Kabupaten Manggarai sebesar 241,90 poin menandakan bahwa wilayah Kabupaten Manggarai memiliki kombinasi ancaman (*hazard*) yang besar, kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi, dan kapasitas (*capacity*) penanggulangan bencana yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Faktor-faktor penyebab utama tingginya indeks risiko bencana:

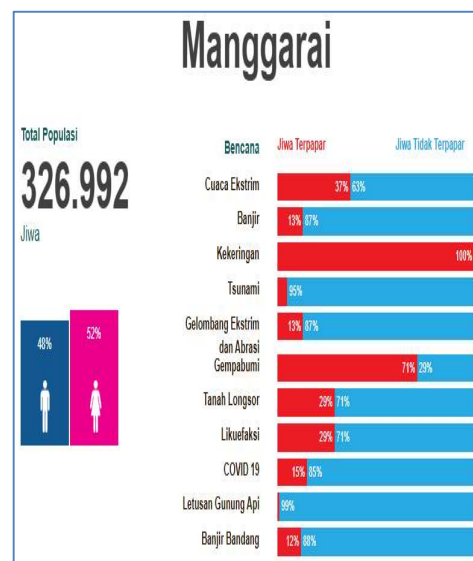
1. Faktor Geografis dan Geologis: Wilayah Kabupaten Manggarai didominasi oleh perbukitan terjal dan tanah yang lunak, sehingga sangat rentan terhadap pergerakan tanah atau tanah longsor.
2. Iklim dan Curah Hujan: Intensitas curah hujan yang tinggi, terutama saat puncak musim hujan, menjadi pemicu utama longsor dan banjir bandang.
3. Kondisi Lingkungan dan Drainase: Adanya pemukiman warga yang dibangun di daerah rawan seperti di bantaran sungai dan di bawah lereng bukit serta drainase yang kurang baik akan meningkatkan dampak bencana dan/atau jumlah jiwa terpapar.
4. Alih Fungsi Lahan dan Vegetasi: Penggundulan hutan, penebangan liar, dan pengurangan vegetasi penutup lereng mengurangi stabilitas tanah.
5. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi dan tindakan saat bencana.
6. Kurangnya infrastruktur atau sistem peringatan dini yang menjangkau masyarakat lokal secara cepat.
7. Penegakan aturan tata ruang yang lemah memungkinkan pembangunan di zona merah bencana.

Berdasarkan upaya mitigasi dan konteks daerah rawan bencana, berikut adalah solusi yang telah dan akan dilakukan untuk menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Manggarai:

1. Mitigasi Non-Struktur (Penyadaran dan Kapasitas Masyarakat):
 - a. Pembentukan Tim Siaga Bencana (SIBAT): Mengaktifkan dan memperkuat Komite Pengurangan Risiko Bencana (PRB) serta tim SIBAT di tingkat desa/kecamatan untuk mempercepat respons dan evakuasi.



- b. Edukasi Mitigasi Masyarakat : Melakukan sosialisasi mengenai adaptasi perubahan iklim dan risiko bencana (tanah longsor, banjir) kepada masyarakat.
 - c. Pelatihan dan Simulasi Bencana: Melakukan simulasi evakuasi secara berkala di sekolah, perkantoran, dan pemukiman rawan untuk mengurangi kerentanan manusia.
 - d. Optimalisasi Forum PRB: Memperkuat Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk menyinergikan kebijakan antara pemerintah, LSM, dan masyarakat.
2. Mitigasi Struktur (Pembangunan Fisik dan Lingkungan):
 - a. Penataan Ruang Berbasis Risiko: Menghindari pembangunan pemukiman di kawasan rawan bencana (seperti tebing terjal atau sempadan sungai) sesuai dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).
 - b. Penguatan Infrastruktur Dasar: Membangun drainase yang memadai untuk mencegah banjir bandang dan memperkuat pondasi bangunan di daerah rawan pergerakan tanah.
 - c. Reboisasi dan penghijauan dengan menanam pohon berakar dalam pada lereng-lereng kritis, restorasi mangrove, dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mencegah tanah longsor, erosi dan banjir.
 - d. Sistem Peringatan Dini: Pemasangan alat peringatan dini (*Early Warning System*) di wilayah rawan longsor dan banjir.
3. Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan:
 - a. Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana): Menyusun dan memperbarui RPB untuk memperkuat strategi penanganan bencana.
 - b. Pengintegrasian PRB ke dalam Perencanaan Daerah: Memastikan mitigasi bencana masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).





- c. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB): Menggunakan data **inaRISK** untuk pemetaan bahaya yang lebih rinci agar pengambilan keputusan lebih tepat sasaran.
- d. Aktifkan Posko Siaga Bencana: Mengaktifkan posko bencana secara cepat dan tepat untuk merespons dampak cuaca ekstrem.

Dalam pencapaian tujuan **MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL**, didukung oleh 4 (Empat) sasaran pembangunan, yaitu:

Sasaran 10 : *Meningkatnya Ketertiban Umum*

Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA

Target 40,43 → Realisasi 40,58 → Capaian Kinerja 100,27% → ISTIMEWA

Perhitungan Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA =

$$\frac{(\text{Pelanggaran tahun ini} - \text{Pelanggaran tahun lalu})}{\text{Pelanggaran tahun lalu}} \times 100$$

Angka pelanggaran terhadap Perda/Perkada di Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebanyak 260 pelanggaran atau bertambah 75 pelanggaran dari tahun 2024 yang mencapai 185 pelanggaran. Dengan demikian realisasi indikator sasaran ini adalah 40,58% dari target 40,43% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 100,27% predikat kinerja Istimewa. Angka pelanggaran terhadap PERDA/Perkada sebanyak 260 ini semuanya telah ditangani dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Sementara pada tahun 2024, angka pelanggaran terhadap Perda/Perkada di Kabupaten Manggarai sebanyak 185 pelanggaran atau bertambah 43 pelanggaran dari tahun 2023 yang mencapai 142 pelanggaran.

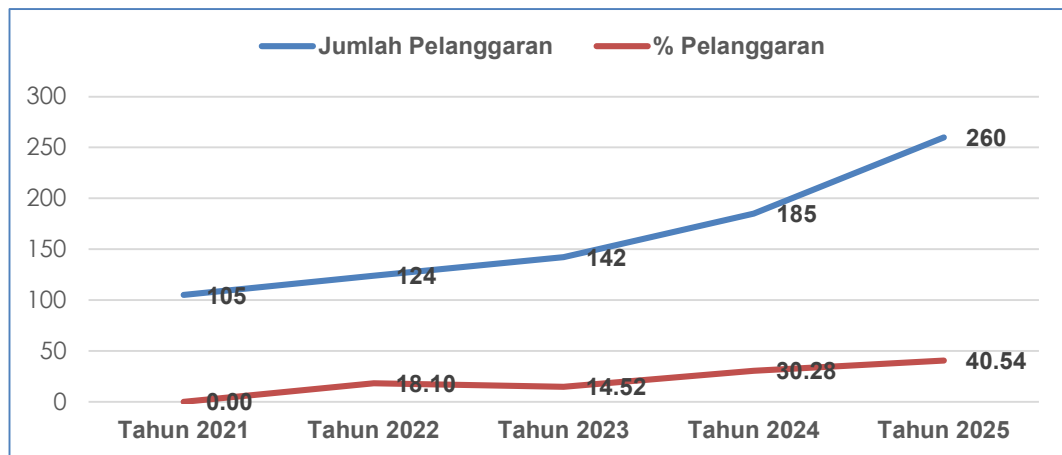
Tabel 3.17
Data Pelanggaran Perda/Perkada
Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	% Pelanggaran PERDA	Ket.
1	2021	105	-	
2	2022	124	18,10	
3	2023	142	14,52	
4	2024	185	30,28	
5	2025	260	40,54	

Sumber: SATPOLPP dan Damkar, 2025



Grafik 3.19
Angka Pelanggaran PERDA/PERKADA
Tahun 2021-2025



Angka pelanggaran terhadap PERDA/PERKADA dalam kurun waktu tahun 2021-2025 terus meningkat. Hal ini antara lain disebabkan :

1. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan Perda/Perkada.
2. Kesadaran masyarakat akan Perda/Perkada menurun.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
4. Sumber Daya Manusia dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas menyebabkan pelaksanaan program penegakan perda/perkada kurang optimal.

Langkah-langkah antisipatif dan alternatif solusi yang dilakukan:

1. Koordinasi yang lebih terencana dan lebih terorganisir dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Perda/Perkada serta pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
2. Peningkatan SDM anggota Satpol PP dan Damkar baik dari segi kualitas maupun kuantitas melalui diklat sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
4. Melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kali Lima (PKL).
5. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait penegakan Perda/Perkada.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran di atas pada tahun 2025 sebagai berikut:



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.324.719.057,00	1.249.653.555,00	94,33
Total Anggaran	1.324.719.057,00	1.249.653.555,00	94,33

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran *Meningkatnya Ketertiban Umum* sebesar Rp1.324.719.057,00 realisasi Rp1.249.653.555,00 atau 94,33%.

Sasaran 11 : Menurunnya Gangguan Kohesivitas Sosial
Indikator Angka konflik sosial
Target 4 → Realisasi 3 → Capaian Kinerja 125,00% → ISTIMEWA

Konflik sosial sepertinya tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Menjadi soal serius ketika konflik sosial itu mengganggu rasa aman dan nyaman seseorang atau sekelompok orang. Apalagi kalau berdampak pada kerugian material maupun immaterial. Dengan demikian setiap konflik sosial sekecil apapun harus diselesaikan agar tidak menghambat kegiatan sosial manusia sebagai pribadi maupun komunitas.

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Meskipun pada tahun 2025 jumlah Angka Kejadian Konflik Sosial **3 (tiga)**, namun berdasarkan data yang dihimpun selama tahun 2025 tercatat 12 (dua belas) kejadian **potensi** konflik. Kejadian potensi konflik yang dilaporkan oleh mitra kerja/masyarakat maupun yang terpantau langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai selanjutnya dilakukan upaya penanganan yang berupa deteksi dini dan cegah dini yaitu segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak terkait, pengamanan tertutup, dialog, sosial *conditioning* dan melaporkan/menyampaikan telaahan kepada pimpinan.



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kerukunan dan harmoni masyarakat di Kabupaten Manggarai cukup tinggi.
2. Dukungan dan sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
3. Peran Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh forum kemitraan yang berpengaruh dan kharismatik sehingga mampu meredam potensi-potensi konflik di masyarakat.
4. Peran aktif dan pelibatan Pemerintah Desa/Kalurahan dalam kegiatan pencegahan konflik sosial melalui optimalisasi Deteksi Dini Cegah Dini di tingkat Desa/Kalurahan.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan kondisi Kabupaten Manggarai yang kondusif tanpa Konflik Sosial antara lain:

1. Adanya peningkatan kejadian (insiden pelanggaran hukum, gesekan di masyarakat, demonstrasi, bentrok fisik antar anggota kelompok masyarakat) bidang sosial budaya dan bidang politik yang berpotensi memunculkan konflik di masyarakat dan jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan.
2. Pemantauan tentang aktivitas Ormas, LSM dan WNA yang belum terkoordinir dengan baik, pemantauan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga kemungkinan tindak kriminalitas yang muncul.
3. Belum optimalnya pemanfaatan jejaring komunikasi dan pelaporan intelijen, pembinaan serta fasilitasi terhadap mitra pemerintah daerah (Jejaring Intelijen, Ormas/LSM, FKUB, FKDM, FPK, FKAP, instansi vertikal terkait dll).

Strategi peningkatan capaian kinerja :

1. Memperkuat kelembagaan FKDM, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, FORKOPIMDA dan jejaring intelijen dengan cara menyusun regulasi, tata kerja dan menambah sarana prasarana deteksi dini cegah dini.
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan pemahaman kehidupan Demokrasi serta Hak Asasi Manusia terlebih menyambut Pemilu dan Pemilukada serentak melalui sosialisasi dan edukasi.
3. Optimalisasi dan peningkatan frekuensi pemantauan kegiatan Ormas/LSM, WNA di masyarakat, agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang



mengarah pada penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan potensi ke kriminal.

4. Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan mitra pemerintah daerah (Ormas/LSM, FKUB, FKDM, FPK, FKAP, instansi vertikal terkait dll).

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2024 sebagai berikut:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	268.094.000,00	262.339.000,00	97,85
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	219.334.500,00	218.843.660,00	99,78
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	718.432.200,00	718.432.200,00	100,00
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.053.000,00	9.053.000,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	29.950.500,00	26.610.500,00	88,85
Total Anggaran	1.244.864.200,00	1.235.278.360,00	99,23

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Menurunnya Gangguan Kohesivitas Sosial** sebesar Rp1.244.864.200,00 realisasi Rp1.235.278.360,00 atau 99,23%.

Sasaran 12 : **Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana**

Indikator Indeks ketahanan daerah (IKD)

Target 0,49 (Sedang) → Realisasi 0,34 (Rendah) → Capaian Kinerja 69,39% → CUKUP

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di



daerah dengan mengimpelementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit Perangkat Daerah dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bapperida di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

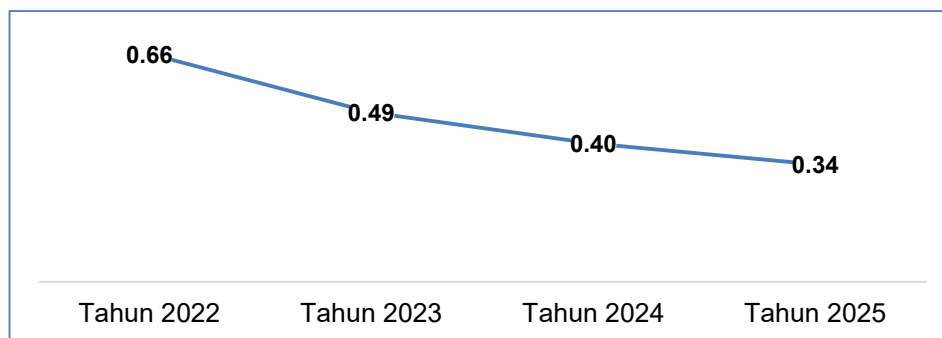
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dan juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

IKD menggambarkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, dimana semakin tinggi nilainya, semakin baik ketahanan daerah tersebut begitupun sebaliknya.

IKD tahun 2025 yang disajikan dalam laporan ini adalah IKD hasil perhitungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang termuat dalam surat Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B-48/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 Hal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IKD Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sesuai surat tersebut adalah 0,34 poin dengan kelas IKD **Rendah**. IKD 0,34 poin tahun 2025 ini turun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai **0,40 poin** dengan kategori **Sedang**. Realisasi 0,34 poin dari target 0,49 poin maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 69,39% predikat kinerja CUKUP.



Grafik 3.20
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

IKD Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2022-2025 terus mengalami penurunan dari 0,66 tahun 2022 menjadi 0,34 tahun 2025. Penurunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencerminkan melemahnya kapasitas pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola risiko bencana, yang diukur melalui 71 indikator.

Faktor utama turunnya IKD meliputi **rendahnya anggaran penanggulangan, lemahnya mitigasi, dan kurangnya koordinasi sektoral**. Penurunan ini berpotensi meningkatkan risiko bencana, terutama jika ancaman tinggi dan kapasitas rendah.

Tabel 3.18
Perbandingan Nilai IKD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT
TAHUN 2024-2025

No	Kabupaten/Kota	IKD 2024	IKD 2025	Kelas IKD 2025
1	Sumba Barat	0,31	0,44	Sedang
2	Sumba Timur	0,49	0,50	Sedang
3	Kupang	-	0,39	Rendah
4	Timor Tengah Selatan	0,36	0,34	Rendah
5	Timor Tengah Utara	0,35	0,44	Sedang
6	Belu	0,38	0,43	Sedang
7	Alor	0,53	0,36	Rendah
8	Lembata	0,42	0,51	Sedang
9	Flores Timur	0,52	0,54	Sedang
10	Sikka	0,44	0,44	Sedang
11	Ende	0,40	0,39	Rendah
12	Ngada	-	0,34	Rendah
13	Manggarai	0,40	0,34	Rendah
14	Manggarai Barat	0,50	0,53	Sedang
15	Manggarai Timur	0,44	0,46	Sedang
16	Rote Ndao	0,52	0,40	Rendah
17	Sumba Tengah	0,25	0,38	Rendah
18	Sumba Barat Daya	0,31	0,29	Rendah



No	Kabupaten/Kota	IKD 2024	IKD 2025	Kelas IKD 2025
19	Nagekeo	0,51	0,49	Sedang
20	Sabu Raijua	0,29	0,38	Rendah
21	Malaka	-	0,29	Rendah
22	Kota Kupang	0,44	0,41	Sedang

Sumber : BNPB, 2025

Faktor penyebab penurunan IKD, antara lain:

1. Kapasitas daerah yang rendah, yang merupakan hasil dari kurangnya komitmen dalam mitigasi bencana (pra-bencana) dan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring yang tidak optimal.
2. Kurangnya integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) dalam kebijakan daerah, kurangnya perencanaan anggaran, dan koordinasi antar Perangkat Daerah yang lemah.
3. Banyaknya Penduduk rentan baik fisik, sosial dan ekonomi.

Alternatif solusi yang ditempuh untuk mengatasinya antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan BPBD, peningkatan anggaran mitigasi, dan komitmen Pemda dalam mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan.
2. Mengurangi kerentanan yang ada di daerah, baik itu berupa kerentanan yang sifatnya fisik, sosial maupun kerentanan akibat ekonomi serta memperbanyak program-program pembangunan yang dapat mengurangi berbagai ancaman yang ada di daerah.
3. Meningkatkan sinergitas dengan instansi lain untuk melakukan upaya pengurangan faktor dasar penyebab risiko bencana.
4. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung terlaksananya fasilitas koodinasi kebencanaan yang ada.
5. Memberdayakan aparatur dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi potensi ancaman bencana.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2024 sebagai berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penanggulangan Bencana	461.607.939,00	190.890.860,00	41,35
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	111.722.000,00	109.412.000,00	97,93



Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Total Anggaran	573.329.939,00	300.302.860,00	52,38

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana** sebesar Rp573.329.939,00 realisasi Rp300.302.860,00 atau 52,38%.

Sasaran 13 : **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana**

Indikator Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Memiliki Bangunan Pengendali Bencana

Target 47,17 → Realisasi 33,62 → Capaian Kinerja 69,79% → CUKUP

Sesuai data Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, realisasi kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana sampai dengan tahun 2025 mencapai 33,62% atau sekitar 7,77 Ha dari 23,12 kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kabupaten Manggarai. Realisasi 33,62% dari target 47,17% maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 69,79% predikat kinerja CUKUP.

Tabel 3.19

Kawasan Rawan Bencana yang Memiliki Bangunan Pengendali Bencana
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Luas Kawasan Rawan Bencana (Ha)	Luas Kawasan rawan bencana yang memiliki Bangunan Pengendali Bencana (Ha)	% Kawasan rawan bencana yang memiliki Bangunan Pengendali Bencana	Ket
1	2021	23,12	3,84	16,60	Data kondisi awal RPJMD 2021-2026
2	2022	23,12	1,06	4,58	Persentase hanya untuk tahun 2022
3	2023	23,12	2,81	12,15	Persentase hanya untuk tahun 2023
4	2024	23,12	0,00	0,00	Tahun 2024, luas kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana 0,00 atau tidak ada.
5	2025	23,12	0,06	0,26	Persentase hanya untuk tahun 2025



No	Tahun	Luas Kawasan Rawan Bencana (Ha)	Luas Kawasan rawan bencana yang memiliki Bangunan Pengendali Bencana (Ha)	% Kawasan rawan bencana yang memiliki Bangunan Pengendali Bencana	Ket
Total		23,12	7,77	33,62	Persentase akumulasi s/d tahun 2025

Sumber : Dinas PUPR Kab. Manggarai, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, luas kawasan rawan bencana yang memiliki Bangunan Pengendali Bencana sampai dengan tahun 2025 $\pm$ 7,77 Ha atau 33,62% dari total Luas Kawasan Rawan Bencana Kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai 23,12 Ha. Realisasi indikator kinerja ini sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran.

Permasalahan yang terjadi terkait Indikator Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Memiliki Bangunan Pengendali Bencana yaitu identifikasi dan pemetaan lokasi rawan bencana belum sepenuhnya terdata secara detail sehingga penentuan prioritas pembangunan bangunan pengendali bencana di lapangan belum terarah secara optimal.

Solusi yang perlu dilakukan terkait permasalahan di atas yaitu melakukan pemutakhiran peta kawasan rawan bencana melalui survei lapangan cepat dan menetapkan prioritas lokasi penanganan untuk pembangunan atau peningkatan bangunan pengendali secara bertahap pada titik yang paling berisiko.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ***Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana*** tersebut pada tahun 2025 sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	477.005.000,00	475.540.900,00	99,69
Total Anggaran	477.005.000,00	475.540.900,00	99,69

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Bangunan Pengendali Bencana*** sebesar Rp477.005.000,00 realisasi Rp475.540.900,00 atau 99,69%.



TUJUAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)

Laju Inflasi

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,22	5,09	97,51
2	PDRB Perkapita (ADHK, Ribu Rp.)	Ribu Rp per penduduk	11.288	10.502	93,04
3	Laju Inflasi	Angka	2,00	1,74	113,00
Rata-rata					101,18
Predikat Kinerja					Istimewa

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui 3 (tiga) IKU dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101,18% predikat kinerja ISTIMEWA.

INDIKATOR Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target 5,22 → Realisasi 5,09 → Capaian Kinerja 97,51% → BAIK

Sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Tahun 2026, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah 5,09% membaik 1,16% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 3,93%.

Secara umum, sebagian besar kategori yang membentuk PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Sektor yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,53% disusul sektor Industri Pengolahan sebesar 11,96% selanjutnya sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,15%.

Tabel 13.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021-2025
Table 13.2.4 Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Regency/Municipality (percent) in Nusa Tenggara Timur Province, 2021-2025

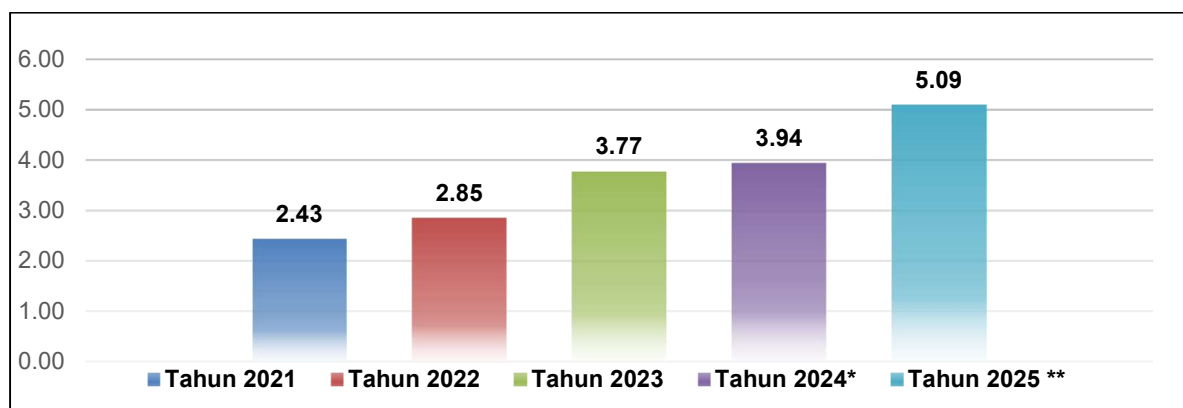
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten / Regency					
1. Sumba Barat	1,03	3,23	3,70	3,75	5,21
2. Sumba Timur	1,15	2,63	3,07	3,63	4,75
3. Kupang	2,75	2,81	3,58	3,57	4,81
4. Timor Tengah Selatan	2,41	3,11	3,21	3,37	4,16
5. Timor Tengah Utara	2,36	2,81	3,04	3,25	4,48
6. Belu	1,75	3,19	3,26	3,99	5,18
7. Alor	2,50	2,98	4,09	4,34	4,57
8. Lembata	1,44	2,58	2,66	3,35	4,47
9. Flores Timur	0,69	1,73	3,00	2,90	4,98
10. Sikka	2,13	3,38	3,74	4,04	5,04
11. Ende	2,13	3,09	3,60	4,01	5,38
12. Ngada	1,13	3,06	3,30	3,66	4,38
13. Manggarai	2,45	2,85	3,77	3,94	5,09
14. Nuro Ndao	2,24	3,52	2,79	3,21	7,56
15. Manggarai Barat	1,29	4,12	4,79	4,93	5,82
16. Sumba Tengah	1,41	2,52	2,91	3,71	5,07
17. Sumba Barat Daya	2,09	3,84	3,07	3,89	4,80
18. Nagekeo	2,08	3,06	3,04	3,16	4,61
19. Manggarai Timur	2,31	3,74	3,44	3,89	4,75
20. Sabu Raija	1,70	3,00	2,28	4,70	5,09
21. Malaka	1,39	3,73	3,77	3,09	4,16
Kota / Municipality					
1. Kota Kupang	1,34	3,40	4,24	4,77	5,70



Tabel 3.20
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Manggarai (persen), 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025 **
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,39	4,48	1,27	0,87	3,35
b.	Pertambangan dan Penggalian	1,88	2,28	5,31	7,08	-0,93
c.	Industri pengolahan	-3,73	4,84	7,17	7,57	11,96
d.	Pengadaan listrik dan Gas	0,50	9,08	11,28	15,07	-5,35
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,55	1,42	5,63	5,49	4,14
f.	Konstruksi	6,34	-0,05	7,84	1,24	-0,39
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	8,76	7,07	8,84	12,53
h.	Transportasi dan Pergudangan	1,70	3,34	4,68	5,55	6,35
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,62	19,03	14,04	15,17	5,96
j.	Informasi dan Komunikasi	3,51	5,00	4,01	2,12	5,40
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	1,21	0,74	3,49	6,90
l.	Real Estat	1,20	3,49	4,09	3,64	1,80
m,n.	Jasa Perusahaan	-13,79	4,63	4,68	7,43	8,15
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,67	0,10	1,31	9,14	6,43
p.	Jasa Pendidikan	-0,03	-0,15	4,89	2,65	7,79
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	3,02	5,14	3,32	4,54
r,s,t,u	Jasa Lainnya	-0,07	0,91	2,97	1,60	1,44
PDRB		2,43	2,85	3,77	3,94	5,09

Grafik 3.21
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025



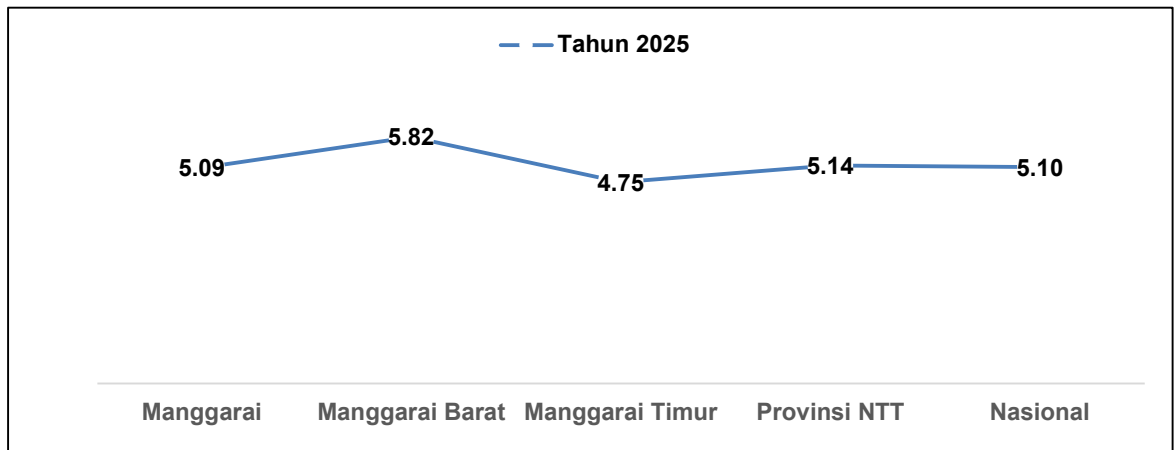
BPS_Manggarai Dalam Angka, 2026

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan dari 2,43% tahun 2021 menjadi 5,09% tahun 2025. Tren peningkatan ini menandakan semakin kokohnya fondasi ekonomi daerah, yang



didorong oleh produktivitas sektor riil (pertanian, UMKM, pariwisata), peningkatan konsumsi rumah tangga, serta efektifnya program pemerintah.

Grafik 3.22
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Kabupaten terdekat, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2025



Sumber : BPS_Prov. NTT Dalam Angka, 2026

Berdasarkan grafik tersebut di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2025 berada di atas Kabupaten Manggarai Timur namun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dan Indonesia/Nasional.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. Tingkat Kemiskinan yang masih relatif tinggi, tahun 2025 mencapai 18,10% atau sekitar 65.810 jiwa.
2. Keterbatasan infrastruktur pendukung dimana Infrastruktur yang belum memadai, termasuk akses transportasi dan jaringan teknologi, menjadi kendala dalam mengolah potensi daerah untuk meningkatkan nilai kompetitif.
3. Belum optimalnya pengolahan potensi pertanian: meskipun sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi sektor utama (PDRB), pengelolaannya belum maksimal untuk diubah menjadi keunggulan kompetitif.

Meskipun terdapat berbagai hambatan tersebut di atas, Kabupaten Manggarai telah menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 2,43% tahun 2021 menjadi 5,09% pada tahun 2025. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Manggarai



telah dan akan terus melakukan penguatan pada sektor unggulan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.

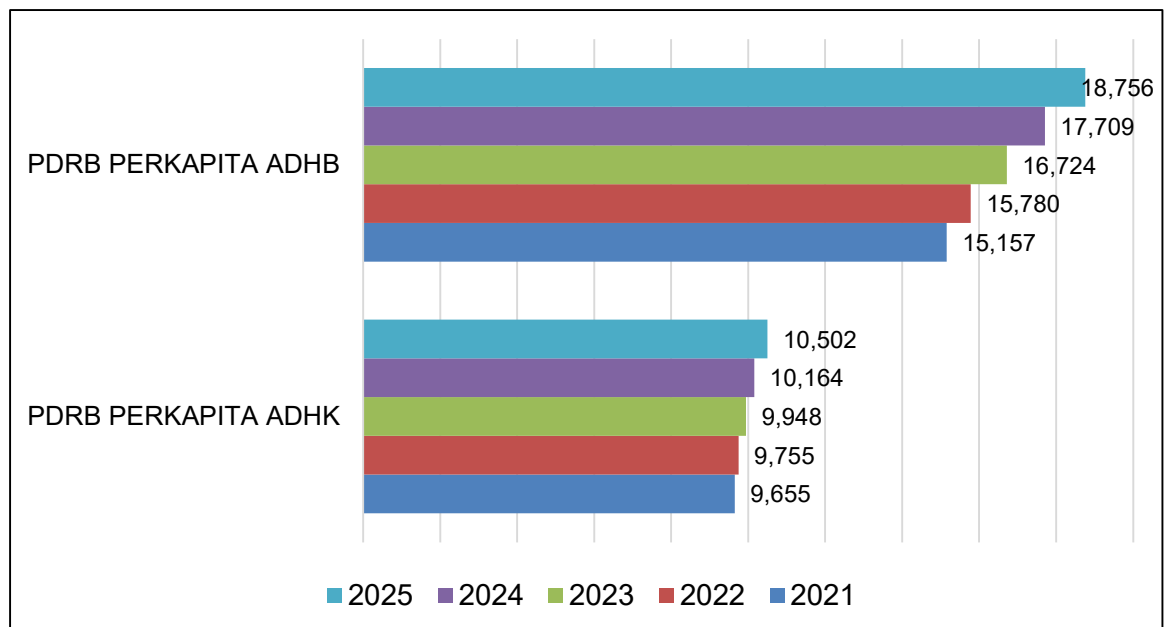
INDIKATOR PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)

Target 11.288 → Realisasi 10.502 → Capaian Kinerja 93,04% → BAIK

Angka PDRB perkapita menunjukkan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan semakin baiknya perekonomian rata-rata penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya angka PDRB yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah pula rata-rata tingkat perekonomian penduduknya. PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Manggarai tahun 2025 sesuai Data Prov. NTT Dalam Angka yang dirilis BPS Prov. NTT Tahun 2026 adalah Rp10.502 atau 93,04% dari yang ditargetkan Rp11.288 dengan predikat kinerja BAIK.

Grafik 3.23

PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.) dan PDRB Per Kapita (ADHB, Ribu Rp.)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



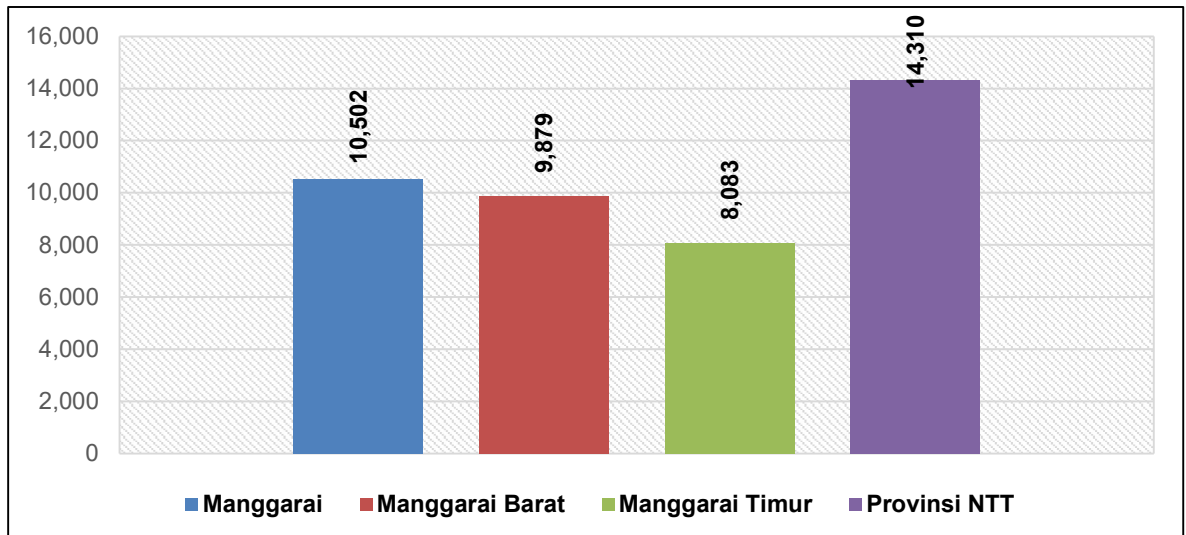
Sumber : BPS_Provinsi NTT Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data pada grafik tersebut di atas, PDRB Per Kapita (ADHK) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan dari Rp9.655 tahun



2021 menjadi Rp10.502 tahun 2025. Demikian juga dengan PDRB Per Kapita (ADHB) dari Rp15.157 tahun 2021 meningkat menjadi Rp18.756 pada tahun 2025.

Grafik 3.24
PDRB Perkapita (ADHK, Ribu Rp.) dan
Perbandingan dengan Kabupaten terdekat, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2025



Sumber : Prov. NTT Dalam Angka-BPS Prov. NTT, 2026 dan Statistik Indonesia, 2026

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Manggarai tahun 2025 berada jauh dibawah PDRB Perkapita Provinsi NTT namun sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur di tahun yang sama.

Permasalahan utama yang perlu diatasi untuk mendorong peningkatan PDRB per Kapita Kabupaten Manggarai:

1. Perekonomian masih dominan pada sektor pertanian/perkebunan tradisional dengan nilai tambah yang rendah karena kurangnya hilirisasi produk.
2. Akses jalan ke sentra produksi pertanian masih terbatas, yang menghambat distribusi dan meningkatkan biaya logistik.
3. Terbatasnya akses terhadap pendidikan keterampilan teknis dan kesehatan, serta aksesibilitas teknologi pertanian yang masih rendah.
4. Pelaku UMKM dan petani kesulitan mendapatkan akses permodalan dari perbankan dan akses langsung ke pasar pariwisata premium (seperti di Manggarai Barat).



Solusi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai, antara lain:

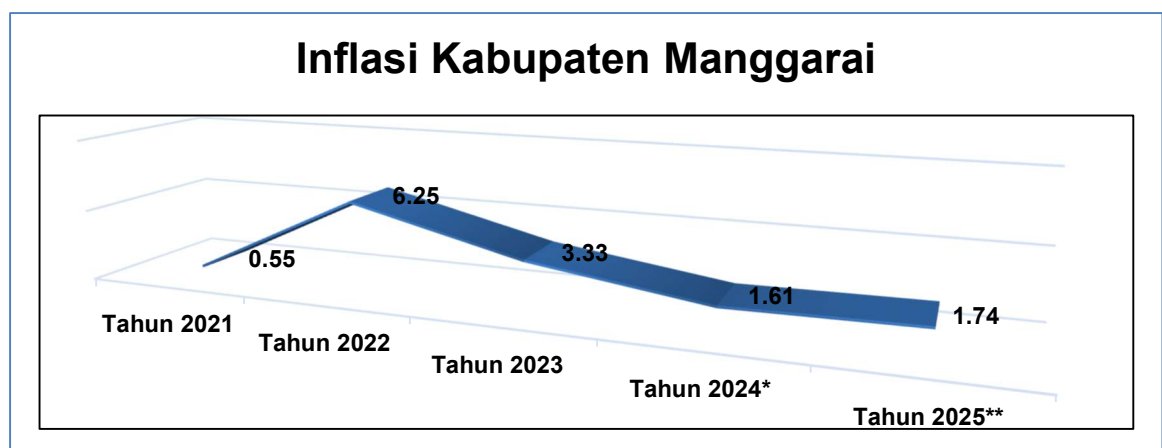
1. Mendorong pendirian industri pengolahan hasil pertanian seperti pengolahan biji kopi menjadi kopi bubuk kemasan.
2. Menghubungkan sektor pertanian (agrowisata) dengan pariwisata di Labuan Bajo. Produk pertanian unggulan Manggarai (kopi, sayur organik) disuplai langsung ke hotel/restoran.
3. Perbaikan dan pelebaran jalan kabupaten ke pusat produksi pertanian kopi/sayur.
4. Penguatan pendidikan vokasi yang berbasis potensi daerah (pertanian, pariwisata) serta pelatihan teknis budidaya organik dan teknologi pascapanen.

INDIKATOR Laju Inflasi

Target 2,00 → Realisasi 1,74 → Capaian Kinerja 113,00% → ISTIMEWA

Inflasi kabupaten/kota di Provinsi NTT dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari 5 (lima) kota inflasi yaitu Kota Kupang, Waingapu, Timor Tengah Selatan, Maumere, dan Kabupaten Ngada. Untuk Kabupaten Manggarai atau Kota Ruteng, Inflasi diperoleh berdasarkan daerah/kota terdekat yaitu Ngada Provinsi NTT. Pada tahun 2025, inflasi Kabupaten Ngada berada pada angka 1,74 persen, artinya inflasi kota Ruteng Kabupaten Manggarai adalah 1,74 persen dari target 2,00% dengan tingkat capaian 113,00% predikat Kinerja ISTIMEWA.

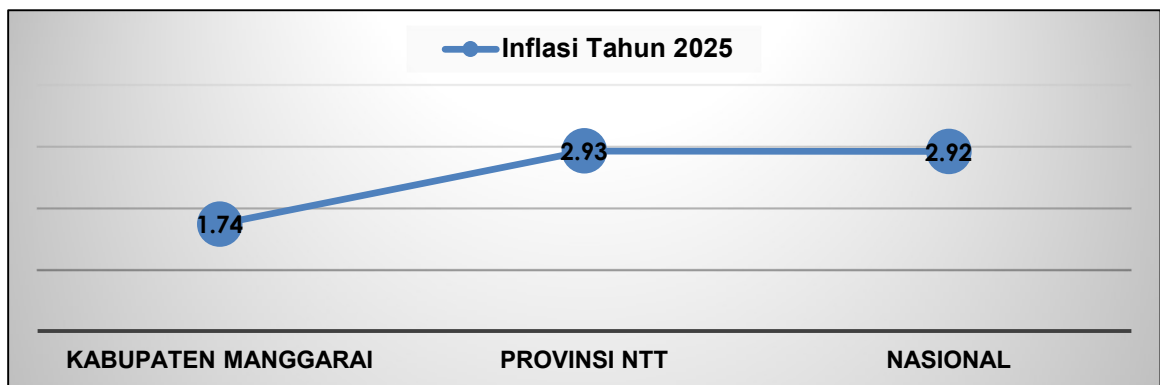
Grafik 3.25
Laju Inflasi Kota Ruteng Kabupaten Manggarai
Sesuai data Kota Inflasi Bajawa Kabupaten Ngada
Tahun 2021-2025





Laju inflasi Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu tahun 2021-2025 diperoleh berdasarkan kota inflasi Maumere (2021-2023) dan Bajawa (2024-2025) berfluktuatif, dimana pada tahun 2021 mencapai 0,55%, naik cukup tinggi tahun 2022 menjadi 6,25%. Tahun 2023 turun menjadi 3,33% dan kembali menurun 1,61% tahun 2024. Namun pada tahun 2025 laju inflasi kembali meningkat menjadi 1,74%.

Grafik 3.26
Laju Inflasi Kota Ruteng Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2025



Inflasi tertinggi sesuai data pada grafik tersebut di atas adalah 2,93% yaitu inflasi Provinsi NTT dan terendah adalah Kabupaten Manggarai yang diperoleh dari wilayah inflasi Kota Bajawa Kabupaten Ngada.

Inflasi tahun 2025 (y-on-y) ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pendidikan sebesar 2,98 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,89 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,72 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 1,98 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,47 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,68 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,63 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,40 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,08 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran lain mengalami penurunan, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,75 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34 persen.

Dalam pencapaian tujuan **MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI**, didukung oleh **dua belas** sasaran pembangunan, yaitu:



Sasaran 14 : ***Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian***

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian

Target 3,84 → Realisasi 3,35 → Capaian Kinerja 87,24% → BAIK

Pada tahun 2025, kontribusi terhadap PDRB dari sektor ini mengalami peningkatan dari 0,87% tahun 2024 menjadi 3,35% tahun 2025. Realisasi 3,35% dari target 3,84% maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 87,24% predikat kinerja BAIK. Selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tersebut, beberapa sektor yang kontribusi terhadap PDRB mengalami peningkatan di tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Manggarai (persen), 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025 **
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,39	4,48	1,27	0,87	3,35
b.	Pertambangan dan Penggalian	1,88	2,28	5,31	7,08	-0,93
c.	Industri pengolahan	-3,73	4,84	7,17	7,57	11,96
d.	Pengadaan listrik dan Gas	0,50	9,08	11,28	15,07	-5,35
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,55	1,42	5,63	5,49	4,14
f.	Konstruksi	6,34	-0,05	7,84	1,24	-0,39
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	8,76	7,07	8,84	12,53
h.	Transportasi dan Pergudangan	1,70	3,34	4,68	5,55	6,35
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,62	19,03	14,04	15,17	5,96
j.	Informasi dan Komunikasi	3,51	5,00	4,01	2,12	5,40
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	1,21	0,74	3,49	6,90
l.	Real Estat	1,20	3,49	4,09	3,64	1,80
m,n.	Jasa Perusahaan	-13,79	4,63	4,68	7,43	8,15
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,67	0,10	1,31	9,14	6,43
p.	Jasa Pendidikan	-0,03	-0,15	4,89	2,65	7,79
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	3,02	5,14	3,32	4,54
r,s,t,u	Jasa Lainnya	-0,07	0,91	2,97	1,60	1,44
PDRB		2,43	2,85	3,77	3,94	5,09

Sasaran “***Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian***” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyuluhan Pertanian	934.517.239,00	855.354.840,00	91,53
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.788.499.195,00	4.322.119.930,00	90,26
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	175.586.900,00	166.894.300,00	95,05
Program Perizinan Usaha Pertanian	0,00		0,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.794.328.244,00	7.359.100.840,00	94,42
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	564.749.973,00	491.277.030,00	86,99
Total Anggaran	14.257.681.551,00	13.194.746.940,00	92,54

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian*** sebesar Rp14.257.681.551,00 realisasi Rp13.194.746.940,00 atau 92,54%.

Sasaran 15 : <i>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan</i>
Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan
Target 3,84 → Realisasi 3,35 → Capaian Kinerja 87,24% → BAIK

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis BPS Kabupaten Manggarai tahun 2026, realisasi Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan 3,35% tahun 2025 merupakan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai menurut Lapangan Usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan demikian laju pertumbuhan 3,35% termasuk pertumbuhan sub sektor perikanan. Realisasi 3,35% dari target 3,84% maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 87,24% predikat kinerja BAIK.

Tabel 3.22
Produksi Perikanan Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jlh. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jlh. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Jumlah
1	2021	7.542,00	151,17	7.693,17
2	2022	7.505,56	158,30	7.663,86
3	2023	7.381,99	165,83	7.547,82
4	2024	7.392,90	173,22	7.566,12
5	2025	7.466,83	174,045	7.640,88

Sumber: Perikanan Kab. Manggarai, 2025



Langkah-langkah yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan produksi perikanan antara lain:

1. Penambahan alokasi anggaran untuk perluasan dan peningkatan infrastruktur perikanan budidaya dan peningkatan kualitas produksi perikanan di masyarakat.
2. Penambahan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur.
3. Pembentukan kelompok perikanan budidaya.

Sasaran “**Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Perikanan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	323.784.314,00	319.319.196,00	98,62
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.022.440.059,00	993.701.434,00	97,19
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	41.830.000,00	41.542.419,00	99,31
Total Anggaran	1.388.054.373,00	1.354.563.049,00	97,59

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan** sebesar Rp1.388.054.373,00 realisasi Rp1.354.563.049,00 atau 97,59%.

Sasaran 16 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri
Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
Target 6,31 → Realisasi 11,96 → Capaian Kinerja 189,54% → ISTIMEWA

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan menjadi salah satu yang mengalami percepatan pertumbuhan. Sesuai data MDA-BPS Kabupaten Manggarai Tahun tahun 2026, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2025 mencapai 11,96%. Realisasi 11,96% tahun 2025 melampaui target yang diperjanjikan yaitu sebesar 6,31% dengan tingkat capaian 189,54% predikat kinerja ISTIMEWA.



Tabel 3.23
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Manggarai (persen), 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025 **
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,39	4,48	1,27	0,87	3,35
b.	Pertambangan dan Penggalian	1,88	2,28	5,31	7,08	-0,93
c.	Industri Pengolahan	-3,73	4,84	7,17	7,57	11,96
d.	Pengadaan listrik dan Gas	0,50	9,08	11,28	15,07	-5,35
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,55	1,42	5,63	5,49	4,14
f.	Konstruksi	6,34	-0,05	7,84	1,24	-0,39
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	8,76	7,07	8,84	12,53
h.	Transportasi dan Pergudangan	1,70	3,34	4,68	5,55	6,35
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,62	19,03	14,04	15,17	5,96
j.	Informasi dan Komunikasi	3,51	5,00	4,01	2,12	5,40
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	1,21	0,74	3,49	6,90
l.	Real Estat	1,20	3,49	4,09	3,64	1,80
m,n.	Jasa Perusahaan	-13,79	4,63	4,68	7,43	8,15
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,67	0,10	1,31	9,14	6,43
p.	Jasa Pendidikan	-0,03	-0,15	4,89	2,65	7,79
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	3,02	5,14	3,32	4,54
r,s,t,u	Jasa Lainnya	-0,07	0,91	2,97	1,60	1,44
PDRB		2,43	2,85	3,77	3,94	5,09

Sumber : MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2026

Sasaran “**Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	676.240.439,00	668.470.750,00	98,85
Total Anggaran	676.240.439,00	668.470.750,00	98,85

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri** sebesar Rp676.240.439,00 realisasi Rp668.470.750,00 atau 98,85%.



Sasaran 17 : **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata**

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Target 5,68 → Realisasi 5,96 → Capaian Kinerja 104,93% → ISTIMEWA

Pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun 2025 mencapai 5,96% dari target sebesar 5,68% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,93% predikat kinerja ISTIMEWA. Realisasi 5,68 tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 9,49 poin dari tahun 2024 yang mencapai 15,17 persen.

Tabel 3.24

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Manggarai (persen), 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025 **
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,39	4,48	1,27	0,87	3,35
b.	Pertambangan dan Penggalian	1,88	2,28	5,31	7,08	-0,93
c.	Industri Pengolahan	-3,73	4,84	7,17	7,57	11,96
d.	Pengadaan listrik dan Gas	0,50	9,08	11,28	15,07	-5,35
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,55	1,42	5,63	5,49	4,14
f.	Konstruksi	6,34	-0,05	7,84	1,24	-0,39
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	8,76	7,07	8,84	12,53
h.	Transportasi dan Pergudangan	1,70	3,34	4,68	5,55	6,35
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,62	19,03	14,04	15,17	5,96
j.	Informasi dan Komunikasi	3,51	5,00	4,01	2,12	5,40
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	1,21	0,74	3,49	6,90
l.	Real Estat	1,20	3,49	4,09	3,64	1,80
m,n.	Jasa Perusahaan	-13,79	4,63	4,68	7,43	8,15
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,67	0,10	1,31	9,14	6,43
p.	Jasa Pendidikan	-0,03	-0,15	4,89	2,65	7,79
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	3,02	5,14	3,32	4,54
r,s,t,u	Jasa Lainnya	-0,07	0,91	2,97	1,60	1,44
PDRB		2,43	2,85	3,77	3,94	5,09

Sumber : MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2026

Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai, langkah-langkah yang dilakukan:

1. Melakukan penataan terhadap obyek-obyek wisata yang telah ada maupun obyek-obyek wisata baru.
2. Melakukan promosi obyek-obyek wisata melalui media massa dan elektronik.



3. Melakukan pembinaan dan penertiban terhadap sektor-sektor jasa usaha yang menunjang kegiatan kepariwisataan seperti pembinaan terhadap pemilik hotel dan restoran, pemilik tempat rekreasi dan hiburan umum. Upaya-upaya itu dilakukan dengan harapan para pengusaha dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan mengembangkan produk-produk wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan.
4. Melakukan pendekatan sosial budaya kepada para pemilik lahan yang berpotensi sebagai obyek wisata untuk dikembangkan lewat program dan kegiatan sektor pariwisata agar memiliki daya tarik yang signifikan.

Sasaran “**Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	62.780.000,00	57.180.000,00	91,08
Program Pemasaran Pariwisata	239.520.000,00	238.530.000,00	99,59
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	59.620.000,00	59.611.322,00	99,99
Total Anggaran	361.920.000,00	355.321.322,00	98,18

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata** sebesar Rp361.920.000,00 realisasi Rp355.321.322,00 atau 98,18%.

Sasaran 18 : **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan**

Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Target 6,01 → Realisasi 12,53 → Capaian Kinerja 208,49% → ISTIMEWA

Salah satu sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor. Pada tahun 2025, kontribusi sektor ini terhadap laju pertumbuhan PDRB ADHK mencapai 12,53 persen meningkat dari 6,01 persen dengan tingkat capaian kinerja 208,49 persen predikat kinerja ISTIMEWA.



Tabel 3.25
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Manggarai (persen), 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry		Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025 **
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,39	4,48	1,27	0,87	3,35
b.	Pertambangan dan Penggalian	1,88	2,28	5,31	7,08	-0,93
c.	Industri Pengolahan	-3,73	4,84	7,17	7,57	11,96
d.	Pengadaan listrik dan Gas	0,50	9,08	11,28	15,07	-5,35
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,55	1,42	5,63	5,49	4,14
f.	Konstruksi	6,34	-0,05	7,84	1,24	-0,39
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	8,76	7,07	8,84	12,53
h.	Transportasi dan Pergudangan	1,70	3,34	4,68	5,55	6,35
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,62	19,03	14,04	15,17	5,96
j.	Informasi dan Komunikasi	3,51	5,00	4,01	2,12	5,40
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	1,21	0,74	3,49	6,90
l.	Real Estat	1,20	3,49	4,09	3,64	1,80
m,n.	Jasa Perusahaan	-13,79	4,63	4,68	7,43	8,15
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,67	0,10	1,31	9,14	6,43
p.	Jasa Pendidikan	-0,03	-0,15	4,89	2,65	7,79
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	3,02	5,14	3,32	4,54
r,s,t,u	Jasa Lainnya	-0,07	0,91	2,97	1,60	1,44
PDRB		2,43	2,85	3,77	3,94	5,09

Sumber : MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2026

Faktor penghambat yang menyebabkan tercapai/tidak tercapainya kinerja ini antara lain adalah :

1. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan.
2. Kurangnya promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, langkah-langkah yang dilakukan, antara lain :

1. Peningkatan sarana distribusi perdagangan.
2. Pembinaan secara rutin terhadap pedagang/petani dan pelaku usaha.
3. Peningkatan SDM.
4. Promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Sasaran “**Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:



Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	36.821.878,00	36.645.176,00	99,52
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	119.130.000,00	118.900.001,00	99,81
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	28.770.000,00	27.887.000,00	96,93
Total Anggaran	184.721.878,00	183.432.177,00	99,30

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan*** sebesar Rp184.721.878,00 realisasi Rp183.432.177,00 atau 99,30%.

Sasaran 19 : <i>Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal</i>
Indikator Persentase Peningkatan Realisasi PMDN
Indikator Persentase Peningkatan Realisasi PMA

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN	Persen	5,00	58,99	1179,86
2	Persentase Peningkatan Realisasi PMA	Persen	5,00	0,00	0,00
Rata-rata					589,93
Kategori					Istimewa

Sasaran "***Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal***" diukur menggunakan 2 (dua) indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas dengan rata-rata capaian sebesar 589,93%, Predikat Kinerja ISTIMEWA.

Sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari ke-2 indikator sasaran yang mempunyai data realisasi hanya indikator "Persentase Peningkatan Realisasi PMDN". Sedangkan indikator "Persentase Peningkatan Realisasi PMA" tidak ada realisasi karena belum adanya investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Manggarai.

Tabel 3.26
Data Investor dan Nilai Investasi Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp)	% Peningkatan Realisasi Investasi	Ket.
1	2021	63	271.084.902.297,00	-	-
2	2022	115	195.134.403.611,00	-28,02	Nilai Investasi tahun 2022 turun dari tahun 2021



No	Tahun	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Rp)	% Peningkatan Realisasi Investasi	Ket.
3	2023	156	181.995.578.575,00	-6,73	Nilai Investasi tahun 2023 turun dari tahun 2022
4	2024	179	154.671.191.707,00	-15,01	Nilai Investasi tahun 2024 turun dari tahun 2023
5	2025	739	245.916.532.796,00	58,99	Nilai Investasi tahun 2025 naik dari tahun 2024

Sesuai tabel tersebut di atas, jumlah realisasi investasi PMDN di Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2021-2024 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2025 meningkat signifikan. Peningkatan realisasi nilai investasi tahun 2025 tersebut antara lain disebabkan karena adanya kesinambungan kebijakan hilirisasi dan kemudahan berusaha yang konsisten untuk menjaga kepercayaan investor, melalui:

1. Promosi potensi daerah untuk menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Manggarai.
2. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil, baik dalam memfasilitasi pengurusan perizinan melalui sistem OSS, aplikasi Pusat Pelayanan Informasi Perizinan Terpadu (Puspita) dan Pelayanan Perizinan Prima-Cepat, Transparan dan Terintegrasi (Prima Cetar).

Kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Minimnya sumber daya pelaku usaha dalam memahami tatacara penyampaian laporan penanaman modal.
2. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang tatacara penyampaian laporan penanaman modal dan proses perijinan secara mandiri melalui OSS RBA.
3. Kurangnya Pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil, baik dalam memfasilitasi pengurusan perizinan melalui sistem OSS maupun terhadap kewajiban (penyampaian kegiatan penanaman modal).
4. Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami dengan baik dan benar tentang tatacara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *Online*.
5. Pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan komitmen usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Perusahaan dengan skala usaha menengah/besar tidak memiliki penambahan realisasi investasi baik modal tetap maupun modal kerja.
7. Banyaknya pelaku usaha yang berskala mikro/kecil yg melaporkan kegiatan investasinya dimana realisasi investasinya kecil.
8. Minimnya Penambahan Pelaku Usaha baru yang berinvestasi di Kabupaten Manggarai.
9. Kurang promosi potensi investasi.

Solusi yang dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. Meningkatkan promosi potensi daerah untuk menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Manggarai.
2. Mengikutsertakan sebanyak mungkin pelaku usaha menengah/besar dalam kegiatan bimtek tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan sosialisasi terkait regulasi pelaksanaan penanaman modal.
3. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil, baik dalam memfasilitasi pengurusan perizinan melalui sistem OSS, aplikasi Pusat Pelayanan Informasi Perizinan Terpadu (Puspita) dan Pelayanan Perizinan Prima-Cepat, Transparan dan Terintegrasi (Prima Cetar) maupun terhadap kewajiban (penyampaian kegiatan penanaman modal).
4. Mempercepat kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.



Sasaran “**Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.348.000,00	2.348.000,00	100,00
Program Promosi Penanaman Modal	1.652.000,00	1.652.000,00	100,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	36.863.000,00	36.669.000,00	99,47
Program Pelayanan Penanaman Modal	51.463.599,94	30.613.400,00	59,49
Total Anggaran	92.326.599,94	71.282.400,00	77,21



Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal** sebesar Rp92.326.599,94 realisasi Rp71.282.400,00 atau 77,21%.

Sasaran 20 : **Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan**

Indikator Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Target 64,95 → Realisasi 55,88 → Capaian Kinerja 86,04% → BAIK

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap diartikan sebagai jalan kabupaten dengan kondisi permukaan jalan **baik** dan **sedang**. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai data dari Dinas PUPR sampai dengan tahun 2025 adalah 1414,12 Km. Panjang jalan kabupaten tersebut tidak termasuk jalan desa 410,870 Km. Dari 1414,12 Km panjang jalan kabupaten tersebut yang dalam kondisi mantap sepanjang 790,23 Km, terdiri dari jalan **kondisi baik** 542,23 Km dan **sedang** 248,00 Km atau 55,88% dari target 64,95% jalan dalam kondisi mantap tahun 2025. Dengan demikian capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 86,04% predikat kinerja BAIK.

Tabel 3.27
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km)
Tahun 2020-2025

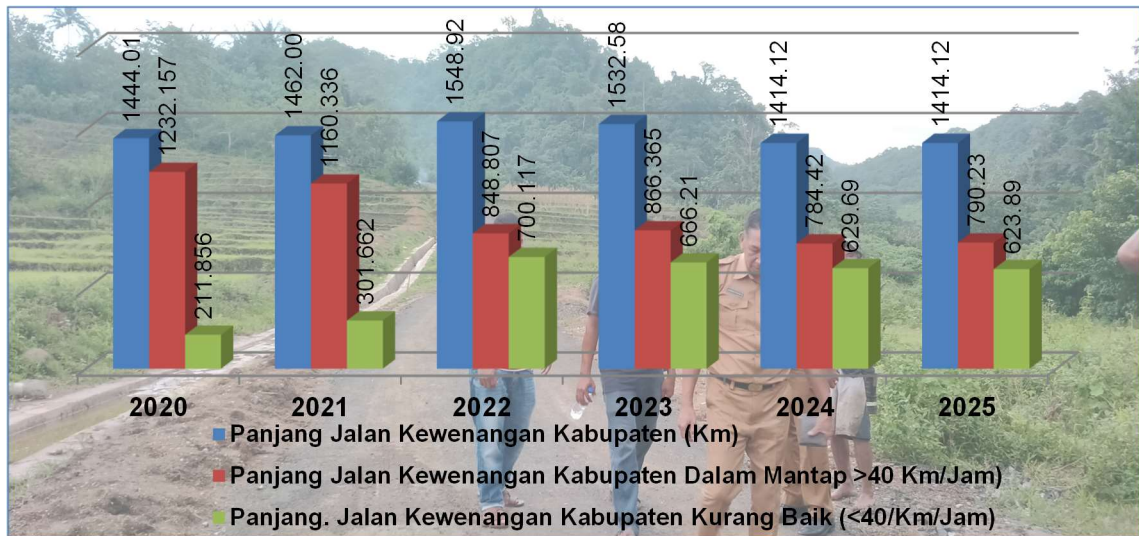
No	S/d Tahun	Panjang Jalan Kabupaten	Pjg. Jln Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang, Km)	% Jalan Kondisi Mantap	Panjang Jalan Kurang Baik (Rusak dan Rusak Berat, Km)	% Jalan Kurang Baik
1	2020	1444,01	1232,157	85,33	211,856	14,67
2	2021	1462,00	1160,336	79,37	301,662	20,63
3	2022	1548,92	848,807	54,80	700,117	45,20
4	2023	1532,575	866,365	56,53	666,21	43,47
5	2024	1414,12	784,42	55,47	629,69	44,53
6	2025	1414,12	790,23	55,88	623,89	44,12

Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, 2025

Ket. - Jalan dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) = Jalan yang kondisi permukaannya baik dan sedang.
- Jalan dalam kondisi kurang baik (<40 Km/Jam) = Jalan yang kondisi permukaannya rusak dan rusak berat.



Grafik 3.27
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Km)
Tahun 2020-2025



Sesuai Hasil Survei Ulang Data Base Jalan, panjang jalan Kabupaten Manggarai tahun 2025 tidak mengalami penambahan panjang jalan dari tahun 2024 yaitu masih 1414,12 Km.

Tabel 3.28
Kondisi jalan di Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025

No	Tahun	Kewenangan Jalan	Jenis Pemukaan (Km)					Kondisi Permukaan (Km)			
			Hotmix	Aspal	Kerikil	Tanah	Perkerjan Beton	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	2020	Nasional	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108,935	0,00	12,00	0,00
		Provinsi NTT	20,16	24,95	0,00	0,00	0,00	17,16	1,50	26,44	0,00
		Kab. Manggarai	264,05	1022,06	74,54	83,38	0,00	768,40	463,76	110,76	101,10
		Desa	0,00	82,36	184,14	144,22	0,15	76,37	2,55	3,58	328,36
2	2021	Nasional	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,935	0,00	11,00	0,00
		Provinsi NTT	20,16	24,95	0,00	0,00	0,00	15,16	1,00	28,94	0,00
		Kab. Manggarai	297,426	918,746	128,360	110,119	7,347	1220,725	36,687	72,315	543,139
		Desa	0,00	106,059	168,090	136,571	0,150	84,957	12,120	9,132	304,661
3	2022	Nasional	108,935	0,00	0,00	0,00	0,00	109,935	0,00	11,00	0,00
		Provinsi NTT	20,16	24,95	0,00	0,00	0,00	15,16	1,00	28,94	0,00
		Kab. Manggarai	293,750	1176,612	23,5920	52,450	2,520	552,468	296,339	69,130	630,987
		Desa	0,00	89,733	175,958	144,691	0,487	100,701	2,623	3,582	303,963
4	2023	Nasional	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,935	0,00	11,000	0,00
		Provinsi NTT	56,56	24,95	0,00	0,00	0,00	50,56	1,00	28,94	0,00
		Kab. Manggarai	331,2507	1122,7623	25,7185	50,3235	2,5200	570,026	296,339	129,711	536,499
		Desa	0,00	89,733	175,958	144,691	0,847	100,701	2,623	3,582	303,963
5	2024	Nasional	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,935	0,00	11,000	0,00
		Provinsi NTT	46,68	24,94	0,00	0,00	0,00	41,68	1,00	28,94	0,00
		Kab. Manggarai	388,12	825,34	137,19	57,92	5,54	518,63	265,79	76,70	552,99
		Desa	0,00	165,85	160,65	83,29	1,09	100,70	2,62	3,58	303,96
6	2025	Nasional	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,935	0,00	11,000	0,00
		Provinsi NTT	46,68	24,94	0,00	0,00	0,00	41,68	1,00	28,94	0,00



No	Tahun	Kewenangan Jalan	Jenis Permukaan (Km)					Kondisi Permukaan (Km)			
			Hotmix	Aspal	Kerikil	Tanah	Perkerjan Beton	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
		Kab. Manggarai	388,12	825,34	137,12	57,92	5,54	542,23	248,00	79,38	544,51
		Desa	0,00	165,85	160,65	83,29	1,09	100,70	2,62	3,58	303,96

Ketecapaian indikator sasaran panjang jalan dalam kondisi mantap sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran, karena terkait dengan pekerjaan fisik.

Permasalahan terkait kondisi jalan di Kabupaten Manggarai yaitu beberapa ruas jalan mengalami penurunan kondisi akibat kerusakan permukaan dan drainase jalan yang kurang berfungsi sehingga mempercepat degradasi struktur jalan.

Terkait permasalahan tersebut di atas maka perlu melaksanakan program pemeliharaan rutin dan perbaikan cepat pada segmen jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang disertai penanganan sistem drainase jalan untuk mencegah kerusakan berulang.

Sasaran "**Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan**" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	77.846.916.940,00	71.318.582.260,00	91,61
Total Anggaran	77.846.916.940,00	71.318.582.260,00	91,61

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan** sebesar Rp77.846.916.940,00 realisasi Rp71.318.582.260,00 atau 91,61%.

Sasaran 21 : <i>Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan</i>
Indikator Persentase Drainase Perkotaan yang Terbangun
Target 84,80 → Realisasi 72,92 → Capaian Kinerja 85,99% → BAIK

Realisasi indikator *Persentase Drainase Perkotaan yang Terbangun* merupakan realisasi akumulasi dari hasil perhitungan tahun ini ditambah dengan hasil perhitungan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025 panjang drainase perkotaan yang dibangun mencapai 1,335 KM dari total panjang jalan kewenangan Kabupate Manggarai tahun 2025 adalah 1414,112 Km atau sekitar 0,094% ditambah realisasi tahun 2024 sebesar 72,82%,



maka *Persentase Drainase Perkotaan yang Terbangun* sudah mencapai **72,92%** atau $\pm$ drainase perkotaan yang sudah dibangun sampai tahun 2025 sepanjang **1.031,17339 Km.**

Realisasi 72,92% tahun 2025 dari target 84,80 maka capaian kinerja dari indikator ini adalah 85,99% predikat kinerja BAIK.

Permasalahan terkait pencapaian indikator *Persentase Drainase Perkotaan yang Terbangun* antara yaitu sebagian jaringan drainase perkotaan belum terhubung secara optimal dan mengalami sedimentasi serta penyumbatan sehingga fungsi pengaliran air belum maksimal.

Solusi yang akan dilakukan yaitu melakukan normalisasi dan penyambungan jaringan drainase yang terputus serta penataan saluran pada titik genangan untuk meningkatkan kelancaran aliran air di kawasan perkotaan.

Tabel 3.29
Data Drainase yang Dibangun
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Panjang Jalan Kab. Manggarai (Km)	Drainase yang Dibangun (Km)	% Drainase yang Dibangun
1	s/d 2021	1461,997	1.055,56	72,20
2	s/d 2022	1548,924	1,62	0,1044
3	s/d 2023	1532,575	2,20	0,1435
4	s/d 2024	1414,112	5,19	0,367
5	s/d 2025	1414,112	1,335	0,094
Jumlah		1414,112	1.031,17339	72,92

Ket. % Drainase yang dibangun disesuaikan dengan panjang jalan kewenangan Kabupaten.

Realisasi indikator sasaran tidak mencapai target yang ditetapkan karena sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran.

Sasaran “***Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan***” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.790.633.826,00	2.766.130.561,00	99,12
Total Anggaran	2.790.633.826,00	2.766.130.561,00	99,12



Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Jaringan Drainase Perkotaan** sebesar Rp2.790.633.829,00 realisasi Rp2.766.130.561,00 atau 99,12%.

Sasaran 22 : **Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan**

Indikator Persentase Luas Daerah Terlayani Irigasi Primer

Target 95,84 → Realisasi 88,97 → Capaian Kinerja 92,83% → BAIK

Realisasi indikator sasaran ini diperoleh dari perbandingan antara luas daerah irigasi yang terlayani irigasi primer (Ha) dibagi luas daerah irigasi (Ha) seluruhnya di Kabupaten Manggarai.

Pada tahun 2025, sesuai data Dinas PUPR Kabupaten Manggarai luas daerah yang terlayani irigasi primer 17.645,01 Ha atau 88,97% dari total luas daerah irigasi Kabupaten Manggarai 19.833,00 Ha. Sementara tahun 2024 tercatat luas daerah irigasi yang terlayani irigasi primer adalah 17.441,01 Ha atau 87,94% dari total luas daerah irigasi Kabupaten Manggarai 19.833 Ha.

Tabel 3.30
Data Daerah Irigasi Kab. Manggarai
2022-2025

No	Tahun	Luas Daerah Irigasi (Ha)	Luas Daerah Irigasi terlayani Irigasi Primer (Ha)	% Luas Daerah Terlayani Irigasi Primer	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)			
					Non Teknis	Teknis		
						Primer	Sekunder	Tersier
1	2022	19.883	14.330,99	72,26	174.737	100.779	25.442,20	1.411
2	2023	19.833	17.266,94	86,86	174.737	100.779	25.442,20	1.411
3	2024	19.833	17.441,01	87,94	161.520,15	101.175,40	38.118,58	1.554,87
4	2025	19.833	17.645,01	88,97	157.898,27	101.175,40	41.740,47	1.554,87

Permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian Indikator Persentase Luas Daerah Terlayani Irigasi Primer adalah beberapa jaringan irigasi primer mengalami penurunan fungsi akibat sedimentasi, kerusakan struktur saluran, serta gangguan pada bangunan pengatur air.

Solusi yang perlu dilakukan adalah melaksanakan rehabilitasi ringan dan pembersihan sedimen pada saluran irigasi primer untuk menjaga keberlanjutan layanan irigasi.



Sasaran “**Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.083.280.000,00	3.054.323.612,00	99,06
Total Anggaran	3.083.280.000,00	3.054.323.612,00	99,06

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Infrastruktur Pengairan Lahan** sebesar Rp3.083.280.000,00 realisasi Rp3.054.323.612,00 atau 99,06%.

Sasaran 23 : Meningkatnya Pelayanan Perhubungan
Indikator Rasio Konektivitas
Indikator Kinerja Lalulintas

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rasio Konektivitas	Angka	0,86	0,73297	85,23
2	Kinerja Lalulintas	Angka	59,37	31,56	53,15
Rata-rata					69,19
Kategori					CUKUP

Sasaran “**Meningkatnya Pelayanan Perhubungan**” diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran tersebut tahun 2025 sebesar 69,19%, turun jika dibandingkan dengan rata-rata tahun 2024 yang mencapai 71,53% dengan predikat Kinerja yang sama yaitu CUKUP.

Indikator Rasio Konektivitas
Target 0,86 → Realisasi 0,73297 → Capaian Kinerja 85,23% → BAIK

Rasio Konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kab. Manggarai x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kab. Manggarai).
 - Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten = 66
 - Jumlah Kebutuhan trayek pada Kabupaten = 72
 - Bobot trayek = 1
 - Bobot angkutan jalan = 70



$$\begin{aligned}\text{IK1 (angkutan jalan)} &= (66 \times 1)/72 \\ &= \mathbf{0,916667}\end{aligned}$$

► IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kab. Manggarai x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut).

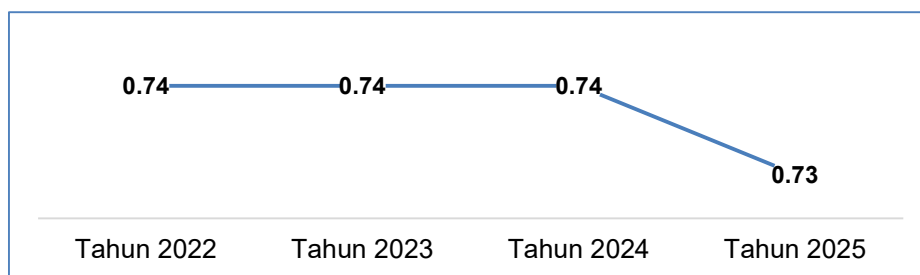
- *Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada wilayah kabupaten (tidak termasuk sungai dan danau) = 14.*
- *Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada wilayah Kabupaten = 23*
- *Bobot lintas = 0,5*
- *Bobot SDP = 30*

$$\begin{aligned}\text{IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)} &= (14 \times 0,5)/23 \\ &= \mathbf{0,304348}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio Konektivitas} &= (0,91667 \times 70\%) + (0,304348 \times 30\%) \\ &= \mathbf{0,73297}\end{aligned}$$

Dengan demikian rasio konektivitas tahun 2025 adalah 0,73297 atau turun dari rasio konektivitas tahun 2024 yang mencapai 0,74.

Grafik 3.28
Rasio Konektivitas 2022-2025



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini, antara lain:

1. Infrastruktur dasar transportasi sudah tersedia dan berfungsi.
2. Jaringan layanan perhubungan telah menjangkau sebagian besar wilayah
3. Adanya kesinambungan program konektivitas antarwilayah.

Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
2. Belum optimalnya integrasi antar moda transportasi.
3. Hambatan geografis dan kondisi infrastruktur yang mulai menurun kualitasnya.



Solusi yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

1. Optimalisasi jaringan yang sudah ada.
2. Peningkatan konektivitas pendukung jaringan ekonomi utama.
3. Perkuat koordinasi lintas sektor (PU, perencanaan wilayah, dan perhubungan).
4. Gunakan teknologi (digitalisasi rute, manajemen jaringan) untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Indikator Kinerja Lalulintas

Target 59,37 → Realisasi 31,56 → Capaian Kinerja 53,15% → KURANG

$$\text{Kinerja Lalulintas} = \frac{V (\text{Volume Lalulintas})}{C (\text{Kapasitas Jalan})} \times 100\%$$

Realisasi capaian indikator sasaran ini adalah 31,56% dari target 59,37% dengan tingkat capaian kinerja 53,15% predikat kinerja KURANG. Realisasi 31,15% diperoleh dari jumlah volume angkutan jalan yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor tahun 2025 sesuai data Dinas Perhubungan dan SAMSAT Ruteng sebanyak 63.670 unit. Sementara panjang jalan seluruhnya di Kabupaten Manggarai adalah sampai dengan tahun 2025 adalah 2017,55 Km yang terdiri dari Jalan Nasional 120,94 Km, Jalan Provinsi 71,62 KM, Jalan Kabupaten 1414,12 Km dan Jalan Desa 410,87 Km.

Tabel 3.31
Data Kinerja Lalulintas
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Kinerja Lalulintas
1	2022	2125,83	46.214	21,74
2	2023	2144,88	58.295	27,18
3	2024	2017,545	60.524	30,00
4	2025	2017,55	63.670	31,56

Ket: - Panjang Jalan sesuai data Dinas PUPR (Jalan Negara, Provinsi, Kabupaten dan Desa)
- Jumlah Kendaraan (Data SAMSAT, Ruteng)

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini, antara lain:

1. Upaya rekayasa lalu lintas dan pengaturan arus mulai berdampak.
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas meskipun tidak secara signifikan.



Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Pertumbuhan volume kendaraan lebih cepat dibanding peningkatan infrastruktur.
2. Titik kemacetan belum tertangani secara menyeluruh.
3. Kenaikan target yang cukup tinggi pada 2025 tidak diimbangi kapasitas jalan.

Solusi yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan manajemen lalu lintas (ATCS, pengaturan jam sibuk, rekayasa simpang).
2. Mendorong penggunaan transportasi umum dan manajemen permintaan perjalanan.
3. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas.
4. Melakukan penyesuaian target agar lebih realistis dan berbasis kapasitas riil.

Sasaran "**Meningkatnya Pelayanan Perhubungan**" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Perhubungan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	790.514.708,00	782.669.730,00	99,01
Program Pengelolaan Pelayaran	54.587.696,00	54.010.206,00	98,94
Total Anggaran	845.102.404,00	836.679.936,00	99,00

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Perhubungan** sebesar Rp845.102.404,00 realisasi Rp836.679.936,00 atau 99,00%.

Sasaran 24 : **Meningkatnya Ketahanan Pangan**

Indikator Indeks Ketahanan Pangan

Target 79,94 → Realisasi 61,54 → Capaian Kinerja 76,98% → CUKUP

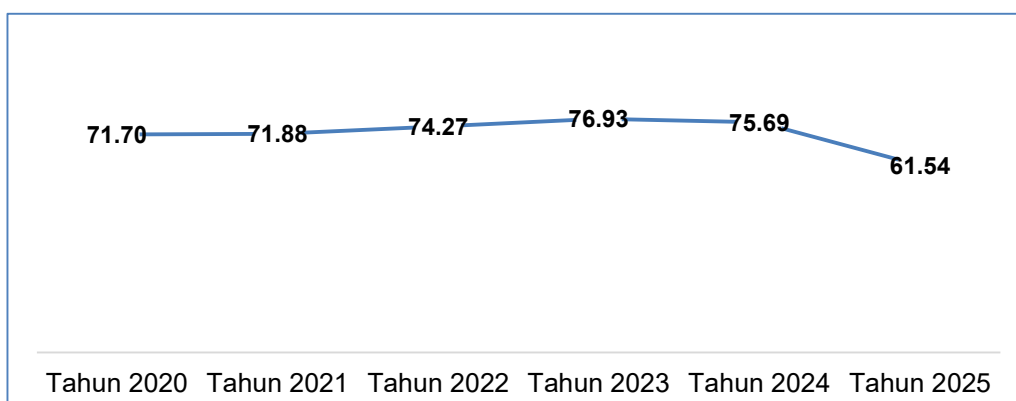
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan



merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Selain itu, dihasilkan pula IKP Nasional yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan nasional.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sesuai data/laporan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2025 adalah 61,54. Realisasi 61,54 dari target 79,94 maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 76,98% predikat kinerja CUKUP.

Grafik 3,29
IKP Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



IKP Kabupaten Manggarai tahun 2025 sesuai grafik tersebut di atas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan IKP tahun 2025 bukan saja terjadi pada IKP Kabupaten Manggarai tetapi juga terjadi pada sebagian besar kabupaten/kota se-Indonesia, provinsi bahkan penurunan juga terjadi pada IKP level Nasional. Penurunan ini terjadi karena perubahan metode penghitungan baru yang lebih komprehensif dengan menambahkan sejumlah indikator.



Tabel 3.32
IKP Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2024-2025

No	Kabupaten/Kota	IKP Tahun		Prioritas Komposit Thn. 2025	Peringkat terhadap 412 Kab/kota se- Indonesia Thn. 2025
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
1	Kupang	70,45	59,51	3 (Agak Rentan)	444
2	Timor Tengah Selatan	67,02	56,47	3 (Agak Rentan)	458
3	Timor Tengah Utara	73,61	58,57	3 (Agak Rentan)	448
4	Belu	71,21	56,52	3 (Agak Rentan)	457
5	Alor	63,81	55,70	3 (Agak Rentan)	465
6	Flores Timur	68,61	59,23	3 (Agak Rentan)	445
7	Sikka	77,22	61,80	4 (Agak Tahan)	430
8	Ende	72,93	63,06	4 (Agak Tahan)	420
9	Ngada	82,72	64,71	4 (Agak Tahan)	402
10	Manggarai	75,69	61,54	4 (Agak Tahan)	433
11	Sumba Timur	70,98	56,94	3 (Agak Rentan)	456
12	Sumba Barat	71,31	55,09	3 (Agak Rentan)	468
13	Lembata	70,11	54,25	3 (Agak Rentan)	474
14	Rote Ndao	71,27	55,34	3 (Agak Rentan)	466
15	Manggarai Barat	78,00	60,88	3 (Agak Rentan)	437
16	Nagekeo	75,20	57,74	3 (Agak Rentan)	453
17	Sumba Tengah	65,96	53,38	2 (Rentan)	476
18	Sumba Barat Daya	62,53	49,22	2 (Rentan)	486
19	Manggarai Timur	66,92	59,62	3 (Agak Rentan)	442



No	Kabupaten/Kota	IKP Tahun		Prioritas Komposit Thn. 2025	Peringkat terhadap 412 Kab/kota se-Indonesia Thn. 2025
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
20	Sabu Raijua	56,66	51,43	2 (Rentan)	480
21	Malaka	71,78	59,56	3 (Agak Rentan)	443
22	Kota Kupang	75,94	59,89	3 (Agak Rentan)	439
Provinsi NTT		71,25	58,24	3 (Agak Rentan)	32 dari 38 Provinsi
Indonesia/Nasional		77,54	73,00	5 (Tahan)	-

Sumber : Laporan Badan Pangan Nasional, 2025

IKP Kabupaten Manggarai tahun 2025 menempati peringkat ke-433 dari 514 Kabupaten/kota se-Indonesia dan berada pada peringkat ke-4 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT di bawah Kabupaten Ngada, Ende dan Sikka.

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan IKP Kabupaten Manggarai, sebagai berikut:

1. Dari Aspek Ketersediaan:
Terbatasnya jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, rendahnya ketersediaan protein hewani dan CBPD (Cadangan Beras Pemerintah Daerah).
2. Dari Aspek Keterjangkauan:
PoU (*Prevalence of Undernourishment*) yang tinggi, terbatasnya daya beli masyarakat karena kemiskinan, dan harga pangan yang berfluktuasi.
3. Dari Aspek Pemanfaatan:
Keamanan pangan, pola konsumsi pangan yang belum beragam, prevalensi balita stunting, akses air bersih, serta rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

Beberapa solusi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan IKP Kabupaten Manggarai ke depan, sebagai berikut:

1. Dari Aspek Ketersediaan:
 - a. Peningkatan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang sesuai dengan potensi lahan dan biodiversitas pangan serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman, dan menerapkan teknologi



inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan.

- b. Pemanfaatan pekarangan, kebun, lahan tidur, lahan marginal, dan talun dalam rangka mendukung cadangan pangan “hidup” berbasis sumberdaya pangan lokal.
 - c. Peningkatan ketersediaan sumber pangan hewani dengan pengembangan peternakan skala kecil terutama untuk unggas dan ternak kecil.
 - d. Pengelolaan keluar masuk barang (distribusi dan perdagangan) untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk.
2. Dari Aspek Keterjangkauan:
- a. Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antarwaktu antarwilayah; termasuk daerah rentan rawan pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen.
 - b. perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau.
 - c. fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan pangan antarwilayah, terutama dari daerah surplus ke daerah defisit pangan.
 - d. Peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif.
 - e. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama di bidang pangan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
 - f. Penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan dirancang untuk memenuhi gizi masyarakat dan dengan memanfaatkan potensi bahan pangan lokal.



3. Dari Aspek Pemanfaatan:

- a. Penjaminan keamanan dan mutu pangan melalui penyusunan regulasi dan standar terkait keamanan dan mutu pangan, serta pengawasan keamanan pangan sebelum produk beredar dan saat diedarkan.
- b. Penyusunan regulasi dan standar terkait keamanan dan mutu pangan.
- c. Penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan pangan lokal.
- d. Penguatan dan pengembangan industri pangan lokal, khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah.
- e. Penurunan prevalensi balita stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik (1.000 (seribu) hari pertama kehidupan) dan sensitif (peningkatan akses pangan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga terutama pada kelompok berpendapatan rendah).
- f. Peningkatan akses terhadap air bersih dengan pembangunan fasilitas dan layanan air bersih disertai sosialisasi dan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan.

IKP Kabupaten Manggarai menempati peringkat ke-328 dari 514 Kabupaten/kota se-Indonesia dan menempati peringkat ke-5 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT yaitu berada di bawah Kabupaten Ngada, Manggarai Barat, Sikka dan Kota Kupang.

Sasaran “**Meningkatnya Ketahanan Pangan**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	5.216.000,00	5.216.000,00	100,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.359.100,00	20.348.500,00	99,95
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.518.000,00	9.487.800,00	99,68
Program Pengawasan Keamanan Pangan	0,00	0,00	0,00
Total Anggaran	35.093.100,00	35.052.300,00	99,88

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan** sebesar Rp35.093.100,00 realisasi Rp35.052.300,00 atau 99,88%.



Sasaran 25 : **Meningkatnya Stabilitas Harga Barang**

Indikator Indeks Harga Konsumen

Target 117,34 → Realisasi 107,53 → Capaian Kinerja 91,64% → BAIK

Indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Indeks Harga Konsumen Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sesuai data BPS Provinsi NTT yang diperoleh berdasarkan wilayah inflasi yaitu kota Bajawa Kabupaten Ngada mencapai angka 107,53. Realisasi 107,53 dari target 117,34 maka tingkat capaian dari indikator sasaran ini adalah 91,64% predikat kinerja BAIK.



Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dan melaksanakan operasi pasar murah di beberapa tempat di Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan laju inflasi.

Sasaran **Meningkatnya Stabilitas Harga Barang** dicapai melalui **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.870.939,00 terserap Rp39.612.500,00 atau 99,35%.

TUJUAN 5

MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN

INDIKATOR Indeks Gini

Target 0,283 → Realisasi 0,230 → Capaian Kinerja 117,86% → ISTIMEWA

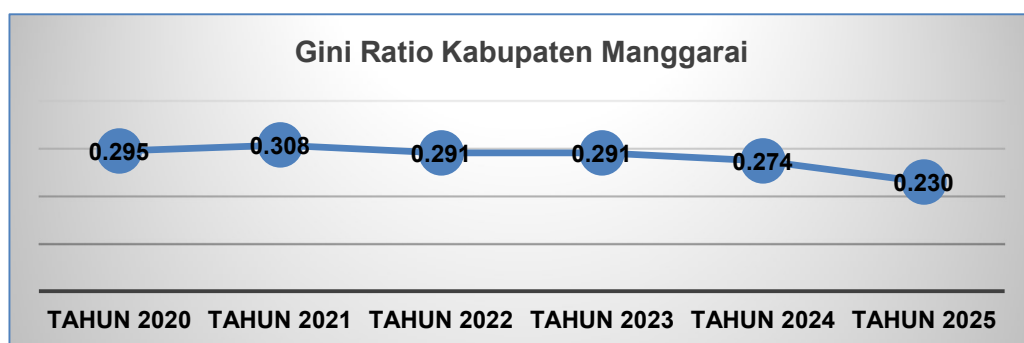
Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1



berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

Indeks Gini atau Gini Ratio Kabupaten Manggarai tahun 2025 sesuai data BPS Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah 0,230. Realisasi 0,230 dari target 0,283 maka capaiannya kinerjanya sebesar 117,86% kategori kinerja ISTIMEWA.

Grafik 3.30
Indeks Gini Ratio di Kabupaten Manggarai, 2020-2025

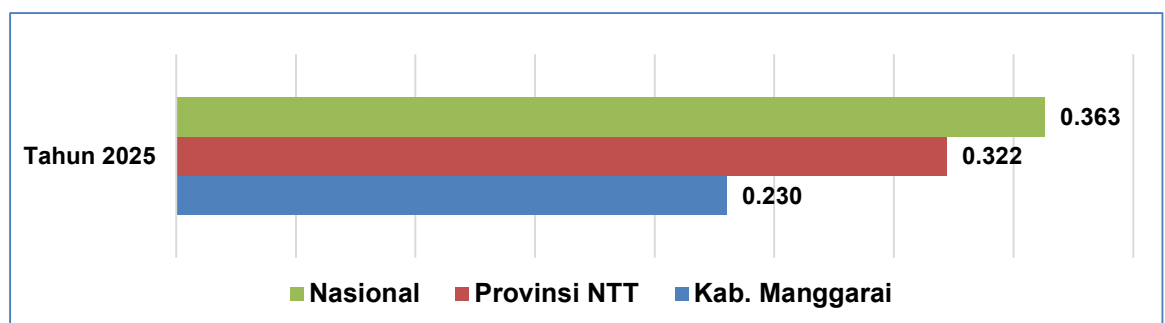


Keterangan :

1. Nilai Gini Ratio berada diantara 0 dan 1, Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan.
2. Kelompok Ketimpangan:
 - Ketimpangan Rendah : $< 0,35$
 - Ketimpangan Sedang : $0,35 - 0,5$
 - Ketimpangan Tinggi : $> 0,5$

Indeks Gini Kabupaten Manggarai dalam kurun 2020-2025 cenderung menurun dari 0,295 tahun 2020 turun menjadi 0,230 tahun 2025. Realisasi 0,230 tersebut masuk dalam kategori **Ketimpangan Rendah**.

Grafik 3.31
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Manggarai
Dengan Provinsi NTT dan Indonesia/Nasional
Tahun 2025



Sumber : BPS Kab. Manggarai, Provinsi NTT dan Nasional



Gini Ratio Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang mencapai 0,230 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi NTT yang mencapai 0,322 dan Nasional 0,363 di tahun yang sama. Gini Ratio Provinsi dan Nasional masuk dalam kategori **Ketimpangan Sedang**.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan indeks gini, melalui peningkatan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan **MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN**, didukung oleh 1 (Satu) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 26 : *Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian*

Indikator Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya

Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Kecil

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	97,50	76,19	78,14
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	65,00	0,69	1,07
Rata-rata					39,61
Kategori Kinerja					KURANG

Rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran tersebut di atas tahun 2025 adalah 39,61% meningkat sebesar 24,50% dari tahun 2024 yang mencapai 15,11% dengan predikat kinerja yang sama yaitu KURANG.

Indikator Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya

Target 97,00 → Realisasi 76,19 → Capaian Kinerja 78,14% → CUKUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan





Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam peraturan tersebut penilaian Kesehatan Koperasi dilaksanakan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam (USP). Adapun aspek yang dinilai yaitu: (1) Aspek Permodalan, (2) Aspek Kualitas Aktiva Produktif, (3) Aspek Manajemen, (4) Efisiensi, (5) Aspek Likuiditas, (6) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, dan (7) Aspek Jatidiri Koperasi.

Pada tahun 2025 dari 21 Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai, sebanyak 16 koperasi yang dikategorikan sebagai Koperasi Sehat/meningkat SHU-nya atau 76,19%. Realisasi 76,19% dari target 97,50% tahun 2025 maka capaian dari indikator sasaran ini adalah 78,14% predikat kinerja CUKUP. Sedangkan pada tahun 2024 dari 82 Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai, sebanyak 23 koperasi yang dikategorikan sebagai Koperasi Sehat/meningkat SHU-nya atau 28,05%. Realisasi 28,05% dari target 95,00% tahun 2024 maka capaian dari indikator sasaran ini adalah 29,53% kategori kinerja KURANG.

Tabel 3.33
Data Koperasi Sehat/ yang meningkat SHU-nya
Tahun 2022-2025

Uraian	Sampai dengan Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Koperasi Aktif	76	79	82	21
Koperasi sehat	12	11	23	16
Persentase Koperasi Sehat/Meningkat SHU-nya	15,79	13,92	28,05	76,19

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, 2025

Sesuai data pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif dari 82 tahun 2024 menjadi 21 pada tahun 2025 dan jumlah koperasi sehat dari 23 koperasi tahun 2024 menjadi 16 koperasi pada tahun 2025. Artinya di tahun 2025 terdapat 61 unit koperasi yang tidak konsisten melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyelenggarakan rapat tahunan secara rutin dan tidak memenuhi kewajiban administratif serta operasional sesuai peraturan.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja dari indikator sasaran tersebut di atas, antara lain banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan atau tidak melaporkan hasil RAT sehingga sulit dimonitoring / dievaluasi perkembangan SHU-nya.



Sulosi/strategi perbaikan kinerja ke depan antara lain:

1. Mendorong koperasi aktif melalui pengawasan dan pendampingan agar selalu melaksanakan RAT tepat waktu dan melaporkan perkembangan koperasi serta memberikan teguran kepada koperasi yang tidak melaksanakan RAT.
2. Terus melakukan pelatihan bagi Manajemen Koperasi seperti yang telah dilakukan tahun 2023-2025.

Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas menjadi Kecil

Target 60,00 → Realisasi 0,69 → Capaian Kinerja 1,07% → KURANG

Kriteria Usaha Mikro **Naik Kelas menjadi Usaha Kecil** yang digunakan adalah kenaikan omset dan aset UMKM sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Data Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai, Usaha Mikro yang naik kelas menjadi kecil di Kabupaten Manggarai sampai tahun 2025 sebanyak 36 UMKM atau 0,69% dari total usaha mikro sampai dengan tahun 2025 sebanyak 5.191 UMKM. Sedangkan tahun 2024 terdapat 21 UMKM yang naik kelas menjadi kecil atau 0,42% dari total usaha mikro sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.030 UMKM.

Tabel 3.34
Data Usaha Mikro Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

Uraian	Sampai dengan Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Jumlah Usaha Mikro	3.678	4.410	5.030	5.191
Jumlah Usaha Mikro yang Naik menjadi Kecil	13	21	21	36
Persentase yang naik kelas menjadi kecil	0,35	0,48	0,42	0,69

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan usaha mikro dari 5.030 tahun 2024 menjadi 5.191 tahun 2025 dan usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil dari 21 unit tahun 2024 menjadi 36 unit tahun 2025.

Realisasi dan capaian dari indikator sasaran ini sangat kecil. Hal ini antara lain disebabkan:

1. Berubahnya kriteria UMKM dari UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjadi **PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan**



Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dimana klasifikasi usaha mikro dan kecil mengalami perubahan sebagai berikut:

INDIKATOR	UU NOMOR 20 TAHUN 2008	PP NOMOR 7 TAHUN 2021
Modal	Usaha Mikro: paling banyak Rp.50 juta Usaha Kecil: lebih dari Rp.50 juta- paling banyak Rp.500 juta Usaha Menengah: lebih dari Rp.500 juta- paling banyak Rp.10 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Mikro: paling banyak Rp 1 miliar Usaha Kecil: lebih dari Rp.1 miliar-paling banyak Rp.5 miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp.5 miliar-paling banyak Rp.10 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
Omset	Usaha Mikro: paling banyak Rp.300 juta Usaha Kecil: lebih dari Rp.300 juta- paling banyak Rp.2,5 miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp.2,5 miliar-paling banyak Rp.50 miliar	Usaha Mikro: paling banyak Rp.2 miliar Usaha Kecil: lebih dari Rp.2 miliar-paling banyak Rp.15 miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp.15 miliar-paling banyak Rp.50 miliar

Berdasarkan data pada tabel di atas maka kenaikan kelas UMKM tersebut dinilai sulit dicapai mengingat jauhnya rentang omset dan modal antar masing-masing klasifikasi usaha.

2. Pada saat melakukan pendataan, pelaku UMKM tidak terbuka mengenai omset dan aset UMKM.

Sulosi/strategi perbaikan kinerja ke depan antara lain:

- a. Pelatihan/sosialisasi, pendampingan dan pengawasan bagi UMKM untuk meningkatkan omset dan permodalannya.
- b. Mendorong pelaku UMKM untuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya untuk meningkatkan permodalan.

Sasaran “**Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	0,00	0,00	0,00
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	43.000.000,00	42.912.500,00	99,80
Program Pengembangan UMKM	4.780.000,00	4.780.000,00	100,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	12.420.000,00	7.955.000,00	64,05
Total Anggaran	60.200.000,00	55.647.500,00	92,44



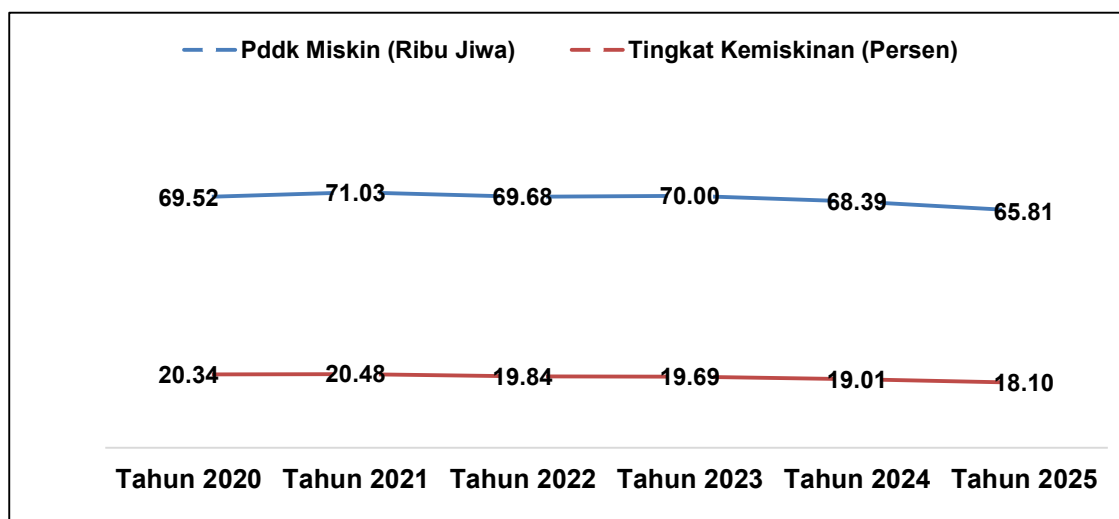
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian*** sebesar Rp60.200.000,00 realisasi Rp55.647.500,00 atau 92,44%.



Indikator Tingkat Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Manggarai tahun 2025 ditetapkan target sebesar 17,71. Realisasi tahun 2025 sebesar 18,10 membaik 0,91 poin dari capaian tahun 2024 sebesar 19,01 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 97,80% dari target.

Angka kemiskinan Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020-2025 cenderung membaik dan/atau menurun seperti terlihat pada grafik berikut.

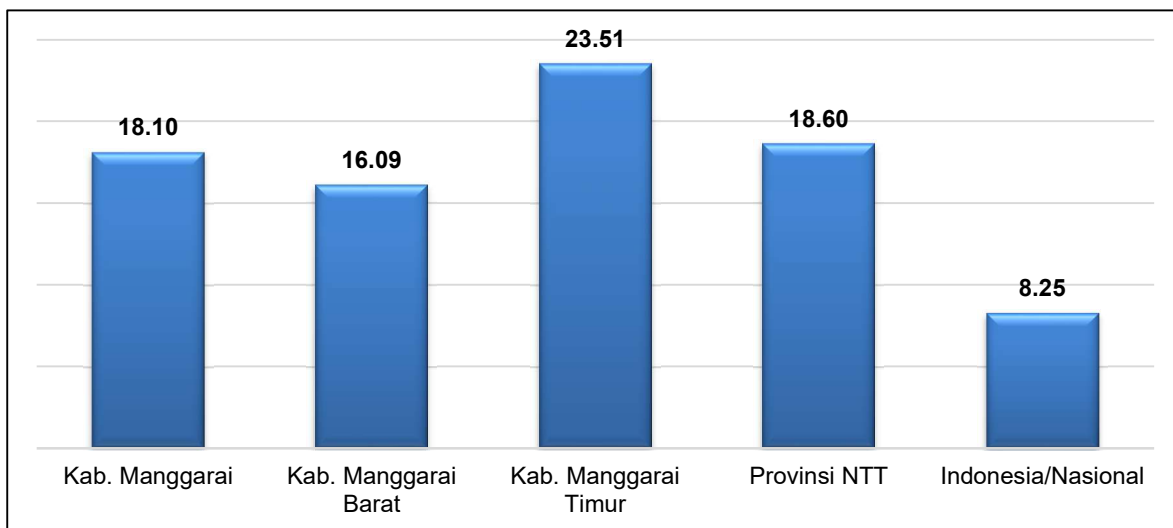
Grafik 3.32
Angka Kemiskinan Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Sumber : BPS_Manggarai Dalam Angka & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2026



Grafik 3.33
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat, Provinsi dan Nasional
Tahun 2025



Sumber : BPS_Manggarai Dalam Angka & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2026

Berdasarkan grafik tersebut di atas tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai lebih besar/tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Nasional namun lebih sedikit/rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur dan Provinsi NTT.

Tabel 3.35
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	% Penduduk Miskin
1	Kota Kupang	37,91	7,57
2	Flores Timur	28,92	10,88
3	Ngada	19,53	11,22
4	Sikka	36,74	11,25
5	Nagekeo	18,63	12,18
6	Belu	30,40	12,79
7	Malaka	28,05	13,52
8	Manggarai Barat	49,55	16,09
9	Manggarai	65,81	18,10
10	Alor	38,68	18,29
11	Timor Tengah Utara	53,44	20,17
12	Kupang	87,50	20,32
13	Ende	58,92	21,31
14	Lembata	36,78	23,27
15	Manggarai Timur	70,99	23,51



No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	% Penduduk Miskin
16	Rote Ndao	51,64	24,37
17	Timor Tengah Selatan	116,74	24,50
18	Sumba Timur	70,35	25,64
19	Sumba Barat Daya	97,68	25,66
20	Sumba Barat	37,08	26,47
21	Sabu Raijua	30,65	27,18
22	Sumba Tengah	22,81	29,23
NTT		1088,78	18,60

Sumber : BPS_ Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2026

Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/18/2024 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten Manggarai Tahun 2024, tertanggal 3 Januari 2024. Keputusan Bupati tersebut menetapkan sebanyak 5.930 Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 37.208 jiwa. Penentuan sasaran tersebut diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2024. Keputusan ini sebagai dasar Perangkat Daerah untuk melaksanakan intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai.

Upaya Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rangka pengentasan kemiskinan atau mengurangi indikator ciri-ciri kemiskinan antara lain melalui:

1. Bantuan bahan bangunan rumah, sambungan listrik gratis, program Hibah Air Minum Bersih dan lain-lain.
2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Manggarai telah ditetapkan dengan SK Bupati Manggarai Nomor : HK/47/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

Strategi penanggulangan kemiskinan dalam periode RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menyusun strategi pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin;
3. Memberdayakan masyarakat miskin; dan



4. Membangun sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta dalam program pengentasan kemiskinan.

Dalam pencapaian tujuan **MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN**, didukung oleh 3 (Tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 27 : **Menurunnya Pengangguran**

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Target 2,33 → Realisasi 1,56 → Capaian 133,05% → ISTIMEWA

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran (2.930 Org)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja (187.239 Org)}} \times 100$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 ditetapkan target sebesar 2,33%. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 sebesar 1,56% menurun 0,39 poin dari capaian tahun 2024 yaitu 1,17 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 133,05% dari target.

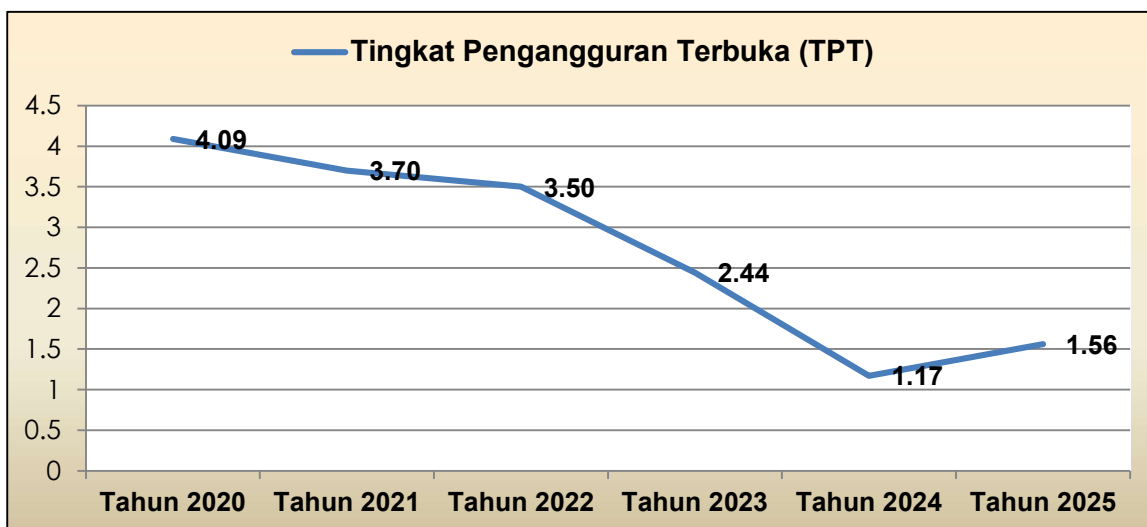
Tabel 3.36
TPT Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025

No	Tahun	Angkatan Kerja			Pengangguran Terbuka			TPT (%)
		L	P	Jlh.	L	P	Jlh.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5x100)
1	2020	95.604	83.475	179.079	5.859	1.464	7.323	4,09
2	2021	96.199	88.108	184.307	5.097	1.716	6.813	3,70
3	2022	99.133	90.065	189.198	3.862	2.754	6.616	3,50
4	2023	94.754	86.220	180.974	3.608	811	4.419	2,44
5	2024	101.330	92.722	194.052	1.242	1.026	2.268	1,17
6	2025	100.104	87.135	187.239	1.591	1.339	2.930	1,56

Sumber : BPS_Manggarai Dalam Angka, 2026



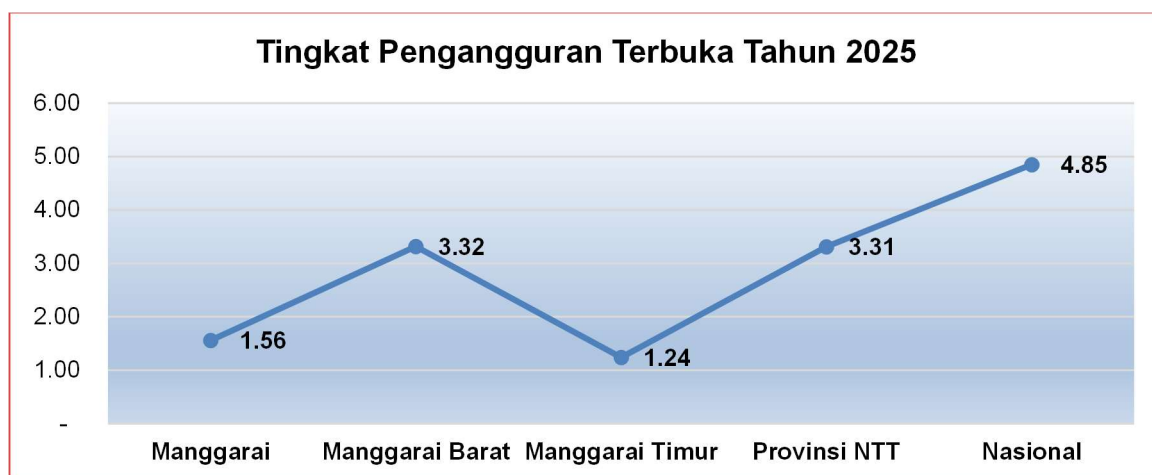
Grafik 3.34
TPT Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025



Sumber : MDA-BPS Kab. Manggarai & Prov. NTT Dalam Angka-BPS NTT, 2026

TPT Kabupaten Manggarai selama tahun 2020-2024 sesuai grafik tersebut di atas terus menurun dari 4,09% tahun 2020 menjadi 1,17% di tahun 2024, namun kembali meningkat tahun 2025 menjadi 1,56%.

Grafik 3.35
TPT Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat, Provinsi dan Nasional
Tahun 2025



TPT Kabupaten Manggarai tahun 2025 masih lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dan Nasional namun sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Manggarai Timur.



Tabel 3.37
TPT Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	TPT
1	Manggarai Timur	1,24
2	Nagekeo	1,31
3	Lembata	1,37
4	Manggarai	1,56
5	Sumba Barat Daya	1,70
6	Malaka	2,07
7	Alor	2,08
8	Rote Ndao	2,18
9	Sumba Tengah	2,49
10	Timor Tengah Utara	2,54
11	Ngada	2,60
12	Sikka	2,62
13	Ende	2,95
14	Sabu Raijua	3,12
15	Sumba Barat	3,27
16	Manggarai Barat	3,32
17	Sumba Timur	3,36
18	Kupang	3,53
19	Timor Tengah Selatan	3,57
20	Belu	5,20
21	Flores Timur	6,36
22	Kota Kupang	8,61
NTT		3,31

BPS_Provinsi NTT Dalam Angka, 2026

TPT Kabupaten Manggarai sebesar 1,56% tahun 2025 sesuai tabel di atas menempati TPT terendah ke-4 di bawah Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo dan Lembata dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Sementara Kota Kupang menduduki peringkat ke-1 dengan TPT tertinggi yang mencapai 8,61%, disusul Kabupaten Flores Timur mencapai 6,61% dan Kabupaten Belu mencapai 5,20%.

Strategi perbaikan kinerja dalam rangka menurunkan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai :

1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Mendorong penciptaan wirausaha/lapangan kerja/kesempatan kerja baru.
3. Menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala nasional agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan.



4. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang sebesar-besarnya di Kabupaten Manggarai.

Sasaran “**Menurunnya Pengangguran**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	716.590.939,00	684.538.430,00	95,53
Program Penempatan Tenaga Kerja	20.712.300,00	20.036.300,00	96,74
Program Hubungan Industrial	258.247.000,00	242.535.000,00	93,92
Total Anggaran	995.550.239,00	947.109.730,00	95,13

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Menurunnya Pengangguran** sebesar Rp995.550.239,00 realisasi Rp947.109.730,00 atau 95,13%.

Sasaran 28 : **Meningkatnya Akses terhadap Pemukiman Layak Huni**

Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rasio Rumah Layak Huni	Angka	93,75	92,34	98,49
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	86,927	86,66	99,69
3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen	92,00	87,92	95,57
Rata-rata					97,92
Kategori Kinerja					BAIK

Rata-rata capaian dari ke-3 indikator sasaran tersebut di atas adalah 97,92%, predikat kinerja BAIK. Rata-rata capaian dari ke-3 indikator sasaran ini turun dari tahun 2024 yang mencapai 97,98%.

Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Target 93,75 → Realisasi 92,34 → Capaian Kinerja 98,49% → BAIK

$$\text{Rasio Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jlh. Rumah Layak Huni}}{\text{Jlh. Seluruh Rumah}} \times 100$$



Data perhitungan dari indikator *Rasio Rumah Layak Huni* dalam kurun waktu tahun 2024-2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 dimana jumlah rumah layak huni dalam kurun waktu tersebut sebanyak 60.174 unit. Demikian juga dengan total jumlah rumah masih sebanyak 65.168 unit. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak mengalokasikan anggaran terkait kegiatan pendataan, bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka realisasi indikator rasio rumah layak huni dari tahun 2023-2025 masih sama yaitu 92,34%, sedangkan persentase capaian kinerja dalam kurun waktu tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2023 mencapai 101,15%, tahun 2024 mencapai 99,55% dan tahun 2025 mencapai 98,49%.

Tabel 3.38
Data Rumah Layak Huni
Tahun 2020-2025

Uraian	Sampai dengan Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Rumah Layak Huni	58.757	59.824	60.004	60.174	60.174	60.174
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	6.411	5.344	5.164	4.994	4.994	4.994
Jumlah Rumah	65.168	65.168	65.168	65.168	65.168	65.168
Rasio Rumah Layak Huni	90,16	91,80	92,08	92,34	92,34	92,34

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Untuk mendukung capaian indikator "Rasio Rumah Layak Huni" Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2025 memberikan bantuan berupa Meteran Listrik tahun 2025 sebanyak 131 unit x Rp3.300.000,00/unit atau setara Rp432.300.000,00.



Tabel 3.39
Data Bantuan Bahan Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Tahun 2018-2025

No	Tahun	Rumah Bantuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Total Rumah Bantuan
1	s/d 2018	10.910	45.403.280.941,0	APBD II, APBD I, DAK ABPD II, DAU APBD II, SNVT-APBN dan APBDDes	10.910
2	2019	100	1.750.000.000,00	SNVT-APBN	11.010
		19	332.500.000,00	APBD I	11.029
		170	2.975.000.000,00	DAK APBD II	11.199
		104	1.560.000.000,00	DAU APBD II	11.303
		2.323	26.263.623.316,00	APBDDes	13.626
3	2020	28	2.812.520.000,00	KSPN-APBN	13.654
		200	3.500.000.000,00	SNVT/BSPS-APBN	13.854
		135	2.362.500.000,00	DAK APBD II	13.989
		50	750.000.000,00	DAU APBD II	14.039
		1.547	19.324.276.298,00	APBDDes	15.586
4	2021	126	2.520.000.000,00	DAK APBD II	15.712
		140	2.450.000.000,00	SNVT/BSPS-APBN	15.852
		801	9.687.543.127,00	APBDDes	16.653
5	2022	180	6.300.000.000,00	DAK APBD II	16.833
6	2023	170	3.400.000.000,00	DAU APBD II	17.003
7	2024	0,00	0,00	-	0,00
8	2025	0,00	0,00	-	0,00
Total			134.872.010.562,00		17.003

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Tabel 3.40
Data Bantuan Listrik Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Tahun 2019-2025

No	Tahun	Meteran Listrik (Unit)	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Total Meteran Listrik (Unit)
1	2019	600	1.457.130.000,00	APBD II	600
2	2020	468	1.158.709.200,00	APBD II	1.068
3	2021	90	240.000.000,00	APBD II	1.158
4	2022	90	269.010.000,00	APBD II	1.248
5	2023	448	1.187.200.000,00	APBD II	1.696
6	2024	0,00	0,00	-	0,00
7	2025	131	432.300.000,00	APBD II	1.801
Total			4.744.349.200,00	APBD II	1.801

Sumber : Dinas PRKPP Kab. Manggarai, 2025

Sesuai tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2025 sudah terdapat 1.801 unit meteran listrik gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten



Manggarai kepada masyarakat kurang mampu yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai.

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Target 86,927 → Realisasi 86,66 → Capaian Kinerja 99,69% → BAIK

Sesuai data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, jumlah Rumah Tangga/KK yang memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan sampai tahun 2025 sebanyak 84.786 KK atau 86,66% dari total rumah tangga/KK yang ada di Kabupaten Manggarai sebanyak 97.838 Rumah Tangga/KK. Realisasi 86,66% dari target 86,9277% menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 99,69 predikat kinerja BAIK.

Tabel 3.41
Data Rumah Tangga/KK Akses Sarana Sanitasi
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga/KK	Jumlah Rumah Tangga/KK Akses Sanitasi Layak	%
1	s/d 2022	94.589	78.636	83,13
2	s/d 2023	97.838	81.497	83,30
3	s/d 2024	97.838	81.988	83,80
4	s/d 2025	97.838	84.786	86,66

Sumber : Dinas PUPR, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2025 tidak ada penambahan jumlah Rumah Tangga/KK di Kabupaten Manggarai dari tahun 2023, namun jumlah Rumah Tangga/KK Akses Sanitasi Layak Berkelanjutan bertambah sebanyak 3.289 Rumah Tangga/KK yaitu dari 81.497 tahun 2023 menjadi 84.786 Rumah Tangga/KK tahun 2025.

Permasalahan yang dihadapi terkait indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan adalah masih terdapat sebagian rumah tangga terutama di wilayah permukiman terpencar yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak atau belum menerapkan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.



Solusi terkait indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan antara lain fasilitasi pembangunan sarana sanitasi yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Target 92,00 → Realisasi 87,92 → Capaian Kinerja 95,57% → BAIK

Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga/KK yang memiliki akses terhadap air minum bersih sampai dengan tahun 2025 sebanyak 86.019 KK atau 87,92% dari total KK di Kabupaten Manggarai sebanyak 97.838 KK. Realisasi 87,92% dari target 92,00% maka capaian kinerjanya adalah 95,57% predikat kinerja BAIK.

Tabel 3.42
Data Rumah Tangga/KK Akses Air Minum Bersih
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga/ KK	Jumlah Rumah Tangga/KK Akses Air Minum Layak	%
1	s/d 2022	94.589	81.176	85,81
2	s/d 2023	97.838	84.140	86,00
3	s/d 2024	97.838	84.219	86,08
4	s/d 2025	97.838	86.019	87,92

Sumber : Dinas PUPR, 2025

Data pada tabel di atas menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2025 tidak ada penambahan jumlah Rumah Tangga/KK di Kabupaten Manggarai dari tahun 2023, namun jumlah Rumah Tangga/KK Akses Air Minum Layak Berkelanjutan bertambah sebanyak 1.879 Rumah Tangga/KK yaitu dari 84.140 tahun 2023 menjadi 86.019 Rumah Tangga/KK tahun 2025.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator sasaran ini adalah distribusi layanan air minum pada beberapa wilayah belum merata akibat keterbatasan jaringan distribusi dan belum optimalnya pengelolaan sarana air minum yang ada.



Solusi yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan fungsi jaringan distribusi serta penguatan pengelolaan sarana air minum berbasis masyarakat agar pelayanan air minum layak dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.

Sasaran “**Meningkatnya Akses terhadap Pemukiman Layak Huni**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Kawasan Permukiman	9.600.000,00	9.560.000,00	99,58
Program Pengembangan Perumahan	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.246.528.500,00	1.204.853.500,00	96,66
Program Pengembangan Permukiman	0,00	0,00	0,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.536.014.000,00	9.459.275.949,00	99,20
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.490.452.000,00	8.883.691.061,00	93,61
Total Anggaran	20.287.384.500,00	19.562.170.510,00	96,43

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran *Meningkatnya Akses terhadap Pemukiman Layak Huni* sebesar Rp20.287.384.500,00 realisasi Rp19.562.170.510,00 atau 96,43%.

Sasaran 29 : **Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang**

Indikator Persentase Cakupan Pemanfaatan Ruang yang Terkendali

Target 52,00 → Realisasi 43,28 → Capaian Kinerja 83,23% → BAIK

Hasil perhitungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sebagai pengampu dari indikator sasaran ini, realisasi cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali di Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah 43,28% dari target 52,00% dengan tingkat capaian sebesar 83,23% predikat kinerja BAIK. Realisasi 43,28 tahun 2025 ini meningkat sebesar 2,51% dari realisasi tahun 2024 yang mencapai 40,77%. Namun jika dilihat dari tingkat capaian kinerja, maka capaian kinerja tahun 2025 turun dari kondisi tahun 2024 yang mencapai 97,07. Hal ini disebabkan karena angka target tahun 2025 (52,00) lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka target tahun 2024 sebesar 42,00%.

Adapun jenis kegiatan cakupan pemanfaatan tata ruang yang terkendali yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.43
Kegiatan cakupan pemanfaatan tata ruang yang terkendali
Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Satuan	s/d Tahun		
			2023	2024	2025
1	Permohonan Informasi Tata Ruang	Bangunan	189	269	339
2	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai	Dokumen	1	1	1
3	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Manggarai	Dokumen	2	2	2
4	Pemasangan Plang Dalam Kegiatan Insentif/Disinsentif RTRW	Plang	8	18	23

Sumber : Dinas PUPR, 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang belum optimal karena masih terdapat kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan rencana tata ruang.

Solusi yang perlu dilakukan terkait pengendalian pemanfaatan tata ruang antara lain meningkatkan pengawasan dan sosialisasi pemanfaatan ruang kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi perizinan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Sasaran "**Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang**" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	301.300.000,00	238.635.167,00	79,20
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.820.000,00	4.740.000,00	98,34
Program Penataan Bangunan Gedung	1.218.652.049,00	1.206.661.799,00	99,02
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	259.084.750,00	187.190.648,00	72,25
Total Anggaran	1.783.856.799,00	1.637.227.614,00	91,78

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang** sebesar Rp1.783.856.799,00 realisasi Rp1.637.227.614,00 atau 91,78%.



TUJUAN 7

MENINGKATNYA TINGKAT KEMANDIRIAN DESA

INDIKATOR Indeks Desa Membangun (IDM)

Target 0,638 → Realisasi 0,632 → Capaian Kinerja 99,02% → BAIK

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM dapat menentukan status desa menjadi Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal berdasarkan nilai dari indeks-indeks tersebut.

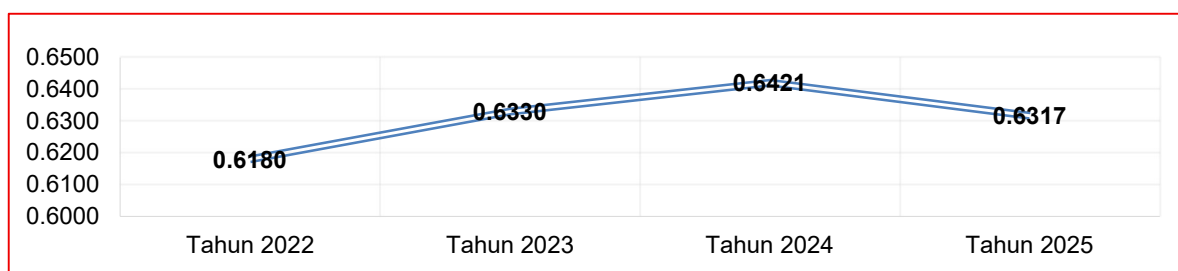
Realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2025 adalah 0,6317 atau menurun 0,0104 poin dari capaian tahun 2024 yaitu 0,6421 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 99,02% dari target. Realisasi 0,6317 tahun 2025 menunjukkan status IDM Kabupaten Manggarai adalah **BERKEMBANG**.

Tabel 3.44
Data Indeks Desa Membangun
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Tahun	IDM	Status Desa				Jumlah Desa
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	
1	s/d 2022	0,618	0	4	97	44	145
2	s/d 2023	0,633	0	10	109	26	145
3	s/d 2024	0,6421	0	13	115	17	145
4	s/d 2025	0,6317	0	27	102	16	145

Sumber : Dinas PMD dan <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>, 2025

Grafik 3.36
Indeks Desa Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas PMD dan <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>, 2025



Faktor pendukung keberhasilan IDM secara umum dipengaruhi oleh:

1. Ketahanan Sosial (SDM dan Layanan Dasar):
 - a. Aksesibilitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan : Kedekatan dan kemudahan akses fisik terhadap fasilitas kesehatan (Puskesmas/Pustu) dan sekolah (SD/SMP/SMA) sangat mempengaruhi skor.
 - b. Kualitas SDM Desa : Tingkat pendidikan warga, ketersediaan tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.
 - c. Modal Sosial: Tingkat keamanan, toleransi, dan gotong royong di desa, yang diukur dari kejadian gangguan ketentraman.
2. Faktor Ketahanan Ekonomi:
 - a. Infrastruktur dan aksesibilitas : Akses jalan, ketersediaan transportasi umum, akses logistik, dan jaringan internet di desa.
 - b. Lembaga Ekonomi: Keberadaan pasar, bank/BPR, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan kemudahan akses permodalan.
 - c. Keragaman Produksi: Potensi alam yang dapat dimanfaatkan dan keberagaman sektor ekonomi.
3. Faktor Ketahanan Lingkungan/Ekologi:
 - a. Kualitas Lingkungan: Penanganan bencana, potensi rawan bencana, dan kualitas pemukiman (kebersihan lingkungan).
 - b. Sarana Sanitasi dan Air Bersih: Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
4. Faktor Tata Kelola Pemerintahan Desa:
 - a. Kinerja Aparatur Desa: Kualitas tata kelola pemerintah desa, penggunaan aplikasi data (IDM), dan kepatuhan dalam perencanaan pembangunan.
 - b. Manajemen Anggaran Desa: Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tepat sasaran untuk meningkatkan fasilitas umum dan layanan sosial.

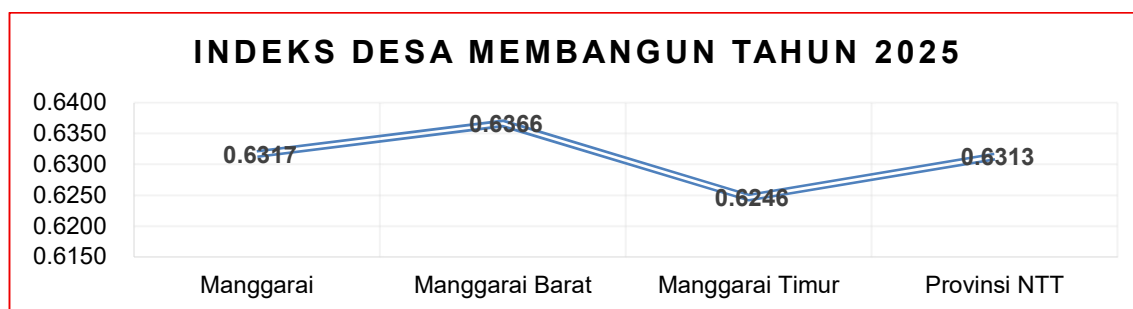
Faktor Penghambat keberhasilan IDM secara umum dipengaruhi oleh:

1. Lokasi desa yang sulit dijangkau.
2. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang layak.
3. Lemahnya pemahaman dalam pendataan mandiri dan penginputan data pada aplikasi IDM.



Solusi dalam rangka meningkatkan IDM secara umum antara lain Sinergi antara pembangunan infrastruktur (ekonomi), peningkatan layanan sosial (kesehatan/pendidikan), dan tata kelola pemerintah desa yang akuntabel. Pengalokasian dana desa yang efisien dan tepat sasaran sangat krusial untuk meningkatkan skor dimensi-dimensi tersebut.

Grafik 3.37
IDM Kabupaten Manggarai dan
Perbandingan dengan Kabupaten Terdekat, Provinsi dan Nasional
Tahun 2025



Sumber : Dinas PMD dan <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>, 2025

Berdasarkan grafik tersebut di atas, Indeks Desa Kabupaten Manggarai berada di atas Kabupaten Manggarai Timur dan Provinsi NTT namun berada di bawah IDM Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam pencapaian tujuan **MENINGKATNYA TINGKAT KEMANDIRIAN DESA**, didukung oleh 1 (satu) sasaran pembangunan, yaitu:

Sasaran 30 : *Meningkatnya Keberdayaan Desa*

Indikator Persentase Status Desa Berkembang

Target 59,65 → Realisasi 70,34 → Capaian Kinerja 117,93 → ISTIMEWA

Tabel 3.45
Status IDM Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Status Desa	Jumah	%
1	2022	Mandiri	0	0,00
2		Maju	4	2,76
3		Berkembang	97	66,90
4		Tertinggal	44	30,34
Total Desa 2022			145	100,00
1	2023	Mandiri	0	0,00



No	Tahun	Status Desa	Jumah	%
2		Maju	10	6,90
3		Berkembang	109	75,17
4		Tertinggal	26	17,93
Total Desa 2023			145	100,00
1	2024	Mandiri	0	0,00
2		Maju	13	8,97
3		Berkembang	115	79,31
4		Tertinggal	17	11,72
Total Desa 2024			145	100,00
1	2025	Mandiri	0	0,00
2		Maju	27	18,62
3		Berkembang	102	70,34
4		Tertinggal	16	11,03
Total Desa 2025			145	100,00

Sumber : Dinas PMD dan <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, Persentase Status Desa Berkembang di Kabupaten Manggarai tahun 2025 mencapai 70,34% atau terdapat 102 desa dengan status desa "berkembang" dari total 145 desa yang ada di Kabupaten Manggarai. Sementara pada tahun 2024 persentase status desa berkembang mencapai 79,31% atau terdapat 115 desa berkembang dari total 145 desa yang ada di Kabupaten Manggarai. Realisasi tahun 2025 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024, namun ini dinilai positif karena jumlah desa **berkembang** berkurang 115 desa tahun 2024 menjadi 102 desa tahun 2025 dan jumlah desa **maju** dari 13 desa tahun 2024 bertambah menjadi 27 desa tahun 2025.

Sasaran "**Meningkatnya Keberdayaan Desa**" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.774.671.076,00	1.679.753.396,00	94,65
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	843.951.348,00	825.049.674,00	97,76
Program Penataan Desa	441.112.000,00	184.307.691,00	41,78
Total Anggaran	3.059.734.424,00	2.689.110.761,00	87,89

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Keberdayaan Desa** sebesar Rp3.059.734.424,00 realisasi Rp2.689.110.761,00 atau 87,89%.

TUJUAN 8

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target 81,86 → Realisasi 80,05 → Capaian Kinerja 97,79% → BAIK

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Kinerja meningkatnya kualitas lingkungan yang direpresentasikan dengan Indikator Indeks Lingkungan Hidup dimana pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar sebesar 97,79% dengan predikat kinerja BAIK. Capaian ini diukur dari target IKLH yang diperjanjikan sebesar 81,86% dan mampu terealisasi sebesar 80,05 kategori sedang. Sementara pada tahun 2024 capaian kinerja mencapai 93,81% dengan predikat kinerja BAIK. Capaian ini diukur dari target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebesar 81,75% dan mampu terealisasi sebesar 76,69.



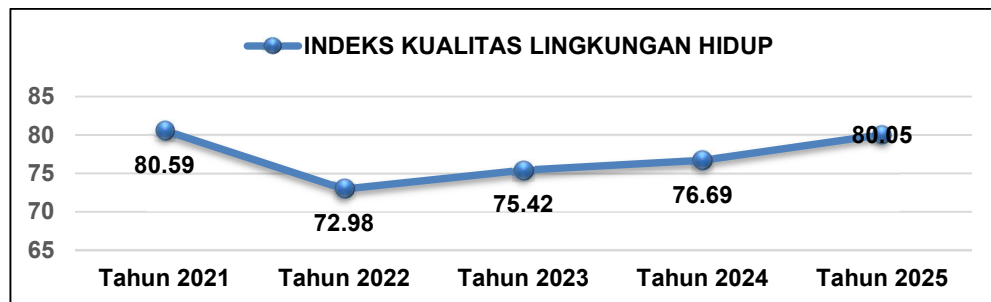
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbentuk dari 3 (tiga) indikator pembentuk yakni Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.

Tahun	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan
2021	80,59	70,00	87,87	85,32
2022	72,98	50,00	93,82	73,89
2023	75,42	56,25	93,27	75,33
2024	76,69	61,25	92,19	74,53
2025	80,05	75,33	83,68	81,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Grafik 3.38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025



IKLH Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebesar 80,05 ini menempati peringkat 3 (tiga) dari 22 kabupaten/kota se-provinsi NTT dan peringkat 119 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Manggarai:

1. Peningkatkan pengawasan terhadap jenis usaha/atau kegiatan yang menghasilkan polutan baik berupa limbah padat, cair dan udara (emisi/ambient).
2. Kerja kolaborasi dan sinergi bersama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengelolaan sampah, melestarikan sumber mata air, melakukan penanaman terhadap lahan kritis dan menjaga sungai bersih.
3. Kolaborasi bersama lembaga-lembaga swadaya pegiat lingkungan dalam penanganan, pengelolaan persampahan serta pendampingan dan edukasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai sampah.

Dalam pencapaian tujuan **MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**, didukung oleh 4 (Empat) sasaran pembangunan, yaitu:

Sasaran 31 : Meningkatkan Kualitas Air

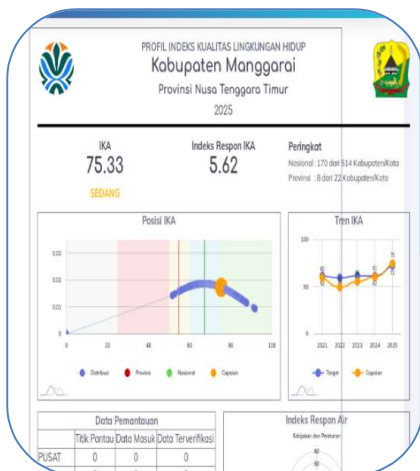
Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

Target 72.00 → Realisasi 75.33 → Capaian Kinerja 104,637% → ISTIMEWA

Kualitas air merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi *Pollution*



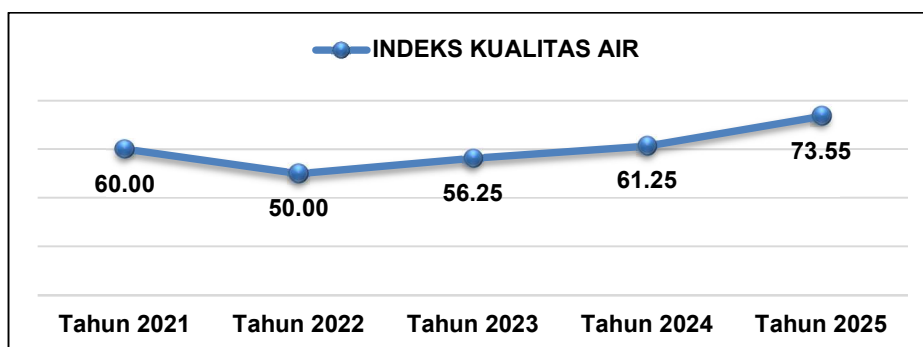
Indeks (PI). Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter.



Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 melakukan pengujian indeks kualitas air pada 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Wae Mese dan DAS Wae Pesi dan hasil pengujian menunjukkan nilai Indeks Permutu Air Kabupaten Manggarai adalah 75,33 kategori Sedang.

Realisasi IKA 75,33 dari target 72,00 maka capaian kinerjanya adalah 104,63% dengan predikat kinerja ISTIMEWA. Indeks Kualitas Air dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan kualitas seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.39
Indeks Kualitas Air Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025



IKA Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebesar 75,33 ini menempati peringkat 8 (delapan) dari 22 kabupaten/kota se-provinsi NTT dan peringkat 170 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagai upaya meningkatkan kualitas air di Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

1. Masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang diolah ke sungai sehingga menyebabkan beban pencemaran air sungai meningkat dan beberapa parameter air sungai melampaui baku mutu yang dipersyaratkan.



2. Kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
3. Untuk usaha-usaha kecil dan menengah masih menemui kesulitan dalam membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) karena membutuhkan biaya operasional dan perawatan yang relatif tidak murah.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sungai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Lingkungan sebagai berikut.

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air, baik dari desa/kelurahan, Perangkat Daerah terkait serta usaha dan/atau kegiatan untuk bersama-sama menjaga sungai.
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan kerjasama pengolahan air limbah.
4. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah ke desa/kelurahan dan usaha dan/atau kegiatan sehingga masyarakat/pihak pelaku usaha tidak lagi membuang sampah/ limbah sembarangan ke lingkungan/sungai.

Sasaran 32 : **Meningkatnya Kualitas Udara**

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)

Target 88,87 → Realisasi 83,68 → Capaian Kinerja 94,16% → BAIK

Pada tahun 2025, hasil pengujian dan perhitungan indeks kualitas udara dilaksanakan melalui aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

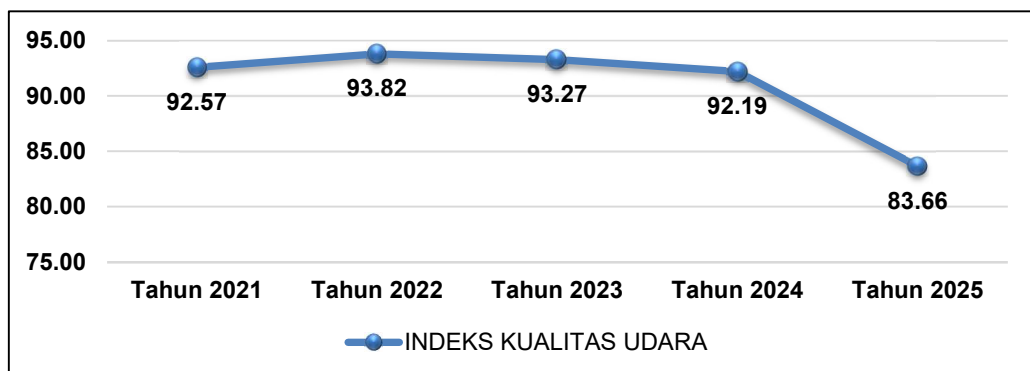
Capaian indikator IKU tahun 2025 adalah 94,16% dengan kategori kinerja BAIK diukur dari target IKU yang ditetapkan sebesar 88,87% dan mampu terealisasi sebesar 83,68%.



IKU di Kabupaten Manggarai dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien melalui metode *passive sampler* dengan parameter NO₂ (Nitrogen dioksida) dan SO₂ (Sulfur dioksida).

IKU dalam 4 (empat) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan kualitas seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.40
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025



IKU Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebesar 83,68 ini menempati peringkat 12 (dua belas) dari 22 kabupaten/kota se-provinsi NTT dan peringkat 203 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sebagai upaya meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

1. Masih adanya masyarakat yang membakar sampah di lahan kosong/ tempat-tempat terbuka.
2. Adanya kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Ruteng pada saat-saat tertentu yang mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara pada jam-jam kemacetan tersebut
3. Kota Ruteng merupakan kota yang dikelilingi pegunungan atau berada di lembah cenderung memiliki kualitas udara lebih buruk karena sirkulasi udara yang terbatas, menahan polutan di permukaan.





Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Lingkungan Hidup ke depan sebagai berikut.

1. Melakukan peningkatan kebutuhan kapasitas SDM untuk menunjang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara.
2. Melakukan penyusunan rencana anggaran pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian pencemaran udara.
3. Meningkatkan keterlibatan Perangkat Daerah terkait dan membuat komitmen bersama dalam peningkatan kualitas udara ambien.
4. Memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai penyerap polutan di udara melalui pembagian pohon ke desa/ kelurahan.
5. Melakukan sosialisasi resiko dan regulasi dalam pengelolaan kualitas udara serta sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan kepada masyarakat.
6. Bekerjasama dengan masyarakat dalam menindaklanjuti oknum yang melakukan pembakaran sampah di lahan kosong/tempat-tempat terbuka.

Sasaran 33 : ***Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan***

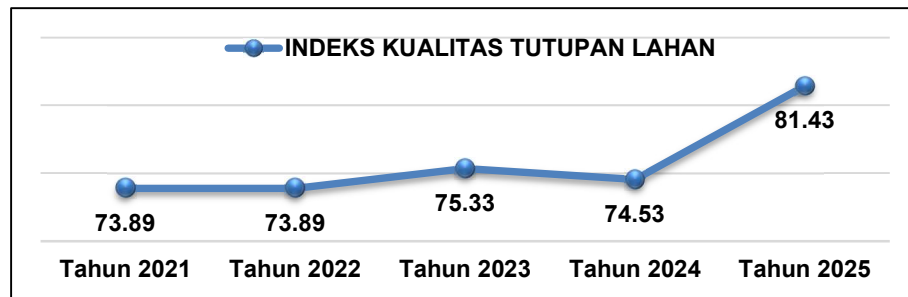
Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Target 85,82 → Realisasi 81,43 → Capaian Kinerja 94,88% → BAIK

IKL merupakan indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hijau dalam IKLH. Perhitungan ini akan mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami.

Capaian indikator IKTL tahun 2025 94,88% predikat kinerja BAIK diukur dari target IKTL yang ditetapkan sebesar 85,82% dan mampu terealisasi sebesar 81,43 kategori sedang.

Grafik 3.41
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025



IKL Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebesar 81,43 ini menempati peringkat 3 (tiga) dari 22 kabupaten/kota se-provinsi NTT dan peringkat 97 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas lahan di Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian akibat perkembangan perkotaan.
2. Kurangnya peremajaan pohon perindang di ruas-ruas jalan.
3. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan penebangan pohon baik secara mandiri maupun melalui pengajuan permohonan penebangan pohon di ruas-ruas jalan.
4. Terbatasnya tenaga dan sarana seperti mobil tangga dan mobil angkut pada saat melakukan perawatan pohon perindang.



Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.
2. Melakukan penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH.
3. Menyusun kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan.



4. Meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Melakukan penanaman pohon perindang di beberapa ruas jalan dengan memilih pohon yang memiliki akar tunggal sehingga nantinya tidak menyebabkan kerusakan trotoar atau badan jalan.

Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Air, Meningkatnya Kualitas Udara dan Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000,00	224.981.022,00	89,99
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	0,00	0,00	0,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	179.347.000,00	151.946.200,00	84,72
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	0,00	0,00	0,00
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	51.315.600,00	51.105.600,00	99,59
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	439.320.000,00	433.517.600,00	98,68
Total Anggaran	669.982.600,00	636.569.400,00	95,01

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Air, Meningkatnya Kualitas Udara dan Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan** sebesar Rp669.982.600,00 realisasi Rp636.569.400,00 atau 95,01%.

Sasaran 34 : **Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3**

Indikator Persentase Sampah Tertangani

Indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Sampah Tertangani	Persen	27,68	13,067	47,21
2	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	Persen	41,46	78,13	188,43
Rata-rata					117,82
Kategori					ISTIMEWA



Sasaran "Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3" diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Rata-rata capaian kinerja dari ke-2 indikator sasaran tersebut tahun 2025 adalah 117,82%, turun dari rata-rata tahun 2024 yang mencapai 129,81 dengan predikat kinerja yang sama yaitu ISTIMEWA.

Indikator Persentase Sampah Tertangani

Target 27,68 → Realisasi 13,067 → Capaian Kinerja 47,21% → KURANG

Sesuai data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, jumlah volume produksi sampah Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebesar 874.590 M³. Dari total volumen sampah 874.590 M³ tersebut, yang tertangani/terangkut mencapai 114.286 M³ atau 13,067%. Realisasi 13,607% dari target 27,68% maka capaian kinerja dari indikator *Persentase Sampah Tertangani* tahun 2025 adalah 47,21% predikat kinerja KURANG.

Tabel 3.46
Penanganan Sampah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Sampah (M ³)	Jumlah Sampah tertangani (M ³)	% Sampah Tertangani
1	2022	814.395	73.714	9,05
2	2023	916.130	109.714	11,98
3	2024	54.522,82	6.831	12,53
4	2025	874.590	114.286	13,07

Faktor Pendorong tercapainya kinerja:

Tersedianya anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Selain itu efektifnya koordinasi dengan semua pihak yang terkait serta arahan dan dorongan dari pimpinan juga menjadi faktor pendorong.

Jumlah tenaga kebersihan dan sopir pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup sejumlah 83 orang. Sarana pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup antara lain Dump Truck Pengangkut Sampah Roda 6 sebanyak 4 unit, Amroll sebanyak 4 unit, Mobil Tangki Air sebanyak 1 unit, Roda 3 Pengangkut Sampah sebanyak 22 unit dan kontainer sebanyak 8 unit.

Faktor Penghambat tercapainya kinerja:

1. Target persentase sampah tertangani merupakan target untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sementara wilayah pelayanan persampahan Dinas



Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2025 hanya mencakup 4 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan persampahan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Reok dan Reo, Kecamatan Cibal di Pagal dan Kecamatan Ruteng di Cancar. Untuk wilayah Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Reok wilayah Reo, pelayanan persampahan dilakukan setiap hari. Sementara di Kecamatan Cibal wilayah Pagal dan Kecamatan Ruteng wilayah Cancar hanya dilakukan sekali dalam waktu satu minggu. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada hanya cukup untuk menangani persampahan di 4 (empat) wilayah dan/atau pusat kecamatan tersebut.

2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah.
3. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang kebermanfaatan sampah.
4. Kurangnya dukungan kepada pelaku/penggiat pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut.

1. Meningkatkan sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah di sumber, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
2. Pembentukan bank sampah di masing-masing desa/kelurahan dan sekolah.
3. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan sarana dan prasarana dan mobilitas pelayanan persampahan di Kabupaten Manggarai.

Indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3

Target 41,46 → Realisasi 78,13 → Capaian Kinerja 188,43% → ISTIMEWA

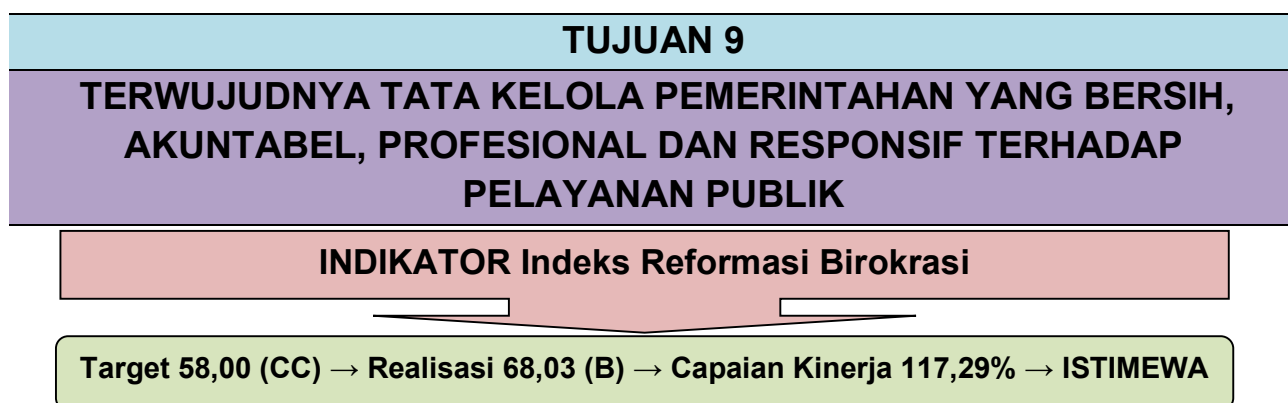
Realisasi indikator sasaran ini tahun 2025 adalah 78,13% dari target 41,46% dengan capaian kinerja 188,43% predikat kinerja ISTIMEWA. Realisasi 78,43% diperoleh dari hasil perbandingan jumlah pelaku usaha yang mengelolah limbah B3 sesuai ketentuan sebanyak 25 pelaku usaha dari 32 pelaku usaha penghasil limbah B3. Sementara pada tahun 2024 jumlah pelaku usaha yang mengelolah limbah B3 sesuai ketentuan sebanyak 26 pelaku usaha dari 34 pelaku usaha penghasil limbah B3 atau 76,47%.

Sasaran “**Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :



Dinas Lingkungan Hidup			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0,00	0,00	0,00
Program Pengelolaan Persampahan	2.247.057.420,00	2.172.029.883,00	96,66
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	35.511.000,00	34.831.000,00	98,09
Total Anggaran	2.282.568.420,00	2.206.860.883,00	96,68

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limba B3*** sebesar Rp2.282.568.420,00 realisasi Rp2.206.860.883,00 atau 96,68%.



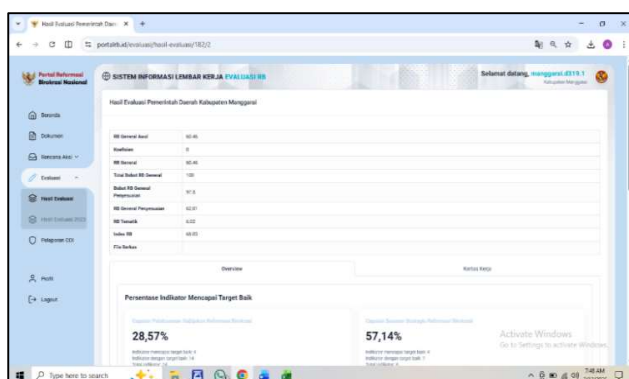
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya



No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
				saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 -70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Evaluasi sementara Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 pada



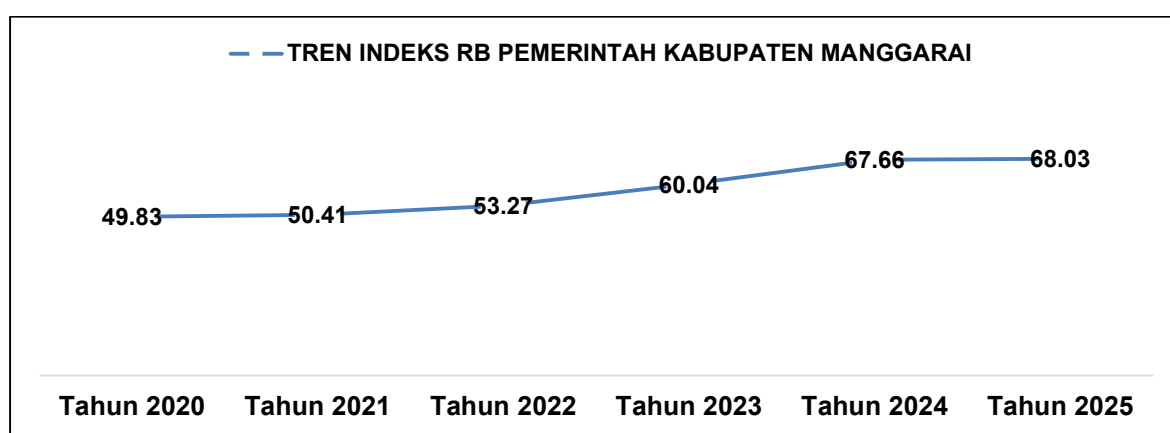
Pemerintah Kabupaten Mangarai telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi tersebut, termuat dalam <https://www.portallrb.id>. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan tersebut, Indeks Reformasi



Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 adalah **68,03** dengan kategori B (Baik). Rincian hasil evaluasi terhadap indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025, sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Tahun 2024	Tahun 2025
A	RB General	100	60,83	62,01
B	RB Tematik	20	6,83	6,02
C	Indeks RB	120	67,66	68,03
D	Kategori		B	B

Realisasi 68,03 tahun 2025 dari target 58,00 maka capaian kinerja dari indikator tujuan/IKU ini adalah 117,29 predikat kinerja ISTIMEWA.



Tren Indeks RB Pemerintah Kabupaten Manggarai selama 6 (enam) tahun terakhir, menunjukkan peningkatan walaupun peningkatannya belum signifikan yaitu dari 49,83 kategori C (Kurang) Tahun 2020 meningkat menjadi 68,03 kategori B (Baik) tahun 2025. Indeks RB 68,03 kategori B (Baik) menunjukkan interpretasi ***Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.***

Keberhasilan capaian reformasi birokrasi di Kabupaten Manggarai tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang telah diterapkan secara konsisten. Berbagai langkah strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi reformasi birokrasi telah memastikan efektivitas perubahan di semua aspek tata kelola pemerintahan. Keberhasilan ini diwujudkan melalui dua aspek utama, yaitu penguatan reformasi birokrasi general dan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik,



yang masing-masing berkontribusi terhadap efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas birokrasi.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Manggarai tahun 2025 antara lain:

1. Penguatan Kebijakan dalam Reformasi Birokrasi General:
 - a. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang telah selesai pada penyiapan seluruh regulasi, utamanya penyiapan regulasi penerapan sistem kerja baru. Penyiapan tersebut sebagai bagian proses akhir setelah sebelumnya dilakukan proses penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Pada tahun 2025 telah ditetapkan Surat Tugas Tim Kerja di beberapa Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai implementasi dari peraturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi.
 - b. Peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan nilai Indeks SPBE sebesar 2,90 dengan kategori Baik, meningkat dari nilai tahun sebelumnya sebesar 2,68 juga dengan kategori Baik.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, meliputi pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai berhasil memperoleh penghargaan Kepatuhan/Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 oleh Ombudsman RI dengan nilai 83,22 kategori B masuk dalam zona hijau dengan kualitas tinggi. Pada tahun 2025, capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan nilai B dengan skor 3,08.
 - d. Upaya untuk melakukan perubahan melalui digitalisasi kearsipan juga turut menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Manggarai. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menerapkan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Transformasi kearsipan tersebut penerapannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pemerintah



Kabupaten Manggarai. Efisiensi diperoleh melalui efisiensi belanja pengadaan alat tulis kantor, penjilidan, penggandaan, pengadaan kebutuhan ruang penyimpanan arsip dan anggaran pemeliharaan ruang penyimpanan arsip. Efektivitas dalam proses administrasi dipengaruhi oleh tahapan yang semakin cepat dan ringkas namun tercapai tujuannya dan dapat dipantau pergerakannya. Berdasarkan penilaian dari ANRI tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan nilai 51,79 untuk tingkat digitalisasi arsip.

- e. Pelaksanaan Reformasi Hukum yang semakin membaik juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan nilai 87,10 dalam kategori A (Sangat Baik). Sebelumnya, pada tahun 2024 nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar 86,72.
 - f. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang cukup baik menghasilkan peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kabupaten Manggarai. Capaian IP ASN Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 sebesar 52,70 meningkat menjadi 73,69 tahun 2024.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik tahun 2025 dengan berfokus pada 2 (dua) penyelesaian isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat yakni penyelesaian pengentasan kemiskinan dan realisasi investasi, berupa:
- a. Komitmen seluruh stakeholder di Kabupaten Manggarai yang cukup tinggi untuk mensukseskan program prioritas Presiden yang meliputi penanggulangan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mencapai 18,10%. Angka kemiskinan ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 19,01%.
 - b. Realisasi nilai investasi Kabupaten Manggarai tahun 2025 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 nilai investasi mencapai Rp245.916.532.796,00. Sementara tahun 2024 mencapai Rp154.671.191.707,00.



Hambatan dalam mencapai keberhasilan:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang dinamis, sehingga daerah memerlukan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan secara teknis.
2. Masih kurangnya implementasi nilai budaya pemerintahan inovatif dan adaptif oleh Aparatur Sipil Negara, yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang cepat, sebagai nilai budaya kerja yang sangat dibutuhkan dan wujud dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan.
3. Pembangunan zona integritas belum dilaksanakan. Pembangunan zona integritas Pemerintah Kabupaten Manggarai masih sebatas sosialisasi kepada Perangkat Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Manggarai belum mengikuti kegiatan terkait pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
5. Respon terhadap pengaduan kurang maksimal dimana rata-rata waktu respon awal terhadap pengaduan masih melebihi 3 (tiga) hari kerja.

Strategi dalam menghadapi hambatan:

1. Mengoptimalkan peran dan penggunaan seluruh sumber daya untuk melaksanakan penyesuaian kebijakan melalui optimalisasi tim kerja, penggunaan teknologi informatika, dan refocusing kegiatan dan anggaran.
2. Melaksanakan upaya pengembangan kompetensi dan menginternalisasikan *core values* BerAKHLAK secara berkesinambungan kepada semua ASN.
3. Mengikuti kegiatan pengukuran terkait pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian PANRB.

Dalam pencapaian tujuan **TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN RESPONSIF TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**, didukung oleh 3 (Tiga) sasaran pembangunan, yaitu :

Sasaran 35 : Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Indikator Nilai SAKIP
Indikator Peringkat EKPPD
Indikator Opini BPK
Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Indeks Kapasitas Fiskal
Indikator Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko



No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)	65,22	96,62
2	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)	2,8113 (Sedang)	62,89
3	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	100,00
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Baik	Baik (62,5367)	100,00
5	Indeks Kapasitas Fiskal	Angka	Tinggi (1,459)	0,017	1,17
6	Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko	Angka	Level 3	Level 2 (2,448)	81,60
Rata-rata					73,71
Predikat Kinerja					CUKUP

Rata-rata capaian sasaran ***Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel*** yang diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator tersebut di atas pada tahun 2025 adalah 73,71% predikat kinerja Cukup. Rata-rata capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2024 yang mencapai 87,03% kategori BAIK. Penurunan capaian ini disebabkan selain karena target yang ditetapkan cukup tinggi tahun 2025 juga karena realisasi indikator kinerja yang mengalami penurunan hasil evaluasi tahun 2025 seperti Peringkat EKPPD dan Indeks Kapasitas Fiskal.

Indikator Nilai SAKIP

Target 67,50 → Realisasi 65,22 → Capaian Kinerja 96,62% → BAIK

Pada tahun 2025, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor B/68/AA.05/2025 Tanggal 23 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025. Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai surat tersebut adalah **65,22** predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja ***"Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.***

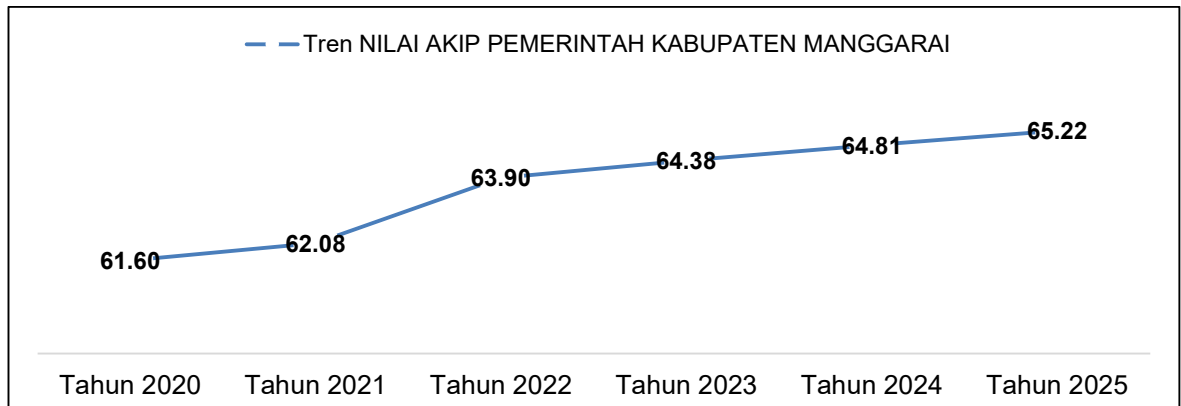
Rincian hasil evaluasi tersebut, sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	21,69	21,77
2	Pengukuran Kinerja	30	17,24	17,30
3	Pelaporan Kinerja	15	10,21	10,31



No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,67	15,82
Nilai Hasil Evalasi		100	64,81	65,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2025



Sumber : LHE Kementerian PANRB

Tren Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai selama 6 (enam) tahun terakhir, menunjukkan peningkatan walaupun peningkatannya belum signifikan yaitu dari 61,60 Tahun 2020 meningkat menjadi 65,22 tahun 2025 dengan kategori yang sama yaitu B (BAIK). Nilai dan kategori ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.47
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2025

No	Instansi Pemerintah	Tahun 2024		Tahun 2025			Ket.
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Interpretasi	
I	Provinsi Nusa Tenggara Timur	63,69	B				
1	Mangarai	64,81	B	65,22	B	BAIK	Naik
2	Kota Kupang	64,07	B				
3	Manggarai Barat	62,29	B	62,57	B	BAIK	Naik
4	Manggarai Timur	61,31	B				
5	Timor Tengah Selatan	60,96	B				
6	Sikka	60,79	B				
7	Nagekeo	60,65	B				
8	Belu	60,55	B				
9	Sumba Timur	60,49	B				
10	Timor Tengah Utara	60,30	B				
11	Ende	60,29	B	60,36	B	BAIK	Naik
12	Sumba Tengah	60,14	B				
13	Alor	60,10	B				



No	Instansi Pemerintah		Tahun 2024		Tahun 2025			Ket.
			Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Interpretasi	
	14	Rote Ndao	60,10	B	61,03	B	BAIK	Naik
	15	Flores Timur	60,09	B				
	16	Ngada	60,09	B				
	17	Lembata	60,08	B				
	18	Kupang	56,58	CC				
	19	Sabu Raijua	55,27	CC				
	20	Sumba Barat	52,22	CC				
	21	Malaka	51,44	CC				
	22	Sumba Barat Daya	50,04	CC				

Sumber: LHE KemenpanRB, 2025

Sesuai tabel tersebut di atas, nilai AKIP Kabupaten Manggarai tahun 2024 menempati Peringkat **ke-1** dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk tahun 2025 belum dapat diperbandingkan karena kesulitan mendapatkan data nilai AKIP dari Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan penilaian ini, antara lain:

1. Beberapa rekomendasi yang tertuang dalam LHE baik LHE dari Kementerian PANRB maupun LHE dari Tim evaluasi SAKIP Internal Perangkat Daerah (APIP Inspektorat Daerah) telah ditindaklanjuti.
2. Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Organisasi Setda melakukan *coaching Klinik* penyusunan dokumen Sakip Perangkat Daerah.
3. Melaksanakan BIMTEK terkait penyusunan dokumen perencanaan (Renstra) dengan TIM UGM dan penyusunan LKIP dengan SmartID dan BPKp NTT.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian nilai AKIP, antara lain :

1. Pergantian personel selaku pengampu teknis pengoordinasian dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang sangat dinamis dan/atau jumlah personel pada unit kerja yang terbatas.
2. Beberapa target kinerja sulit dibuktikan dan/atau diukur karena tidak dirumuskan dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
3. Batas waktu penyusunan dokumen/laporan SAKIP yang singkat sementara dokumen yang disusun tidak hanya dokumen/laporan SAKIP namun juga laporan-laporan lainnya yang menyebabkan laporan dan data yang disajikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya.



4. Catatan dan/atau rekomendasi dalam LHE AKIP dari tahun ke tahun memberikan tantangan yang semakin besar.

Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten antara lain:

1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian PANRB.
2. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisasi ego sektoral dan bekerja secara tim.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melalui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
4. Melakukan pendampingan pada saat penyusunan dokumen SAKIP.



Indikator Peringkat EKPPD

Target Sangat Tinggi (4,47) → Realisasi Sedang (2,8113) → Capaian Kinerja 62,89 → CUKUP

Realisasi indikator Peringkat EKPPD tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai tahun 2023.

Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kabupaten Manggarai memperoleh Skor **2,8113** Status Kinerja **SEDANG** dan menempati peringkat ke-230 dari 395 kabupaten seluruh Indonesia. Sementara pada tahun sebelumnya Kabupaten Manggarai memperoleh skor **2,9317** status kinerja **SEDANG** dan menempati peringkat 174 dari 414 Kabupaten seluruh Indonesia.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai berfluktuatif seperti tersaji pada tabel berikut.



Tabel 3.48
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		Keterangan
		Skor Kinerja	Status Kinerja	
1	2	3	4	5
1	2022	2,7951	Tinggi	Hasil Penilaian Evaluasi dari Kemendagri atas LPPD Tahun 2018
2	2023	2,16	Rendah	Hasil Penilaian Evaluasi dari Kemendagri Tahun 2022 atas LPPD Tahun 2021
3	2024	2,9317	Sedang	Hasil Penilaian Evaluasi dari Kemendagri Tahun 2023 atas LPPD Tahun 2022
4	2025	2,8113	Sedang	Hasil Penilaian Evaluasi dari Kemendagri Tahun 2024 atas LPPD Tahun 2023

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri

Sedangkan skor dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 seperti yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.49
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2025

KABUPATEN/KOTA		STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
		SKOR KINERJA	STATUS KINERJA
Pemerintah Provinsi NTT		2,3002	Rendah
1	Kota Kupang	3,0499	Sedang
2	Lembata	2,9555	Sedang
3	Manggarai Timur	2,8504	Sedang
4	Manggarai	2,8113	Sedang
5	Timor Tengah Utara	2,6224	Sedang
6	Kupang	2,5725	Rendah
7	Manggarai Barat	2,5524	Rendah
8	Nagekeo	2,4922	Rendah



KABUPATEN/KOTA		STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
		SKOR KINERJA	STATUS KINERJA
9	Ende	2,4668	Rendah
10	Ngada	2,4474	Rendah
11	Sumba Barat	2,3767	Rendah
12	Flores Timur	2,3588	Rendah
13	Sabu Raijua	2,3426	Rendah
14	Sikka	2,2659	Rendah
15	Rote Ndao	2,1933	Rendah
16	Sumba Tengah	2,1694	Rendah
17	Alor	2,1127	Rendah
18	Timor Tengah Selatan	2,0067	Rendah
19	Belu	1,8243	Rendah
20	Sumba Timur	1,6077	Sangat Rendah
21	Malaka	1,3786	Sangat Rendah
22	Sumba Barat Daya	Nihil	Nihil

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025

Sesuai tabel tersebut di atas, Kabupaten Manggarai menempati urutan **ke-4** dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Beberapa permasalahan/hambatan dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. IKK tidak didukung oleh dokumen yang lengkap dan/atau tidak sinkron dari Perangkat Daerah menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.
2. Belum semua pegawai di Perangkat Daerah memahami indikator teknis dan definisi operasional IKK yang diminta, terutama jika ada perubahan pedoman dari pemerintah pusat.
3. Sering terjadi pergantian SDM penyusun LPPD, yang mengakibatkan hilangnya *transfer knowledge* dan kebingungan dalam pengisian data.
4. Beberapa target kinerja sulit dibuktikan karena tidak dirumuskan dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
5. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara dokumen/laporan yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya yang menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya.



Usaha yang telah dan terus dilakukan untuk meningkatkan peringkat EKPPD melalui peningkatan nilai LPPD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait pengumpulan data dan penyusunan Laporan.
3. Melakukan review mandiri secara ketat oleh Inspektorat (APIP).

Indikator Opini BPK

Target WTP → Realisasi WTP → Capaian Kinerja 100% → BAIK

Opini BPK terhadap LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara di daerah. Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 belum keluar, sehingga dalam laporan ini capaian yang dilaporkan adalah capaian atas tahun 2024 berdasarkan surat BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 77.B/LHP/XIX.KUP/06/2025 tanggal 19 Juni 2025 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024, bahwa Opini atas Laporan Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah **WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)**.

Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berkomitmen dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan tindak lanjut cepat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dapat dibuktikan dengan telah meraih sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut sejak tahun 2018-2024 mendapatkan opini WTP dari BPK.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Target Baik → Realisasi 62,5367 (Nilai B) → Capaian Kinerja 100% → BAIK

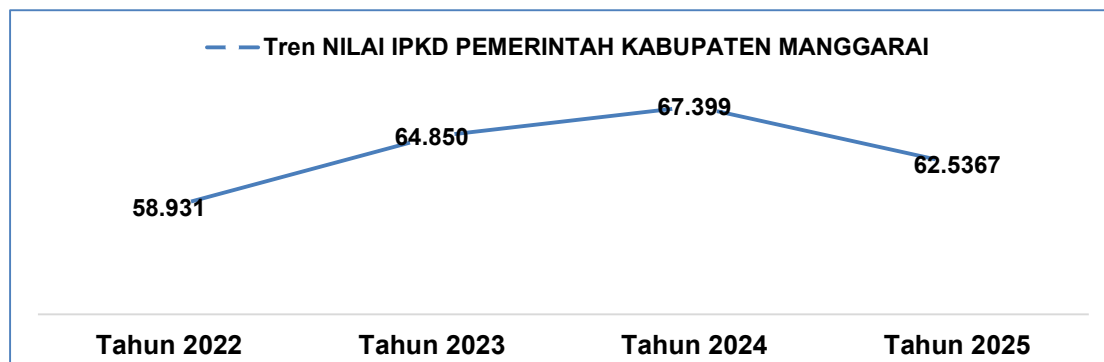
Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 532/KEP/HK/2025 tanggal 19 Desember 2025 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Manggarai masuk dalam Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah RENDAH, dengan



Indeks Total 62,5367 kategori CUKUP BAIK Nilai B. Rincian hasil pengukuran sebagai berikut:

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1	Manggarai	8.4152	7.1528	7.9688	20	8	10	62.5367	Cukup Baik	B

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 2022-2025 berfluktuatif seperti terlihat dalam grafik berikut.



Keterangan Grafik:

1. Tahun 2022 dengan indeks total 58,9308 Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah RENDAH Kategori PERLU PERBAIKAN Nilai B.
2. Tahun 2023 dengan indeks total 64,850 Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah SEDANG Kategori PERLU PERBAIKAN Nilai B
3. Tahun 2024 dengan indeks total 63,399 Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah SEDANG Kategori PERLU PERBAIKAN Nilai B.
4. Tahun 2025 dengan indeks total 62.5367 Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah RENDAH Kategori CUKUP BAIK Nilai B.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian IPKD sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyusunan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaporan keuangan daerah.
2. Tingkat kemampuan SDM menguasai teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Adanya supervisi dari pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IPKD adalah:

1. Adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan dalam perjalanan waktu antara penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang berpengaruh pada tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.



2. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Strategi yang telah dan akan ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap tahapan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.
2. Menyesuaikan peraturan-peraturan karena adanya perubahan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Indikator Indeks Kapasitas Fiskal

Target Tinggi (1,459) → Realisasi Rendah (0,017) → Capaian Kinerja 1,17% → KURANG

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kabupaten Manggarai tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Manggarai **0,017 kategori Rendah**. Realisasi IKF 0,017 dari target 1,459 maka capaian kinerja dari indikator IKF ini adalah 1,17% predikat kinerja Kurang. IKF tahun 2025 ini turun signifikan jika dibandingkan dengan IKF tahun 2024 yang mencapai 1,046 kategori Rendah.

IKF Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020-2025 sebagai berikut:

Tabel 3.50
Kapasitas Fiskal Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2025

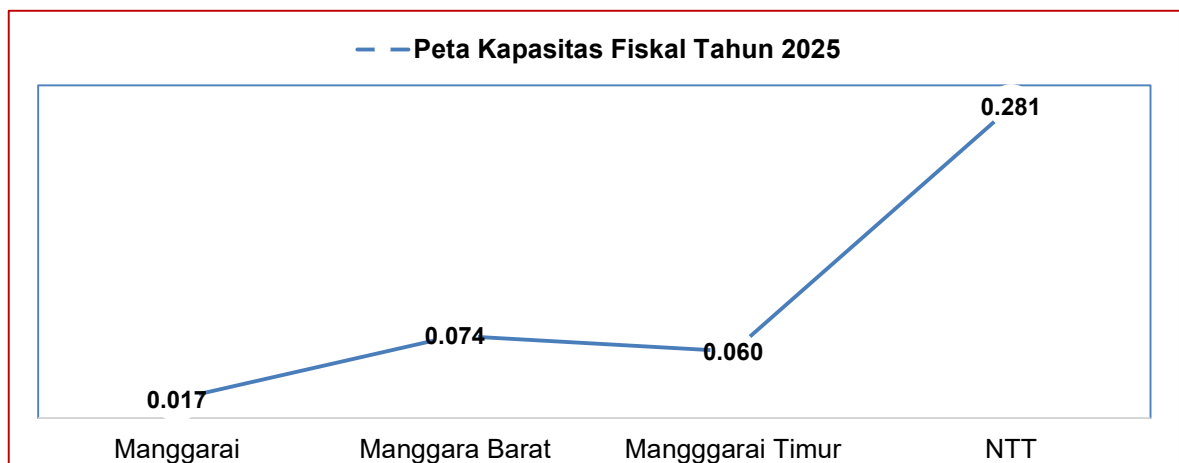
No	Tahun	Indeks	Kategori	Rentang RKFD	Kategori Rentang RKFD Kaoasitas Fiskal Daerah	Keterangan
1	2020	0,541	Rendah	IKFD < 0,517	Sangat rendah	PMK Nomor : 120/PMK. 07 /2020 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
				0,517 ≤ IKFD < 0,747	Rendah	
				0,747 ≤ IKFD < 1,168	Sedang	
				1,168 ≤ IKFD < 2,145	Tinggi	
				IKFD ≥ 2,145	Sangat Tinggi	
2	2021	0,546	Rendah	IKFD < 0,530	Sangat rendah	PMK Nomor : 116/PMK. 07 /2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
				0,530 ≤ IKFD < 0,727	Rendah	
				0,727 ≤ IKFD < 1,053	Sedang	
				1,053 ≤ IKFD < 1,838	Tinggi	
				IKFD ≥ 1,838	Sangat Tinggi	
3	2022	1,678	Sedang	RKFD < 1,171	Sangat rendah	
				1,171 ≤ RKFD < 1,504	Rendah	



No	Tahun	Indeks	Kategori	Rentang RKFD	Kategori Rentang RKFD Kaoasitas Fiskal Daerah	Keterangan
				$1,504 \leq \text{RKFD} < 1,838$	Sedang	PMK Nomor : 193/PMK. 07 /2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
				$1,838 \leq \text{RKFD} < 2,171$	Tinggi	
				$2,171 \leq \text{RKFD}$	Sangat Tinggi	
4	2023	1,254	Sedang	$\text{RKFD} < 0,947$	Sangat Rendah	PMK Nomor : 84/2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
				$0,947 \leq \text{RKFD} < 1,203$	Rendah	
				$1,203 \leq \text{RKFD} < 1,459$	Sedang	
				$1,459 \leq \text{RKFD} < 1,715$	Tinggi	
				$1,715 \leq \text{RKFD}$	Sangat Tinggi	
5	2024	1,046	Rendah	$\text{RKFD} < 0,905$	Sangat Rendah	PMK Nomor : 65/2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
				$0,905 \leq \text{RKFD} < 1,141$	Rendah	
				$1,141 \leq \text{RKFD} < 1,378$	Sedang	
				$1,378 \leq \text{RKFD} < 1,615$	Tinggi	
				$1,615 \leq \text{RKFD}$	Sangat Tinggi	
6	2025	0,017	Rendah	$\text{RKFD} < 0,905$	Sangat Rendah	PMK Nomor : 97/2025 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
				$0,905 \leq \text{RKFD} < 1,141$	Rendah	
				$1,141 \leq \text{RKFD} < 1,378$	Sedang	
				$1,378 \leq \text{RKFD} < 1,615$	Tinggi	
				$1,615 \leq \text{RKFD}$	Sangat Tinggi	

Sumber : Peraturan Menkeu RI

Grafik 3.42
Perbandingan Peta Kapasitas Fiskal
dengan Kabupaten Terdekat dan Provinsi NTT
Tahun 2025



Berdasarkan grafik tersebut di atas Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten Manggarai tercatat nilai 0,017 kategori Rendah lebih kecil jika dibandingkan dengan Manggarai Timur nilai 0,060, Manggarai Barat nilai 0,074 dan Provinsi NTT nilai 0,281 kategori yang sama yaitu Rendah.



Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Manggarai, sebagai berikut:

1. Ketergantungan Tinggi pada Transfer Pusat: sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk Manggarai, masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah karena sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan kapasitas fiskal fluktuatif mengikuti besaran dana transfer (TKD/Transfer ke Daerah).
2. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal: Rendahnya kontribusi PAD dibandingkan total pendapatan daerah menjadi faktor utama lemahnya kapasitas fiskal mandiri.
3. Struktur Belanja yang Belum Efisien: Masih tingginya belanja rutin atau pegawai dibandingkan belanja modal yang produktif, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pengaruh Eksternal/Regulasi: Perubahan kebijakan transfer dari pusat (peraturan Menteri Keuangan/Kemendagri) mempengaruhi perhitungan indeks fiskal.

Upaya Penanganan dilakukan:

1. Optimalisasi dan Digitalisasi PAD dengan cara:
 - a. Inovasi Pemungutan Pajak dan Retribusi dengan menerapkan digitalisasi pada sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi untuk mengurangi kebocoran anggaran.
 - b. Intensifikasi Pajak Sektor Unggulan dengan memaksimalkan potensi pajak dari sektor pariwisata, pertanian, dan jasa yang merupakan sektor unggulan ekonomi di Manggarai.
 - c. Pemutakhiran Data Wajib Pajak dengan melakukan pendataan ulang potensi wajib pajak (PBB-P2, BPHTB) untuk memastikan target pendapatan sesuai dengan potensi riil.
2. Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan dan Tata Kelola:
 - a. Pemberdayaan Sektor Pendidikan dan Kesehatan dengan berfokus pada peningkatan mutu SDM (kesehatan dan pendidikan) yang pada jangka panjang akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pendapatan daerah.



- b. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (*clean government*) untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor, yang berujung pada peningkatan iklim usaha.
 - c. Mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfokus pada penguatan ekonomi dan optimalisasi anggaran.
 3. Efisiensi dan Optimalisasi Belanja Daerah:
 - a. Peningkatan Kualitas Belanja dengan memastikan belanja daerah lebih diarahkan pada kegiatan produktif dari pada konsumtif, serta memastikan belanja APBD selaras dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
 - b. Peningkatan Kinerja ASN dengan mengaitkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan produktivitas kerja dan kepatuhan dalam pelaporan kinerja (E-Kinerja) agar pelayanan publik lebih efisien dan efektif.
 - c. Konsistensi Perencanaan dan Anggaran dengan memastikan sinkronisasi antara Renja PD (Perangkat Daerah) dengan RPJMD untuk menghindari inefisiensi anggaran.
 4. Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi:
 - a. Optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dengan memaksimalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan memenuhi syarat kinerja yang ditetapkan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
 - b. Sinergi Pajak Pusat dan Daerah dengan melakukan kerja sama dengan Ditjen Pajak/DJPK untuk optimalisasi pemungutan pajak.

Indikator Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko

Target Level 3 → Realisasi Level 2 (2,448) → Capaian Kinerja 81,60% → BAIK

Nilai Indeks Manajemen Risiko atau Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Manggarai tahun 2024 adalah 2,344 naik menjadi 2,448 tahun 2025 dan memenuhi karakteristik MRI pada Level 2 (*Risk Aware*). Nilai tersebut sesuai hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa



Tenggara Timur, yang termuat dalam surat Nomor PE.09.03/LHP-335/PW24/3/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai.

Nilai **level 2 (2,448)** tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yaitu Level 3, dengan tingkat capaian 81,60 predikat kinerja BAIK.

Selain nilai Indeks Manajemen Risiko atau Manajemen Risiko Indeks (MRI) tersebut di atas, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Manggarai juga telah memperoleh beberapa hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan nilai 2,824, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan nilai 2,634 dan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dengan skor 3,000 atau Level 3.

Tabel 3.51
Hasil Penilaian MRI, SPIP, IEPK dan APIP
Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Uraian	Hasil Penilaian				Ket.
		2022	2023	2024	2025	
1	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,310	2,581	2,344	2,448	Level 2
2	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2,959	3,009	2,851	2,824	Level 2
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,340	2,316	2,604	2,634	Level 2
4	Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,000	Level 3

Berdasarkan tabel tersebut di atas, hasil penilaian terhadap ke-4 indeks tersebut berfluktuatif dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manajemen Resiko Indeks (MRI) tahun 2022 dengan nilai 2,310, naik menjadi 2,581 tahun 2023. Tahun 2024 turun menjadi 2,344 tahun 2024 dan tahun 2025 naik menjadi 2,448 dan memenuhi karakteristik MRI pada Level 2.
- b. Maturitas Penyelenggaraan SPIP, tahun 2022 dengan nilai 2,959 (Level 2) naik menjadi 3,009 (Level 3) tahun 2023. Tahun 2024 turun menjadi 2,851 dan kembali turun tahun 2025 dengan nilai 2,824, memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2.



- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), tahun 2022 dengan nilai 2,340 turun menjadi 2,316 tahun 2023. Tahun 2025 naik menjadi 2,604 dan tahun 2025 meningkat menjadi 2,634 memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2.
- d. Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak mengalami perubahan nilai dari tahun 2022-2025 yaitu 3,000 (Level 3) dengan karakteristik *delivered*.

Beberapa rekomendasi sekaligus merupakan hambatan dalam usaha meningkatkan Kematangan Penerapan Manajemen Resiko Indeks Kabupaten Manggarai, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan
 - a. Beberapa sasaran strategis pemda, sasaran strategis OPD, sasaran program dan sasaran kegiatan belum sepenuhnya berorientasi *outcome* serta indikatornya belum memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, dan timebound* (SMART).
 - b. Strategi pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah belum sepenuhnya lintas perangkat daerah (*crosscutting*) sehingga tidak menggambarkan pola kolaborasi antar perangkat daerah dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja pemda.
 - c. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan belum sepenuhnya dirancang untuk mengatasi permasalahan/isu strategis (*critical success factor*).
2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses
 - a. SOP terkait Fraud Control Plan (FCP) yang disusun Inspektorat yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengelolaan risiko fraud belum diarahkan secara spesifik untuk memitigasi risiko korupsi di seluruh OPD.
 - b. Register risiko strategis pada tingkat perangkat daerah (OPD) yang memuat identifikasi risiko, prioritas risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah disusun, namun secara umum masih kurang jelas dan sulit dipahami. Selain itu, belum seluruh OPD mengidentifikasi risiko operasional, risiko fraud, dan risiko kemitraan dengan pihak ketiga.
 - c. RTP belum sepenuhnya diimplementasikan dan dilakukan pemantauan / monitoring atas pelaksanaannya sehingga efektivitasnya dalam upaya menurunkan tingkat risiko tidak dapat diukur secara memadai.



- d. Manajemen risiko belum diintegrasikan dengan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, tahapan manajemen risiko belum melibatkan setiap unsur di dalam unit organisasi.
- e. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memiliki kanal whistleblowing system (WBS) sebagai sarana pengaduan pelaporan pelanggaran dan penyimpangan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui kanal tersebut.
- f. Reviu terhadap penyelenggaraan manajemen risiko yang mencakup aspek kebijakan, framework, metode, tahapan, proses manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan secara komprehensif sehingga belum mampu memberikan dampak berupa perbaikan kualitas dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan. Selain itu, Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD beserta manajemen belum sepenuhnya menggunakan informasi pada register risiko dan RTP di setiap pengambilan keputusan/kebijakan.

Langkah-langkah perbaikan dan dalam rangka meningkatkan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) di Kabupaten Manggarai antara lain menindaklanjuti saran/rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti:

1. Memperbaiki proses perencanaan dan penjenjangan kinerja secara konsisten sesuai dengan proses bisnis yang didukung indikator kinerja yang berorientasi hasil, memenuhi kriteria SMART, dan target yang tepat.
2. Peningkatan pemahaman pegawai terkait dengan sasaran, tujuan serta proses bisnis pemda agar dapat menyusun indikator yang memenuhi kriteria SMART dan target yang tepat sehingga dapat mengukur capaian kinerja pemda.
3. Menyempurnakan implementasi manajemen risiko secara konsisten dan memadai di seluruh perangkat daerah.
4. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi IEPK.
5. Penguatan pengendalian intern secara konsisten untuk mengurangi dampak dan keterjadian temuan berulang pada temuan keuangan, aset, dan ketaatan.
6. Mengoptimalkan perbaikan tata kelola pada sektor pengentasan kemiskinan.
7. Mengoptimalkan perbaikan tata kelola pada sektor ketahanan pangan.



Sasaran “**Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappelitbenda, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	889.457.700,00	869.874.719,00	97,80
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	333.984.324,00	285.594.809,00	85,51
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	159.887.000,00	133.013.973,00	83,19
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29.895.000,00	29.895.000,00	100,00
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.474.022.386,00	1.425.571.866,00	96,71
Program Perekonomian dan Pembangunan	390.721.348,00	346.633.858,00	88,72
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.953.110.000,00	9.772.160.236,00	89,22
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	203.067.615.400,00	197.916.244.296,75	97,46
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	765.541.878,00	246.405.749,75	32,19
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	952.087.188,00	847.057.130,00	88,97
Program Penyelenggaraan Pengawasan	459.825.000,00	427.915.000,00	93,06
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	875.000,00	850.000,00	97,14
Total Anggaran	219.477.022.224,00	212.301.216.637,50	96,73

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel** sebesar Rp219.477.022.224,00 realisasi 212.301.216.637,50 atau 96,14%.

Sasaran 36 : <i>Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel</i>	
Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
Indikator Indeks Profesionalitas ASN	

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks SPBE	Angka	2,80	2,90	103,57
2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,00 (Tinggi)	58,38 (Sangat Rendah)	72,07
Rata-rata					87,82
Kategori					BAIK

Rata-rata capaian dari ke-2 indikator sasaran Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel tahun 2025 adalah 87,82 predikat kinerja BAIK. Rata-rata capaian ini turun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 103,01 predikat kinerja



ISTIMEWA. Penurunan ini disebabkan karena perbedaan target yang ditetapkan tahun 2025 yang lebih tinggi dan juga karena terjadinya penurunan realisasi pada indikator indeks profesionalitas ASN. Uraian dari ke-2 indikator tersebut sebagai berikut.

Indikator SPBE

Target 2,80 → Realisasi 2,90 → Capaian Kinerja 103,57% → ISTIMEWA

Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahap kegiatan yakni penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.

Predikat Penilaian SPBE:

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Indeks SPBE yang disajikan dalam laporan tahun 2025 ini merupakan Indeks SPBE tahun 2024, karena pada tahun 2025, Kementerian PANRB tidak melakukan evaluasi atas tingkat kematangan SPBE di Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.

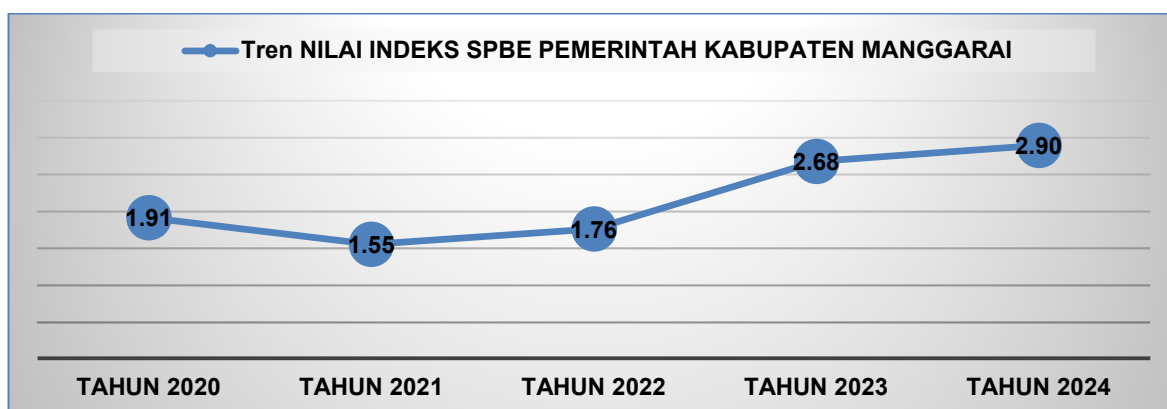
Target Indeks SPBE Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah 2,80. Realisasi sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah



Daerah Tahun 2024. Pada Lampiran Keputusan Menteri PANRB tersebut, Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah 2,90 Predikat BAIK. Realisasi 2,90 dari target 2,80 maka capaian dari indikator Indeks SPBE tahun 2025 adalah 103,57%. Nilai ini meningkat dari tahun 2023 yang mencapai 2,68.

Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berfluktuatif, seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.43
Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2020-2024



Sumber : Keputusan Menteri PANRB, 2024

Tabel 3.52
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024

KABUPATEN		SPBE	
		INDEKS	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi NTT		3,89	SANGAT BAIK
1	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,47	Baik
2	Pemerintah Kab. Rote Ndao	3,35	Baik
3	Pemerintah Kota Kupang	3,14	Baik
4	Pemerintah Kab. Sumba Barat	3,12	Baik
5	Pemerintah Kab. Manggarai	2,90	Baik
6	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,83	Baik
7	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,64	Baik
8	Pemerintah Kab. Ende	2,58	Cukup
9	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,56	Cukup
10	Pemerintah Kab. Kupang	2,48	Cukup
11	Pemerintah Kab. Belu	2,47	Cukup
12	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,43	Cukup
13	Pemerintah Kab. Lembata	2,42	Cukup
14	Pemerintah Kab. Alor	2,19	Cukup
15	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	2,19	Cukup



KABUPATEN		SPBE	
		INDEKS	PREDIKAT
16	Pemerintah Kab. Ngada	2,17	Cukup
17	Pemerintah Kab. Malaka	2,17	Cukup
18	Pemerintah Kab. Flores Timur	2,10	Cukup
19	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	2,03	Cukup
20	Pemerintah Kab. Sikka	2,02	Cukup
21	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	1,84	Cukup
22	Pemerintah Kab. Nagekeo	-	-

Sumber : Keputusan Menteri PANRB, 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas Indeks SPBE Kabupaten Manggarai pada tahun 2024, menempati peringkat tertinggi ke-5 dari 22 Kabupaten/kota se-Provinsi NTT.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indeks SPBE sebagai berikut:

1. Pada Domain Kebijakan telah ditetapkan beberapa kebijakan terkait dengan SPBE khususnya Manajemen Keamanan Informasi dan kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan SPBE di Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memiliki dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE yang memuat tentang postur SPBE dan rencana pengembangan untuk beberapa domain SPBE.
3. Pelayanan publik tingkat Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menggunakan beberapa layanan aplikasi umum berbagi pakai dan beberapa layanan Administrasi Pemerintahan yang mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan Akuntabel.

Hambatan utama pencapaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. Belum seluruh sarana dan prasarana pendukung penerapan SPBE terpenuhi secara optimal, khususnya di tingkat kecamatan atau unit pelayanan publik yang lebih kecil. Ketersediaan infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai juga menghambat integrasi data.
2. Masih terbatasnya SDM yang kompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini memengaruhi kemampuan teknis dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi SPBE.
3. Masih perlunya penguatan koordinasi penganggaran untuk pengembangan e-Government secara menyeluruh. Seringkali pembangunan aplikasi atau sistem



informasi dilakukan sendiri-sendiri (terkotak-kotak/silo) oleh masing-masing Perangkat Daerah, belum terintegrasi sepenuhnya.

4. Meskipun sudah ada Peraturan Bupati, masih diperlukan penguatan kebijakan yang lebih mendetail mengenai tata kelola dan operasional SPBE di tingkat teknis untuk memastikan kepatuhan.
5. Secara umum, keterbatasan sumber daya yang dimiliki, termasuk anggaran, membuat pemenuhan seluruh indikator kinerja utama dalam waktu singkat belum dapat terwujud secara maksimal.

Strategi yang akan dilakukan ke depan adalah memperkuat kebijakan (payung hukum), optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi penganggaran.

Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Target 81,00 (Tinggi)→Realisasi 58,38 (Sangat Rendah)→Capaian Kinerja 72,07%→CUKUP

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN bertujuan untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai mencakup 4 (empat) dimensi:

- a) Dimensi kualifikasi
Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- b) Dimensi Kompetensi
Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- c) Dimensi Kinerja
Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu



dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

d) Dimensi Disiplin

Digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Indeks Profesionalitas Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 sesuai Data dari BKPSDMD Kabupaten Manggarai melalui <https://siasn-instansi.bkn.go.id/layananIP> adalah **58,38** kategori **SANGAT RENDAH**. Jumlah ASN yang dinilai dalam laporan tersebut sebanyak 5.526 terdiri dari PNS sebanyak 3.563 orang dan PPPK sebanyak 1.963 orang dengan rincian capaian:

No	Uraian	Komponen Penilaian				Rata-rata	Total Nilai
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1	PNS	20,16	17,69	14,13	5	56,98	203015,9
2	PPPK	20,00	20,41	14,36	5	59,78	117340,8
Rata-rata		20,08	19,05	14,245	5	58,38	160178,4
IP ASN Kabupaten Manggarai Tahun 2025						58,38	

Sumber : BKPSDMD melalui <https://siasn-instansi.bkn.go.id/layananIP>, 2025

Faktor yang menghambat peningkatan nilai IP ASN:

1. Sebagian ASN belum mengikuti diklat sesuai persyaratan jabatan.
2. Sebagian besar ASN belum menyampaikan sertifikat diklat/seminar/workshop/bimtek ke BKPSDMD untuk selanjutnya BKPSDMD menginput ke Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.
3. Sebagian ASN belum melakukan penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Langkah-langkah yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan nilai IP ASN

1. Mengikuti diklat sesuai persyaratan jabatan (diklat PIM, diklat Fungsional dan Teknis).
2. Melaporkan secara berkala diklat teknis dan diklat fungsional ke BKPSDMD untuk dapat diinput ke Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.
3. Melakukan penilaian kinerja secara berkala dan tepat waktu.
4. Meningkatkan kedisiplinan.



Sasaran "**Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel**" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	569.292.375,00	569.067.469,00	99,96
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	78.680.000,00	78.185.400,00	99,37
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.980.000,00	3.980.000,00	100,00
Program Kepegawaian Daerah	1.512.003.400,00	1.348.843.896,00	89,21
Total Anggaran	2.163.955.775,00	2.000.076.765,00	92,43

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel** sebesar Rp2.512.003.400,00 realisasi Rp2.000.076.765,00 atau 92,43%.

Sasaran 37 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Target 83,50 → Realisasi 85,44 → Capaian Kinerja 102,32% → ISTIMEWA

Sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima" diukur dengan menggunakan sebuah indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi IKM Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah 85,44 dengan target 83,50 tingkat capaian kinerja mencapai 102,32% dan termasuk predikat kinerja ISTIMEWA.

Realisasi IKM 85,44 diperoleh dari rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah/Unit Organisasi Penyelektora Pelayanan Publik. Pada tahun 2025, terdapat 20 Perangkat Daerah/Unit Organisasi yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Ke-20 Perangkat Daerah/Unit Organisasi yang melaksanakan SKM tersebut sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/UPT/UPTD	HASIL PELAKS. SKM UPP			Tahun Pelaksanaan SKM
		Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
1	Dinas Kependudukan dan Capil	87,33	B	Baik	2025
2	Dinas Sosial	91,00	A	Sangat Baik	2025
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	84,88	B	Baik	2025
4	Dinas PMPTSP	89,98	A	Sangat Baik	2025

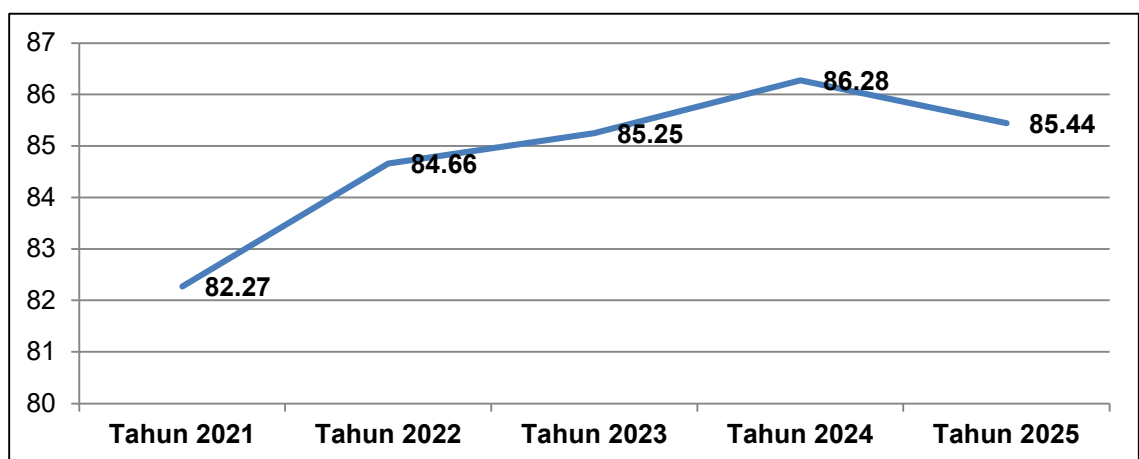


No	Nama Perangkat Daerah/UPT/UPTD	HASIL PELAKS. SKM UPP			Tahun Pelaksanaan SKM
		Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	82,03	B	Baik	2025
6	Dinas PPO	93,80	A	Sangat Baik	2025
7	RSUD Ruteng	89,48	A	Sangat Baik	2025
8	RSP Reo	76,95	B	Baik	2025
9	Bagian Organisasi Setda	89,76	A	Sangat Baik	2025
10	Kecamatan Lelak	82,64	B	Baik	2025
11	Kecamatan Satar Mese	82,26	B	Baik	2025
12	Kecamatan Cibal	86,69	B	Baik	2025
13	Kecamatan Ruteng	87,01	B	Baik	2025
14	Kecamatan Reok	78,03	B	Baik	2025
15	Puskesmas Bea Mese	84,36	B	Baik	2025
16	Puskesmas Cancar	84,09	B	Baik	2025
17	Puskesmas Watu Alo	80,41	B	Baik	2025
18	Puskesmas Ketang	84,04	B	Baik	2025
19	Puskesmas Kota	87,96	B	Baik	2025
20	Puskesmas Bangka Kenda	86,09	B	Baik	2025
IKM Pemerintah Kabupaten Manggarai		85,44	B	Baik	2025

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2025

Rata-rata nilai IKM dari 20 Perangkat Daerah/Unit Organisasi Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM tersebut adalah **85,44** Kategori B dengan Kinerja Pelayanan BAIK.

Grafik 3.44
Tren IKM Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025



Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan Nilai IKM Kabupaten Manggarai :



1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pemenuhan instrumen dan infrastruktur pelayanan publik serta pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah dalam perbaikan pelayanannya.
2. Pengusulan dan pelaksanaan anggaran pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik.
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.
4. Meningkatkan komitmen pimpinan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik seperti pelaksanaan survei IKM, sosialisasi terkait Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Terkait kualitas dan kepatuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kementerian PANRB dan Ombudsman RI setiap tahun melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.53
Hasil Penilaian Kualitas dan Kepatuhan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Uraian	Nilai/Kategori		Keterangan
1	2021	Kualitas Pelayanan Publik	2,36	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	61,00	CUKUP (zona Kuning) kualitas Sedang	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
2	2022	Kualitas Pelayanan Publik	2,81	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	75,59	CUKUP (zona Kuning) kualitas Sedang	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
3	2023	Kualitas Pelayanan Publik	2,90	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	70,99	CUKUP (zona Kuning) kualitas Sedang	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
4	2024	Kualitas Pelayanan Publik	3,78	BAIK	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	83,22	Baik (Zona Hijau) Kualitas Tinggi	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
5	2025	Kualitas Pelayanan Publik	3,08	B- (Baik dengan Catatan)	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB



No.	Tahun	Uraian	Nilai/Kategori		Keterangan
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	63,18	C (Cukup) Kualitas Sedang	Hasil Penilaian Ombudsman RI

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2025

Sesuai tabel tersebut di atas, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Manggarai tahun 2025 mencapai 3,08 atau termasuk dalam kategori B- (baik dengan catatan). Sedangkan terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh nilai 63,18 kategori Cukup Kualitas Sedang.

Faktor yang mempengaruhi nilai IPP dan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai berada pada kategori BAIK dan CUKUP tersebut antara lain karena Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai telah secara rutin membangun komunikasi, menyampaikan informasi dan melakukan pendampingan terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menjadi lokus penilaian dalam PEKPPP dan Tingkat Kepatuhan baik nasional maupun mandiri tahun 2025 .

Namun nilai IPP tahun 2025 sebesar 3,08 ini mengalami penurunan dari nilai IPP tahun 2024 yaitu 3,78 dan Tingkat Kepatuhan dari 83,22 tahun 2024 turun menjadi 63,18 tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Informasi mengenai PEKPPP dari Kementerian PANRB dan Penilaian Kepatuhan atau opini Ombudsman RI terlambat disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Manggarai, sehingga persiapan Perangkat dan UPP yang lokus penilaian menjadi kurang maksimal.
2. Pada tahun 2025 terjadi perubahan penilaian PEKPPP secara nasional yang melibatkan 2 (dua) UPP dan secara mandiri melibatkan minimal 25,00% dari jumlah UPP. Sementara pada tahun 2024 hanya dilakukan secara nasional yang melibatkan 2 (dua) UPP. Perubahan penilaian dengan terjadinya peningkatan jumlah UPP mandiri ini menyebabkan persiapan dari UPP tersebut kurang maksimal yang mengakibatkan terjadinya penurunan hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manggarai tahun 2025.
3. Pada tahun 2025, penilaian terhadap tingkat kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik terjadi perubahan indikator penilaian (penilaian mall administrasi dan kategori penilaian dari Tingkat Kepatuhan menjadi OPINI Ombudsman RI.



Untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik berupa IPP di Kabupaten Manggarai, maka solusi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai sebagai koordinator harus lebih cepat dan tepat waktu dalam menyebarkan informasi kepada Perangkat Daerah/UPP serta rutin melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah/UPP yang menjadi lokus PEKPPP baik secara nasional maupun mandiri dan penilaian Opini Ombudsman RI.
2. Setiap Perangkat Daerah/UPP yang telah dilakukan evaluasi pada tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai wajib menyiapkan dan mengupdate semua data dukung untuk PEKPPP dan Opini Ombudsman RI tahun berikutnya, berdasarkan PEKPPP dan List Matrik Penilaian tahun sebelumnya.

Sasaran “**Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima**” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dan Kecamatan (12) Kecamatan			
Nama Program	Total Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	620.024.000,00	591.730.500,00	95,44
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	285.545.000,00	271.438.000,00	95,06
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.516.567.000,00	5.389.253.000,00	97,69
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	237.500.000,00	215.370.000,00	90,68
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	836.000,00	300.000,00	35,89
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.583.939,00	18.176.348,00	84,21
Program Pendaftaran Penduduk	102.327.634,00	101.098.088,00	98,80
Program Pencatatan Sipil	111.689.454,00	107.631.838,00	96,37
Program Pengelolaan Arsip	17.739.500,00	14.970.000,00	84,39
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	69.305.000,00	63.227.200,00	91,23
Total Anggaran	6.983.117.527,00	6.773.194.974,00	96,99

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima** sebesar Rp6.983.117.527,00 realisasi Rp6.773.194.974,00 atau 96,99%.



PREVALENSI STUNTING

Target 11,90 → Realisasi 13,17 → Capaian Kinerja 89,34% → BAIK

IKU **Prevalensi Stunting** merupakan salah satu indikator dari program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai periode 2021-2026 dijadikan Indikator Kinerja Utama.

Angka prevalensi stunting 2025 pada pengukuran Agustus tahun 2025 mencapai 13,17% atau sekitar 2.987 balita masuk dalam kategori stunting dari 22.683 balita yang diukur dan ditimbang. Sementara pada tahun 2024 Angka Prevalensi Stunting mencapai 11,07% atau sekitar 2.791 balita masuk kategori stunting dari 25.219 balita yang diukur dan ditimbang. Dari data tersebut angka prevalensi stunting tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 yaitu dari 11,07 tahun 2024 menjadi 13,17 tahun 2025.

Angka stunting Kabupaten Manggarai tahun 2022-2025 berfluktuatif seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.54
Data Balita Stunting Kab. Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah Balita yang Diukur dan Ditimbang	Jumlah Balita Kategori Stunting	Prevalensi Stunting	Ket.
1	2022	26.563	4.313	16,24	Pengukuran Agustus 2022
2	2023	26.598	3.480	13,08	Pengukuran Agustus 2023
3	2024	25.219	2.791	11,07	Pengukuran Agustus 2024
4	2025	22.683	2.987	13,17	Pengukuran Agustus 2025

Status Gizi Balita Berdasarkan Bulan Penimbangan Balita Agustus 2025

Status gizi berdasarkan panjang/tinggi badan berbanding usia **Balita Stunting/pendek**
2.987 (13,17 %)

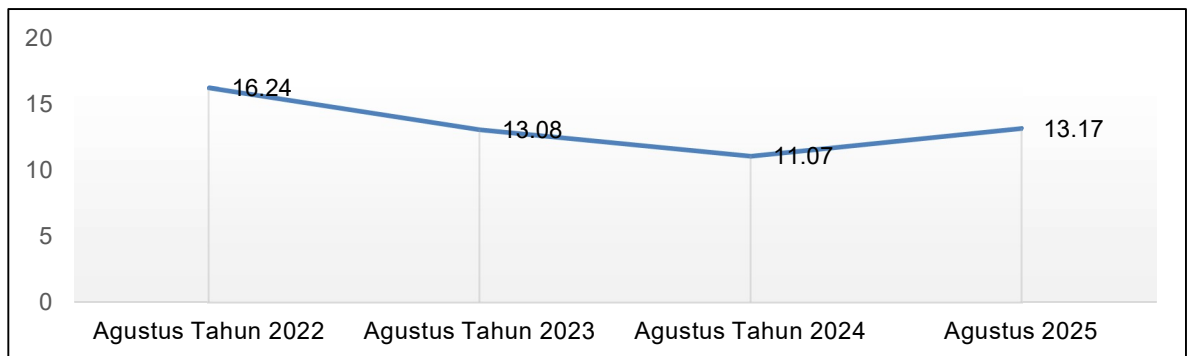
Status gizi berdasarkan berat badan berbanding panjang/tinggi badan **Balita Wasting**
2.473 (10,94%)

Status gizi berdasarkan berat badan berbanding usia **Balita Underweight**
979 (4,3%)

Balita **Wasting** dan **Underweight** berpotensi menjadi **Balita Stunting**



Grafik 3.45
Tren Angka Stunting Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025



Angka stunting Kabupaten Manggarai pada pengukuran bulan Agustus tahun 2025 meningkat dari hasil pengukuran Agustus tahun 2024 yaitu dari 11,07 menjadi 13,17 tahun 2025.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian Indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai :

1. **Sarana** : Belum semua Pustu/Posyandu memiliki alat ukur *anthropometri*.
2. **SDM** :
 - a. Jumlah tenaga gizi di Faskes masih kurang.
 - b. Belum semua petugas kesehatan memahami cara penggunaan *anthropometri*.
3. **Anggaran** :
 - a. Belum optimalnya ketersediaan anggaran di beberapa Perangkat Daerah untuk penurunan stunting.
 - b. Pada Tahun Anggaran 2023, beberapa perangkat Daerah terkait tidak mengalokasikan program/kegiatan untuk penanganan stunting.
4. **Pola Asuh** : - Masih banyak orang tua yang kurang/tidak memahami dan/atau kurang/tidak mempraktikkan pola asuh yang benar.

Langkah-langkah yang telah dan terus dilakukan dalam rangka penurunan angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai:

1. **Pembentukan Tim Peludes** (Pembina Kelurahan dan Desa Bebas Stunting) dimana semua Perangkat Daerah masing-masing diberikan tanggung jawab untuk membina beberapa Desa/Kelurahan.
2. **Lonto Leok** yaitu kegiatan sarasehan atau penyuluhan kepada keluarga-keluarga di Desa/Kelurahan tentang upaya pencegahan dan penanganan stunting.



3. Perbaiki Gizi Ibu dengan pemberian tablet tambah darah (zat besi & asam folat), edukasi konsumsi makanan bergizi seimbang dan Penanganan anemia sejak sebelum kehamilan.

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Penganggaran.

1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu sumber daya yang sangat besar perannya dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah Sumber Daya Manusia Aparatur. SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2025 berjumlah 7.845 orang. Jumlah 7.845 orang tersebut terdiri dari PNS sebanyak 4.310 Orang dan PPPK sebanyak 3.535 orang. Adapun komposisi ASN Kabupaten Manggarai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin sebagai berikut :

No.	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Jumlah	%
1	Laki-Laki	1.867	1.664	3.531	45,01
2	Perempuan	2.443	1.871	4.314	54,99
JUMLAH		4.310	3.535	7.845	100,00

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2025

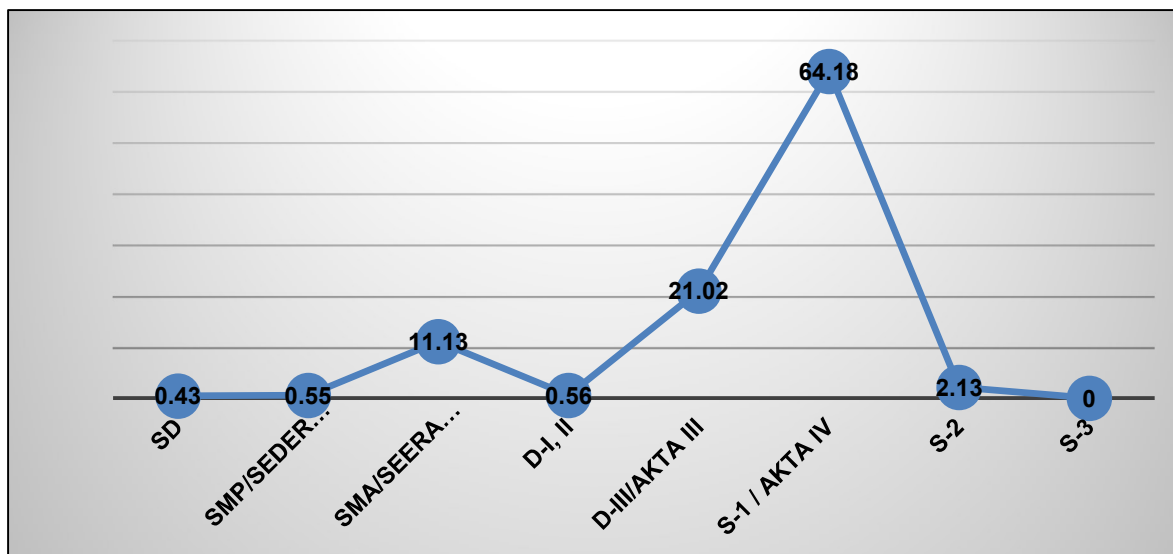
- b. Jumlah ASN menurut Pendidikan sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah	%
1	SD	11	23	34	0,43
2	SMP /Sederajat	17	26	43	0,55
3	SMA/Sederajat	508	365	873	11,13
4	Diploma I, II /Akta I, II	44	-	44	0,56
5	Diploma III/Akta III	939	710	1649	21,02
6	S-1/ Akta IV	2.624	2.411	5.035	64,18
7	S-2	167	-	167	2,13
8	S-3	-	-	-	-
JUMLAH		4.310	3.535	7.845	100,00

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2025



Grafik 3.46
Kondisi ASN Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2025



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas, komposisi Pegawai (ASN) Kabupaten Manggarai tahun 2025, didominasi oleh tingkat pendidikan S-1/Akta IV yang mencapai 64,18%, disusul pendidikan D-III sebanyak 21,02%.

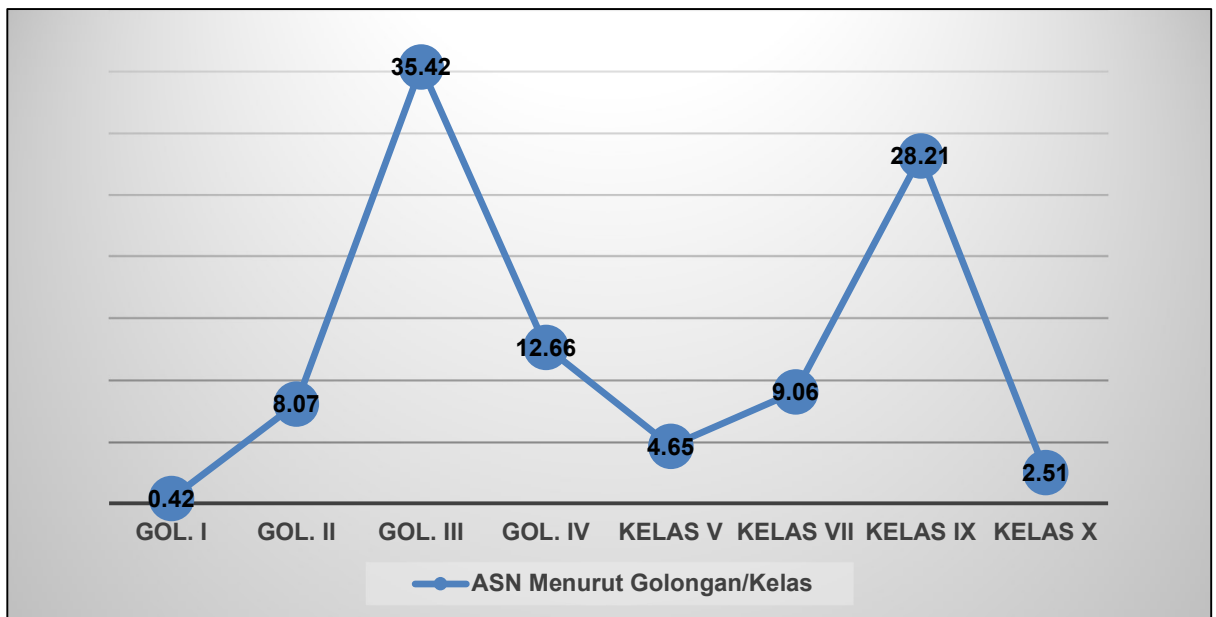
c. Jumlah ASN menurut Golongan sebagai berikut:

GOL./Kelas		RUANG					Jlh.	%
		PNS				PPPK		
		A	B	C	D			
1	I	1	2	5	2	23	33	0,42
2	II	42	38	279	274	-	633	8,07
3	III	682	579	308	1105	26	2.700	35,42
4	IV	285	378	330	-	-	993	12,66
5	V	-	-	-	-	365	365	4,65
6	VII	-	-	-	-	711	711	9,06
7	IX	-	-	-	-	2.213	2.213	28,21
8	X	-	-	-	-	197	197	2,51
JUMLAH		1.010	997	922	1.381	3.535	7.845	100,00

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Manggarai, 2025



Grafik 3.47
Komposisi Pegawai (ASN) menurut Golongan
Tahun 2025



Komposisi Pegawai (ASN) Kabupaten Manggarai tahun 2025 menurut golongan, didominasi oleh PNS Golongan III sebesar 35,42% dan menurut kelas didominasi oleh PPPK Kelas IX sebesar 28,21%.

2. Anggaran

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2024, bahwa perencanaan anggaran menggunakan pendekatan **anggaran berbasis kinerja**. Pendekatan ini berorientasi pada **hasil atau outcome**. Setiap input (SDM, Biaya dan Peralatan) harus memperhatikan urgensi setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pola pembelanjaan harus proporsional, efisiensi dan efektif serta disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.55
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (3/2)*100	5
BELANJA DAERAH	1.295.248.407.633,00	1.215.206.080.839,63	93,82	1.236.705.881.370,13
BELANJA OPERASI	960.626.734.805,00	893.951.595.374,79	93,05	874.604.336.520,03
Belanja Pegawai	613.112.892.177,56	564.450.245.429,00	92,06	491.977.680.014,10
Belanja Barang dan Jasa	307.526.423.889,44	289.962.561.608,85	94,28	299.480.727.145,13
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.504.451.584,80
Belanja Hibah	37.279.727.000,00	36.910.383.160,94	99,00	72.645.506.776,00
Belanja Bantuan Sosial	2.707.691.738,00	2.628.405.176,00	97,07	7.995.971.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	960.626.734.805,00	893.951.595.374,79	93,05	874.604.336.520,03
BELANJA MODAL	133.732.377.967,00	124.990.675.843,84	93,46	159.732.790.450,10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.733.533.650,00	16.714.932.509,06	94,25	40.880.603.233,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.980.360.023,00	10.214.672.090,78	93,02	39.089.157.311,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.076.650.894,00	90.112.302.024,00	92,82	75.324.159.743,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.791.833.400,00	7.798.919.220,00	100,09	4.438.870.163,00
Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	133.732.377.967,00	124.990.675.843,84	93,46	159.732.790.450,10
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71	667.330.200,00
Belanja Tidak Terduga	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71	667.330.200,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71	667.330.200,00
BELANJA TRANSFER	199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,71	201.701.424.200,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.515.533.621,00	2.272.153.345,00	50,31	4.952.787.580,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.235.099.840,00	530.169.876,00	42,92	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.813.661.400,00	192.206.516.100,00	99,17	196.748.636.620,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,71	201.701.424.200,00

Sumber : Badan Keuangan dan Asat Daerah, 2025 (Realisasi 2025 unaudited, 2024 Audited), 03 Maret 2026

D. REALISASI ANGGARAN

APBD adalah *rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda*. APBD dapat juga dilihat sebagai implementasi dari Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang berisikan langkah-langkah strategis dan prioritas pembangunan daerah yang disertai dengan penganggarannya setiap tahun. APBD juga memiliki daya ungkit mendongkrak perekonomian daerah. APBD juga dapat dipandang sebagai investasi Pemerintah Kabupaten Manggarai bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Pertumbuhan dimaksud tentu tidak berorientasi pada profit atau keuntungan tetapi diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu juga menjadi tanggungjawab pihak swasta dan masyarakat. Realitanya bahwa investasi sektor swasta dalam pembangunan daerah sangat terbatas. Masyarakat juga belum mampu membiayai sendiri kehidupannya. Masyarakat masih membutuhkan intervensi Pemerintah Kabupaten dalam banyak bidang seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian peran Pemerintah menjadi semakin dominan dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah berikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai.

Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Manggarai belum mampu membiayai seluruh urusan pemerintahan. Pengelolaan APBD harus benar-benar efektif, efisien, akuntabel dan demokratis. APBD hendaknya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. APBD harus berorientasi pada kepentingan publik.

Pengelolaan keuangan daerah juga dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas fiskal, tingkat ketergantungan fiskal, realisasi belanja yang menggambarkan tentang keterkaitan aspek perencanaan dan penganggaran serta bagaimana pengelolaan kas telah dilakukan untuk menjamin likuiditas dan pemanfaatan unsur pembiayaan secara efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah mencakup 3 (tiga) aspek yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rasio pendapatan, belanja dan pembiayaan menggambarkan bagaimana wujud pengelolaan keuangan daerah dimaksud. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025, termuat dalam RKPD tahun 2025.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut : *(Data realisasi keuangan tahun anggaran 2025 yang disajikan dalam laporan ini adalah data sementara atau unaudited per tanggal 3 Maret 2026 yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai).*

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam **Pendapatan Asli Daerah**, **Pendapatan Transfer** dan **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.56
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	Jumlah TA. 2025			Realisasi TA. 2024
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
PENDAPATAN DAERAH	1.274.043.867.398,00	1.213.722.283.495,12	95,26	1.289.104.308.257,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.764.184.380,00	132.000.749.235,47	89,33	109.307.352.589,08
Pajak Daerah	45.155.336.207,00	30.309.302.194,00	67,12	21.270.967.323,00
Retribusi Daerah	12.360.998.398,00	7.137.075.788,00	57,73	7.155.915.070,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.511.802.797,00	5.511.802.797,00	100,00	3.579.443.275,00
Lain-lain PAD yang Sah	84.736.046.978,00	89.042.568.456,47	105,08	77.301.026.921,08
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	147.764.184.380,00	132.000.749.235,47	89,33	109.307.352.589,08
PENDAPATAN TRANSFER	1.107.757.414.708,00	1.063.474.755.016,00	96,00	1.163.065.281.980,00
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	995.681.227.037,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	8.414.478.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	677.515.472.202,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	114.943.944.920,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	194.807.331.915,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	7.809.793.000,00	7.365.688.846,00	94,31	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	697.185.844.000,00	676.150.082.895,00	96,98	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	245.211.308.591,00	229.886.469.499,00	93,75	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	950.206.945.591,00	913.402.241.240,00	96,12	995.681.227.037,00
Dana Desa	123.365.629.000,00	121.758.483.700,00	98,69	129.061.909.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	123.365.629.000,00	121.758.483.700,00	98,69	129.061.909.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.184.840.117,00	28.314.030.076,00	82,82	38.322.145.943,00
Pendapatan Bagi Hasil	34.184.840.117,00	28.114.030.076,00	82,24	38.322.145.943,00
Bantuan Keuangan	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	34.184.840.117,00	28.314.030.076,00	82,82	38.322.145.943,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.107.757.414.708,00	1.063.474.755.016,00	96,00	1.163.065.281.980,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.522.268.310,00	18.246.779.243,65	98,51	16.731.673.688,30
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.522.268.310,00	18.246.779.243,65	98,51	16.731.673.688,30
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.522.268.310,00	18.246.779.243,65	98,51	16.731.673.688,30
JUMLAH PENDAPATAN	1.274.043.867.398,00	1.213.722.283.495,12	95,26	1.289.104.308.257,38

Sumber: Badan Keuangan dan Asat Daerah (Realisasi 2025 *Unaudited*, 2024 *Audited*), tanggal 3 Maret 2026



2. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2025, bahwa perencanaan anggaran menggunakan pendekatan **anggaran berbasis kinerja**. Pendekatan ini berorientasi pada **hasil atau outcome**. Setiap input (SDM, Biaya dan Peralatan) harus memperhatikan urgensi setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pola pembelanjaan harus proporsional, efisiensi dan efektif serta disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.57
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	Jumlah TA. 2025			Realisasi TA. 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	1.295.248.407.633,00	1.215.206.080.839,63	93,82	1.236.705.881.370,13
BELANJA OPERASI	960.626.734.805,00	893.951.595.374,79	93,05	874.604.336.520,03
Belanja Pegawai	613.112.892.177,56	564.450.245.429,00	92,06	491.977.680.014,10
Belanja Barang dan Jasa	307.526.423.889,44	289.962.561.608,85	94,28	299.480.727.145,13
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.504.451.584,80
Belanja Hibah	37.279.727.000,00	36.910.383.160,94	99,00	72.645.506.776,00
Belanja Bantuan Sosial	2.707.691.738,00	2.628.405.176,00	97,07	7.995.971.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	960.626.734.805,00	893.951.595.374,79	93,05	874.604.336.520,03
BELANJA MODAL	133.732.377.967,00	124.990.675.843,84	93,46	159.732.790.450,10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.733.533.650,00	16.714.932.509,06	94,25	40.880.603.233,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.980.360.023,00	10.214.672.090,78	93,02	39.089.157.311,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.076.650.894,00	90.112.302.024,00	92,82	75.324.159.743,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.791.833.400,00	7.798.919.220,00	100,09	4.438.870.163,00
Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	133.732.377.967,00	124.990.675.843,84	93,46	159.732.790.450,10
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71	667.330.200,00
Belanja Tidak Terduga	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71	667.330.200,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.325.000.000,00	1.254.970.300,00	94,71	667.330.200,00
BELANJA TRANSFER	199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,71	201.701.424.200,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	4.515.533.621,00	2.272.153.345,00	50,31	4.952.787.580,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.235.099.840,00	530.169.876,00	42,92	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.813.661.400,00	192.206.516.100,00	99,17	196.748.636.620,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	199.564.294.861,00	195.008.839.321,00	97,71	201.701.424.200,00



Uraian	Jumlah TA. 2025			Realisasi TA. 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5
JUMLAH BELANJA	1.295.248.407.633,00	1.215.206.080.839,63	93,82	1.236.705.881.370,13

Sumber: Badan Keuangan dan Asat Daerah (Realisasi 2025 *Unaudited*, 2024 *Audited*), tanggal 3 Maret 2026

3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.58
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	Jumlah TA. 20225			Realisasi TA. 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
PEMBIAYAAN DAERAH	21.204.540.235,00	21.213.871.112,10	100,04	(31.184.555.774,33)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.204.540.235,00	21.213.871.112,10	100,04	27.206.748.573,66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.204.540.235,00	21.213.871.112,10	100,04	27.206.748.573,66
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.204.540.235,00	21.213.871.112,10	100,04	27.206.748.573,66
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	58.391.304.347,99
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	57.391.304.347,99
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	58.391.304.347,99
PEMBIAYAAN NETTO	21.204.540.235,00	21.213.871.112,10	100,04	(31.184.555.774,33)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	19.730.073.767,59	0,00	21.213.871.112,92

Sumber: Badan Keuangan dan Asat Daerah (Realisasi 2025 *Unaudited*, 2024 *Audited*), tanggal 3 Maret 2026.

4. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program-program tersebut berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam laporan ini hanya menyajikan program-program yang dianggap sangat relevan atau mempunyai keterkaitan dengan misi, tujuan dan sasaran. Program-



program tersebut akan dipetakan sesuai sasarannya (untuk tahunan) seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.59
Keterkaitan antara Sasaran dan Program dengan Target dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA PROGRAM	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	2	3	4	5
Sasaran	1 Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan			112,65
1	Program Pengelolaan Pendidikan	105.793.613.938,00	75.223.315.286,00	71,10
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.963.240.755,00	6.798.679.462,00	97,64
3	Program Pengembangan Kurikulum	0,00	0,00	0,00
	Total Anggaran Sasaran 1	112.756.854.693,00	82.021.994.748,00	72,74
Sasaran	2 Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat			137,60
4	Program Pembinaan Perpustakaan	664.760.064,00	597.974.672,00	89,95
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	36.064.900,00	32.450.000,00	89,98
	Total Anggaran Sasaran 2	700.824.964,00	630.424.672,00	89,95
Sasaran	3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			61,15
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.305.946.452,00	66.166.286.098,88	86,71
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.688.069.732,00	1.551.207.188,00	91,89
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	314.209.000,00	306.538.829,00	97,56
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	260.949.900,00	101.891.500,00	39,05
	Total Anggaran Sasaran 3	78.569.175.084,00	68.125.923.615,88	86,71
Sasaran	4 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk			119,56
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.998.113.850,00	4.205.155.304,00	84,13
11	Program Pengendalian Penduduk	0,00	0,00	0,00
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.748.040.000,00	1.068.379.000,00	61,12
	Total Anggaran Sasaran 4	6.746.153.850,00	5.273.534.304,00	78,17
Sasaran	5 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan			72,44
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	252.860.000,00	51.895.000,00	20,52
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	194.600.000,00	70.000.000,00	35,97
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	323.248.400,00	293.640.600,00	90,84
	Total Anggaran Sasaran 5	770.708.400,00	415.535.600,00	53,92
Sasaran	6 Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya			100,07
16	Program Pengembangan Kebudayaan	219.060.000,00	218.970.000,00	99,96
17	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	46.130.000,00	46.020.000,00	99,76



NO	NAMA PROGRAM	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	2	3	4	5
18	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	18.636.928.188,00	18.625.551.900,00	99,94
Total Anggaran Sasaran 6		18.902.118.188,00	18.890.541.900,00	99,94
Sasaran	7 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat			15,65
19	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.121.000,00	12.710.000,00	78,84
20	Program Rehabilitasi Sosial	523.592.000,00	515.641.636,00	98,48
21	Program Pemberdayaan Sosial	96.332.000,00	95.375.840,00	99,01
22	Program Penanganan Bencana	64.996.000,00	37.688.100,00	57,99
Total Anggaran Sasaran 7		701.041.000,00	661.415.576,00	94,35
Sasaran	8 Menurunnya ketimpangan gender			108,24
23	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	136.485.000,00	121.333.200,00	88,90
Total Anggaran Sasaran 8		136.485.000,00	121.333.200,00	88,90
Sasaran	9 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			-60,62
24	Program Perlindungan Perempuan	135.768.168,00	130.506.218,00	96,12
25	Program Perlindungan Khusus Anak	66.734.668,00	54.951.243,00	82,34
26	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	333.725.168,00	270.653.848,00	81,10
27	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	14.270.000,00	13.970.000,00	97,90
Total Anggaran Sasaran 9		550.498.004,00	470.081.309,00	85,39
Sasaran	10 Meningkatnya ketertiban umum			100,27
28	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.324.719.057,00	1.249.653.555,00	94,33
Total Anggaran Sasaran 10		1.324.719.057,00	1.249.653.555,00	94,33
Sasaran	11 Menurunnya gangguan kohesivitas sosial			125,00
29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	268.094.000,00	262.339.000,00	97,85
30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	219.334.500,00	218.843.660,00	99,78
31	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	718.432.200,00	718.430.200,00	100,00
32	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.053.000,00	9.053.000,00	100,00
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	29.950.500,00	26.610.500,00	88,85
Total Anggaran Sasaran 11		1.244.864.200,00	1.235.276.360,00	99,23
Sasaran	12 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana			69,39
34	Program Penanggulangan Bencana	461.607.939,00	190.890.860,00	41,35
35	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	111.722.000,00	109.412.000,00	97,93
Total Anggaran Sasaran 12		573.329.939,00	300.302.860,00	52,38



NO	NAMA PROGRAM	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	2	3	4	5
Sasaran 13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana				69,79
36	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	477.005.000,00	475.540.900,00	99,69
Total Anggaran Sasaran 13		477.005.000,00	475.540.900,00	99,69
Sasaran 14 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian				87,24
37	Program Penyuluhan Pertanian	934.517.239,00	855.354.840,00	91,53
38	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.788.499.195,00	4.322.119.930,00	90,26
39	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	175.586.900,00	166.894.300,00	95,05
40	Program Perizinan Usaha Pertanian	0,00		0,00
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.794.328.244,00	7.359.100.840,00	94,42
42	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	564.749.973,00	491.277.030,00	86,99
Total Anggaran Sasaran 14		14.257.681.551,00	13.194.746.940,00	92,54
Sasaran 15 Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan				87,24
43	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	323.784.314,00	319.319.196,00	98,62
44	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.022.440.059,00	993.701.434,00	97,19
45	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	41.830.000,00	41.542.419,00	99,31
Total Anggaran Sasaran 15		1.388.054.373,00	1.354.563.049,00	97,59
Sasaran 16 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri				189,54
46	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	676.240.439,00	668.470.750,00	98,85
Total Anggaran Sasaran 16		676.240.439,00	668.470.750,00	98,85
Sasaran 17 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata				104,93
47	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	62.780.000,00	57.180.000,00	91,08
48	Program Pemasaran Pariwisata	239.520.000,00	238.530.000,00	99,59
49	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	59.620.000,00	59.611.322,00	99,99
Total Anggaran Sasaran 17		361.920.000,00	355.321.322,00	98,18
Sasaran 18 Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan				208,49
50	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	36.821.878,00	36.645.176,00	99,52
51	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	119.130.000,00	118.900.001,00	99,81
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	28.770.000,00	27.887.000,00	96,93
Total Anggaran Sasaran 18		184.721.878,00	183.432.177,00	99,30
Sasaran 19 Meningkatnya realisasi penanaman modal				589,93
53	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.348.000,00	2.348.000,00	100,00
54	Program Promosi Penanaman Modal	1.652.000,00	1.652.000,00	100,00
55	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	36.863.000,00	36.669.000,00	99,47



NO	NAMA PROGRAM	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	2	3	4	5
56	Program Pelayanan Penanaman Modal	51.463.599,94	30.613.400,00	59,49
Total Anggaran Sasaran 19		92.326.599,94	71.282.400,00	77,21
Sasaran	20 Meningkatnya kualitas jaringan jalan			86,04
57	Program Penyelenggaraan Jalan	77.846.916.940,00	71.318.582.260,00	91,61
Total Anggaran Sasaran 20		77.846.916.940,00	71.318.582.260,00	91,61
Sasaran	21 Meningkatnya jaringan drainase perkotaan			85,99
58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.790.633.826,00	2.766.130.561,00	99,12
Total Anggaran Sasaran 21		2.790.633.826,00	2.766.130.561,00	99,12
Sasaran	22 Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan			92,83
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.083.280.000,00	3.054.323.612,00	99,06
Total Anggaran Sasaran 22		3.083.280.000,00	3.054.323.612,00	99,06
Sasaran	23 Meningkatnya pelayanan perhubungan			69,19
59	Program Penyelenggaraan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan	790.514.708,00	782.669.730,00	99,01
60	Program Pengelolaan Pelayaran	54.587.696,00	54.010.206,00	98,94
Total Anggaran Sasaran 23		845.102.404,00	836.679.936,00	99,00
Sasaran	24 Meningkatnya ketahanan pangan			76,98
61	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	5.216.000,00	5.216.000,00	100,00
62	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.359.100,00	20.348.500,00	99,95
63	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9.518.000,00	9.487.800,00	99,68
64	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0,00	0,00	0,00
Total Anggaran Sasaran 24		35.093.100,00	35.052.300,00	99,88
Sasaran	25 Meningkatnya stabilitas harga barang			91,64
65	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	39.870.939,00	39.612.588,00	99,35
Total Anggaran Sasaran 25		39.870.939,00	39.612.588,00	99,35
Sasaran	26 Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian			39,61
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	0,00	0,00	0,00
67	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	43.000.000,00	42.912.500,00	99,80
68	Program Pengembangan UMKM	4.780.000,00	4.780.000,00	100,00
69	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	12.420.000,00	7.955.000,00	64,05
Total Anggaran Sasaran 26		60.200.000,00	55.647.500,00	92,44
Sasaran	27 Menurunnya pengangguran			132,84
70	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	716.590.939,00	684.538.430,00	95,53
71	Program Penempatan Tenaga Kerja	20.712.300,00	20.036.300,00	96,74
72	Program Hubungan Industrial	258.247.000,00	242.535.000,00	93,92



NO	NAMA PROGRAM	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	2	3	4	5
Total Anggaran Sasaran 27		995.550.239,00	947.109.730,00	95,13
Sasaran	28 Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni			97,92
73	Program Kawasan Permukiman	9.600.000,00	9.560.000,00	99,58
74	Program Pengembangan Perumahan	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00
75	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.246.528.500,00	1.204.853.500,00	96,66
76	Program Pengembangan Permukiman	0,00	0,00	0,00
77	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.536.014.000,00	9.459.275.949,00	99,20
78	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.490.452.000,00	8.883.691.061,00	93,61
Total Anggaran Sasaran 28		20.287.384.500,00	19.562.170.510,00	96,43
Sasaran	29 Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang			83,23
79	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	301.300.000,00	238.635.167,00	79,20
80	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.820.000,00	4.740.000,00	98,34
81	Program Penataan Bangunan Gedung	1.218.652.049,00	1.206.661.799,00	99,02
82	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	259.084.750,00	187.190.648,00	72,25
Total Anggaran Sasaran 29		1.783.856.799,00	1.637.227.614,00	91,78
Sasaran	30 Meningkatnya keberdayaan desa			117,93
83	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.774.671.076,00	1.679.753.396,00	94,65
84	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	843.951.348,00	825.049.674,00	97,76
85	Program Penataan Desa	441.112.000,00	184.307.691,00	41,78
Total Anggaran Sasaran 30		3.059.734.424,00	2.689.110.761,00	87,89
Sasaran	31 Meningkatnya kualitas air			104,63
86	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
87	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	0,00	0,00	0,00
88	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	51.315.600,00	51.105.600,00	99,59
Total Anggaran Sasaran 31		51.315.600,00	51.105.600,00	99,59
Sasaran	32 Meningkatnya kualitas udara			94,16
89	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	179.347.000,00	151.946.200,00	84,72
Total Anggaran Sasaran 32		179.347.000,00	151.946.200,00	84,72



NO	NAMA PROGRAM	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	2	3	4	5
Sasaran	33 Meningkatnya kualitas tutupan lahan/vegetasi			94,88
90	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00	0,00
91	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	439.320.000,00	433.517.600,00	98,68
	Total Anggaran Sasaran 33	439.320.000,00	433.517.600,00	98,68
Sasaran	34 Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3			117,82
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
92	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0,00	0,00	0,00
93	Program Pengelolaan Persampahan	2.247.057.420,00	2.172.229.883,00	96,67
94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	35.511.000,00	34.631.000,00	97,52
	Total Anggaran Sasaran 34	2.282.568.420,00	2.206.860.883,00	96,68
Sasaran	35 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			73,71
95	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	889.457.700,00	869.874.719,00	97,80
96	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	333.984.324,00	285.594.809,00	85,51
97	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	159.887.000,00	133.013.973,00	83,19
98	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29.895.000,00	29.895.000,00	100,00
99	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.474.022.386,00	1.425.571.866,00	96,71
100	Program Perekonomian dan Pembangunan	390.721.348,00	346.633.858,00	88,72
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.953.110.000,00	9.772.160.236,00	89,22
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	203.067.615.400,00	197.916.244.296,75	97,46
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	765.541.878,00	246.405.749,75	32,19
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	952.087.188,00	847.057.130,00	88,97
105	Program Penyelenggaraan Pengawasan	459.825.000,00	427.915.000,00	93,06
106	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	875.000,00	850.000,00	97,14
	Total Anggaran Sasaran 35	219.477.022.224,00	212.301.216.637,50	96,73
Sasaran	36 Meningkatnya birokrasi yang kapabel			87,82
108	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	569.292.375,00	569.067.469,00	99,96
109	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	78.680.000,00	78.185.400,00	99,37
110	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.980.000,00	3.980.000,00	100,00
111	Program Kepegawaian Daerah	1.512.003.400,00	1.348.843.896,00	89,21



NO	NAMA PROGRAM	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI UNAUDITED	%
1	2	3	4	5
Total Anggaran Sasaran 36		2.163.955.775,00	2.000.076.765,00	92,43
Sasaran	37 Meningkatnya pelayanan publik yang prima			102,32
112	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	620.024.000,00	591.730.500,00	95,44
113	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	285.545.000,00	271.438.000,00	95,06
114	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.516.567.000,00	5.389.253.000,00	97,69
115	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	237.500.000,00	215.370.000,00	90,68
116	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	836.000,00	300.000,00	35,89
117	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.583.939,00	18.176.348,00	84,21
118	Program Pendaftaran Penduduk	102.327.634,00	101.098.088,00	98,80
119	Program Pencatatan Sipil	111.689.454,00	107.631.838,00	96,37
120	Program Pengelolaan Arsip	17.739.500,00	14.970.000,00	84,39
121	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	69.305.000,00	63.227.200,00	91,23
Total Anggaran Sasaran 37		6.983.117.527,00	6.773.194.974,00	96,99
Total Anggaran Pada Program/Keg. Strategis		582.818.991.936,94	522.558.941.269,38	89,66
Total Anggaran Pada Program/Kegiatan Pendukung		712.429.415.696,06	561.225.293.913,25	78,78
Total Anggaran Tahun 2025		1.295.248.407.633,00	1.083.784.235.182,63	83,67
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1 S/D 37				106,71

Alokasi anggaran pada program/kegiatan strategis yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran sesuai tabel tersebut di atas sebesar Rp582.818.991.936,94 dan terealisasi (*unaudited*) Rp522.558.941.269,38 atau 89,66%. Persentase penyerapan anggaran sebesar 89,66% ini dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai yang mencapai 106,71%. Sedangkan program/kegiatan pendukung sasaran tidak menjadi bagian dari perhitungan tersebut di atas.

5. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2025.



Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

- a. Efektif apabila target kinerja sasaran tercapai.
- b. Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **efisien** dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **tidak efisien**.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%) <i>Unaudit</i>	Efisien / Tidak Efisien
1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	112,65	Efektif	72,74	Efisien
2	Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	137,60	Efektif	89,95	Efisien
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	61,15	Tidak Efektif	86,71	Tidak Efisien
4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	119,56	Efektif	78,17	Efisien
5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	72,44	Tidak Efektif	53,92	Efisien
6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	100,07	Efektif	99,94	Efisien
7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	15,65	Tidak Efektif	94,35	Tidak Efisien
8	Menurunnya ketimpangan gender	108,24	Efektif	88,90	Efisien
9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-60,62	Tidak Efektif	85,39	Tidak Efisien
10	Meningkatnya ketertiban umum	100,27	Efektif	94,33	Efisien
11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	125,00	Efektif	99,23	Efisien
12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	69,39	Tidak Efektif	52,38	Efisien



No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%) <i>Unaudit</i>	Efisien / Tidak Efisien
13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	69,79	Tidak Efektif	99,69	Tidak Efisien
14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	87,24	Tidak Efektif	92,54	Tidak Efisien
15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	87,24	Tidak Efektif	97,59	Tidak Efisien
16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	189,54	Efektif	98,85	Efisien
17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	104,93	Efektif	98,18	Efisien
18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	208,49	Efektif	99,30	Efisien
19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	589,93	Efektif	77,21	Efisien
20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	86,04	Tidak Efektif	91,61	Tidak Efisien
21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	85,99	Tidak Efektif	99,12	Tidak Efisien
22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	92,83	Efektif	99,06	Tidak Efisien
23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	69,19	Tidak Efektif	99,00	Tidak Efisien
24	Meningkatnya ketahanan pangan	76,98	Tidak Efektif	99,88	Tidak Efisien
25	Meningkatnya stabilitas harga barang	91,64	Efektif	99,35	Tidak Efisien
26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	39,61	Tidak Efektif	92,44	Tidak Efisien
27	Menurunnya pengangguran	132,84	Efektif	95,13	Efisien
28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	97,92	Tidak Efektif	96,43	Efisien
29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	83,23	Efektif	91,78	Tidak Efisien
30	Meningkatnya keberdayaan desa	117,93	Efektif	87,89	Efisien
31	Meningkatnya kualitas air	104,63	Efektif	99,59	Efisien
32	Meningkatnya kualitas udara	94,16	Efektif	84,72	Efisien



No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%) <i>Unaudit</i>	Efisien / Tidak Efisien
33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	94,88	Tidak Efektif	98,68	Tidak Efisien
34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	117,82	Efektif	96,68	Efisien
35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	73,71	Tidak Efektif	96,73	Tidak Efisien
36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	87,82	Tidak Efektif	92,43	Tidak Efisien
37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	102,32	Efektif	96,99	Efisien
Rata-rata		106,71	Efektif	89,66	Efisien

Sumber: Diolah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Manggarai, 2026

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program/kegiatan/sub kegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran **106,71%** ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program-program/kegiatan-kegiatan strategis sebesar **89,66%**, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah **efektif** dan **efisien**.



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Manggarai Tahun 2025 merupakan laporan kinerja keempat/terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA TUJUAN

Tabel 4.1
Tingkat Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No.	Misi / Tujuan	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
MISI I MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1	102,28	ISTIMEWA
2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	2	117,56	ISTIMEWA
3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	2	37,96	KURANG
MISI II MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT				
4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	3	101,18	ISTIMEWA
5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	1	117,86	ISTIMEWA
6	Menurunnya Kemiskinan	1	97,80	BAIK
7	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	1	99,02	BAIK
MISI III MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP				
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	97,79	BAIK
MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI				



No.	Misi / Tujuan	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	1	117,29	ISTIMEWA
RATA-RATA		13	98,75	BAIK

Rata-rata capaian kinerja tujuan yang diukur menggunakan 13 indikator tujuan tersebut di atas adalah 98,75% predikat kinerja BAIK.

CAPAIAN KINERJA UTAMA

Tabel 4.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Misi / Indikator Kinerja Utama	% Capaian	Kategori	Keterangan
MISI I MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	102,28	ISTIMEWA	IK Tujuan
2	Prevalensi Stunting	89,34	BAIK	IK Program
3	Angka PMKS	136,01	ISTIMEWA	IK Tujuan
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	99,12	BAIK	IK Tujuan
5	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	-49,07	KURANG	IK Tujuan
MISI II MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT				
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	97,51	BAIK	IK Tujuan
7	PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	93,04	BAIK	IK Tujuan
8	Indeks Gini	117,86	ISTIMEWA	IK Tujuan
9	Tingkat Kemiskinan	97,80	BAIK	IK Tujuan
10	Indeks Desa Membangun (IDM)	99,02	BAIK	IK Tujuan
MISI III MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP				
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	97,79	BAIK	IK Tujuan
MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI				
12	Indeks Reformasi Birokrasi	117,29	ISTIMEWA	IK Tujuan
13	Nilai SAKIP	96,62	BAIK	IK Sasaran
14	Opini BPK	100,00	BAIK	IK Sasaran
RATA-RATA		92,47	BAIK	

Rata-rata capaian kinerja dari 14 (empat belas) IKU Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah 92,47% dengan predikat kinerja BAIK. Dari 14 IKU tersebut terdapat 4 (empat) atau 28,57% yang realisasinya melampaui target, 1 (satu) atau 7,14% yang sesuai target dan terdapat 9 (sembilan) atau 64,29% yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025.



CAPAIAN KINERJA SASARAN

Tabel 4.3
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	3	112,65	ISTIMEWA
2	Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	1	137,60	ISTIMEWA
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	61,15	CUKUP
4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1	119,56	ISTIMEWA
5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	2	72,44	CUKUP
6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	1	100,07	ISTIMEWA
Tujuan 2 Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat				
7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1	15,65	KURANG
8	Menurunnya ketimpangan gender	1	108,24	ISTIMEWA
9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2	-60,62	KURANG
Tujuan 3 Meningkatnya Ketahanan Sosial				
10	Meningkatnya ketertiban umum	1	100,27	ISTIMEWA
11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	1	125,00	ISTIMEWA
12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	1	69,39	CUKUP
13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	1	69,79	CUKUP
Tujuan 4 Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi				
14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	1	87,24	BAIK
15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	1	87,24	BAIK
16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	1	189,54	ISTIMEWA
17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	1	104,93	ISTIMEWA
18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	1	208,49	ISTIMEWA
19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	2	589,93	ISTIMEWA
20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	1	86,04	BAIK
21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	1	85,99	BAIK
22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	1	92,83	BAIK
23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	2	69,19	CUKUP
24	Meningkatnya ketahanan pangan	1	76,98	CUKUP
25	Meningkatnya stabilitas harga barang	1	91,64	BAIK
Tujuan 5 Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan				
26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	2	39,61	KURANG



No.	Tujuan / Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
Tujuan 6 Menurunnya Kemiskinan				
27	Menurunnya pengangguran	1	132,84	ISTIMEWA
28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	3	97,92	BAIK
29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	1	83,23	BAIK
Tujuan 7 Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa				
30	Meningkatnya keberdayaan desa	1	117,93	ISTIMEWA
Tujuan 8 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
31	Meningkatnya kualitas air	1	104,63	ISTIMEWA
32	Meningkatnya kualitas udara	1	94,16	BAIK
33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	1	94,88	BAIK
34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	2	117,82	ISTIMEWA
Tujuan 9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik				
35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	6	73,71	CUKUP
36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	2	87,82	BAIK
37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1	102,32	ISTIMEWA
RATA-RATA		54	106,71	ISTIMEWA

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa, rata-rata capaian kinerja dari 37 sasaran dengan 54 indikator sasaran adalah 106,71% dengan predikat kinerja ISTIMEWA. Predikat kinerja istimewa ini menggambarkan bahwa tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025 sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.

4.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKT, PK) dengan dokumen penganggaran (RKA/DPA). Anggaran yang dialokasikan tidak mendukung target kinerja strategis yang telah ditetapkan.
2. Pengalokasian anggaran di setiap Perangkat Daerah belum sepenuhnya memperhatikan program dan kegiatan yang mendukung IKU Kepala Daerah dan IKU Perangkat Daerah.



3. Terbatasnya aparatur dalam bidang akuntabilitas kinerja, serta rendahnya tingkat pemahaman terhadap konsep pengukuran kinerja.
4. Akuntabilitas kinerja masih dianggap sebagai beban administratif, bukan sebagai alat perbaikan kinerja. SAKIP belum diimplementasikan secara konsisten di sebagian Perangkat Daerah.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai khususnya pada beberapa indikator kinerja baik itu indikator kinerja tujuan maupun sasaran yang memiliki tingkat capaian $\leq 60\%$ atau memiliki kinerja KURANG tentunya tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Beberapa kendala dan hambatan telah diuraikan pada Bab III dan beserta strategi dan langkah tindak untuk mengatasinya. Agar kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai ke depan semakin meningkat, perlu mempersiapkan langkah yang akan dilaksanakan pada masa mendatang sebagai berikut:

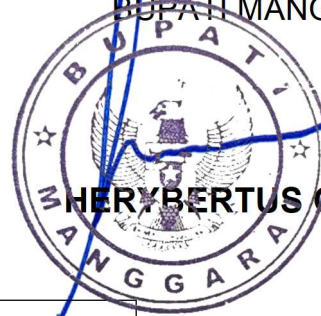
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkesinambungan melalui program pengembangan kompetensi yang terarah dan terpadu, pengelolaan talenta yang baik, serta perwujudan sistem merit yang optimal dalam rangka memberikan daya dorong roda pemerintahan yang kuat sehingga pelayanan publik akan dapat lebih optimal.
2. Upaya perbaikan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.
3. Optimalisasi pelaksanaan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat Daerah Kabupate Manggarai yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Reformasi Birokrasi agar capaian kinerja lebih optimal dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan betul-betul berdampak.
4. Pengalokasian anggaran di setiap Perangkat Daerah agar betul-betul memperhatikan program dan kegiatan yang mendukung IKU Kepala Daerah dan IKU Perangkat Daerah.



Akhir kata, kiranya LKIP ini dapat dijadikan masukan dalam *Perumusan, Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan* untuk mewujudkan **MANGGARAI YANG SEJAHTERA, BERSIH, BERKELANJUTAN, DAN BERDAYA SAING.**

Ruteng, 25 Maret 2026

BUPATI MANGGARAI,



HERYBERTUS G. L. NABIT

Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	

**RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABUPATEN MANGGARAI**

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	68,54
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,93
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,91
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,49
Sasaran	2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	15
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Prevalensi Stunting	Persen	11,90
			6	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	68,88
			7	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar	Persen	100
Sasaran	4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	8	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,014
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,61
			10	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	4
Sasaran	6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	11	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	91,00
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	Angka PMKS		Angka	17.589
Sasaran	7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	12	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	4,09
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Angka	65,97
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	13	TPAK Perempuan	Angka	67,32
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	14	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	22,29
			15	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,015
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial		Angka	4
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	16	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	40,43
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	17	Angka konflik sosial	Angka	4
			Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)		Angka	97,12
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	18	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	19	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,22
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)		Ribu Rp per penduduk	11.288
Sasaran	14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	20	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	3,84
Sasaran	15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	21	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	3,84
Sasaran	16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	22	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	6,31
Sasaran	17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	23	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	5,68
Sasaran	18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	24	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	6,01
Sasaran	19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	25	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00
			26	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Sasaran	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	27	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	28	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	84,80
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	29	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	30	Rasio konektivitas	Angka	0,86
			31	Kinerja lalu lintas	Angka	59,37
			Laju Inflasi		Angka	2,00
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	32	Indeks ketahanan pangan	Angka	79,94
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	33	Indeks harga konsumen	Angka	117,34
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini		Angka	0,280
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	34	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	97,50
			35	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	65,00
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		Persen	17,71
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	36	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,33
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	37	Rasio rumah layak huni	Angka	93,75
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,927
			39	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00
Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	40	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	52,00
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)		Angka	0,638
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	41	Persentase status desa berkembang	Persen	59,65
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,86
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	42	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	72,00
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	43	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,87
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	44	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,82
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	45	Persentase sampah tertangani	Persen	27,68
			46	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	41,46
Tujuan	9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birkraasi		Nilai / Predikat	58,00 (CC)
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	47	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)
			48	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)
			49	Opini BPK	Peringkat	WTP
			50	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Baik
			51	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Tinggi (1,459)
			52	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	53	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,80
			54	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,00 (Tinggi)

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	55	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50

Keterangan : **Merupakan IKU**



Ruteng, 14 Oktober 2025
 BUPATI MANGGARAI,
HEPYBERTUS G. L. NABIT SE, MA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	



BUPATI MANGGARAI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Jabatan : BUPATI MANGGARAI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ruteng, 14 Oktober 2025

BUPATI MANGGARAI,



HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	

Lampiran **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**
KABUPATEN MANGGARAI

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	68,54
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,93
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,91
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,49
Sasaran	2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	15
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Prevalensi Stunting	Persen	11,90
			6	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	68,88
			7	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100
Sasaran	4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	8	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,014
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,61
			10	Peringkat pada event olahraga daerah (POFDA)	Angka	4
Sasaran	6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	11	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	91,00
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	Angka PMKS		Angka	17.589
Sasaran	7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	12	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	4,09
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Angka	65,97
Sasaran	8	Menurunnya ketimpangan gender	13	TPAK Perempuan	Angka	67,32
Sasaran	9	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	14	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	22,29
			15	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,015
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial		Angka	4
Sasaran	10	Meningkatnya ketertiban umum	16	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	40,43
Sasaran	11	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	17	Angka konflik sosial	Angka	4
			Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)		Angka	97,12
Sasaran	12	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	18	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)
Sasaran	13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	19	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,22
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)		Ribu Rp per penduduk	11.288,00
Sasaran	14	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	20	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	3,84
Sasaran	15	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	21	Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	3,84
Sasaran	16	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	22	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	6,31
Sasaran	17	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	23	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	5,68
Sasaran	18	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	24	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	6,01
Sasaran	19	Meningkatnya realisasi penanaman modal	25	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00
			26	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00
Sasaran	20	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	27	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1			2		3	4
Sasaran	21	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	28	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	84,80
Sasaran	22	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	29	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perhubungan	30	Rasio konektivitas	Angka	0,86
			31	Kinerja lalu lintas	Angka	59,37
			Laju Inflasi		Angka	2,00
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	32	Indeks ketahanan pangan	Angka	79,94
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	33	Indeks harga konsumen	Angka	117,34
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini		Angka	0,28
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	34	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	97,50
			35	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	65,00
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		Persen	17,71
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	36	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,33
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	37	Rasio rumah layak huni	Angka	93,75
			38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,927
			39	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00
Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	40	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	52,00
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)		Angka	0,638
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	41	Persentase status desa berkembang	Persen	59,65
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,86
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	42	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	72,00
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	43	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,87
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	44	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Angka	85,82
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	45	Persentase sampah tertangani	Persen	27,68
			46	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	41,46
Tujuan	9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birkasi		Nilai / Predikat	58,00 (CC)
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	47	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)
			48	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)
			49	Opini BPK	Peringkat	WTP
			50	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Baik
			51	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Tinggi (1,459)
			52	Indeks kematangan penerapan manajemen risiko	Angka	Level 3
Sasaran	36	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	53	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,80
			54	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,00 (Tinggi)
Sasaran	37	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	55	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
Sasaran 1 Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan		Rp. 112.756.854.693,00	APBD-P 2025
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 105.793.613.938,00	APBD-P 2025
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 6.963.240.755,00	APBD-P 2025
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 0,00	APBD-P 2025
Sasaran 2 Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat		Rp. 700.824.964,00	APBD-P 2025
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 664.760.064,00	APBD-P 2025
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 36.064.900,00	APBD-P 2025
Sasaran 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Rp. 78.569.175.084,00	APBD-P 2025
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 76.305.946.452,00	APBD-P 2025
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.688.069.732,00	APBD-P 2025
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 314.209.000,00	APBD-P 2025
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 260.949.900,00	APBD-P 2025
Sasaran 4 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk		Rp. 6.746.153.850,00	APBD-P 2025
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 4.998.113.850,00	APBD-P 2025
11	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 0,00	APBD-P 2025
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.748.040.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 5 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan		Rp. 770.708.400,00	APBD-P 2025
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 252.860.000,00	APBD-P 2025
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 194.600.000,00	APBD-P 2025
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 323.248.400,00	APBD-P 2025
Sasaran 6 Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya		Rp. 18.902.118.188,00	APBD-P 2025
16	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 219.060.000,00	APBD-P 2025
17	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 46.130.000,00	APBD-P 2025
18	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 18.636.928.188,00	APBD-P 2025
Sasaran 7 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Rp. 701.041.000,00	APBD-P 2025
19	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 16.121.000,00	APBD-P 2025
20	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 523.592.000,00	APBD-P 2025
21	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 96.332.000,00	APBD-P 2025
22	Program Penanganan Bencana	Rp. 64.996.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 8 Menurunnya ketimpangan gender		Rp. 136.485.000,00	APBD-P 2025
23	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 136.485.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 9 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Rp. 550.498.004,00	APBD-P 2025
24	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 135.768.168,00	APBD-P 2025
25	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 66.734.668,00	APBD-P 2025
26	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 333.725.168,00	APBD-P 2025
27	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 14.270.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 10 Meningkatnya ketertiban umum		Rp. 1.324.719.057,00	APBD-P 2025
28	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.324.719.057,00	APBD-P 2025
Sasaran 11 Menurunnya gangguan kohesivitas sosial		Rp. 1.244.864.200,00	APBD-P 2025
29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 268.094.000,00	APBD-P 2025
30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 219.334.500,00	APBD-P 2025
31	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 718.432.200,00	APBD-P 2025
32	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 9.053.000,00	APBD-P 2025
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 29.950.500,00	APBD-P 2025
Sasaran 12 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana		Rp. 573.329.939,00	APBD-P 2025
34	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 461.607.939,00	APBD-P 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
35	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 111.722.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana		Rp. 477.005.000,00	APBD-P 2025
36	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 477.005.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 14 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian		Rp. 14.257.681.551,00	APBD-P 2025
37	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 934.517.239,00	APBD-P 2025
38	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 4.788.499.195,00	APBD-P 2025
39	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 175.586.900,00	APBD-P 2025
40	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 0,00	APBD-P 2025
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 7.794.328.244,00	APBD-P 2025
42	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 564.749.973,00	APBD-P 2025
Sasaran 15 Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan		Rp. 1.388.054.373,00	APBD-P 2025
43	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 323.784.314,00	APBD-P 2025
44	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.022.440.059,00	APBD-P 2025
45	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 41.830.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 16 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri		Rp. 676.240.439,00	APBD-P 2025
46	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 676.240.439,00	APBD-P 2025
Sasaran 17 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata		Rp. 361.920.000,00	APBD-P 2025
47	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 62.780.000,00	APBD-P 2025
48	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 239.520.000,00	APBD-P 2025
49	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 59.620.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 18 Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan		Rp. 184.721.878,00	APBD-P 2025
50	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 36.821.878,00	APBD-P 2025
51	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 119.130.000,00	APBD-P 2025
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 28.770.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 19 Meningkatnya realisasi penanaman modal		Rp. 92.326.599,94	APBD-P 2025
53	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 2.348.000,00	APBD-P 2025
54	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 1.652.000,00	APBD-P 2025
55	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 36.863.000,00	APBD-P 2025
56	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 51.463.599,94	APBD-P 2025
Sasaran 20 Meningkatnya kualitas jaringan jalan		Rp. 77.846.916.940,00	APBD-P 2025
57	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 77.846.916.940,00	APBD-P 2025
Sasaran 21 Meningkatnya jaringan drainase perkotaan		Rp. 2.790.633.826,00	APBD-P 2025
58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 2.790.633.826,00	APBD-P 2025
Sasaran 22 Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan		Rp. 3.083.280.000,00	APBD-P 2025
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 3.083.280.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 23 Meningkatnya pelayanan perhubungan		Rp. 845.102.404,00	APBD-P 2025
59	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 790.514.708,00	APBD-P 2025
60	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 54.587.696,00	APBD-P 2025
Sasaran 24 Meningkatnya ketahanan pangan		Rp. 35.093.100,00	APBD-P 2025
61	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 5.216.000,00	APBD-P 2025
62	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 20.359.100,00	APBD-P 2025
63	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 9.518.000,00	APBD-P 2025
64	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 0,00	APBD-P 2025
Sasaran 25 Meningkatnya stabilitas harga barang		Rp. 39.870.939,00	APBD-P 2025
65	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 39.870.939,00	APBD-P 2025
Sasaran 26 Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian		Rp. 60.200.000,00	APBD-P 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 0,00	APBD-P 2025
67	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 43.000.000,00	APBD-P 2025
68	Program Pengembangan UMKM	Rp. 4.780.000,00	APBD-P 2025
69	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 12.420.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 27 Menurunnya pengangguran		Rp. 995.550.239,00	APBD-P 2025
70	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 716.590.939,00	APBD-P 2025
71	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 20.712.300,00	APBD-P 2025
72	Program Hubungan Industrial	Rp. 258.247.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 28 Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni		Rp. 20.287.384.500,00	APBD-P 2025
73	Program Kawasan Permukiman	Rp. 9.600.000,00	APBD-P 2025
74	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 4.790.000,00	APBD-P 2025
75	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.246.528.500,00	APBD-P 2025
76	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 0,00	APBD-P 2025
77	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 9.536.014.000,00	APBD-P 2025
78	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 9.490.452.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 29 Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang		Rp. 1.783.856.799,00	APBD-P 2025
79	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 301.300.000,00	APBD-P 2025
80	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 4.820.000,00	APBD-P 2025
81	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 1.218.652.049,00	APBD-P 2025
82	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 259.084.750,00	APBD-P 2025
Sasaran 30 Meningkatnya keberdayaan desa		Rp. 3.059.734.424,00	APBD-P 2025
83	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.774.671.076,00	APBD-P 2025
84	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 843.951.348,00	APBD-P 2025
85	Program Penataan Desa	Rp. 441.112.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 31 Meningkatnya kualitas air		Rp. 669.982.600,00	APBD-P 2025
86	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 179.347.000,00	APBD-P 2025
87	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 0,00	APBD-P 2025
88	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 51.315.600,00	APBD-P 2025
89	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 439.320.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 32 Meningkatnya kualitas udara		Rp. 0,00	APBD-P 2025
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	APBD-P 2025
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	APBD-P 2025
Sasaran 33 Meningkatnya kualitas tutupan lahan/vegetasi		Rp. 0,00	APBD-P 2025
90	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 0,00	APBD-P 2025
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	APBD-P 2025
Sasaran 34 Meningkatnya pengelolaan persampahan		Rp. 2.282.568.420,00	APBD-P 2025
91	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	APBD-P 2025
92	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 0,00	APBD-P 2025
93	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.247.057.420,00	APBD-P 2025
94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 35.511.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 35 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Rp. 219.477.022.224,00	APBD-P 2025
95	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 889.457.700,00	APBD-P 2025
96	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 333.984.324,00	APBD-P 2025
97	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 159.887.000,00	APBD-P 2025
98	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 29.895.000,00	APBD-P 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
99	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 1.474.022.386,00	APBD-P 2025
100	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 390.721.348,00	APBD-P 2025
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 10.953.110.000,00	APBD-P 2025
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 203.067.615.400,00	APBD-P 2025
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 765.541.878,00	APBD-P 2025
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 952.087.188,00	APBD-P 2025
105	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 459.825.000,00	APBD-P 2025
106	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 875.000,00	APBD-P 2025
Sasaran 36 Meningkatnya birokrasi yang kapabel		Rp. 2.163.955.775,00	APBD-P 2025
107	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 569.292.375,00	APBD-P 2025
108	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 78.680.000,00	APBD-P 2025
109	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 3.980.000,00	APBD-P 2025
110	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.512.003.400,00	APBD-P 2025
Sasaran 37 Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Rp. 6.983.117.527,00	APBD-P 2025
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 620.024.000,00	APBD-P 2025
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 285.545.000,00	APBD-P 2025
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.516.567.000,00	APBD-P 2025
114	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 237.500.000,00	APBD-P 2025
115	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 836.000,00	APBD-P 2025
116	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 21.583.939,00	APBD-P 2025
117	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 102.327.634,00	APBD-P 2025
118	Program Pencatatan Sipil	Rp. 111.689.454,00	APBD-P 2025
119	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 17.739.500,00	APBD-P 2025
120	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 69.305.000,00	APBD-P 2025
JUMLAH ANGGARAN PADA PROGRAM STRATEGIS		Rp. 582.818.991.936,94	APBD-P 2025
JUMLAH ANGGARAN PADA PROGRAM PENDUKUNG (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)		Rp. 712.429.415.696,06	APBD-P 2025
TOTAL ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2025		Rp. 1.295.248.407.633,00	APBD-P 2025



Ruteng, 14 Oktober 2025

BUPATI MANGGARAI,

HERBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	

**Lamp. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TAHUN 2025
KABUPATEN MANGGARAI**

TUJUAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TAHUN	
					2025	AKHIR RPJMD		2025	AKHIR RPJMD
1			2	3	4	5	6	7	8
Tujuan	1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,54	69,30	70,10	102,28	101,15
		Rata-rata tujuan 1						102,28	101,15
		Predikat Kinerja						ISTIMEWA	ISTIMEWA
Tujuan	2	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Masyarakat	Angka PMKS	Angka	17.589	17.089	11.256	136,01	134,13
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,97	66,02	65,39	99,12	99,05
		Rata-rata tujuan 2						117,56	116,59
		Predikat Kinerja						ISTIMEWA	ISTIMEWA
Tujuan	3	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Angka konflik sosial	Angka	4	3	3	125,00	100,00
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	97,12	97,12	241,90	-49,07	-49,07
		Rata-rata tujuan 3						37,96	25,46
		Kategori						KURANG	KURANG
Tujuan	4	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,22	5,23	5,09	97,51	97,32
			PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	Ribu Rp per penduduk	11.288	11.706	10.502	93,04	89,71
			Laju Inflasi	Angka	2,00	2,00	1,74	113,00	113,00
		Rata-rata tujuan 4						101,18	100,01
		Predikat Kinerja						ISTIMEWA	ISTIMEWA
Tujuan	5	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	Angka	0,280	0,276	0,23	117,86	116,67
		Rata-rata tujuan 5						117,86	116,67
		Predikat Kinerja						BAIK	BAIK
Tujuan	6	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	17,71	17,12	18,10	97,80	94,28
		Rata-rata tujuan 6						97,80	94,28
		Predikat Kinerja						BAIK	BAIK
Tujuan	7	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,638	0,650	0,6317	99,02	97,19
		Rata-rata tujuan 7						99,02	97,19
		Predikat Kinerja						BAIK	BAIK
Tujuan	8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,86	82,16	80,05	97,79	97,43

TUJUAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TAHUN	
					2025	AKHIR RPJMD		2025	AKHIR RPJMD
1			2	3	4	5	6	7	8
Tujuan	9	Rata-rata tujuan 8						97,79	97,43
		Predikat Kinerja						BAIK	BAIK
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Profesional dan Responsif terhadap Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Predikat	58,00 (CC)	60,10 (B)	68,03	117,29	113,19
		Rata-rata Tujuan 9						117,29	113,19
		Kategori						ISTIMEWA	ISTIMEWA
Rata-rata Tujuan 1 s/d 9								98,75	95,78
Predikat Kinerja								BAIK	BAIK


 RT. 10/10, 25 MARET 2026
 BUPATI MANGGARAI,
 HER/BERTUS G.L. NABIT, SE, MA

Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	

**Lamp. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KABUPATEN MANGGARAI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TAHUN	
			2025	Akhir RPJMD 2021-2026		2025	Akhir RPJMD 2021-2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,54	69,30	70,10	102,28	101,15
2	Prevalensi Stunting	Persen	11,90	9,40	13,17	89,34	59,91
3	Angka PMKS	Angka	17.589	17.089	11.256	136,01	134,13
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,97	66,02	65,39	99,12	99,05
5	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	97,12	97,12	241,90	-49,07	-49,07
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,22	5,23	5,09	97,51	97,32
7	PDRB Per Kapita (ADHK, Ribu Rp.)	Ribu Rp per penduduk	11.288	11.706	10.502	93,04	89,71
8	Indeks Gini	Angka	0,28	0,276	0,230	117,86	116,67
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	17,71	17,12	18,10	97,80	94,28
10	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,638	0,650	0,632	99,02	97,19
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,86	82,16	80,05	97,79	97,43
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai / Predikat	58,00 (CC)	60,10 (B)	68,03	117,29	113,19
13	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)	68,00 (B)	65,22	96,62	95,91
14	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
RATA-RATA						92,47	89,06
PREDIKAT KINERJA						BAIK	BAIK

Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	


 MURUTENG, 25 MARET 2026
 BUPATI MANGGARAI,
HERYBERTUS G.L. NABIT, SE, MA

Lamp. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2025
KABUPATEN MANGGARAI

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun		
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD	
1			2		3	4	5	6	7	8	
Sasaran	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,93	8,04	8,17	103,03	101,62	
			2	Haparan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,91	14,03	13,74	98,78	97,93	
			3	Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,49	56,52	76,91	136,15	136,08	
	Rata-rata Sasaran 1								112,65	111,88	
	Predikat Kinerja								ISTIMEWA	ISTIMEWA	
Sasaran	2	Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat	4	Indeks literasi masyarakat / indeks minat baca	Angka	15	15	20,64	137,60	137,60	
			Rata-rata Sasaran 2							137,60	137,60
			Predikat Kinerja							MEMUASKAN	MEMUASKAN
Sasaran	3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Angka harapan hidup (AHH)	Angka	68,88	69,24	72,76	105,63	105,08	
			6	Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	100,00	100,00	16,67	16,67	16,67	
	Rata-rata Sasaran 3								61,15	60,88	
	Predikat Kinerja								CUKUP	CUKUP	
Sasaran	4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	7	Angka kelahiran total (TFR)	Angka	2,014	2,00	1,62	119,56	119,00	
			Rata-rata Sasaran 4							119,56	119,00
			Predikat Kinerja							ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	5	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	9,61	9,75	13,92	144,88	142,80	
			9	Peringkat pada event olahraga daerah (POFDA)	Angka	4	4	0	0,00	0,00	
	Rata-rata Sasaran 5								72,44	71,40	
	Predikat Kinerja								CUKUP	CUKUP	
Sasaran	6	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	10	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	91,00	100,00	91,06	100,07	91,06	
			Rata-rata Sasaran 6								100,07

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
					2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1		2		3	4	5	6	7	8
	Predikat Kinerja							ISTIMEWA	BAIK
Sasaran	7 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	11	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	4,09	5,08	0,64	15,65	12,60
	Rata-rata Sasaran 7							15,65	12,60
	Predikat Kinerja							KURANG	KURANG
Sasaran	8 Menurunnya ketimpangan gender	12	TPAK Perempuan	Angka	67,32	68,37	72,86	108,24	106,57
	Rata-rata Sasaran 8							108,24	106,57
	Predikat Kinerja							ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	9 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	22,29	21,24	65,08	-91,95	-106,38
		14	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,015	0,014	0,0344	-29,28	-45,66
	Rata-rata Sasaran 9							-60,62	-76,02
	Predikat Kinerja							KURANG	KURANG
Sasaran	10 Meningkatnya ketertiban umum	15	Persentase penurunan pelanggaran PERDA	Persen	40,43	67,87	40,54	100,27	59,73
	Rata-rata Sasaran 10							100,27	59,73
	Predikat Kinerja							ISTIMEWA	KURANG
Sasaran	11 Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	16	Angka konflik sosial	Angka	4	3	3	125,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 11							125,00	100,00
	Kategori							ISTIMEWA	BAIK
Sasaran	12 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	17	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Angka	0,49 (Sedang)	0,49 (Sedang)	0,34 (Rendah)	69,39	69,39
	Rata-rata Sasaran 12							69,39	69,39
	Predikat Kinerja							CUKUP	CUKUP
Sasaran	13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	18	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	48,17	58,60	33,62	69,79	57,37
	Rata-rata Sasaran 13							69,79	57,37
	Predikat Kinerja							CUKUP	KURANG
Sasaran	14 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	19	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	3,84	3,85	3,35	87,24	87,01

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
					2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1		2		3	4	5	6	7	8
	Rata-rata Sasaran 14							87,24	87,01
	Predikat Kinerja							BAIK	BAIK
Sasaran	15 Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	20 Laju pertumbuhan sub sektor perikanan	Angka	3,84	3,85	3,35		87,24	87,01
	Rata-rata Sasaran 15							87,24	87,01
	Predikat Kinerja							BAIK	BAIK
Sasaran	16 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	21 Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	6,31	6,53	11,96		189,54	183,15
	Rata-rata Sasaran 16							189,54	183,15
	Predikat Kinerja							ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	17 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	22 Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	5,68	5,72	5,96		104,93	104,20
	Rata-rata Sasaran 17							104,93	104,20
	Predikat Kinerja							ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	18 Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	23 Laju pertumbuhan sektor perdagangan	Angka	6,01	6,30	12,53		208,49	198,89
	Rata-rata Sasaran 18							208,49	198,89
	Predikat Kinerja							ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	19 Meningkatnya realisasi penanaman modal	24 Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	5,00	25,00	58,99		1179,86	235,97
		25 Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	5,00	25,00	0,00		0,00	0,00
	Rata-rata Sasaran 19							589,93	117,99
	Predikat Kinerja							ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	20 Meningkatnya kualitas jaringan jalan	26 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64,95	67,88	55,88		86,04	82,32
	Rata-rata Sasaran 20							86,04	82,32
	Predikat Kinerja							BAIK	BAIK
Sasaran	21 Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	27 Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	84,80	88,00	72,92		85,99	82,86
	Rata-rata Sasaran 21							85,99	82,86
	Predikat Kinerja							BAIK	BAIK
Sasaran	22 Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	28 Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	95,84	100,00	88,97		92,83	88,97

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
	Rata-rata Sasaran 22								92,83	88,97
	Predikat Kinerja								BAIK	BAIK
Sasaran	23	Meningkatnya pelayanan perumahan	29	Rasio konektivitas	Angka	0,86	0,89	0,73297	85,23	82,36
			30	Kinerja lalu lintas	Angka	59,37	65,94	31,56	53,15	47,86
	Rata-rata Sasaran 23								69,19	65,11
	Predikat Kinerja								CUKUP	CUKUP
Sasaran	24	Meningkatnya ketahanan pangan	31	Indeks ketahanan pangan	Angka	79,94	81,94	61,54	76,98	75,10
	Rata-rata Sasaran 24								76,98	75,10
	Kategori								CUKUP	CUKUP
Sasaran	25	Meningkatnya stabilitas harga barang	32	Indeks harga konsumen	Angka	117,34	119,69	107,53	91,64	89,84
	Rata-rata Sasaran 25								91,64	89,84
	Predikat Kinerja								BAIK	BAIK
Sasaran	26	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	33	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	97,50	100,00	76,19	78,14	76,19
	34		Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	65,00	70,00	0,69	1,07	0,99	
	Rata-rata Sasaran 26								39,61	38,59
	Predikat Kinerja								KURANG	KURANG
Sasaran	27	Menurunnya pengangguran	35	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,33	2,08	1,56	132,84	124,77
	Rata-rata Sasaran 27								132,84	124,77
	Predikat Kinerja								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	28	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	36	Rasio rumah layak huni	Angka	93,75	94,75	92,34	98,49	97,45
	37		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	86,927	89,872	86,66	99,69	96,43	
	38		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92,00	93,00	87,92	95,57	94,54	
	Rata-rata Sasaran 28								97,92	96,14
	Predikat Kinerja								BAIK	BAIK

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
						2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1			2		3	4	5	6	7	8
Sasaran	29	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	39	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	52,00	62,00	43,28	83,23	69,81
	Rata-rata Sasaran 29								83,23	69,81
	Predikat Kinerja								BAIK	CUKUP
Sasaran	30	Meningkatnya keberdayaan desa	40	Persentase status desa berkembang	Persen	59,65	65,51	70,34	117,93	107,38
	Rata-rata Sasaran 30								117,93	107,38
	Predikat Kinerja								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	31	Meningkatnya kualitas air	41	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	72,00	72,50	75,33	104,63	103,90
	Rata-rata Sasaran 31								104,63	103,90
	Predikat Kinerja								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	32	Meningkatnya kualitas udara	42	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	88,87	88,87	83,68	94,16	94,16
	Rata-rata Sasaran 32								94,16	94,16
	Predikat Kinerja								BAIK	BAIK
Sasaran	33	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	43	Indeks kualitas tutupan lahan (IKL)	Angka	85,82	86,32	81,43	94,88	94,34
	Rata-rata Sasaran 33								94,88	94,34
	Predikat Kinerja								BAIK	BAIK
Sasaran	34	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	44	Persentase sampah tertangani	Persen	27,68	29,91	13,067	47,21	43,69
			45	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	41,46	46,57	78,13	188,43	167,76
	Rata-rata Sasaran 34								117,82	105,72
	Predikat Kinerja								ISTIMEWA	ISTIMEWA
Sasaran	35	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	46	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)	68,00 (B)	65,22	96,62	95,91
			47	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (4,73)	2,8113 (Sedang)	62,89	59,44
			48	Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
			49	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Angka	Baik	Baik	Baik (62,5367)	100,00	100,00
			50	Indeks kapasitas fiskal	Angka	Tinggi (1,459)	Tinggi (1,587)	0,017	1,17	1,07
			51	Indeks kematangan penerapan manajemen resiko	Angka	Level 3	Level 3	Level 2 (2,448)	81,60	81,60

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUN		REALISASI Thn. 2025	% Capaian Tahun	
					2025	Akhir RPJMD		2025	Akhir RPJMD
1		2		3	4	5	6	7	8
	Rata-rata Sasaran 35							73,71	73,00
	Predikat Kinerja							CUKUP	CUKUP
Sasaran	36 Meningkatnya birokrasi yang kapabel	52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,80	3,00	2,90	103,57	96,67
		53	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,00 (Tinggi)	83,00 (Tinggi)	58,38 (Sangat Rendah)	72,07	70,34
	Rata-rata Sasaran 36							87,82	83,50
	Kategori							BAIK	BAIK
Sasaran	37 Meningkatnya pelayanan publik yang prima	54	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50	84,50	85,44	102,32	101,11
	Rata-rata Sasaran 37							102,32	101,11
	Predikat Kinerja							ISTIMEWA	ISTIMEWA
RATA-RATA SASARAN 1 s/d 37								106,71	88,55
PREDIKAT KINERJA								ISTIMEWA	BAIK

Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	

RUTENG, 25 MARET 2026
 BUPATI MANGGARAI,

 HERYBERTUS G.L. NABIT, SE, MA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI UNAUDITED	%
Sasaran 1 Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan		Rp. 112.756.854.693,00	82.021.994.748,00	72,74
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 105.793.613.938,00	75.223.315.286,00	71,10
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 6.963.240.755,00	6.798.679.462,00	97,64
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 0,00	0,00	0,00
Sasaran 2 Meningkatnya literasi / minat baca masyarakat		Rp. 700.824.964,00	630.424.672,00	89,95
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 664.760.064,00	597.974.672,00	89,95
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 36.064.900,00	32.450.000,00	89,98
Sasaran 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Rp. 78.569.175.084,00	68.125.923.615,88	86,71
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 76.305.946.452,00	66.166.286.098,88	86,71
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.688.069.732,00	1.551.207.188,00	91,89
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 314.209.000,00	306.538.829,00	97,56
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 260.949.900,00	101.891.500,00	39,05
Sasaran 4 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk		Rp. 6.746.153.850,00	5.273.534.304,00	78,17
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 4.998.113.850,00	4.205.155.304,00	84,13
11	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 0,00	0,00	0,00
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.748.040.000,00	1.068.379.000,00	61,12
Sasaran 5 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan		Rp. 770.708.400,00	415.535.600,00	53,92
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 252.860.000,00	51.895.000,00	20,52
14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 194.600.000,00	70.000.000,00	35,97
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 323.248.400,00	293.640.600,00	90,84
Sasaran 6 Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya		Rp. 18.902.118.188,00	18.890.541.900,00	99,94
16	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 219.060.000,00	218.970.000,00	99,96
17	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 46.130.000,00	46.020.000,00	99,76
18	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 18.636.928.188,00	18.625.551.900,00	99,94
Sasaran 7 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Rp. 701.041.000,00	661.415.576,00	94,35
19	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 16.121.000,00	12.710.000,00	78,84
20	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 523.592.000,00	515.641.636,00	98,48
21	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 96.332.000,00	95.375.840,00	99,01
22	Program Penanganan Bencana	Rp. 64.996.000,00	37.688.100,00	57,99
Sasaran 8 Menurunnya ketimpangan gender		Rp. 136.485.000,00	121.333.200,00	88,90
23	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 136.485.000,00	121.333.200,00	88,90
Sasaran 9 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan		Rp. 550.498.004,00	470.081.309,00	85,39
24	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 135.768.168,00	130.506.218,00	96,12
25	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 66.734.668,00	54.951.243,00	82,34
26	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 333.725.168,00	270.653.848,00	81,10
27	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 14.270.000,00	13.970.000,00	97,90
Sasaran 10 Meningkatnya ketertiban umum		Rp. 1.324.719.057,00	1.249.653.555,00	94,33
28	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.324.719.057,00	1.249.653.555,00	94,33
Sasaran 11 Menurunnya gangguan kohesivitas sosial		Rp. 1.244.864.200,00	1.235.276.360,00	99,23
29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 268.094.000,00	262.339.000,00	97,85
30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 219.334.500,00	218.843.660,00	99,78
31	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 718.432.200,00	718.430.200,00	100,00
32	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 9.053.000,00	9.053.000,00	100,00
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 29.950.500,00	26.610.500,00	88,85
Sasaran 12 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana		Rp. 573.329.939,00	300.302.860,00	52,38
34	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 461.607.939,00	190.890.860,00	41,35
35	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 111.722.000,00	109.412.000,00	97,93
Sasaran 13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana		Rp. 477.005.000,00	475.540.900,00	99,69
36	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 477.005.000,00	475.540.900,00	99,69
Sasaran 14 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian		Rp. 14.257.681.551,00	13.194.746.940,00	92,54
37	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 934.517.239,00	855.354.840,00	91,53

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI UNAUDITED	%
38	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 4.788.499.195,00	4.322.119.930,00	90,26
39	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 175.586.900,00	166.894.300,00	95,05
40	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 0,00		0,00
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 7.794.328.244,00	7.359.100.840,00	94,42
42	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 564.749.973,00	491.277.030,00	86,99
Sasaran 15 Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan		Rp. 1.388.054.373,00	1.354.563.049,00	97,59
43	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 323.784.314,00	319.319.196,00	98,62
44	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.022.440.059,00	993.701.434,00	97,19
45	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 41.830.000,00	41.542.419,00	99,31
Sasaran 16 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri		Rp. 676.240.439,00	668.470.750,00	98,85
46	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 676.240.439,00	668.470.750,00	98,85
Sasaran 17 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata		Rp. 361.920.000,00	355.321.322,00	98,18
47	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 62.780.000,00	57.180.000,00	91,08
48	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 239.520.000,00	238.530.000,00	99,59
49	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 59.620.000,00	59.611.322,00	99,99
Sasaran 18 Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan		Rp. 184.721.878,00	183.432.177,00	99,30
50	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 36.821.878,00	36.645.176,00	99,52
51	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 119.130.000,00	118.900.001,00	99,81
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 28.770.000,00	27.887.000,00	96,93
Sasaran 19 Meningkatnya realisasi penanaman modal		Rp. 92.326.599,94	71.282.400,00	77,21
53	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 2.348.000,00	2.348.000,00	100,00
54	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 1.652.000,00	1.652.000,00	100,00
55	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 36.863.000,00	36.669.000,00	99,47
56	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 51.463.599,94	30.613.400,00	59,49
Sasaran 20 Meningkatnya kualitas jaringan jalan		Rp. 77.846.916.940,00	71.318.582.260,00	91,61
57	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 77.846.916.940,00	71.318.582.260,00	91,61
Sasaran 21 Meningkatnya jaringan drainase perkotaan		Rp. 2.790.633.826,00	2.766.130.561,00	99,12
58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 2.790.633.826,00	2.766.130.561,00	99,12
Sasaran 22 Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan		Rp. 3.083.280.000,00	3.054.323.612,00	99,06
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 3.083.280.000,00	3.054.323.612,00	99,06
Sasaran 23 Meningkatnya pelayanan perhubungan		Rp. 845.102.404,00	836.679.936,00	99,00
59	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 790.514.708,00	782.669.730,00	99,01
60	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 54.587.696,00	54.010.206,00	98,94
Sasaran 24 Meningkatnya ketahanan pangan		Rp. 35.093.100,00	35.052.300,00	99,88
61	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 5.216.000,00	5.216.000,00	100,00
62	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 20.359.100,00	20.348.500,00	99,95
63	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 9.518.000,00	9.487.800,00	99,68
64	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 0,00	0,00	0,00
Sasaran 25 Meningkatnya stabilitas harga barang		Rp. 39.870.939,00	39.612.588,00	99,35
65	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Rp. 39.870.939,00	39.612.588,00	99,35
Sasaran 26 Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian		Rp. 60.200.000,00	55.647.500,00	92,44
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 0,00	0,00	0,00
67	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 43.000.000,00	42.912.500,00	99,80
68	Program Pengembangan UMKM	Rp. 4.780.000,00	4.780.000,00	100,00
69	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 12.420.000,00	7.955.000,00	64,05
Sasaran 27 Menurunnya pengangguran		Rp. 995.550.239,00	947.109.730,00	95,13
70	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 716.590.939,00	684.538.430,00	95,53
71	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 20.712.300,00	20.036.300,00	96,74
72	Program Hubungan Industrial	Rp. 258.247.000,00	242.535.000,00	93,92
Sasaran 28 Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni		Rp. 20.287.384.500,00	19.562.170.510,00	96,43
73	Program Kawasan Permukiman	Rp. 9.600.000,00	9.560.000,00	99,58
74	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 4.790.000,00	4.790.000,00	100,00
75	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.246.528.500,00	1.204.853.500,00	96,66

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI UNAUDITED	%
76	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 0,00	0,00	0,00
77	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 9.536.014.000,00	9.459.275.949,00	99,20
78	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Rp. 9.490.452.000,00	8.883.691.061,00	93,61
Sasaran 29 Meningkatkan kualitas tata bangunan dan penataan ruang		Rp. 1.783.856.799,00	1.637.227.614,00	91,78
79	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 301.300.000,00	238.635.167,00	79,20
80	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 4.820.000,00	4.740.000,00	98,34
81	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 1.218.652.049,00	1.206.661.799,00	99,02
82	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 259.084.750,00	187.190.648,00	72,25
Sasaran 30 Meningkatkan keberdayaan desa		Rp. 3.059.734.424,00	2.689.110.761,00	87,89
83	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.774.671.076,00	1.679.753.396,00	94,65
84	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 843.951.348,00	825.049.674,00	97,76
85	Program Penataan Desa	Rp. 441.112.000,00	184.307.691,00	41,78
Sasaran 31 Meningkatkan kualitas air		Rp. 51.315.600,00	51.105.600,00	99,59
86	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Rp. 0,00	0,00	0,00
87	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 0,00	0,00	0,00
88	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 51.315.600,00	51.105.600,00	99,59
89	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	0,00	0,00
Sasaran 32 Meningkatkan kualitas udara		Rp. 179.347.000,00	151.946.200,00	84,72
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Rp. 179.347.000,00	151.946.200,00	84,72
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	0,00	0,00
Sasaran 33 Meningkatkan kualitas tutupan lahan/vegetasi		Rp. 439.320.000,00	433.517.600,00	98,68
90	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 0,00	0,00	0,00
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 439.320.000,00	433.517.600,00	98,68
Sasaran 34 Meningkatkan pengelolaan persampahan		Rp. 2.282.568.420,00	2.206.860.883,00	96,68
91	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 0,00	0,00	0,00
92	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Rp. 0,00	0,00	0,00
93	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.247.057.420,00	2.172.229.883,00	96,67
94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 35.511.000,00	34.631.000,00	97,52
Sasaran 35 Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel		Rp. 219.477.022.224,00	212.301.216.637,50	96,73
95	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Rp. 889.457.700,00	869.874.719,00	97,80
96	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Rp. 333.984.324,00	285.594.809,00	85,51
97	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 159.887.000,00	133.013.973,00	83,19
98	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 29.895.000,00	29.895.000,00	100,00
99	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 1.474.022.386,00	1.425.571.866,00	96,71
100	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 390.721.348,00	346.633.858,00	88,72
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 10.953.110.000,00	9.772.160.236,00	89,22
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 203.067.615.400,00	197.916.244.296,75	97,46
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 765.541.878,00	246.405.749,75	32,19
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 952.087.188,00	847.057.130,00	88,97
105	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 459.825.000,00	427.915.000,00	93,06
106	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 875.000,00	850.000,00	97,14
Sasaran 36 Meningkatkan birokrasi yang kapabel		Rp. 2.163.955.775,00	2.000.076.765,00	92,43
107	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 569.292.375,00	569.067.469,00	99,96
108	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 78.680.000,00	78.185.400,00	99,37
109	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 3.980.000,00	3.980.000,00	100,00
110	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.512.003.400,00	1.348.843.896,00	89,21
Sasaran 37 Meningkatkan pelayanan publik yang prima		Rp. 6.983.117.527,00	6.773.194.974,00	96,99
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 620.024.000,00	591.730.500,00	95,44
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 285.545.000,00	271.438.000,00	95,06
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.516.567.000,00	5.389.253.000,00	97,69
114	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 237.500.000,00	215.370.000,00	90,68
115	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 836.000,00	300.000,00	35,89

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI UNAUDITED	%
116	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 21.583.939,00	18.176.348,00	84,21
117	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 102.327.634,00	101.098.088,00	98,80
118	Program Pencatatan Sipil	Rp. 111.689.454,00	107.631.838,00	96,37
119	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 17.739.500,00	14.970.000,00	84,39
120	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 69.305.000,00	63.227.200,00	91,23
JUMLAH ANGGARAN PADA PROGRAM STRATEGIS		Rp. 582.818.991.936,94	522.558.941.269,38	89,66
JUMLAH ANGGARAN PADA PROGRAM PENDUKUNG (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)		Rp. 712.429.415.696,06	561.225.293.913,25	78,78
TOTAL ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2025		Rp. 1.295.248.407.633,00	1.083.784.235.182,63	83,67

Ruteng, 25 Maret 2026
 BUPATI MANGGARAI,
 HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA



Paraf Hierarki	
Penjabat Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

Ruteng, 25 Pebruari 2026

Nomor : T/20/000.8.6.3/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Jepit
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten
Manggarai

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi
Cq. Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan II
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian
PANRB Nomor : B/68/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, bersama ini kami kirimkan
Matriks Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Manggarai
(terlampir). Sedangkan terkait dokumen SAKIP telah dan akan dilengkapi serta
disampaikan melalui aplikasi www.esr.menpan.go.id

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

a.n. BUPATI MANGGARAI
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN ADM. UMUM



M. MARIANUS YOSEF DJELAMU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680815 199503 1 003

Tembusan:

1. Bupati Manggarai di Ruteng;
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng; dan
3. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng.

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Organisasi Setda	✓
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	✓

Lampiran Surat Nomor : T/20/000.8.6.3/II/2026
 Tanggal : 25 Pebruari 2026
 Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Manggarai

1. Link Data Dukung Tindak Lanjut SAKIP (link google drive/cloud yang berisi data dukung tambahan SAKIP (yang tidak terakomodir di esr)) : -
2. Nama Penanggungjawab Data SAKIP / Unit Kerja : AMBROSIUS REFIN, A.Md
3. Nomor HP Penanggungjawab Data SAKIP : 085 259 411 500

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2025
KABUPATEN MANGGARAI**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	Link Data Dukung
1	2	3	4	5	
1	KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA				
1.	Pemerintah Kabupaten Manggarai agar mereviu dan memastikan kembali rumusan sasaran kinerja PD telah dikawal dengan indikator kinerja yang relevan dan cukup. Sehingga kondisi kinerja yang ingin diwujudkan dapat terukur secara spesifik dan akurat.	Melakukan mereviu rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang relevan	BAPPERIDA dan Seluruh Perangkat Daerah	Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Dokumen Renstra diupload di esr.menpan.go.id
2.	Pemerintah Kabupaten Manggarai agar menyusun pohon kinerja baik dari level kabupaten maupun seluruh PD. Pohon kinerja yang akan disusun agar memperhatikan hubungan sebab akibat, kelogisan hubungan kinerja setiap jenjang jabatan, dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.	Melakukan penyusunan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.	BAPPERIDA dan Seluruh Perangkat Daerah	Telah menyusun pohon kinerja 2025-2029	Dokumen Pohon Kinerja diupload di esr.menpan.go.id
3.	Setelah pohon kinerja telah disusun, Pemerintah Kabupaten Manggarai agar melakukan identifikasi potensi crosscutting kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kabupaten Manggarai. Sehingga dapat tergambar bagaimana hubungan kinerja antar lintas PD maupun dengan stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.	Menyusun dan mereviu crosscutting	BAPPERIDA dan Seluruh Perangkat Daerah	Telah melakukan menyusun crosscutting 2026	Dokumen Croscutting diupload di esr.menpan.go.id

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	Link Data Dukung
1	2	3	4	5	
4.	Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun kembali rencana aksi dengan berfokus pada langkah-langkah yang secara langsung mendorong pencapaian sasaran hasil, bukan sekadar aktivitas berorientasi anggaran. Setiap rencana aksi harus menunjukkan kontribusi yang jelas terhadap sasaran kinerja pada level yang lebih tinggi.	Menyusun rencana aksi	Bagian Organisasi dan Seluruh Perangkat Daerah	Telah melakukan penyusunan Rencana Aksi tahun 2026	Dokumen Rencana Aksi diupload di esr.menpan.go.id
II KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA					
1	Mendorong penerapan pengukuran kinerja organisasi secara berkala dan dikaitkan dengan pengukuran kinerja individu. Sehingga penerapan pemberian reward and punishment berbasis kinerja.	Melakukan pengukuran kinerja yang dilakukan setiap triwulan atas Rencana Aksi yang telah dibuat	Bagian Organisasi dan Seluruh Perangkat Daerah	Telah melakukan pengukuran kinerja per triwulan pada tahun 2025 dan tahun berikutnya sesuai rencana aksi yang telah dibuat	Dokumen monev rencana aksi Diupload di esr.menpan.go.id
2	Instansi perlu membangun mekanisme dialog kinerja yang terjadwal secara bulanan atau triwulanan, baik dalam bentuk pertemuan langsung maupun melalui sistem informasi yang memungkinkan pelacakan capaian secara rutin. Forum tersebut harus menjadi wadah pengambilan keputusan untuk mengoreksi deviasi kinerja.	Melakukan dialog kinerja yang terjadwal secara triwulanan	Bagian Organisasi, BKPSDMD dan Seluruh Perangkat Daerah	Bagian Organisasi telah melakukan dialog kinerja melalui rapat monev pencapaian kinerja triwulan yang dihadiri oleh Perencana dari setiap Perangkat Daerah	-
3.	Instansi agar mendorong penggunaan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi strategi dan program. Setiap capaian yang tidak sesuai target harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian kebijakan, reposisi program, atau perubahan intervensi agar perbaikan kinerja dapat terjadi secara nyata.	Melakukan revisi strategi dari program sebagai tindak lanjut dari hasil pengukuran kinerja	BAPPERIDA dan Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	Dilampirkan dalam LKIP
III KOMPONEN PELAPORAN KINERJA					
1	Instansi disarankan memperkuat struktur pelaporan dengan mempertegas informasi pada unsur analisis seperti faktor pendorong dan penghambat, serta risiko terhadap pencapaian akhir. Penambahan informasi secara tegas elemen evaluatif ini diperlukan agar laporan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kualitas pencapaian kinerja.	Penyusunan Laporan Kinerja	Bagian Organisasi dan Seluruh Perangkat Daerah	Terhadap rekomendasi ini, Bagian Organisasi telah menyampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah melalui : 1) Surat Sekretaris Daerah Nomor: T/113/000.8.6.3/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025-2026; 2) Melalui WAG; 3) Pendampingan terhadap Perangkat Daerah.	-

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	Link Data Dukung
1	2	3	4	5	
2.	Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam LPPD maupun LAKIP seluruh PD agar menjadi dasar dalam menetapkan perbaikan strategi perencanaan kinerja kedepan guna mendukung penyelesaian isu strategis maupun peningkatan capaian makro di Pemkab Manggarai.	Melakukan revisi strategi perencanaan kinerja	BAPPERIDA dan Seluruh Perangkat Daerah	Telah ditindaklanjuti dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Dokumen Renstra diupload di esr.menpan.go.id
IV KOMPONEN EVALUASI INTERNAL					
1	Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal dengan memperbaiki struktur dan kualitas Laporan Hasil Evaluasi Internal dengan memastikan laporan memuat temuan kritis berbasis analisis kinerja serta rekomendasi perbaikan yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.	Melakukan Evaluasi AKIP Internal	Inspektorat Daerah	Rekomendasi ini telah disampaikan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Inspektorat Daerah telah melakukan Evaluasi penerapan SAKIP Tahun 2025 di Setiap Perangkat Daerah. Terkait kualitas evaluasi AKIP internal, Tim APIP Inspektorat akan menindaklanjuti pada evaluasi AKIP ke depan.	LHE AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 diupload di esr.menpan.go.id

Ruteng, 25 Februari 2026

a.n. BUPATI MANGGARAI
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN ADM. UMUM,



IR. MARIANUS YOSEF DJELAMU

REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680815 199503 1 003

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Organisasi	☒
Analisis Kebijakan Ahli Muda	☒

